

Kode>Nama Rumpun Ilmu : 424/Perencanaan Wilayah Dan Kota

**LAPORAN PENELITIAN
PENELITIAN HIBAH BERSAING**



**MODEL KERJASAMA ANTAR DAERAH (KAD) PERBATASAN
ANTAR KABUPATEN/KOTA DALAM MENINGKATKAN
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
DI PROVINSI JAWA BARAT**

TIM PENGUSUL :

**IR. SUPRATIGNYO AJI, MT. (NIDN: 0022125401)
DEDEN SYARIFUDIN, ST., MT. (NIDN: 403057604)
DR. IR. RIZA FATHONI ISHAK, MT. (NIDN: 403017102)**

**UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG
Desember 2014**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Kegiatan : Model Kerjasama Antar daerah (KAD) Perbatasan Antar Kabupaten/Kota Dalam Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Barat

Peneliti / Pelaksana
Nama Lengkap : Ir. SUPRATIGNYO AJI M.T
NIDN : 0022125401
Jabatan Fungsional :
Program Studi : Perencanaan Wilayah Dan Kota
Nomor HP : 081572041933
Surel (e-mail) : supratignyo@yahoo.com

Anggota Peneliti (1)
Nama Lengkap : Dr. Ir. RIZA FATHONI ISHAK MT.
NIDN : 0403017102
Perguruan Tinggi : Universitas Pasundan

Institusi Mitra (jika ada)
Nama Institusi Mitra :
Alamat :
Penanggung Jawab :
Tahun Pelaksanaan : Tahun ke 1 dari rencana 2 tahun
Biaya Tahun Berjalan : Rp. 52.500.000,00
Biaya Keseluruhan : Rp. 109.820.000,00

Mengetahui
Dekan Fakultas Teknik



(Dr. Anandadi Garnida, MP.)
NIP/NIK 15110229

Bandung, 20 - 12 - 2014,
Ketua Peneliti,

(Ir. SUPRATIGNYO AJI M.T)
NIP/NIK.195412221988031001

Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian



(Dr. Yaya Mulyana Abdul Aziz, M.Si)
NIP/NIK 15110156

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	v
Ringkasan	1
Bab I Pendahuluan	2
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Permasalahan	3
1.3 Tujuan Khusus	5
1.4 Urgensi Penelitian	6
Bab II Studi Pustaka	8
2.1 <i>State Of The Art</i> Penelitian	8
2.2 Studi Pendahuluan Yang Sudah Dilakukan	12
2.3 Peta Jalan Penelitian	13
Bab III Metode Penelitian	15
3.1 Strategi Penelitian	15
3.2 Data Penelitian	15
3.3 Unit Analisis Penelitian	15
3.4 Teknik Pengumpulan Data	16
3.5 Kerangka Kerja Penelitian	17
Bab IV Hasil Yang Dicapai	21
4.1 Potret Wilayah Studi	21
4.1 Potret Wilayah	21
4.2 Arahan Kebijakan	37
4.3. Kategorisasi Fisik Geografis	92
4.4 Kategorisasi Berdasarkan Jenis Perbatasan	93
4.5 Klasifikasi IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Di Wilayah Perbatasan	135
4.6 Klasifikasi Konektifitas	150
4.7 Klasifikasi Intensitas Ekonomi	155
4.8 Identifikasi Tipologi Wilayah Perbatasan	166
Bab V Simpulan dan Saran	183
6.1 Simpulan.....	183
6.2 Saran.....	185
Daftar Pustaka.....	vi
Lampiran-Lampiran	

DAFTAR TABEL

Tabel 2-1	Indikator Pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2003-2006	11
Tabel 2-2	Penelitian Yang Telah Dilaksanakan dan Usulan Penelitian Hibah Bersaing	12
Tabel 3-1	Unit Analisis Penelitian	18
Tabel 4-1	Luas Kecamatan di Kawasan Perbatasan Jabar-Jateng	21
Tabel 4-2	Luas Jenis Penggunaan Lahan (km ²) di Kawasan Perbatasan Jabar-Jateng Tahun 2005	29
Tabel 4-3	Persentase Luas Penggunaan Lahan di Wilayah Perbatasan Jabar-Jateng	31
Tabel 4-4	Jumlah Penduduk (jiwa) Kawasan Perbatasan Jabar-Jateng Berdasarkan Jenis Kelamin dirinci Per Kecamatan Tahun 2013 ...	33
Tabel 4-5	Jumlah Sarana Pendidikan dan Sarana Kesehatan di Kawasan Perbatasan Jabar-Jateng Tahun 2013	36
Tabel 4-6	Strategi Operasionalisasi Perwujudan System Perkotaan Nasional Kawasan Perbatasan Jabar-Jateng Dalam RTR Pulau Jawa-Bali ...	38
Tabel 4-7	Program-Program Pembangunan Infrastruktur di Kawasan Perbatasan Jabar-Jateng	77
Tabel 4-8	Program-Program Pembangunan Pemanfaatan Ruang di Kawasan Perbatasan Jabar-Jateng	78
Tabel 4-9	Kawasan Strategis Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota di Wilayah Perbatasan Jabar-Jateng	81
Tabel 4-10	Panjang Jalan (km) Kabupaten/Kota di Kawasan Perbatasan Jabar-Jateng Tahun 2010	88
Tabel 4-11	Kategorisasi Perbatasan di Wilayah Pegunungan dan Pesisir	93
Tabel 4-12	Kecamatan yang berbatasan antar Kabupaten	94

Tabel 4-13	Kategorisasi Kecamatan yang Berbatasan Antar Provinsi Jawa Barat dengan Jawa Tengah	98
Tabel 4-14	Paduserasi Program Pengembangan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Jabar-Jateng Sebagai Peluang Kerjasama Antar Kawasan	103
Tabel 4-15	Paduserasi Program Pengembangan Pemanfaatan Ruang Kawasan Perbatasan Jabar-Jateng Sebagai Peluang Kerjasama Antar Kawasan	105
Tabel 4-16	Sinkronisasi Tata Ruang Kawasan Perbatasan Jabar-Jateng	109
Tabel 4-17	Matriks Keterkaitan Antar Komponen IPM	137
Tabel 4-18	Data Pendukung IPM (Jumlah Penduduk, Sarana Pendidikan dan Sarana Kesehatan)	143
Tabel 4-19	Hasil Hitungan IPM di Wilayah Perbatasan	144
Tabel 4-20	Kategorisasi IPM Kawasan Perbatasan	146
Tabel 4-21	Peran Kota dan Desa serta Keterkaitannya	150
Tabel 4-22	Klasifikasi Nilai Indeks Aksesibilitas, Indeks Mobilitas dan Proporsi Luas Jalan	153
Tabel 4-23	Klasifikasi Intensitas Ekonomi Unggulan dan Non Unggulan	156
Tabel 4-24	Pengembangan Pola Ruang Kawasan Perbatasan	159
Tabel 4-25	Identifikasi Tipologi Wilayah Perbatasan	167

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2-1	Indikator Indeks Pembangunan Manusia	8
Gambar 2-2	IPM dihubungkan dengan Kemiskinan	10
Gambar 2-3	Konsep Penelitian	11
Gambar 2-4	<i>Road Map</i> usulan penelitian Hibah Bersaing 2013	14
Gambar 3-1	Research Frame Work	20
Gambar 4-1	Luas Kawasan Perbatasan Jabar-Jateng (km ²) Dirinci Per Kabupaten/Kota	22
Gambar 4-2	Peta Topografi di Kawasan Perbatasan Provinsi Jawa Barat-Jawa Tengah.....	24
Gambar 4-1	Peta Jenis Tanah di Kawasan Perbatasan Provinsi Jawa Barat-Jawa Tengah.....	26
Gambar 4-42	Proporsi Penggunaan Lahan di Kawasan Perbatasan Jabar-Jateng Tahun 2005	27
Gambar 4-3	Peta Penggunaan Lahan di Kawasan Perbatasan Provinsi Jawa Barat-Jawa Tengah	28
Gambar 4-6	Grafik Jumlah Penduduk (jiwa) di Kawasan Perbatasan Jabar-Jateng Berdasarkan Jenis Kelamin	33
Gambar 4-4	Peta Kepadatan Penduduk di Kawasan Perbatasan Prov. Jawa Barat-Jawa Tengah	34
Gambar 4-8	Peta Kawasan Strategis Berdasarkan Kebijakan Nasional, Provinsi, dan Tingkat Kabupaten/Kota di Wilayah Perbatasan Jabar-Jateng	83
Gambar 4-9	Peta Struktur Pusat Pelayanan di Wilayah Perbatasan Jabar-Jateng Berdasarkan Kebijakan Nasional, Provinsi, dan Tingkat kabupaten/Kota	84
Gambar 4-10	Peta Sebaran Sarana Pendidikan di Kawasan Perbatasan Provinsi Jawa Barat-Jawa Tengah	85
Gambar 4-11	Peta Sebaran Sarana Peibadatan di Kawasan Perbatasan Provinsi Jawa Barat-Jawa Tengah	86
Gambar 4-12	Peta Sebaran Sarana Kesehatan di Kawasan Perbatasan Provinsi Jawa Barat-Jawa Tengah	87
Gambar 4-13	Panjang Jalan (km) Berdasarkan Status Jalan di Kawasan Perbatasan Jabar-Jateng 2010	88
Gambar 3-14	Jumlah Panjang Jalan (km) Berdasarkan Kabupaten Kota di Kawasan Perbatasan Jabar-Jateng 2010	89
Gambar 4-15	Bangun Korelasi Indeks Pembangunan Manusia dengan Indikator Desa Tertinggal	136

Gambar 4-16	Konsep IPM dihubungkan dengan pengentasan kemiskinan dan Pengangguran (Lismawati , 2007).....	142
Gambar 4-17	Rencana Pengembangan Sentra Ekonomi Unggulan Pabedilan-Losari (Jabar)-Losari (Jateng)	160
Gambar 4-18	Rencana Pengembangan Sentra Ekonomi Unggulan Purwaharja-Pataruman (Kab. Banjar)	161
Gambar 4-19	Rencana Pengembangan Sentra Ekonomi Unggulan Langensari (Banjar)-Lakbok-Purwadadi (Ciamis)	162
Gambar 4-50	Peta Rencana Pola Ruang Rencana Pengembangan Sentra Ekonomi Unggulan Pabedilan-Losari (Jabar)-Losari (Jateng)	163
Gambar 4-21	Peta Rencana Pola Ruang Rencana Pengembangan Sentra Ekonomi Unggulan Purwaharja-Pataruman (Kab. Banjar)	164
Gambar 4-22	Peta Rencana Pola Ruang Pengembangan Sentra Ekonomi Unggulan Langensari (Banjar)-Lakbok-Purwadadi (Ciamis)	165

RINGKASAN

Penelitian multi tahun ini diarahkan untuk menghasilkan model Kerjasama Antar Daerah (KAD) antar kabupaten/kota dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Barat pada tahun ke 2 (dua). Untuk mengidentifikasi fenomena tersebut penelitian akan menggunakan metodologi kualitatif dan kuantitatif dimana sampel penelitian akan dilaksanakan di Kota Banjar, Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Kuningan.

Tahapan analisis yang akan dilakukan dalam penelitian tahap pertama ini adalah mengidentifikasi tipologi kawasan perbatasan. Berdasarkan hasil penelitian di ketahui bahwa [1]. Berdasarkan fisik geografis wilayah kecamatan di perbatasan maka terdapat 2 kategorisasi dalam membedakan wilayahnya yaitu wilayah pegunungan dan wilayah pesisir; [2]. Berdasarkan kategorisasi karakteristik administrasi perencanaan wilayah perbatasan, kategorisasi di dasarkan kepada unit analisis kecamatan yang berbatasan antar kabupaten dan kecamatan yang berbatasan antar Provinsi Jawa Barat dan Antara Provinsi Jawa Tengah; [3]. Meninjau Klasifikasi IPM (Indeks Pembangunan Manusia) beberapa kecamatan memiliki IPM yang relatif tinggi dengan Indeks Pendidikan Indeks pendidikan rata-rata adalah 75,78, indeks Kesehatan adalah 73,77, sedangkan indeks daya beli rata-rata 67,14 secara keseluruhan Indeks Pembangunan Manusia di 6 Kecamatan di wilayah perbatasan dengan klasifikasi tinggi adalah 72,23. Indeks Pendidikan rata-rata di wilayah perbatasan yang memiliki klasifikasi IPM rendah Indeks pendidikan rata-rata adalah 73,65, indeks Kesehatan adalah 69,80, sedangkan indeks daya beli rata-rata 59,74 secara keseluruhan Indeks Pembangunan Manusia di 13 Kecamatan di wilayah perbatasan adalah 63,73; [4]. Klasifikasi Konektifitas di kecamatan didasarkan pada tinggi dan rendahnya indeks aksesibilitas, indeks mobilitas dan proporsi luas jalan. Kecamatan dengan kategori tinggi berdasarkan aksesibilitas, mobilitas dan proporsi luas jalan yaitu Kecamatan Pasaleman Kabupaten Cirebon, Kecamatan Sabang dan Cilebak di Kabupaten Kuningan, Kecamatan Prwaharja di Kota Banjar dan Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis; [5]. Intensitas Kegiatan Ekonomi di wilayah perbatasan di bedakan menjadi 2 klasifikasi yaitu ekonomi unggulan dan non unggulan. Adapun kecamatan yang memiliki sektor unggulan yang juga sebagai penggerak kecamatan lain di perbatasan adalah [1] Kabupaten Cirebon (Kec. Losari, Kec. Pabedilan); [2] Kota Banjar (Kec. Purwaharja, Kec. Pataruman, Kec. Langensari); [3] Kabupaten Ciamis (Kec. Lakbok, Kec. Purwadadi).

Kata Kunci : Model, Kerjasama Antar Daerah, IPM

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan sistem pemerintahan desentralisasi dengan terbitnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dan disempurnakan UU No. 32 Tahun 2004 menyebabkan setiap daerah memiliki kewenangan terhadap pengelolaan sumberdaya yang dimilikinya. Hal ini sangat berpengaruh besar pada aspek pemerintahan dan aspek pembangunan terutama bagi pengembangan wilayah dan kota. Dalam konteks pengembangan wilayah dan kota (*urban and regional development*) pendekatan struktur ruang dan pola ruang dipandang sebagai fenomena alami yang tidak berbatas administrasi.

Fenomena alami ini disebabkan oleh dua hal yaitu; [1] konektivitas antar wilayah (jaringan jalan dan infrastruktur dasar lainnya); dan, [2] interaksi antar wilayah (disebabkan oleh pola aliran barang dan jasa pada antar wilayah). Konektivitas dan interaksi ini terjadi pada perkotaan kawasan perkotaan dan desa-kota dengan intensitas tinggi di dalam suatu wilayah. Di lain pihak konektivitas dan interaksi kurang begitu diperhatikan pada kawasan kabupaten/kota yang berbatasan (wilayah peri-urban). Jika dilihat dari unit kecamatan di satu sisi beberapa kecamatan antar dua kabupaten/kota yang berbatasan dalam kondisi yang terbelakang atau tertinggal. Disisi lain wilayah peri-urban yang berbatasan antar kabupaten/kota dengan konektivitas dan interaksi yang tinggi telah berubah menjadi pusat sekunder dari sistem kota-kota dalam pengembangan wilayahnya.

Kondisi ini terjadi di wilayah Provinsi Jawa Barat dimana beberapa kecamatan yang berbatasan antar kabupaten/kota disisi lain mengalami peningkatan ekonomi dan infrastruktur yang baik yang berada di Kota dan Kabupaten Bogor, Tangerang, Bekasi, dan Karawang karena menerima manfaat dari Kerjasama Antar Daerah dalam tata ruang yaitu wilayah metropolitan JABODETABEK, Kabupaten/kota lain yang wilayah peri-urban perbatasannya maju adalah Bandung Metropolitan Area (BMA) seperti Kota dan Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang. Hal berbeda dapat kita jumpai di Kabupaten/Kota di wilayah timur seperti Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis, Tasikmalaya, Kuningan Majalengka dan Cirebon pada daerah yang berbatasan merupakan *enclave* yang kurang memiliki konektivitas dan interaksi sehingga rentan terhadap kemiskinan, disparitas dan lambannya pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan data BPS dalam Syarifudin (2008) IPM Provinsi Jawa Barat adalah 66,10 pada tahun 2001, 67,45 pada tahun 2002, 67,87 pada tahun 2003, 68,36 pada tahun 2004, 69,35 pada tahun 2005, 70,30 pada tahun 2006. Disisi lain berdasarkan data BPS Jawa Barat tahun 2003 - 2006 menunjukkan paradoksal bahwa kemiskinan di Provinsi Jawa Barat telah menunjukkan peningkatan persentase yaitu sebesar 27,81 % pada tahun 2003, 27,51% pada tahun 2004, 28,29% pada tahun 2005 dan 29,05 % pada tahun 2006. Paradoksal lambannya IPM Provinsi Jawa Barat dengan peningkatan jumlah kemiskinan ini menunjukkan bahwa masih banyaknya daerah miskin, terjadinya disparitas, dan konektivitas dan interaksi antar dan inter-wilayah wilayah peri-urban pada kabupaten/kota yang berbatasan yang belum menjadi fokus perhatian pembangunan wilayah.

Kerjasama antar daerah (KAD) harus menjadi bagian penting dalam tata ruang untuk mendorong wilayah yang berbatasan antar kabupaten/kota meningkatkan fungsi ruang sebagai interkonektivitas dan interaksi antar ruang yang bermuara pada peningkatan ekonomi wilayah, disparitas dan mereduksi jumlah kemiskinan. Penelitian ini akan diarahkan untuk bagaimana menyusun Model Kerjasama Antar Daerah (KAD) Dalam Meningkatkan Fungsi Ruang Wilayah Pada Perbatasan Antar Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat. Model yang dihasilkan dari penelitian sebelumnya menghasilkan 2 kelompok KAD yaitu *intergovernmental relation* dan *intergovernmental manajemen*. Inovasi model penelitian ini terdiri dari 5 bagian merupakan modifikasi dari Agranoff (2003) dalam Warsono (2009 : 11) ; (1). *Spatial & information network*, (2). *Connecting network* (infrastruktur), (3). *Interaction network*, (4). *developmental network*, dan (5). *Action network*.

1.2 Permasalahan

Jika dilihat berdasarkan data IPM di Provinsi Jawa Barat dan Data peningkatan jumlah kemiskinan, maka paradoksal peningkatan IPM yang lamban dan meningkatnya kemiskinan sangat di pengaruhi oleh keberadaan ruang itu sendiri. Faktor geografis (kondisi fisik alami) dan georeferensi (keberadaan lokasi dalam jejaring ekonomi) sangat menentukan bagi perkembangan suatu daerah. Dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengisyaratkan bahwa kabupaten/kota harus memiliki Rencana Umum Tata Ruang wilayah. Hal demikian belum menjadi instrumen bagi pengembangan daerah

karena tiap rencana memiliki kendala dan limitasi dalam implementasinya serta belum tersiratnya dalam dokumen RTRW suatu model kerjasama antar ruang wilayah.

Berdasarkan data dari studi dokumentasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat bagian Timur (Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon) dapat disintesis terdapat berbagai persoalan yang generik terdapat di wilayah tersebut. Salah satu persoalan yang mendasar adalah adanya perbedaan perkembangan antar wilayah di wilayah kabupaten/kota. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat perkembangan tersebut adalah: [1] Konsentrasi penduduk pada satu pusat; [2]. Distribusi fasilitas ekonomi dan sosial masih sangat terbatas; [3]. Banyaknya daerah yang terisolasi; [4]. Pemanfaatan lahan yang belum optimal.

Pengaruh yang lebih luas dari faktor-faktor tersebut diatas menimbulkan kesenjangan perkembangan wilayah peri-urban perbatasan antar kabupaten/kota. Hal ini terjadi dikarenakan masih lemahnya penerapan konsep pembangunan wilayah/ pembangunan pedesaan yang dilakukan di daerah. Walter Chistaller mengemukakan pembangunan wilayah/ pembangunan pedesaan harus memiliki tiga unsur fundamental, yaitu: (1) adanya pusat, (2) wilayah pengaruh, (3) jaringan transportasi. (Rahardjo 2006 : 103).

Setiap daerah memiliki batas wilayah administratif yang ditentukan secara formal melalui peraturan perundangan, akan tetapi dalam kenyataan berbagai masalah dan kepentingan sering muncul sebagai akibat dari hubungan fungsional di bidang sosial ekonomi yang melewati batas-batas wilayah administratif tersebut. Dalam konteks ini, alasan utama diperlukan kerjasama antara pemerintah daerah adalah agar berbagai masalah lintas wilayah administratif dapat diselesaikan bersama dan sebaliknya agar banyak potensi yang mereka miliki dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama.

Karena kerjasama antar pemerintah daerah harus dilihat sebagai suatu *kebutuhan penting yang tidak terelakkan* maka harus ada upaya yang sistimatis dan berkesinambungan dari pihak pemerintah untuk memperkenalkan, mendorong dan menginstitutionalisasikan kerjasama antara daerah agar pemerintah daerah terbiasa melakukannya dan dapat mengambil manfaatnya.

Dalam kaitan dengan kerjasama tersebut terdapat tiga isu strategis yang harus diidentifikasi untuk kemudian dipelajari dan dibenahi, yaitu (1) membenahi peran dan

kemampuan Propinsi dalam menyelenggarakan fungsi kerjasama antar daerah atau “*local government cooperation*”, (2) menentukan bidang-bidang yang dapat atau patut dikerjasamakan, dan (3) memilih model-model kerjasama yang sesuai dengan hakekat bidang-bidang tersebut. Isu-isu ini dianggap strategis karena posisinya sangat menentukan keberhasilan kerjasama antar pemerintah daerah di masa mendatang. Dalam hal ini pertanyaan penelitiannya adalah “Bagaimana menyusun model Kerjasama Antar Daerah perbatasan kabupaten/kota dalam Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Barat.” Pertanyaan penelitian tersebut kemudian di perinci sebagai berikut :

1. Bagaimana tipologi fisik geografis perbatasan antar kabupaten/kota
2. Bagaimana tipologi konektifitas perbatasan antar kabupaten/kota
3. Bagaimana tipologi interaksi perbatasan antar kabupaten/kota
4. Bagaimana Indeks Pembangunan Manusia terkait dengan faktor-faktor berpengaruh terhadap fisik geografis, konektifitas dan interaksi di daerah perbatasan antar kabupaten/kota.
5. Bagaimana menyusun model Kerjasama Antar Daerah (KAD) antar kabupaten/kota dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Barat.

1.3 Tujuan Khusus

Tujuan dari penelitian ini adalah Model Kerjasama Antar Daerah (KAD) Antar Kabupaten/Kota Dalam Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa Barat. Sasaran yang ingin dicapai adalah :

1. Bagaimana tipologi fisik geografis perbatasan antar kabupaten/kota
2. Bagaimana tipologi konektifitas perbatasan antar kabupaten/kota
3. Bagaimana tipologi interaksi perbatasan antar kabupaten/kota
4. Bagaimana Indeks Pembangunan Manusia terkait dengan faktor-faktor berpengaruh terhadap fisik geografis, konektifitas dan interaksi di daerah perbatasan antar kabupaten/kota.
5. Bagaimana menyusun model Kerjasama Antar Daerah (KAD) antar kabupaten/kota dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Barat.

1.4 Urgensi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang akan menghasilkan model kerjasama antar daerah pada daerah yang berbatasan antar kabupaten/kota dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia. Dalam penelitian ini terdapat lima unsur urgensi yaitu :

Pertama dalam konteks ini, alasan utama diperlukan kerjasama antara pemerintah daerah adalah agar berbagai masalah lintas wilayah administratif dapat diselesaikan bersama dan sebaliknya agar banyak potensi yang mereka miliki dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama termasuk dalam meningkatkan IPM dan . Konsekuensinya adalah harus dilakukan pembenahan *microorganizationnal abilities of governments* di tingkat daerah – suatu bentuk reformasi manajemen publik yang harus diperhatikan pemerintah saat ini, dan tidak semata membenahi *macroorganizational capacities* di tingkat pusat. Dengan kata lain, pembenahan kemampuan institusi pemerintahan di bawah pusat sangat diperlukan. Dengan demikian implikasi kemampuan bagi daerah akan meningkat seperti [1] Kinerja Ekonomi; [2] Keuangan Pemerintah; [3] Pelayanan Publik; [4] Aparat Pemerintah, dan ; [5] Aspek Kewilayahan.

Kedua penelitian ini akan mengetahui dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama pada [1] peningkatan pelayanan kepada masyarakat; [2] percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi; [3] percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah; [4] percepatan pengelolaan potensi daerah; [5] peningkatan keamanan dan ketertiban; [6] peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah baik secara spatial maupun temporal.

Ketiga implikasi ekonomi dan kualitas hidup (IPM), arahan yang akan dihasilkan dari penelitian ini akan membawa kepada perubahan pertumbuhan ekonomi masyarakat, berkembangnya sektor riil dan peningkatan kualitas hidup masyarakat terutama terkait variabel IPM yaitu kesehatan, pendidikan dan daya beli.

Keempat implikasi terhadap kewilayahan terintegrasi yang baik dalam mendukung ekonomi dan sosial masyarakat, dimana keterisolasian akan menjadi kendala terhadap berkembangnya unit pemerintahan kecamatan dan desa dan pemerataan pembangunan. Penelitian ini akan memberikan arahan bagi pengembangan kewilayahan terutama aspek spasial dan infrastruktur dasar yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam kaitannya jejaring daerah perbatasan antar kabupaten/kota serta kerjasama seperti apa yang dapat meningkatkan pembangunan dan disparitas wilayah.

Kelima bersifat praktis di mana hasil dari studi ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam pembuatan kebijakan dan strategi pembangunan daerah baik di tingkat nasional/pusat maupun di tingkat provinsi/lokal. Dalam studi ini akan menghasilkan arahan dimana lebih jauh akan diformulasikan pula program-program yang dapat diaplikasikan/diimplementasikan.

Keenam implikasi teoritis, hasil penelitian ini akan menambah khasanah keilmuan khususnya dalam bidang perencanaan wilayah dan kota, pencapaian minat riset sesuai dengan *road map* riset program studi perencanaan wilayah dan kota universitas pasundan, meningkatkan bahan ajar dan publikasi ilmiah pada jenjang nasional maupun internasional.

1.5 Target Luaran Penelitian

- Tipologi/karakteristik daerah perbatasan kabupaten Kota di Provinsi Jawa Barat berdasarkan Fisik Geografis, interkoneksi, dan interaksi antar wilayah kabupaten /Kota (tahun Pertama).
- Penyusunan Model Kerjasama Antar Daerah (KAD) daerah perbatasan Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat dalam perspektif peningkatan IPM, berdasarkan tipologinya (tahun kedua).
- Publikasi Ilmiah pada jurnal terakreditasi Nasional atau Internasional pada tahun pertama dan kedua.
- Diseminasi ilmiah International pada QiR (Quality in Reseach) penyelenggara Universitas Indonesia diselenggarakan pada Bulan Desember 2014 dan 2015.
- Bahan Ajar bagi mata kuliah pembiayaan pembangunan dan Perencanaan Perdesaan di Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota –Unpas Bandung.

BAB II STUDI PUSTAKA

2.1 State Of The Art Penelitian

A. Konsepsi Kerjasama Antar Daerah

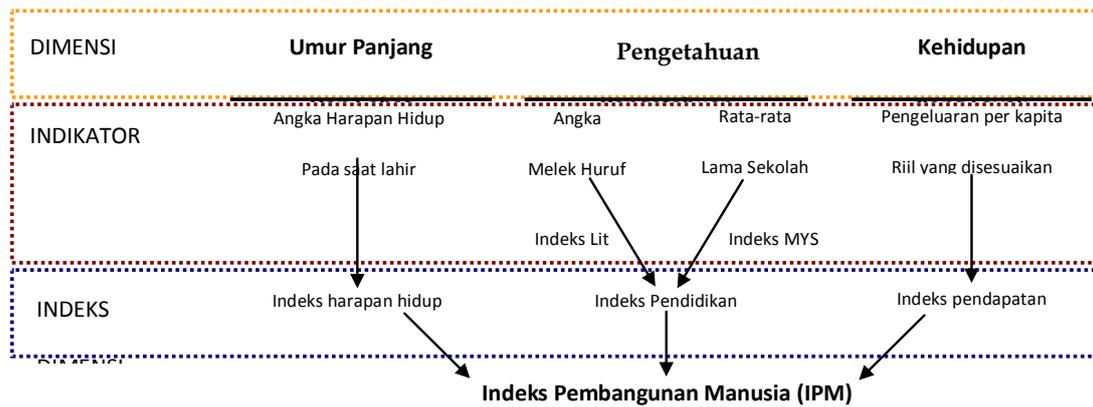
Munculnya model "*integrated area planning*" ini diharapkan dapat mengurangi berbagai konflik antar wilayah administratif, yaitu dengan mengefektifkan pembangunan sektor-sektor tertentu dan institusi yang berhubungan dengan sektor tersebut dalam suatu area (dengan mengesampingkan batas-batas wilayah administratifnya). Model ini muncul sebagai reaksi terhadap kekurangan-kekurangan perencanaan sektoral khususnya koordinasi antar sektor, dan juga terhadap pemenuhan kebutuhan bagi area geografis khusus (yang mungkin tidak sesuai dengan batas-batas wilayah administratif yang ada) seperti daerah aliran sungai (DAS) dan pembangunan perdesaan yang kemudian dikenal dengan "*integrated rural development*".

Jalan keluar yang pernah ditawarkan adalah (1) membentuk suatu struktur yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat yang ditempatkan di area yang bersangkutan, atau juga dibuat oleh pemerintah lokal atau perusahaan swasta yang diberi status khusus; (2) membentuk tim konsultan perencanaan dari luar area, untuk mempersiapkan perencanaannya; dan (3) melakukan reformasi struktur organisasi yang ada dan memperbaiki kemampuan para staff yang ada untuk mempersiapkan dan mengimplementasikan rencana dan memperkuat hubungan horisontal antar sektor serta memperemah hubungan vertikal.

B. Konsepsi Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Menurut UNDP bahwa pada hakikatnya pembangunan merupakan untuk manusia, maka untuk mengukur keberhasilannya menggunakan pendekatan yang merefleksikan kebutuhan manusia itu sendiri. Komponen IPM diukur berdasarkan : [1]. kesehatan yang diukur dari angka harapan hidup; [2] pendidikan yang diukur berdasarkan rata-rata lama sekolah, dan angka melek huruf penduduk usia lebih dari 15 tahun dan; [3]. daya beli yang diukur dari tingkat kemampuan konsumsi makan dan non makan.

Nilai komposit IPM adalah dinilai dengan rentang 0 – 100, dimana rentang nilai untuk *high category* adalah angka diatas 80, kategori *upper-medium* dengan jarak rentang 66,00-79,00, dikategorikan ke dalam *lower-medium* (50,00-65,99) serta 0-49,99 dikategorikan *lower category*.



Gambar 2-1. Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

C. Pengembangan Wilayah & Pengembangan Perdesaan

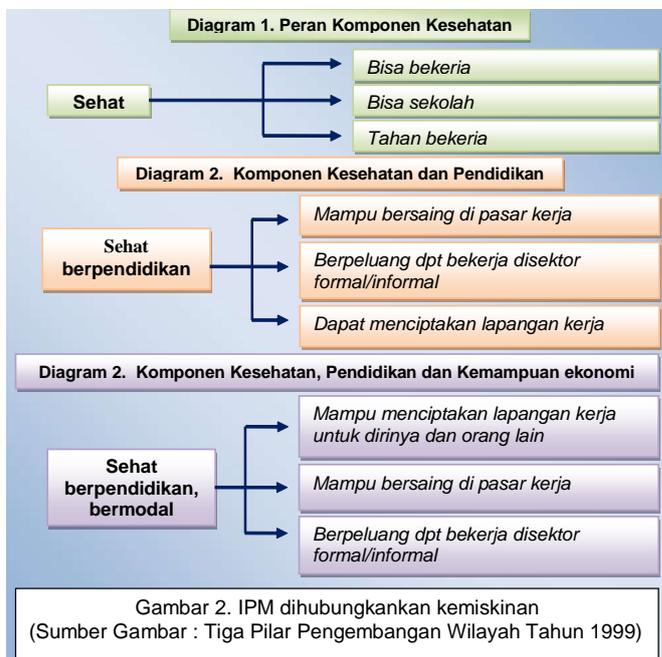
Secara simplistik, konsep pengembangan wilayah sendiri terbagi menjadi dua ekstrim yang saling berseberangan, dominasi pertama yaitu adanya penekanan bahwa dalam mengembangkan suatu wilayah harus berawal dari penentuan kebijakan yang berasal dari pusat atau ‘kekuatan’ dari luar seperti investasi, ekspor dan migrasi (*development from above*). Kebijakan ini sudah banyak diterapkan oleh Pemerintahan dengan anggapan bahwa pengembangan suatu wilayah tidak dapat dilakukan secara serentak melainkan harus melalui beberapa *leading sectors*. Kemudian akan terjadi penjalaran kepada sektor-sektor yang lain dan perekonomian secara keseluruhan. Proses itu terjadi akibat adanya kaitan ke depan (*forward linkages*) dan kaitan ke belakang (*backward linkages*). Sedangkan konsep lainnya beranggapan bahwa untuk mengembangkan wilayah harus dimulai dari ‘dalam’ wilayah itu sendiri (*development from below*). *Development from below* bertujuan untuk menciptakan wilayah otonomi melalui integrasi berbagai sektor yang terdapat di dalam wilayah tersebut. Friedmann dan Douglas menolak pendapat yang menyatakan bahwa wilayah terbelakang akan mendapatkan efek dari adanya *leading sectors* tersebut, sebab yang terjadi adalah penghisapan sumber daya oleh wilayah yang lebih maju sehingga terjadi “kebocoran” (*leakeages*) yang berlebihan.

Pada intinya pengembangan wilayah bertujuan untuk : (1) mendayagunakan sumber daya alam secara optimal melalui pengembangan ekonomi lokal; (2) mengurangi kesenjangan antar wilayah, sebab dikhawatirkan apabila kesenjangan tersebut tidak secepatnya diatasi maka *gap* diantara wilayah tersebut akan semakin besar seperti yang terjadi antara Indonesia bagian barat dengan bagian timur; (3) pembangunan berkelanjutan, tidak mengeksploitasi sumber daya secara berlebihan; (4) mempertahankan atau meningkatkan

laju pertumbuhan ekonomi regional. Namun, keseluruhan tujuan tersebut tidak dapat dicapai bersama-sama karena adanya keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki. Oleh karena itu, tujuan pengembangan wilayah hanya difokuskan pada satu tujuan tanpa mengabaikan tujuan lainnya.

D. Paradoksal Antara IPM dan Kemiskinan serta Kerjasama Antar Daerah

IPM dihitung berdasarkan aspek pendidikan meliputi rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf, aspek kesehatan yang dihitung berdasarkan rata-rata lama hidup dan aspek daya beli dengan mempertimbangkan *prosperity power parity*/kemampuan membeli berbagai jenis komoditi.



Disisi lain pengertian kemiskinan sangat beragam, seperti ketakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan memperbaiki keadaan, kurangnya kesempatan berusaha, bahkan berbagai ketidakmampuan dalam aspek sosial dan moral. Berbagai ahli berpendapat bahwa kemiskinan terkait dengan sikap, budaya hidup, dan lingkungan dalam suatu masyarakat atau yang mengatakan

bahwa kemiskinan merupakan ketakberdayaan sekelompok masyarakat terhadap sistem yang diterapkan oleh suatu pemerintahan sehingga mereka berada pada posisi yang sangat lemah dan tereksplorasi (kemiskinan struktural).

Terlepas dari berbagai pengertian dan sudut pandang kemiskinan bahwa peningkatan IPM merupakan indikator dari berkurangnya kemiskinan baik secara material, sosial dan moral. Hal ini dengan asumsi jika aspek pendidikan, kesehatan dan daya beli seseorang meningkat maka telah terjadi berbagai macam perluasan secara ekonomi, sosial dan moral. Berikut ini keterkaitan antara kemiskinan hubungannya dengan Indeks Pembangunan Manusia sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 2.

IPM hadir sebagai alat ukur yang mampu menggambarkan tingkat kesejahteraan secara menyeluruh karena dapat menggambarkan faktor ekonomi dan non-ekonomi. Tetapi dalam kenyataannya terjadi paradoksal dimana pembangunan pada berbagai tingkatan

Tabel 1. Indikator Pembangunan Provinsi Jawa Barat 2003-2006

No.	Indikator	Tahun 2003		Tahun 2004		Tahun 2005		Tahun 2006	
		T	R	T	R	T	R	T	R
1	IPM	72,37	67,87	73,53	68,36	74,56	69,35	75,05	70,30
2	Indeks Pendidikan	80,2	78,40	81,2	79,02	82,0	79,59	81,5	80,61
3	Indeks Kesehatan	68,6	66,57	69,2	67,23	69,6	69,28	69,8	70,13
4	Indeks Daya Beli	68,2	58,63	70,2	58,83	72,3	59,18	74,2	59,42
5	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	2,24	2,25	2,22	2,64	2,16	2,10	2,14	1,94
6	Penduduk Miskin (%)	19,61	27,81	19,13	27,51	18,64	28,29	18,14	29,05
7	Pengangguran (%)	7,34	12,69	7,39	12,25	6,54	11,91	6,12	10,95
8	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,60	4,50	4,62	5,06	4,65	5,31	4,75	6,02

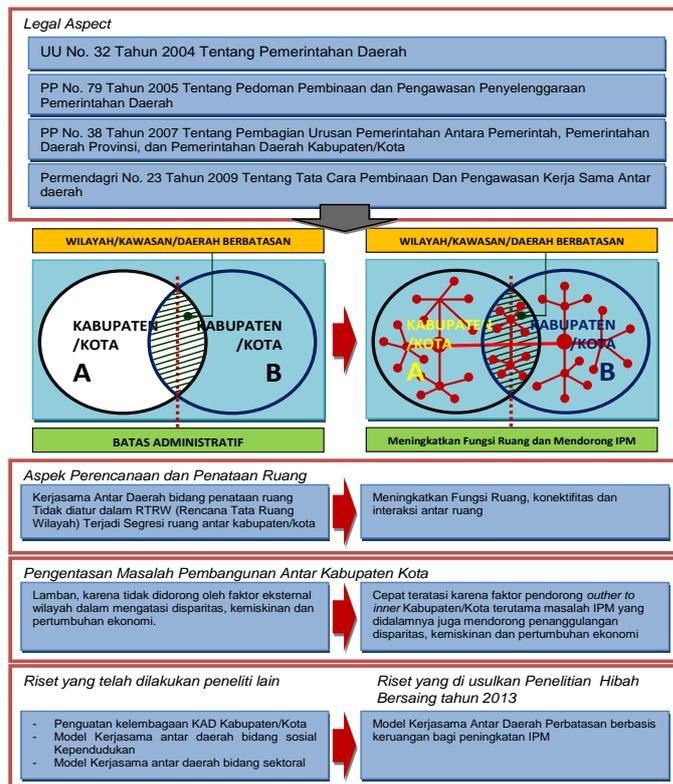
T = Target

R = Realisasi

Sumber : BPS dan Arah Kebijakan Umum Jawa Barat tahun 2007

tertinggal).

Berdasarkan data BPS di Provinsi Jawa Barat sebagai bagian menunjukkan bahwa IPM di Provinsi Jawa Barat mengalami trend yang meningkat pada tahun 2003 adalah



Gambar 2-3 Konsep penelitian

penduduk miskin terus meningkat, jumlah pengangguran terus berkurang dan laju pertumbuhan ekonomi terus meningkat (lihat Tabel 1.). Kondisi seharusnya sebagai *state of desire* adalah jika IPM sebagai tolok ukur pembangunan yang komprehensif akan berkorelasi positif terhadap indikator lainnya. Artinya jika trend IPM naik maka jumlah penduduk miskin berkurang, pengangguran berkurang, dan laju pertumbuhan naik.

nasional, provinsi, kabupaten/kota mengalami paradoksal antara peningkatan IPM dan masih besarnya jumlah kemiskinan dan kemiskinan pada tingkat perdesaan (desa

67,87, pada tahun 2004 adalah 68,36, pada tahun 2005 adalah 69,35 dan pada tahun 2006 adalah 70,30. Indeks yang trendnya rendah adalah pada kesehatan dan daya beli pda level 60 sedangkan paling tinggi adalah indeks pendidikan yaitu pada level 70. Dilihat dari laju pertumbuhan penduduk mengalami kenaikan sampai pada tahun 2004 tetapi menurun kembali pada tahun 2005 dan 2006. Disisi lain indikator pembangunan tersebut berbanding terbalik dengan IPM yaitu jumlah

Paradoksal ini juga terjadi pada sejumlah kabupaten/kota lainnya yang berada pada wilayah Jawa Barat.

Berikut ini adalah gambaran mengenai kondisi state of the art penelitian yang akan dilaksanakan kondisi kenyataan dengan kondisi yang diinginkan serta pentingnya penelitian ini dalam mengungkap suatu fenomena.

2.2 Studi Pendahuluan Yang Sudah Dilakukan

Studi yang pernah dilakukan sebelumnya baik yang dilakukan oleh peneliti lain dan peneliti yang menjadi landasan usulan penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2-2 Penelitian Yang Telah Dilaksanakan dan Usulan Penelitian Hibah Bersaing

No.	Peneliti dan Judul Penelitian	Variabel	Metoda Pendekatan
Penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti lain			
1.(2009) Otonomi Daerah, Kesejahteraan Masyarakat, Dan Kerjasama Pembangunan Antar Daerah (Kerjasama Penelitian Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa)	1. Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Republik Indonesia Pasca Amandemen; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.	Deskriptif Kualitatif Studi dokumentasi
2.	Hadi Warsono (2009) Regionalisasi dan Manajemen Kerjasama Antar Daerah : studi kasus kerjasama antar daerah yang berdekatan di Jawa Tengah. (Disertasi, Program Doktor Ilmu Administrasi Negara Universitas Gajahmada)	Didasarkan kepada 3 Variabel yaitu : 1. Pemetaan Regionalisasi 2. Faktor-faktor pendorong dan penghambat regionalisasi 3. Model KAD melalui regionalisasi ke depan.	Deskriptif Kualitatif
3.	Debbie Vici Prastitidan Holi Bina Wijaya (2005) Kerjasama Antar Daerah Dalam Pelayanan Air Bersih Kota Surakarta Dengan Kabupaten Karanganyar (<i>Studi Kasus: Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar</i>) Jurnal Teknik PWK; Vol. 1; No. 1; 2012; hal. 29-35	Didasarkan kepada 4 variabel yaitu : 1. Mekanisme Kerjasama Antar Daerah 2. Mekanisme Pelayanan Air Bersih 3. Stakeholder yang Berperan dalam Kerjasama antar-daerah dalam Pelayanan Air Bersih 4. Kondisi Kerjasama Antar Daerah dalam Pelayanan Air Bersih	Deskriptif Kualitatif
Penelitian yang telah dilaksanakan oleh Anggota Peneliti yang berkaitan			
4.	Deden Syarifudin (2008) Model Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut Berbasis Sistem Informasi Geografis di Kabupaten Ciamis (Penelitian Dosen Muda Ditjen Dikti Nomor perjanjian : 124/SP2H/PP/DP2M/III/2008)	Variabel Entitas Kewilayahan : 1. Fisik Geografis 2. Administrasi	Kuantitatif Kualitatif (Model GIS/ <i>Geographic Information System</i>)
5.	Gini Hartati dan Deden Syarifudin (2008) Analisis Kondisi Infrastruktur Desa Tertinggal dalam Perspektif Penanggulangan Kemiskinan : Wilayah	Menggunakan variabel infrastruktur desa tertinggal yaitu : 1. Infrastruktur Jalan dan Jembatan 2. Listrik 3. Telepon	Deskriptif Kualitatif

	Studi Kabupaten Ciamis (Penelitian Dosen Muda Ditjen Dikti Nomor perjanjian : 124/SP2H/PP/DP2M/III/2008)	4. Air Bersih 5. Infrastruktur Ekonomi 6. Infrastruktur Pertanian 7. Infrastruktur Kesehatan 8. Infrastruktur Pendidikan	
6.	Deden Syarifudin (2008) Strategi Pengembangan Desa Tertinggal Wilayah Darat dan Pesisir dalam Perspektif Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia : Wilayah Studi Kabupaten Ciamis	Menggunakan 2 Variabel : Variabel Indeks Pembangunan Manusia : 1. Pendidikan 2. Kesehatan 3. Daya beli Variabel Desa Teringgal : 1. Infrastruktur Jalan dan Jembatan 2. Listrik 3. Telepon 4. Air Bersih 5. Infrastruktur Ekonomi 6. Infrastruktur Pertanian 7. Infrastruktur Kesehatan 8. Infrastruktur Pendidikan	Deskriptif Kualitatif
7.	Supratignyo Aji, Endang Hadiansyah, Fitria Irmawati (2013) “Peningkatan Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Jenis Penggunaan Lahan dan Pajak Daerah Di Kota Bandung” Jurnal Planologi Unpas Volume 1 Nomor 1 Maret 2013	Menggunakan variabel : 1. identifikasi perkembangan pajak daerah 2. identifikasi perkembangan penggunaan lahan 3. identifikasi perkembangan Pendapatan Asli Daerah 4. trend pajak daerah dan penggunaan lahan terhadap pendapatan asli daerah	Deskriptif Kualitatif
Hasil penelitian yang sudah dicapai			
Berdasarkan ke 4 (empat) penelitian yang telah dilakukan bahwa pemanfaatan potensi kewilayahan dan kesejahteraan masih sulit untuk dicapai karena masih terjadinya disparitas dalam pemanfaatan potensi kewilayahan dan bidang pemerintahan secara menyeluruh terutama di era otonomi daerah. Setidaknya penelitian tersebut telah memberikan gambaran menunjukkan rendahnya pelayanan masyarakat terutama pada daerah perdesaaan terjadinya enclave dan perlu model yang lebih baik dalam menanggulangi permasalahan disparitas, kemiskinan dan pertumbuhan daerah. Permasalahan utama adalah perencanaan tata ruang wilayah yang tersegregasi. Hal tersebut menyiratkan ego daerah telah di mulai dari payung spasial, oleh sebab itu model kerjasama antar daerah menjadi penting dalam penelitian yang diusulkan.			

2.3 Peta Jalan Penelitian

Penelitian yang diusulkan dalam Penelitian Hibah Bersaing adalah sebagai berikut:

a) Tahun ke 1

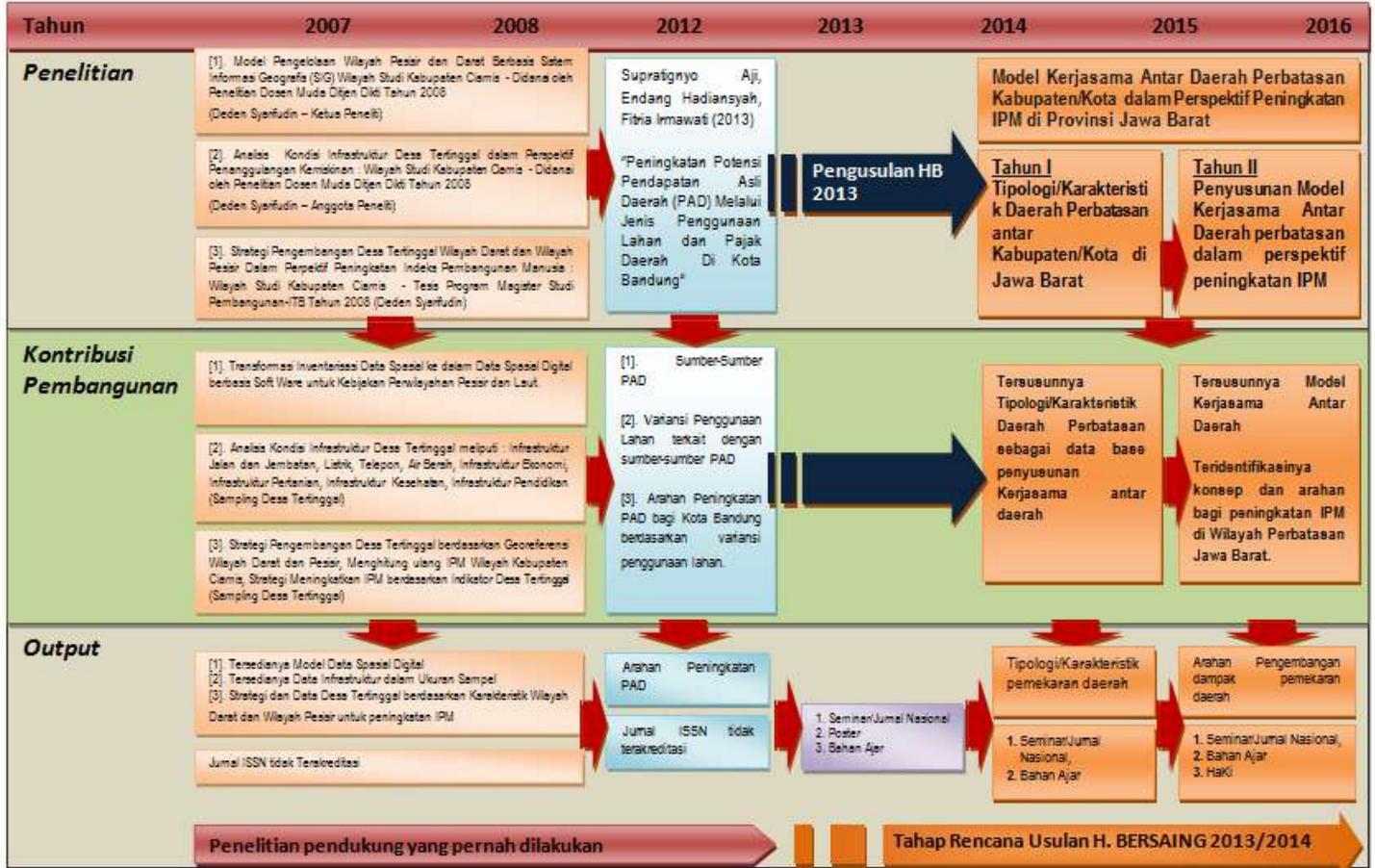
Penelitian pada tahun ke 1 akan menghasilkan Tipologi/Karakteristik Daerah Perbatasan antar Kabupaten di Jawa Barat.

b) Tahun ke 2

Penelitian pada tahun ke 2 akan menghasilkan Model Kerjasama Antar Daerah perbatasan Kabupaten/Kota dalam perspektif peningkatan IPM.

Adapun *road map* penelitian Hibah Bersaing usulan 2013 ini divisualisasikan pada gambar berikut.

Gambar 2-4 Road Map usulan penelitian Hibah Bersaing 2013



BAB III METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian yang diusulkan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam bagian perumusan masalah meliputi hal-hal sebagai berikut :

3.1 Strategi Penelitian

Strategi penelitian diperlukan sebagai pedoman operasional dalam melaksanakan penelitian. Yin [1994] mengidentifikasi 5 [lima] metode penelitian, yaitu : [1]. Survei, [2]. Eksperimen, [3]. *Historical Research*, [4]. Studi Kasus, dan [5]. Analisis Informasi Dokumenter. Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah gabungan antara metoda survei dan studi kasus. Alasan yang menggunakan strategi penelitian ini, tidak semua kabupaten/kota masuk dalam unit analisis penelitian ini. Unit analisis dipilih berdasarkan perbedaan geografis dan georeferensi karakteristik perbatasan, dengan demikian memerlukan penelaahan berdasarkan eksisting di lapangan untuk memahami secara utuh tipologi perbatasan sehingga dapat dirancang dalam bentuk pemodelan baik spasial maupun non spasial dalam Kerjasama Antar Daerah (KAD).

3.2 Data Penelitian

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan dari sumber pertama, sedangkan data sekunder adalah data yang telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen tertulis. Data primer dilakukan pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, serta angket. Sedangkan data sekunder dikumpulkan berupa [1]. Dokumen tertulis [2]. laporan dan hasil penelitian. Data sekunder diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Bappeda, Kantor Kecamatan, Kantor Desa, Internet, literatur, dan hasil penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya.

3.3 Unit Analisis Penelitian

Unit analisis dalam penelitian ini diarahkan pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat Bagian Selatan yang daerah perbatasannya kurang berkembang. Berdasarkan karakteristik geografinya dipilih kabupaten/kota yang memiliki karakteristik daratan dan pesisir. Untuk unit analisis kabupaten daratan terdiri dari kecamatan yang terdapat di kabupaten sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Unit Analisis penelitian

No	Wilayah
I	Kab. Cirebon (Perbatasan Cirebon-
	Kec. Pasaleman
	Kec. Ciledug
	Kec. Losari
II	Kab. Kuningan (Perbatasan Kuningan-
	Kec. Subang
	Kec. Cilebak
	Kec. Ciwaru
	Kec. Karagkancana
	Kec. Cibingbin
III	Kota Banjar (Perbatasan Banjar-Jateng)
	Kec. Purwaharja
	Kec. Pataruman
	Kec. Langensari
IV	Kab. Ciamis (Perbatasan Ciamis-Jateng)
	Kec. Kalipucang
	Kec. Lakbok
	Kec. Cisaga
	Kec. Tambaksari
	Kec. Purwadadi
	Kec. Mangunjaya

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data primer dan sekunder akan dilakukan dengan menggunakan beberapa metode antara lain :

1. Observasi langsung ke lapangan

Metode ini bertujuan untuk mengamati obyek penelitian, sehingga diperoleh gambaran secara menyeluruh tentang obyek yang akan diteliti terutama data-data spasial dan non spasial kondisi yang ada untuk dapat di deskripsikan berdasarkan variabel fisik geografis, konektifitas, dan interaksi antar daerah yang berbatasan.

2. Wawancara

Metode ini merupakan suatu teknik pengumpulan data berupa komunikasi verbal dengan pihak-pihak yang terkait (*stake holders*) di daerah yang berbatasan sebagaimana pada unit analisis. Adapun responden wawancara adalah; [1]. Kepala Bappeda; [2]. Kepala Kimpras Bina Marga, Cipta Karya; [3]. Kepala Industri dan Perdagangan; [4]. Kepala Distamben LH; [5]. Kepala Dinas KB dan Pemberdayaan Masyarakat; [6]. Kepala Bidang Pengembangan Desa; [7] Camat, [8]. Kepala Desa, dan [9]. Masyarakat. Pihak-pihak yang diwawancarai dipilih berdasarkan *pusposif*, karena pemahamannya yang baik dan keterlibatan langsung dengan fenomena yang akan dikaji dalam penelitian ini.

3. Kuisisioner atau Angket Penelitian

Kuisisioner atau angket yang akan digunakan berupa daftar pertanyaan dan pernyataan bersifat terbuka. Pihak yang diberikan kuisisioner adalah masyarakat daerah perbatasan antar kabupaten-kota yang dipilih secara *proporsional to size* pada tingkat kecamatan berdasarkan kaidah jumlah sampel yang *valid* secara statistika. Kuisisioner digunakan untuk mengetahui variabel IPM.

3.5 Kerangka Kerja Penelitian

Kerangka kerja penelitian [*research framework*] yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Penelitian yang sudah dilaksanakan

Penelitian yang sudah dilaksanakan di gunakan sebagai data pendukung dalam penelitian ini untuk mengetahui gambaran umum mengenai unit analisis dan substansi penelitian. Adapun penelitian yang sudah dilaksanakan adalah :

- Model Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut Berbasis Sistem Informasi Geografis di Kabupaten Ciamis
- Analisis Kondisi Infrastruktur Desa Tertinggal dalam Perspektif Penanggulangan Kemiskinan : Wilayah Studi Kabupaten Ciamis

- Strategi Pengembangan Desa Tertinggal Wilayah Darat dan Pesisir dalam Perspektif Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia : Wilayah Studi Kabupaten Ciamis
- Peningkatan Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Jenis Penggunaan Lahan dan Pajak Daerah Di Kota Bandung

2. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan konstruksi teori yang digunakan untuk memahami fenomena dan gejala-gejala fenomena penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian, menentukan alat analisis dan pemodelan yang akan dibangun. Tinjauan pustaka dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu domain konstruksi teori dan domain pemilihan alat analisis. Tinjauan pustaka yang merupakan domain konstruksi teori adalah : [1]. Teori Pengembangan Wilayah; [2]. Teori Indeks Pembangunan Manusia; [3]. Teori kerjasama antar daerah. Tinjauan pustaka yang merupakan domain pemilihan alat analisis adalah : [1]. Hitungan Pemekaran wilayah; [2]. Hitungan *AHP/Analytical Hierarchy Process*; [3]. Hitungan dan Analisis SWOT (*strengthness, weakness, opportunity, threath*); [4]. Analisis matriks fungsional; [5]. Analisis Spatial; [6]. FGD (*focus group discussion*); [7]. GIS (*geographical information System*).

3. Survei data sekunder dan data primer. Data sekunder berupa inventarisasi data dari instansi berupa dokumen-dokumen yang telah tercatat di instansi berdasarkan variabel penelitian. Data primer adalah data yang di laksanakan melalui observasi, wawancara dan pemberian angket pada responden.
4. Analisis Tipologi/Karakteristik Fisik Geografis. Analisis fisik geografis dimaksud adalah menelaah daya dukung dan daya tampung lahan di perbatasan serta kesesuaian lahan bagi kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat di perbatasan. Model yang dibangun dalam penelitian yang diusulkan adalah dengan menggunakan SIG (sistem informasi geografis) yaitu model yang mentransformasikan berbagai data spasial dan non spasial menjadi basis data yang memenuhi fungsi pemodelan seperti penelusuran data, analisis, berbagai penampalan data spasial dan non spasial, serta simulasi. Sistem informasi geografis yang dibangun dalam model yang dibangun menggunakan *software Arc View* versi 3.9.

5. Analisis Tipologi/Karakteristik Konektifitas Antar Perbatasan. Analisis tipologi konektifitas dilakukan analisis berdasarkan jaringan infrastruktur meliputi : jaringan jalan, listrik, telepon, air bersih, serta sarana-sarana lain seperti sarana pendidikan, kesehatan, sosial dan sarana ibadah. Data tersebut kemudian di kodifikasi untuk di analisis menggunakan analisis indeks sentralitas.
6. Analisis Tipologi/Karakteristik Interaksi Antar Perbatasan. Analisis ini adalah menggunakan analisis rantai nilai produksi dan konsumsi pada kegiatan ekonomi untuk barang sedangkan untuk pergerakan orang dan barang di gunakan analisis matriks asal-tujuan (MAT). Analisis di perbatasan dihitung berdasarkan barang dan orang ke luar maupun ke dalam daerah perbatasan antar kabupaten/kota. Hasil masing-masing analisis akan di sintesis ke dalam pemetaan tipologi/karakteristik interaksi antar daerah dan peluang bagi peningkatan kegiatan ekonomi.
7. Analisis Tipologi IPM. Analisis IPM di hitung berdasarkan sintesis dan pemilahan berdasarkan data IPM kecamatan yang di dapat dari BPS di daerah. Penentuan tipologi ini akan dilihat berdasarkan variansi data IPM pada tiap daerah berdasarkan variabel pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat. selain itu juga tim peneliti memberikan kuesioner adalah masyarakat daerah perbatasan antar kabupaten-kota yang dipilih secara *proporsional to size* pada tingkat kecamatan berdasarkan kaidah jumlah sampel yang *valid* secara statistika.
8. Analisis Penyempurnaan Tipologi/Karakteristik Desa Tertinggal
Penyempurnaan tipologi/karakteristik desa tertinggal di perlukan untuk *validasi* analisis pada tahap perancangan tipologi/karakteristik pemekaran daerah dan menampung sejumlah isu-isu strategis yang belum atau tidak terungkap dalam tahap pengumpulan data primer. Oleh sebab itu maka di gunakan analisis AHP (*Analitycal Hierarchy Process*) untuk teknik perbandingan diperlukan "*judgement*" atau pendapat yang berlandaskan pada "*keyperson*". Dalam tahap ini tim peneliti melaksanakan pembagian kuisisioner AHP kepada masyarakat dan Baleka (badan, lembaga, kantor) di lingkungan pemerintahan (lihat pada 3 Kota yaitu Kota Banjar, Kota Tasikmalaya dna Kota Cirebon.
9. Arahan Spasial dan Konsep Kerjasama Antar Daerah

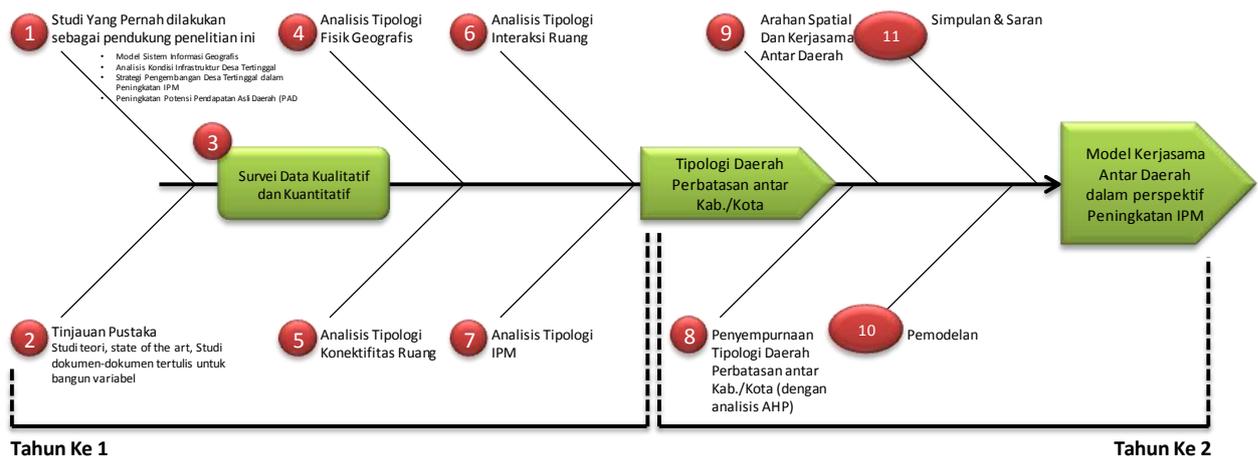
10. Pemodelan Kerjasama Antar daerah berbasis spatial dalam meningkatkan IPM di Daerah perbatasan

Uji model di lakukan sebagai *test run model* yang dibuat, selanjutnya tahap uji model juga digunakan sebagai validasi model yang dilakukan bersama-sama dengan pakar penataan ruang, pakar kerjasama antar daerah dan pakar pemodelan SIG.

11. Simpulan & Rekomendasi

Pada tahap ini dilakukan simpulan dari hasil keseluruhan penelitian dan juga rekomendasi baik praktis maupun teoritis untuk penelitian lanjutan.

Untuk lebih jelasnya kerangka kerja penelitian [*research framework*] yang digunakan sebagai kerangka berpikir dalam penelitian ini divisualisasikan sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 5.



Gambar 3-1 Research Frame Work

BAB 4 PEMBAHASAN DAN HASIL

4.1 Potret Wilayah

A. Karakteristik Fisik Geografis

Karakteristik fisik alami kawasan perbatasan Jabar-Jateng dapat dilihat dari kondisi topografi, klimatologi, hidrologi, geologi, jenis tanah, serta flora dan fauna. Kondisi fisik ini memberikan pengaruh terhadap kondisi tutupan lahan dan kegiatan yang berkembang di wilayah perbatasan Jabar-Jateng.

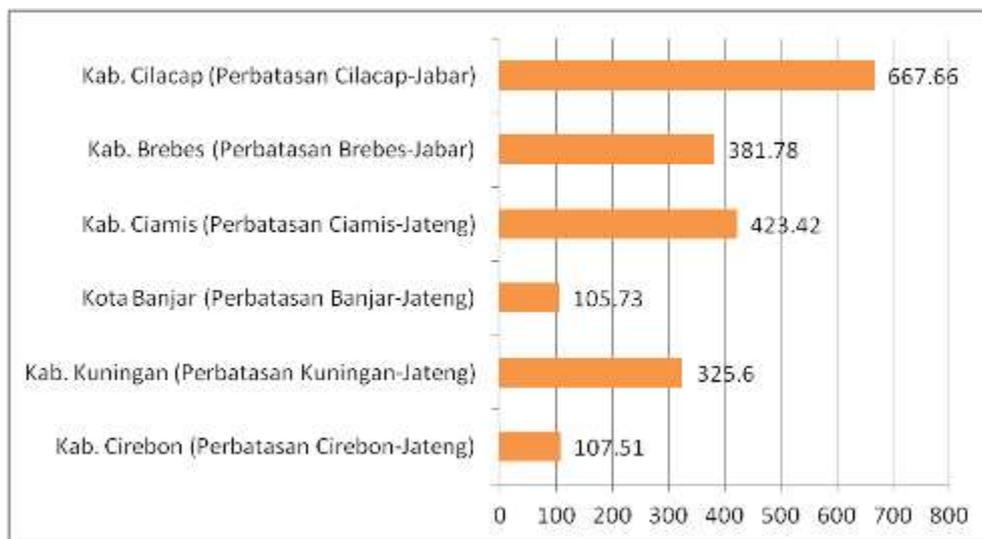
Tabel 4-1 Luas Kecamatan di Kawasan Perbatasan Jabar-Jateng

No	Wilayah	Luas Wilayah (km ²)
I	Kab. Cirebon (Perbatasan Cirebon-Jateng)	107.51
	Kec. Pasaleman	32.11
	Kec. Ciledug	12.25
	Kec. Losari	39.07
	Kec. Pabedilan	24.08
II	Kab. Kuningan (Perbatasan Kuningan-Jateng)	325.60
	Kec. Subang	47.58
	Kec. Cilebak	42.50
	Kec. Ciwaru	52.17
	Kec. Karagkencana	65.35
	Kec. Cibingbin	70.91
	Kec. Cibeureum	47.09
III	Kota Banjar (Perbatasan Banjar-Jateng)	105.73
	Kec. Purwaharja	18.27
	Kec. Pataruman	54.05
	Kec. Langensari	33.41
IV	Kab. Ciamis (Perbatasan Ciamis-Jateng)	423.42
	Kec. Kalipucang	136.78
	Kec. Lakkok	55.53
	Kec. Cisaga	60.40
	Kec. Tambaksari	64.31
	Kec. Purwadadi	43.37
	Kec. Mangunjaya	63.03
V	Kab. Brebes (Perbatasan Brebes-Jabar)	381.78
	Kec. Salem	152.09
	Kec. Banjarharjo	140.26
	Kec. Losari	89.43
VI	Kab. Cilacap (Perbatasan Cilacap-Jabar)	667.66
	Kec. Dayeuhluhur	185.06
	Kec. Wanareja	189.73
	Kec. Kedungreja	71.43

	Kec. Patimuan	75.3
	Kec. Kumpunglaut	146.14
	Kawasan Perbatasan Jabar-Jateng	2,011.70

Sumber:

1. Kab. Cirebon Dalam Angka, 2013
2. Kab. Kuningan Dalam Angka, 2013
3. Kab. Ciamis Dalam Angka, 2013
4. Kota Banjar Dalam Angka, 2013
5. Kab. Brebes Dalam Angka, 2013
6. Kab. Cilacap Dalam Angka, 2013



Sumber: Kab. Cirebon Dalam Angka, 2013; Kab. Kuningan Dalam Angka, 2013; Kab. Ciamis Dalam Angka, 2013; Kota Banjar Dalam Angka, 2013; Kab. Brebes Dalam Angka, 2013; Kab. Cilacap Dalam Angka, 2013.

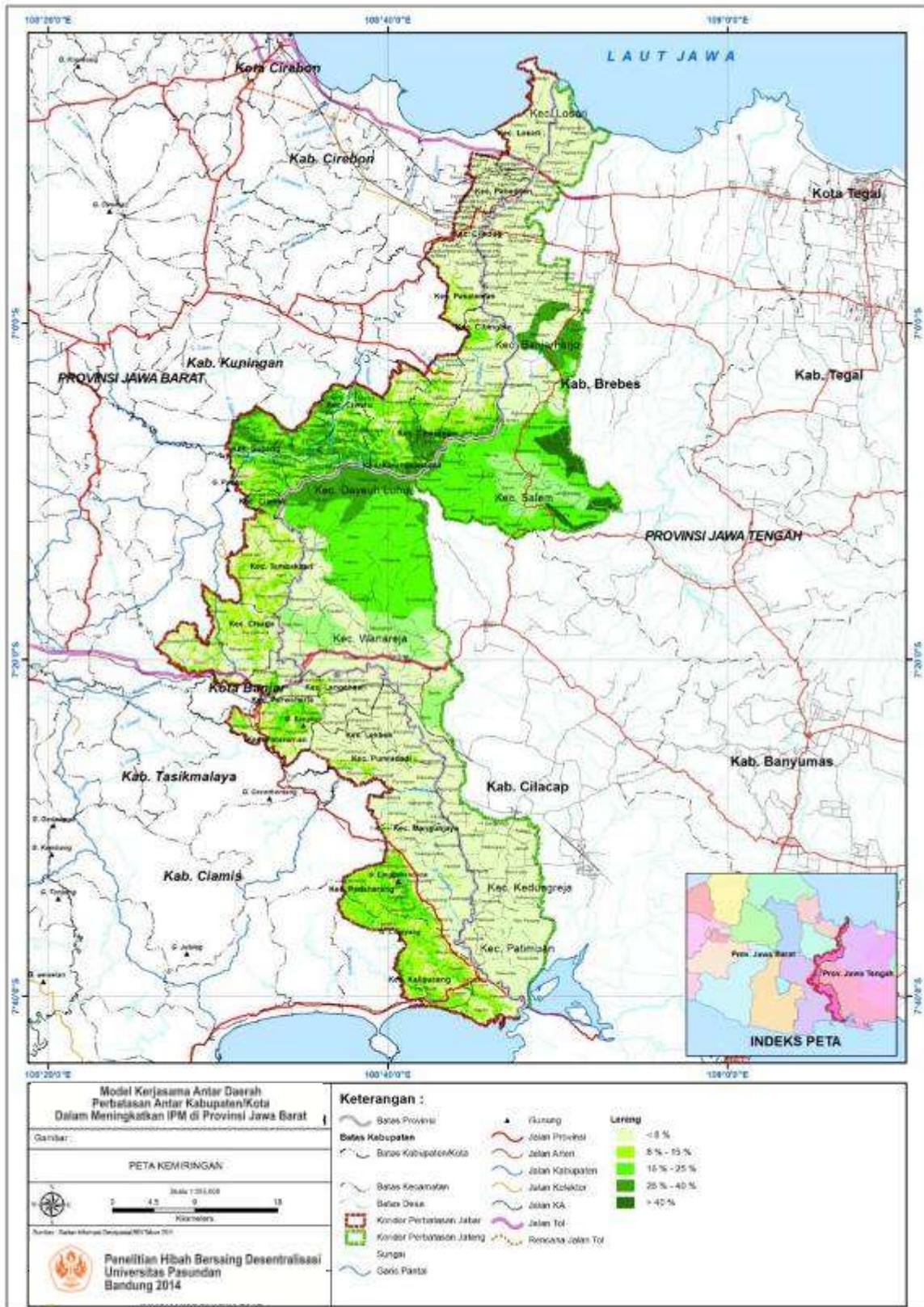
Gambar 4-1 Luas Kawasan Perbatasan Jabar-Jateng (km²) Dirinci Per Kabupaten/Kota

1. Topografi

Bentang alam kawasan perbatasan Jabar-Jateng di Provinsi Jawa Barat terdiri dari karakteristik daerah pantai di bagian utara dan selatan, sedangkan bagian tengah berupa daerah dataran dan perbukitan. Morfologi berupa dataran rendah dengan ketinggian antara 0-12 m di atas permukaan laut terdapat di bagian utara yaitu Kecamatan Losari, Ciledug, dan Pabedilan Kabupaten Cirebon, sedangkan Kecamatan Pasaleman di Kabupaten Cirebon berada pada ketinggian di atas 12 m dpl. Topografi kawasan perbatasan yang termasuk Kabupaten Kuningan merupakan dataran dengan ketinggian antara 120-222 m dpl. Sementara itu, Kecamatan Pataruman dan Purwahrja di Kota Banjar pada umumnya berada pada ketinggian 100 m dpl, sedangkan Kecamatan Langensari berada pada ketinggian kurang dari 25 m dpl. Begitu pula halnya dengan

kondisi fisiografi di Kecamatan Lakbok dan Padaherang Kabupaten Ciamis memiliki ketinggian lahan 0-25 m dpl, sedangkan kawasan perbatasan lainnya yang terdapat di Kabupaten Ciamis berada pada ketinggian antara 25-1.000 m dpl.

Karakteristik fisik berdasarkan kemiringan di pantai utara lebih landai dibandingkan dengan karakteristik pantai selatan. Kemiringan lereng di wilayah studi pada umumnya berkisar antara 0-2% dan 0-8%. Namun demikian, pada kawasan lainnya yang berupa perbukitan cenderung memiliki kemiringan lahan di atas 8%.



Gambar 4-2 Peta Topografi di Kawasan Perbatasan Provinsi Jawa Barat-Jawa Tengah

3. Klimatologi

Kondisi iklim di wilayah perbatasan Jabar-Jateng termasuk beriklim tropis. Jumlah hari hujan di Kecamatan Losari, Pabedilan, Ciledug, dan Pasaleman rata-rata sebesar 12 hari hujan dengan curah hujan rata-rata 2.504 mm. Jumlah hari hujan di Kabupaten Kuningan secara umum mencapai 156 hari dengan curah hujan mencapai 2995 mm per tahun. Adapun rata-rata curah hujan di Kota Banjar dalam setahun mencapai 4900 mm pada tahun 2010 dan jumlah hari hujan 177 hari. Curah hujan tertinggi terjadi pada Bulan Januari dan Desember. Kondisi iklim di kawasan perbatasan yang termasuk Kabupaten Ciamis memiliki jumlah hari hujan rata-rata sebesar 161 hari dengan curah hujan rata-rata sekitar 2.551 mm.

4. Hidrologi

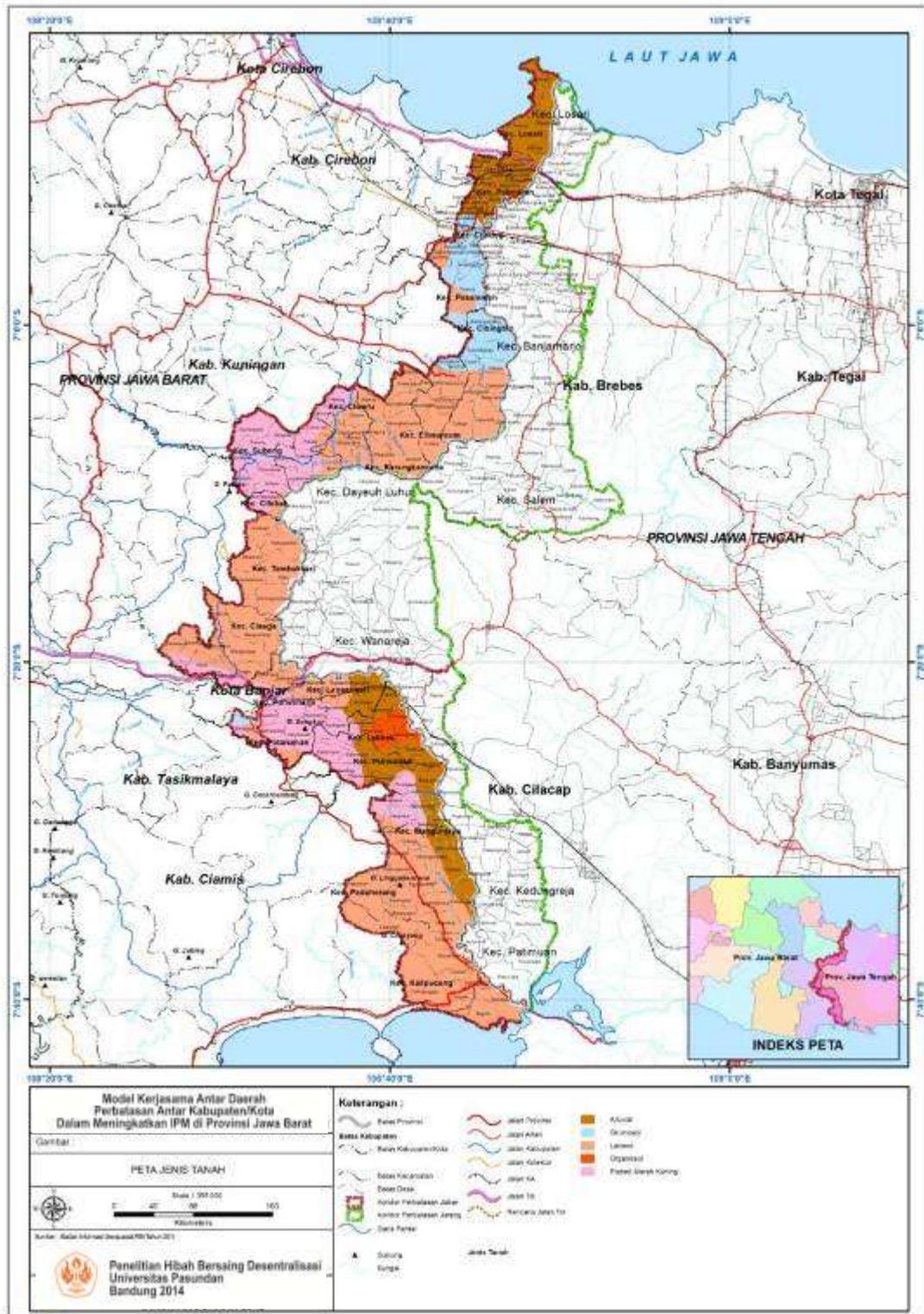
Pada bagian utara kawasan perbatasan Jabar-Jateng, tepatnya di Kecamatan Losari, Pabedilan, Ciledug, dan Pasaleman Kabupaten Cirebon ini dilalui oleh salah satu sungai besar yaitu Sungai Cisanggarung. Begitu pula halnya dengan kawasan perbatasan yang termasuk di Kabupaten Kuningan dilalui oleh Sungai Cisanggarung.

Secara umum, kawasan perbatasan Jabar-Jateng yang berada di Kota Banjar dan Kabupaten Ciamis, secara hidrologi dilalui oleh Sungai Citanduy yang merupakan salah satu sungai besar dan merupakan bagian dari DAS utara Sungai Citanduy yang bermuara di Sagara Anakan. Sungai ini mengalir melalui Sukadana lalu ke kecamatan-kecamatan di Kota Banjar hingga menerus sampai ke Kecamatan Kalipucang dan menjadi pembatas antara Kabupaten Ciamis dengan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah. Keberadaan sungai-sungai besar dan anak sungainya dimanfaatkan sebagai sumber mata air dan sumber air baku.

5. Geologi dan Jenis Tanah

Kondisi geologi di wilayah Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis terbentuk oleh struktur geologi yang didominasi oleh endapan gunung api tua disertai gunung api muda, formasi tapak, formasi halang, breksi gunung api Galunggung, aluvium, lalu ke selatan hingga ke Kalipucang berupa batu gamping. Kondisi geologi turut mempengaruhi kondisi jenis tanah di wilayah studi. Kabupaten Kuningan memiliki tanah yang subur yang berasal dari endapan vulkanis. Sementara itu, tingkat kesuburan tanah di Kota Banjar tergolong baik

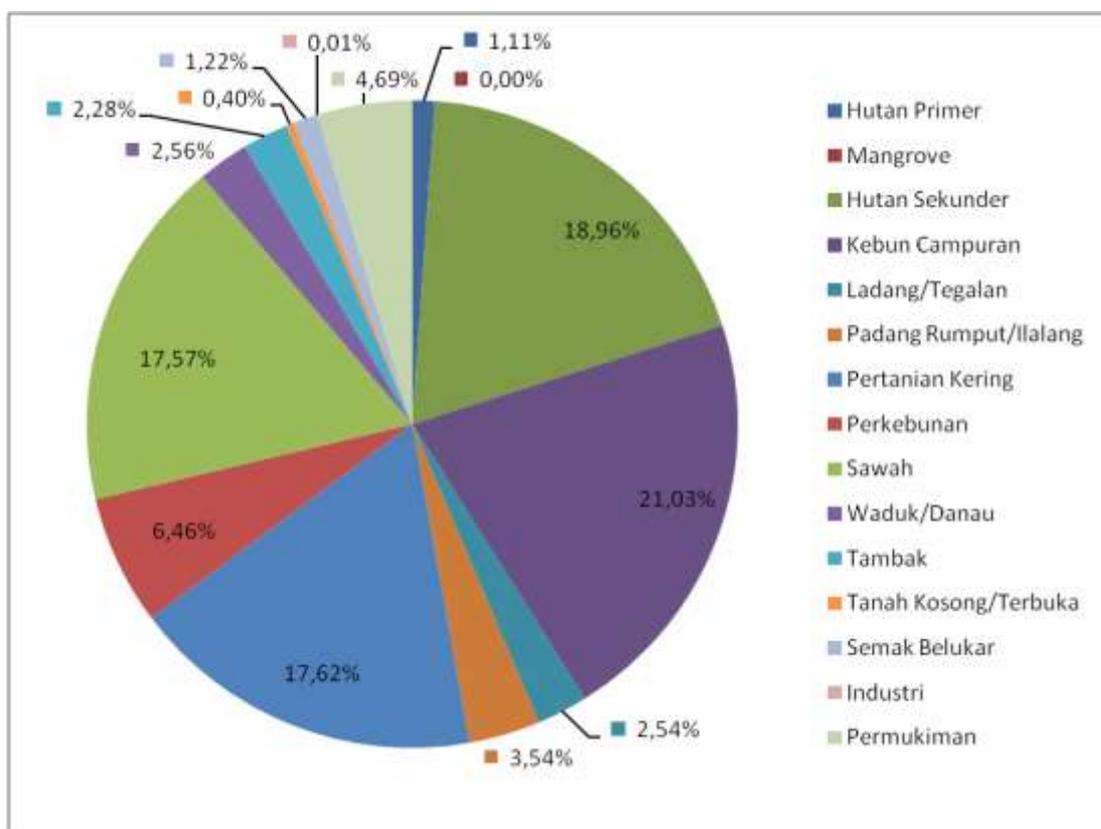
dengan tekstur tanah sebagian besar halus dengan jenis tanah aluvial, sedangkan di Kecamatan Langensari jenis tanahnya berupa jenis podsolik merah kuning.



Gambar 4-6 Peta Jenis Tanah di Kawasan Perbatasan Provinsi Jawa Barat-Jawa Tengah

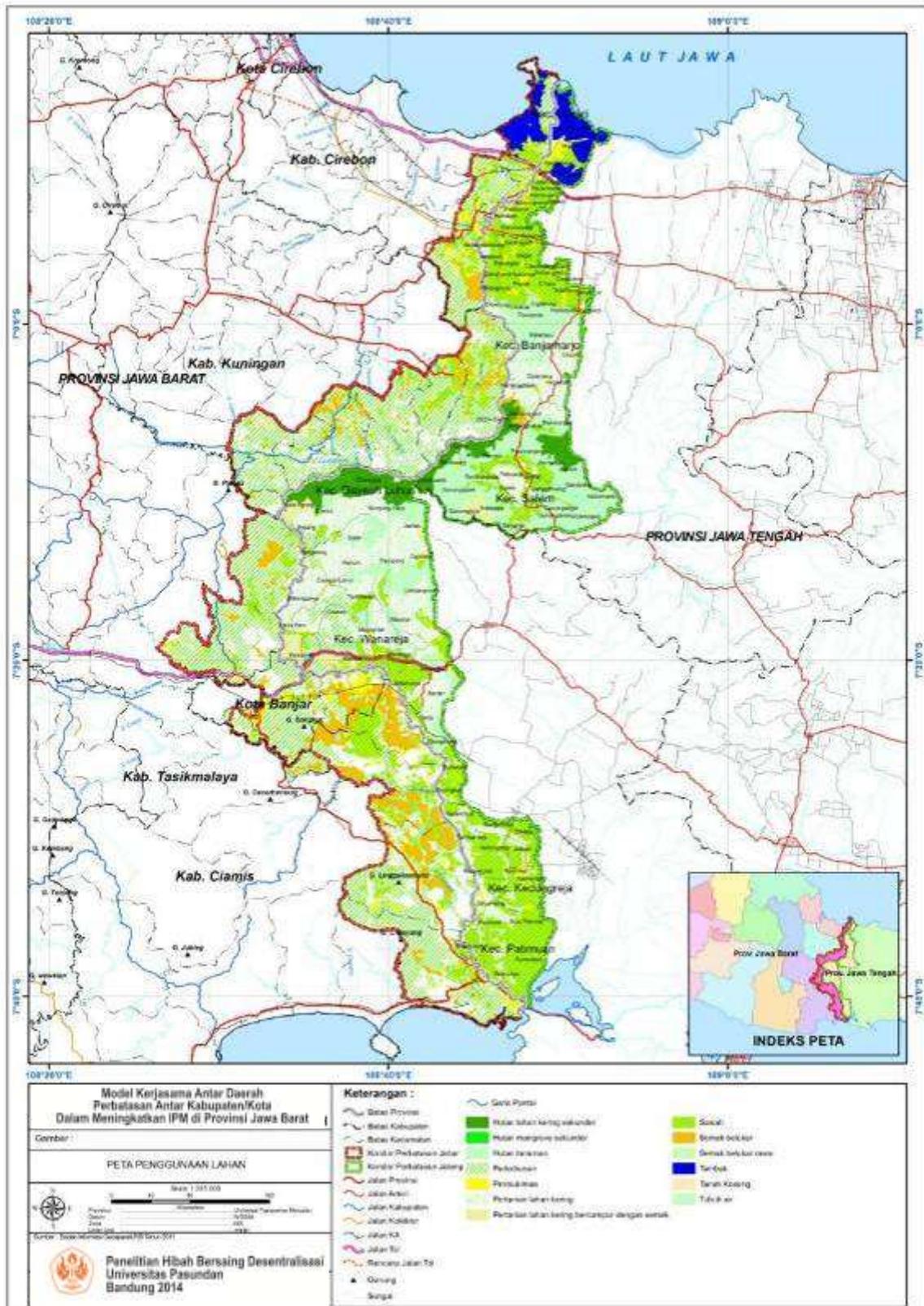
B. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kawasan Perbatasan Jabar-Jateng pada tahun 2005 yang bersumber dari perhitungan Arc GIS pada data RTRW Provinsi Jawa Barat dan RTRW Provinsi Jawa Tengah. Hasil identifikasi bahwa penggunaan lahan di Kawasan Perbatasan Jabar-Jateng didominasi oleh jenis penggunaan lahan sebagai kebun campuran seluas 423,11 km², hutan sekunder seluas 381,48 km², pertanian lahan kering seluas 354,53 km² yang dominan di Kawasan Perbatasan Jateng, dan sawah seluas 353,53 km². Sedangkan, untuk kawasan permukiman di Kawasan Perbatasan Jabar-Jateng, dapat diidentifikasi seluas 94,45 km².



Sumber: Penghitungan GIS, Peta RTRW Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah

Gambar 4-47 Proporsi Penggunaan Lahan di Kawasan Perbatasan Jabar-Jateng Tahun 2005



Gambar 4-8 Peta Penggunaan Lahan di Kawasan Perbatasan Provinsi Jawa Barat-Jawa Tengah

Tabel 4-2 Luas Jenis Penggunaan Lahan (km²) di Kawasan Perbatasan Jabar-Jateng Tahun 2005

No	Wilayah	Ruang Non-Terbangun													Ruang Terbangun		Total Luas Wilayah
		Hutan Primer	Mangv	Hutan Skndr	Kebun Camp	Ladang/ Tegalan	Padang Rumput/ Ilalang	Pertan Kering	Perkeb	Sawah	Waduk/ Danau	Tambak	Tanah Kosong/ Terbuka	Semak Belukar	Indus	Peremuk	
1	Kabupaten Cirebon	0,00	0,00	0,88	41,37	3,25	3,79	0,00	12,39	17,79	0,00	17,27	0,48	0,00	0,00	10,30	107,51
	a Kec. Pasaleman	0,00	0,00	0,00	16,59	2,37	3,79	0,00	2,48	3,83	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00	2,57	32,11
	b Kec. Ciledug	0,00	0,00	0,00	4,83	0,12	0,00	0,00	1,82	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,03	12,25
	c Kec. Losari	0,00	0,00	0,32	4,92	0,19	0,00	0,00	5,71	8,48	0,00	17,27	0,00	0,00	0,00	2,18	39,07
	d Kec. Pabedilan	0,00	0,00	0,55	15,02	0,57	0,00	0,00	2,39	3,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,52	24,08
2	Kabupaten Kuningan	22,31	0,00	22,76	168,52	30,70	0,03	0,00	41,53	26,84	2,40	0,00	5,92	0,36	0,23	4,01	325,60
	a Kec. Subang	0,00	0,00	8,14	28,89	0,85	0,00	0,00	5,11	1,43	0,54	0,00	1,87	0,00	0,00	0,75	47,58
	b Kec. Cilebak	2,59	0,00	5,53	25,01	1,44	0,03	0,00	3,88	0,92	1,27	0,00	1,35	0,00	0,00	0,48	42,50
	c Kec. Ciwaru	4,05	0,00	1,96	25,34	12,31	0,00	0,00	5,38	1,33	0,00	0,00	1,26	0,20	0,00	0,34	52,17
	d Kec. Karangkencana	6,72	0,00	4,85	37,67	2,20	0,00	0,00	8,18	3,85	0,00	0,00	1,19	0,16	0,05	0,48	65,35
	e Kec. Cibingbin	4,79	0,00	2,25	34,56	9,60	0,00	0,00	7,14	10,48	0,58	0,00	0,00	0,00	0,18	1,33	70,91
	f Kec. Cibeureum	4,16	0,00	0,03	17,04	4,30	0,00	0,00	11,84	8,83	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	0,63	47,09
3	Kota Banjar	0,00	0,00	15,45	35,86	3,77	12,66	0,00	14,86	6,59	2,73	0,00	0,85	0,00	0,00	12,96	105,73
	a Kec. Purwaharja	0,00	0,00	4,63	7,59	0,53	0,00	0,00	1,45	0,65	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	18,27
	b Kec. Pataruman	0,00	0,00	6,65	21,76	1,98	1,64	0,00	12,46	2,57	1,44	0,00	0,17	0,00	0,00	5,38	54,05
	c Kec. Langensari	0,00	0,00	4,17	6,51	1,26	11,02	0,00	0,94	3,37	0,78	0,00	0,68	0,00	0,00	4,68	33,41
4	Kab. Ciamis	0,00	0,00	63,60	177,37	13,46	54,65	0,00	31,16	62,98	4,80	0,27	0,66	1,58	0,02	12,87	423,42
	a Kec. Kalipucang	0,00	0,00	24,10	78,61	4,13	0,00	0,00	7,71	13,56	2,17	0,27	0,06	0,00	0,00	6,18	136,78
	b Kec. Lakbok	0,00	0,00	7,96	8,60	0,00	20,56	0,00	0,89	13,74	0,75	0,00	0,45	0,24	0,00	2,35	55,53
	c Kec. Cisaga	0,00	0,00	11,59	27,86	0,63	0,51	0,00	13,51	3,25	0,28	0,00	0,00	0,00	0,02	2,75	60,40
	d Kec. Tambaksari	0,00	0,00	0,71	42,92	6,40	0,00	0,00	6,63	7,30	0,16	0,00	0,09	0,00	0,00	0,10	64,31

	e	Kec. Purwadadi	0,00	0,00	14,79	9,17	0,40	3,67	0,00	2,16	11,12	0,70	0,00	0,06	0,00	0,00	1,29	43,37
	f	Kec. Mangunjaya	0,00	0,00	4,45	10,20	1,89	29,92	0,00	0,26	14,01	0,74	0,00	0,00	1,34	0,00	0,21	63,03
5		Kabupaten Brebes	0,00	0,00	149,58	0,00	0,00	0,00	62,51	0,00	91,57	2,66	28,34	0,00	2,86	0,00	44,26	381,78
	a	Kec. Salem	0,00	0,00	112,02	0,00	0,00	0,00	15,74	0,00	22,71	0,38	0,00	0,00	0,13	0,00	1,10	152,09
	b	Kec. Banjarharjo	0,00	0,00	37,56	0,00	0,00	0,00	40,67	0,00	27,37	1,54	0,00	0,00	2,73	0,00	30,39	140,26
	c	Kec. Losari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,09	0,00	41,49	0,73	28,34	0,00	0,00	0,00	12,77	89,43
6		Kab. Cilacap	0,00	0,00	129,21	0,00	0,00	0,00	292,02	30,04	147,72	38,86	0,00	0,08	19,69	0,00	10,04	667,66
	a	Kec. Dayeuhluhur	0,00	0,00	50,30	0,00	0,00	0,00	102,40	21,76	6,54	2,25	0,00	0,08	0,00	0,00	1,73	185,06
	b	Kec. Wanareja	0,00	0,00	39,78	0,00	0,00	0,00	94,68	8,27	39,84	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4,46	189,73
	c	Kec. Kedungreja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,22	0,00	47,21	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17	71,43
	d	Kec. Patimuan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	54,00	2,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1,68	75,30
	e	Kec. Kampunglaut	0,00	0,00	39,13	0,00	0,00	0,00	56,73	0,00	0,13	30,45	0,00	0,00	19,69	0,00	0,01	146,14
		Perbatasan Jabar-Jateng	22,31	0,00	381,48	423,11	51,18	71,13	354,53	129,97	353,49	51,44	45,88	7,99	24,50	0,25	94,45	2.011,70

Sumber: Penghitungan GIS, Peta RTRW Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah

Pola pemanfaatan ruang kawasan di wilayah perbatasan Jabar-Jateng pada umumnya berupa lahan tidak terbangun. Berdasarkan pola penggunaan lahannya, wilayah perbatasan Jabar-Jateng didominasi oleh lahan kebun campuran, pertanian lahan basah, perkebunan, dan hutan. Pengembangan pola pemanfaatan ruang di kawasan perbatasan Jabar-Jateng bertipe kawasan agraris yang memiliki ciri khas sebagai kawasan pertanian yang dibatasi oleh wilayah konservasi, hutan, lahan kritis di kawasan DAS, serta kawasan lindung di perbatasan antar provinsi pantai di wilayah yang berbatasan dengan laut. Pola pemanfaatan ruang yang diusahakan masyarakat sebagai mata pencaharian yang mendukung sistem ekonomi kawasan antara lain kawasan hutan produksi, lahan perkebunan rakyat atau perkebunan negara, lahan pertanian sawah (lahan basah), kawasan perikanan tambak, kawasan kebun campuran yang diusahakan masyarakat untuk budidaya sayuran, buah-buahan, dan sebagainya. Adapun pemanfaatan lahan terbangun berupa kawasan permukiman (perkotaan dan perdesaan) yang juga dilengkapi dengan penggunaan lahan untuk industri. Kondisi fisik tanah yang subur termasuk aspek bentang alam dengan kemiringan dan ketinggian yang relatif cocok untuk kegiatan pembangunan cukup mendukung untuk kegiatan pertanian serta berbagai penggunaan lainnya.

Tabel 4-3 Persentase Luas Penggunaan Lahan di Wilayah Perbatasan Jabar-Jateng

No.	Penggunaan Lahan	Luas Lahan (%)	
		Jabar	Jateng
1	Hutan Primer	2,32	0
2	Mangrove	0	0
3	Hutan Sekunder	10,67	26,57
4	Kebun Campuran	43,97	0
5	Ladang / Tegalan	5,32	0
6	Padang Runput	7,39	0
7	Pertanian Kering	0	33,78
8	Perkebunan	10,39	2,86
9	Sawah	11,87	22,8
10	Waduk / Danau	1,03	3,96
11	Tambak	1,82	2,7
12	Tanah Kosong	0,82	0,01
13	Semak	0,2	2,15
14	Industri	0,03	0
15	Permukiman	4,17	5,17

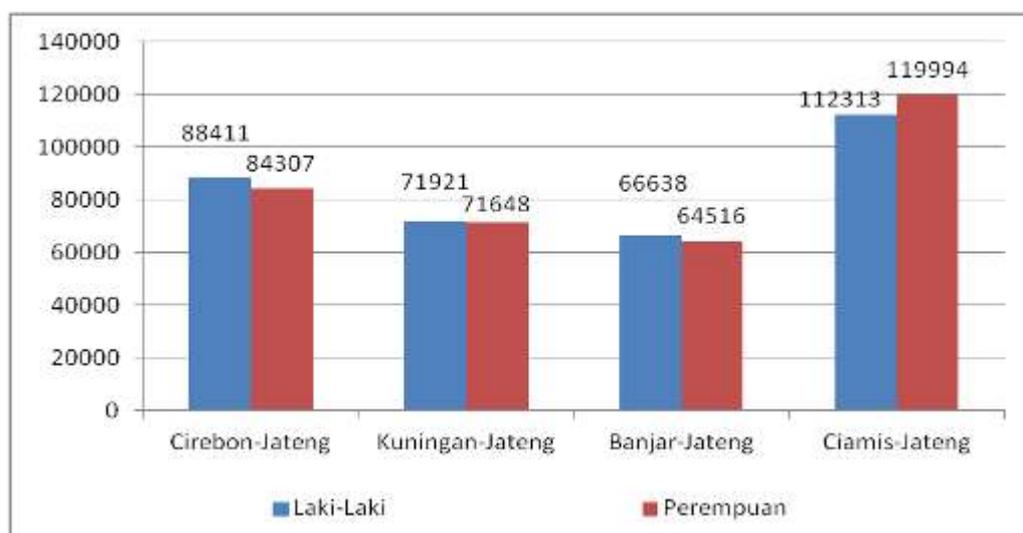
Sumber: Hasil Perhitungan GIS, 2013.

C. Kependudukan

Karakteristik kependudukan dan sosial budaya memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan dan perkembangan wilayah. Jumlah penduduk dengan kondisi sosial budaya yang terbentuk didalamnya menjadi aktor dan subjek dalam pembangunan kawasan. Tingkat perkembangan penduduk baik kuantitas maupun kualitas akan memberikan pengaruh terhadap perubahan pola pergerakan, tingkat kebutuhan sarana dan prasarana, juga sebagai penggerak roda perekonomian, serta memiliki peran penting dalam penguatan kelembagaan guna pemerataan pembangunan.

Karakteristik kependudukan dan sosial budaya di kawasan strategis perbatasan (KSP) Jabar-Jateng ini ditinjau dari jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, umur, agama, tingkat pendidikan, dan mata pencaharian, serta kondisi sosial budaya masyarakat dalam mendukung pembangunan. Hal ini mencerminkan profil kegiatan masyarakat di wilayah perbatasan dan menggambarkan pola sebaran dan interaksi penduduk antar wilayah di lokasi perbatasan.

Jumlah penduduk yang berada di kawasan perbatasan Jabar-Jateng mencapai 1,262,330 jiwa pada tahun 2010 atau naik sebesar 0,84% dari tahun 2008. Penduduk laki-laki sebanyak 631,658 jiwa lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan yang mencapai 630,672 jiwa. Kepadatan penduduk rata-rata di wilayah perbatasan Jabar-Jateng relatif rendah sebesar 627 jiwa/km². Berdasarkan data jumlah penduduk di wilayah perbatasan Jabar-Jateng, wilayah yang memiliki paling banyak penduduk terdapat di wilayah perbatasan Kabupaten Ciamis, Kabupaten Brebes dan Kabupaten Cilacap.

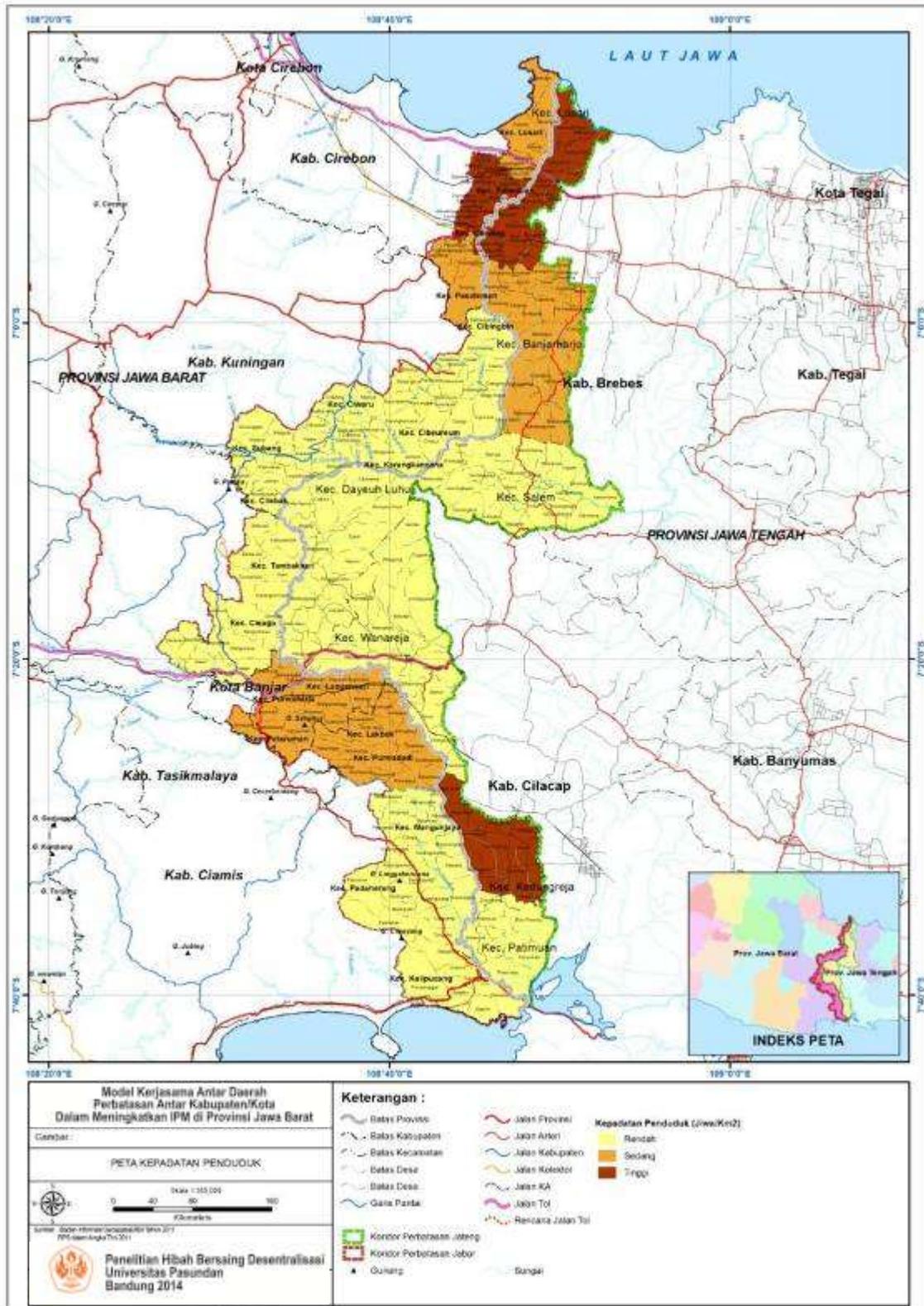


Gambar 4-6 Grafik Jumlah Penduduk (jiwa) di Kawasan Perbatasan Jabar-Jateng Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4-4 Jumlah Penduduk (jiwa) Kawasan Perbatasan Jabar-Jateng Berdasarkan Jenis Kelamin dirinci Per Kecamatan Tahun 2013

No	Wilayah	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Penduduk (jiwa)		
			Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
I	(Perbatasan Cirebon-Jateng)	107.51	88,411	84,307	172,718
	Kec. Pasaleman	32.11	12,554	12,414	24,968
	Kec. Ciledug	12.25	21,297	20,877	42,174
	Kec. Losari	39.07	28,046	26,055	54,101
	Kec. Pabedilan	24.08	26,514	24,961	51,475
II	(Perbatasan Kuningan-Jateng)	325.60	71,921	71,648	143,569
	Kec. Subang	47.58	8,694	8,645	17,339
	Kec. Cilebak	42.50	6,210	6,192	12,402
	Kec. Ciwaru	52.17	15,886	16,023	31,909
	Kec. Karagkencana	65.35	10,270	10,074	20,344
	Kec. Cibingbin	70.91	20,511	20,150	40,661
	Kec. Cibeureum	47.09	10,350	10,564	20,914
III	(Perbatasan Banjar-Jateng)	105.73	66,638	64,516	131,154
	Kec. Purwaharja	18.27	10,743	10,199	20,942
	Kec. Pataruman	54.05	28,238	27,430	55,668
	Kec. Langensari	33.41	27,657	26,887	54,544
IV	(Perbatasan Ciamis-Jateng)	423.42	112,313	119,994	232,307
	Kec. Kalipucang	136.78	20,397	20,349	40,746
	Kec. Lakbok	55.53	29,936	29,672	59,608
	Kec. Cisaga	60.40	19,485	20,244	39,729
	Kec. Tambaksari	64.31	11,477	12,011	23,488
	Kec. Purwadadi	43.37	20,116	20,857	40,973
	Kec. Mangunjaya	63.03	10,902	16,861	27,763
V	(Perbatasan Brebes-Jabar)	381.78	149,384	147,269	296,653
	Kec. Salem	152.09	28,313	28,735	57,048
	Kec. Banjarharjo	140.26	59,630	59,313	118,943
	Kec. Losari	89.43	61,441	59,221	120,662
VI	(Perbatasan Cilacap-Jabar)	667.66	142,991	142,938	285,929
	Kec. Dayeuhluhur	185.06	24,106	24,502	48,608
	Kec. Wanareja	189.73	47,495	47,644	95,139
	Kec. Kedungreja	71.43	40,253	39,888	80,141
	Kec. Patimuan	75.3	22,471	22,749	45,220
	Kec. Kampunglaut	146.14	8,666	8,155	16,821
	Kawasan Perbatasan Jabar-	2,011.70	631,658	630,672	1,262,330

Sumber: Kab. Cirebon Dalam Angka, 2013; Kab. Kuningan Dalam Angka, 2013; Kab. Ciamis Dalam Angka, 2013; Kota Banjar Dalam Angka, 2013; Kab. Brebes Dalam Angka, 2013; Kab. Cilacap Dalam Angka, 2013.



Gambar 4-9 Peta Kepadatan Penduduk di Kawasan Perbatasan Prov. Jawa Barat-Jawa Tengah

D. Sarana dan Prasarana Kawasan

Ketersediaan sarana dan prasarana merupakan faktor yang sangat penting dalam perkembangan wilayah. Sarana pendukung kegiatan masyarakat terdiri dari sarana pendidikan, kesehatan, peribadatan, perdagangan dan jasa, perumahan, pemerintahan, dan sebagainya. Sedangkan prasarana wilayah meliputi infrastruktur transportasi, sumber daya air dan irigasi, telekomunikasi, listrik dan energi serta sarana dan prasarana dasar permukiman juga memiliki peran yang penting bagi peningkatan perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat. Namun demikian, secara umum kualitas dan cakupan pelayanan sarana dan prasarana wilayah di kawasan perbatasan Jabar-Jateng masih rendah dan belum merata.

Pada aspek transportasi yang terdiri dari transportasi perbatasan antar kabupaten/kota, udara dan laut, rendahnya kualitas dan cakupan pelayanan antara lain dicirikan dengan rendahnya nilai indeks aksesibilitas dan mobilitas rata-rata jaringan jalan dibandingkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk jaringan jalan provinsi; belum optimalnya kemantapan jalan provinsi terutama di jalur jalan vertikal yang menghubungkan wilayah tengah dan selatan Jawa Barat; masih kurangnya pembangunan jalan tol; kurangnya penyediaan angkutan massal dan jaringan jalan rel terutama di kawasan perkotaan; belum optimalnya kondisi dan penataan sistem hirarki terminal sebagai tempat pertukaran moda; belum optimalnya pelayanan bandar udara dalam melayani penerbangan komersial; serta masih terbatasnya fungsi Pelabuhan Cirebon sebagai pelabuhan niaga.

Tabel 4-5 Jumlah Sarana Pendidikan dan Sarana Kesehatan di Kawasan Perbatasan Jabar-Jateng Tahun 2013

No.	Kabupaten	Kecamatan	Sarana Pendidikan					Sarana Kesehatan				
			TK	SD	SMP	SMU	PT	Puskesmas	Pustu	Pusling	Posyandu	RS
1	Cirebon	1 Losari	4	33	5	2	0	2	0	5	0	0
		2 Pabedilan	2	27	2	1	0	2	1	1	0	0
		3 Ciledug	0	22	5	2	0	1	1	3	0	0
		4 Pasaleman	2	13	2	0	0	1	0	5	0	0
2	Kuningan	5 Cibingbin	7	12	1	0	0	9	0	0	34	0
		6 Cibeureum	7	23	2	1	0	10	0	0	27	0
		7 Karangkencana	7	16	2	1	0	9	0	0	25	0
		8 Ciwaru	3	12	2	0	0	11	0	0	47	0
		9 Cilebak	6	16	3	1	0	8	0	0	15	0
		10 Subang	7	16	2	0	0	11	0	0	23	0
3	Kota Banjar	11 Purwaharja	6	9	1	0	0	2	2	2	22	0
		12 Pataruman	9	31	4	0	0	3	3	3	48	0
		13 Langensari	2	30	6	2	1	2	1	2	53	0
4	Ciamis	14 Tambaksari	10	21	2	0	0	1	3	0	38	0
		15 Cisaga	17	25	3	1	0	1	4	1	51	0
		16 Lakbok	4	31	3	1	0	2	2	2	48	0
		17 Purwadadi	5	24	4	0	0	1	3	1	40	0
		18 Mangunjaya	5	20	2	1	0	1	2	1	31	0
		19 Padaherang	15	43	7	0	0	2	3	2	81	0
		20 Kalipucang	7	31	3	1	0	1	5	1	41	0
TOTAL JUMLAH KSP			125	455	61	14	1	80	30	29	624	0

Sumber: Kabupaten Dalam Angka, 2013

Keberadaan infrastruktur sumber daya air dan irigasi juga masih belum memadai, yang dicirikan dengan masih tingginya fluktuasi ketersediaan air permukaan yang menimbulkan banjir dan kekeringan; masih terbatasnya penyediaan air baku untuk berbagai kebutuhan, serta belum optimalnya intensitas penanaman padi akibat rendahnya layanan jaringan dan penyediaan air irigasi.

Adapun cakupan layanan untuk infrastruktur telekomunikasi belum bisa menjangkau setiap pelosok wilayah, dicirikan dengan adanya beberapa wilayah yang belum terlayani. Khusus untuk layanan jasa telepon kabel, beberapa daerah perkotaan pada tahun 2005 angka teledensitasnya sudah tinggi, sedangkan untuk beberapa daerah perkotaan dan kabupaten kondisi teledensitasnya masih rendah.

Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana permukiman seperti, perumahan dan cakupan layanan air bersih masih sangat rendah dicirikan dengan masih banyaknya rumah tangga yang belum bisa memiliki rumah layak huni di perkotaan dan di perdesaan. Keberadaan prasarana persampahan juga masih belum optimal baik yang layanannya bersifat lokal maupun regional.

4.2 Arahan Kebijakan

A. Arahan Kebijakan Nasional

Arah kebijakan nasional terkait pada daerah perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan dan peningkatan fungsi PKN Cirebon dalam pembangunan tahap pertama nasional
2. pengembangan PKW Pangandaran sebagai pengembangan kawasan baru dalam pembangunan tahap kedua nasional
3. Pengembangan dan peningkatan fungsi PKN Cilacap dalam pembangunan tahap pertama nasional
4. Pembangan Jaringan Jalan Bebas Hambatan Jalan Tol Kanci-Pejagan
5. Pemantapan Pelabuhan Tanjung Intan menjadi pelabuhan internasional
6. Konservasi sumberdaya air, pendayagunaan sumberdaya alam dan pengendalian daya rusak air di Wlayah Sungai Citanduy pada lintas Provinsi Jawa Barat-Jawa Tengah
7. Konservasi sumberdaya air, pendayagunaan sumberdaya alam dan pengendalian daya rusak air di Wlayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung di Provinsi Jawa Barat sebagai kawasan strategis nasional
8. Rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Pangandaran – Kalipucang - Segara Anakan - Nusakambangan

Adapun arahan kebijakan nasional terkait Kawasan Perbatasan Jabar-Jateng dalam Rencana Pulau Jawa-Bali adalah sebagai berikut :

1. Sistem Perkotaan Nasional

Kawasan perbatasan Jabar-Jateng dalam konteks system perkotaan nasional dalam RTR Jawa Bali adalah ditetapkannya Pusat Kegiatan Nasional yaitu PKN Cirebon dan PKN Cilacap. Adapun strategi operasionalisasi perwujudan system perkotaan nasional Kawasan Perbatasan Jabar-Jateng dalam RTR Pulau Jawa-Bali, dapat dilihat pada **Tabel 4-8** berikut ini.

Tabel 4-6 Strategi Operasionalisasi Perwujudan System Perkotaan Nasional Kawasan Perbatasan Jabar-Jateng Dalam RTR Pulau Jawa-Bali

No	Strategi Operasionalisasi	Sistem Perkotaan	
		PKN Cirebon	PKN Cilacap
1	Pengendalian perkembangan fisik PKN untuk menjaga lahan pertanian tanaman pangan	v	v
2	Pengembangan PKN melalui peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan	v	v
3	Pengembangan perkembangan PKN melalui optimalisasi pemanfaatan Ruang secara kompak dan vertical sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan	v	v
4	Pengendalian perkembangan PKN di kawasa rawan bencana :		
	a. Gelombang pasang	v	
	b. Banjir	v	v
	c. Gempabumi		v
	d. Tsunami		v
	e. Abrasi	v	
5	Pengembangan PKN sebagai pusat kegiatan industri kreatif yang berdaya saing dan ramah lingkungan	v	v
6	Pengembangan PKN sebagai pusat industri pengolahan MIGAS ramah lingkungan	v	v
7	Pengembangan PKN melalui peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan yang ramah lingkungan	v	v
8	Pengembangan PKN sebagai pusat pariwisata agar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran :		
	a. Pusat pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan	v	
	b. Pusat pariwisata bahari	v	v
9	Pengembangan PKN dengan konsep kota hijau yang hemat energy, air, lahan dan minim limbah	v	v

Sumber: Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2012

2. Sistem Jaringan Transportasi Nasional

Strategi operasionalisasi perwujudan system jaringan transportasi nasional di Kawasan Perbatasan Jabar-Jateng dalam RTR Pulau Jawa-Bali adalah sebagai berikut :

- a. Sistem Jaringan Transportasi Perbatasan antar kabupaten/kota

Strategi operasionalisasi perwujudan system jaringan transportasi perbatasan antar kabupaten/kota terdiri dari :

1) Perwujudan Jaringan Jalan Nasional

- a) Memantapkan jaringan jalan arteri primer dan jaringan jalan kolektor primer pada jaringan **Jalan Lintas Utara Pulau Jawa** (yang menghubungkan Merak – Cilegon – Serang – Tangerang – Jakarta – Bekasi – Karawang – Cikampek – Pamanukan – Lohbener – Palimanan – **Cirebon – Losari – Brebes** – Tegal – Pemalang – Pekalongan – Batang – Kendal – Semarang – Demak – Kudus – Pati – Tembang – Bulu – Tuban – Widang – Lamongan – Gresik – Surabaya – Waru – Sidoarjo – Pasuruan – Probolinggo – Situbondo – Ketapang - Banyuwangi) dan jaringan **Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa** (yang menghubungkan Bogor – Ciawi – Cibadak – Sukabumi – Cianjur – Padalarang – Bandung – Cileunyi – Rajapolah – **Ancol – Ciamis – Banjar – Wangon**),
- b) Mengembangkan jaringan jalan kolektor primer pada jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Jawa yang menghubungkan Kalapagenep – Pangandaran – Kalipucang – Jeruklegi,
- c) Mengembangkan jaringan jalan strategis nasional yang menghubungkan Cirebon – Kuningan - Ciamis pada jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Jawa dan jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa yang menghubungkan Kalapagenep – Pangandaran – Kalipucang – Jeruklegi.

2) Perwujudan Jaringan Jalur Kereta Api Nasional

- a) Pemantapan Jalur Kereta Api Lintas Utara Pulau Jawa pada lintas Jakarta – Cikampek – Jatibarang – Cirebon – Tegal – Pekalongan – Semarang – Kudus – Rembang – Bojonegoro – Surabaya,
- b) Pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Selatan Pulau Jawa pada lintas Jakarta – Cikampek – Purwakarta – Bandung – Tasikmalaya – Banjar – Kroya – Kebumen – Kutoarjo – Yogyakarta – Klaten – Surakarta – Madiun – Kertosono – Jombang – Surabaya,

- c) Pemantapan jaringan jalur kereta api lintas utara selatan (pengumpan) Perbatasan Jabar-Jateng di Pulau Jawa pada lintas Cirebon – Prupuk – Purwokerto – Kroya.
 - b. System Jaringan Transportasi Laut

Strategi operasionalisasi perwujudan system jaringan transportasi laut terdiri dari :

 - 1) Pemantapan Pelabuhan Arjuna sebagai penunjang fungsi pelayanan PKN Cirebon sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Cirebon – Indramayu – Majalengka – Kuningan (Ciayumajakuning) dan Priangan Timur,
 - 2) Pemantapan Pelabuhan Tanjung Intan sebagai penunjang fungsi PKN Cilacap.
- 3. Sistem Jaringan Energi Nasional

Strategi optimalisasi perwujudan system jaringan energy nasional terdiri atas strategi operasionalisasi dalam :

 - a. Perwujudan jaringan pipa minyak dan gas bumi

Pengembangan dan pemantapan jaringan pipa transmisi migas Semarang-Cirebon untuk melayani PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur, PKN Cirebon, PKW Tegal dan PKW Pekalongan,
 - b. Perwujudan pembangkit listrik
 - c. Perwujudan jaringan transmisi tenaga listrik
- 4. Sistem Jaringan Sumber Daya Air
 - a. Pendayagunaan sumber air berbasis pada WS untuk melayani kawasan perkotaan nasional dan kawasan andalan yang dilakukan dengan kerjasama antar daerah yang dilakukan pada :
 - 1) WS Strategis Nasional meliputi WS Cimanuk-Cisanggarung (Provinsi Jawa Barat – Jawa Tengah)
 - 2) WS lintas provinsi yang meliputi WS Citanduy

- b. Rehabilitasi DAS kritis yang dilakukan
 - 1) di DAS Cimanuk, DAS Cisanggarung, DAS Ciwaringin pada WS Cimanuk-Cisanggarung
 - 2) di DAS Citanduy dan DAS egara Anakan pada WS Citanduy
- c. Pengendalian pemanfaatan ruang di imbuhan air tanah dan pengendalian pendayagunaan sumber air tanah di kawasan pelepasan air tanah pada CAT yang dilakukan pada :
 - 1) CAT Sidareja yang terdapat di Kabupaten Ciamis, Kota Banjar dan Kabupaten Cilacap,
 - 2) CAT Tegal-Brebes yang terdapat di Kabupaten Cirebon, Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal dan Kota Tegal
- d. Pengembangan dan pemeliharaan bendungan beserta waduknya untuk mempertahankan daya tampung air dan berfungsi sebagai pemasok air baku kawasan perkotaan perbatasan Jabar-Jateng yang terdapat pada Waduk Cipancuh, Waduk Darma, Waduk Situ Anggrahan, Waduk Situ Bolang, Waduk Situ Patok, Waduk Situ Ranca Beureum, Waduk Situ Sendong yang melayani PKN Cirebon dan PKW Indramayu serta Kawasan Andalan Ciayumaja Kuning dan sekitarnya,
- e. Pengembangan dan pemeliharaan bendungan beserta waduknya untuk mempertahankan daya tampung air dan berfungsi sebagai pemasok air baku kawasan perkotaan perbatasan Jabar-Jateng yang terdapat pada Waduk Cacaban, Waduk Malahayu, Waduk Penjalin yang melayani Kawasan Andalan Bregas,
- f. Peningkatan fungsi, pengembangan dan pemeliharaan saluran irigasi teknis pada DI untuk mempertanahkan dan meningkatkan luasan lahan pertanian pangan yang dilakukan di :
 - 1) DI Rentang yang melayani kawasan peruntukkan pertanian di Kabupaten Cirebon, Majalengka dan Indramayu,
 - 2) DI Ciwaringin yang melayani kawasan peruntukkan pertanian di Kabupaten Cirebon dan Majalengka,
 - 3) DI Cikeusik dan DI Seuseupan yang melayani kawasan peruntukkan pertanian di Kabupaten Cirebon,
 - 4) DI Lakbok Utara yang melayani kawasan peruntukkan pertanian di Kabupaten Ciamis dan Kota Banjar,
 - 5) DI Asna – Ciamis yang melayani kawasan peruntukkan pertanian di Kabupaten Ciamis,

- 6) DI Lakbok Selatan/Manganti dan DI Rawa Onom/Panulisan yang melayani kawasan peruntukkan pertanian di Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Cilacap,
- 7) DI Waduk Malahayu yang melayani kawasan peruntukkan pertanian di Kabupaten Brebes

5. Strategi Operasionalisasi Perwujudan Pola Ruang Kawasan Lindung

Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan lindung di Kawasan Perbatasan Jabar-Jateng dalam RTR Pulau Jawa-Bali terdiri atas perwujudan :

- 1) Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya
 - a. Pengembangan pengelolaan, peningkatan fungsi dan mempertahankan luasan kawasan lindung, pemeliharaan jenis dan kerapatan tanaman hutan yang memiliki fungsi lindung sesuai dengan jenis tanah, kemiringan lereng, ketinggian, intensitas hujan serta rehabilitasi kawasan hutan lindung yang tergradasi dengan teknologi lingkungan yang dilakukan dikawasan hutan Kabupaten Ciamis, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Brebes.
 - b. Mempertahankan fungsi kawasan resapan air dan pengendalian alih fungsi lahan kawasan resapan air serta rehabilitasi kawasan resapan air yang tergradasi dengan menggunakan teknologi lingkungan yang dilakukan pada kawasan resapan air didaerah imbuhan air tanah pada CAT Sidareja dan CAT Tegal-Brebes.
- 2) Kawasan Perlindungan Setempat
 - a. Pengendalian pemanfaatan ruang pada sempadan pantai yang berpotensi merusak fungsi sempadan pantai serta pengembangan struktur alami berupa jenis kerapatan tanaman dan/atau struktur sempadan pantai yang dilakukan di Kabupaten Cirebon, Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Brebes.
 - b. Pengendalian pemanfaatan ruang pada sempadan sungai yang berpotensi merusak fungsi sempadan sungai serta pengembangan struktur alami

berupa jenis kerapatan tanaman dan/atau struktur sempadan sungai yang dilakukan di Sungai Branalang, Sungai Cibeureum, Sungai Cijolang, Sungai Cikonde, Sungai Cimeneng, Sungai Cipambokngan, Sungai Cipanerekean, Sungai Ciparayangan, Sungai Citanduy, Sungai Citotok, Sungai Gatel, Sungai Karanganyar, Sungai Kipah, Sungai Lembongpucung, Sungai Nirbaya, Sungai Pandan dan Sungai Panembung di WS Citanduy (Provinsi Jabar-Jateng).

- c. Pengendalian pemanfaatan ruang pada sempadan waduk yang berpotensi merusak fungsi sempadan waduk serta pengembangan struktur alami berupa jenis kerapatan tanaman dan/atau struktur sempadan waduk yang dilakukan di Danau Situ Lengkong (Kab. Ciamis); Waduk Wulukut dan Waduk Dadap Berending (Kabupaten Kuningan); Waduk Sedong dan Waduk Situpatok (Kabupaten Cirebon).

3) Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Cagar Budaya

- a. Pengembangan pengelolaan dan pemertahanan keutuhan suaka margasatwa yang merupakan habitat dari jenis satwa endemic, langka dan/atau akan punah yang dilakukan di Suaka Margasatwa Gunung Sawal (Kabupaten Ciamis),
- b. Pemertahanan kawasan pantai berhutan bakau untuk perlindungan pantai dari abrasi dan kelestarian biota laut yang dilakukan pada kawasan pantai berhutan bakau di Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Cilacap,
- c. Rehabilitasi dan pemantapan fungsi Taman Nasional Gunung Ciremai Kuningan,
- d. Rehabilitasi dan pemantapan fungsi Taman Wisata Alam Laut Cijulang (Kabupaten Ciamis),
- e. Pelestarian dan pengelolaan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan yang dilakukan di Museum Linggarjati (Kabupaten Kuningan), Ciung Wanara-Karang Kamulyan (Kabupaten Ciamis), Makam Sunan Gunungjati (Kabupaten Cirebon).

- 4) Kawasan Rawan Bencana Alam
 - a. Penetapan zona-zona rawan bencana alam beserta ketentuan mengenai standar bangunan gedung yang sesuai dengan karakteristik, jenis dan ancaman bencana, penyelenggaraan upaya mitigasi dan adaptasi bencana melalui penetapan lokasi dan jalur evakuasi bencana serta pembangunan sarana pemantauan bencana dan pengendalian perkembangan kegiatan budidaya terbangun dikawasan tanah longsor di Kabupaten Ciamis, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Cilacap.
 - b. Penetapan zona-zona rawan bencana alam beserta ketentuan mengenai standar bangunan gedung yang sesuai dengan karakteristik, jenis dan ancaman bencana, penyelenggaraan upaya mitigasi dan adaptasi bencana melalui penetapan lokasi dan jalur evakuasi bencana serta pembangunan sarana pemantauan bencana dan pengendalian perkembangan kegiatan budidaya terbangun dikawasan tanah gelombang pasang di Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Cilacap,
 - c. Penetapan zona-zona rawan bencana alam beserta ketentuan mengenai standar bangunan gedung yang sesuai dengan karakteristik, jenis dan ancaman bencana, penyelenggaraan upaya mitigasi dan adaptasi bencana melalui penetapan lokasi dan jalur evakuasi bencana serta pembangunan sarana pemantauan bencana dan pengendalian perkembangan kegiatan budidaya terbangun dikawasan tanah banjir di Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cirebon, Kota Banjar, Kabupaten Brebes dan Kabupaten Cilacap.
- 5) Kawasan Lindung Geologi
 - a. Penetapan zona-zona rawan bencana alam beserta ketentuan mengenai standar bangunan gedung yang sesuai dengan karakteristik, jenis dan ancaman bencana, penyelenggaraan upaya mitigasi dan adaptasi bencana melalui penetapan lokasi dan jalur evakuasi bencana serta pembangunan sarana pemantauan bencana dan pengendalian perkembangan kegiatan budidaya terbangun dikawasan rawan letusan gunung berapi (Gunung Ciremai),

- b. Penetapan zona-zona rawan bencana alam beserta ketentuan mengenai standar bangunan gedung yang sesuai dengan karakteristik, jenis dan ancaman bencana, penyelenggaraan upaya mitigasi dan adaptasi bencana melalui penetapan lokasi dan jalur evakuasi bencana serta pembangunan sarana pemantauan bencana dan pengendalian perkembangan kegiatan budidaya terbangun dikawasan rawan gempa bumi di Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Cilacap,
- c. Penetapan zona-zona rawan bencana alam beserta ketentuan mengenai standar bangunan gedung yang sesuai dengan karakteristik, jenis dan ancaman bencana, penyelenggaraan upaya mitigasi dan adaptasi bencana melalui penetapan lokasi dan jalur evakuasi bencana serta pembangunan sarana pemantauan bencana dan pengendalian perkembangan kegiatan budidaya terbangun dikawasan rawan gerakan tanah di Kabupaten Ciamis, Kabupaten Kuningan, dan Kabupaten Brebes,
- d. Penetapan zona-zona rawan bencana alam beserta ketentuan mengenai standar bangunan gedung yang sesuai dengan karakteristik, jenis dan ancaman bencana, penyelenggaraan upaya mitigasi dan adaptasi bencana melalui penetapan lokasi dan jalur evakuasi bencana serta pembangunan sarana pemantauan bencana dan pengendalian perkembangan kegiatan budidaya terbangun dikawasan rawan tsunami di Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Cilacap,
- e. Penetapan zona-zona rawan bencana alam beserta ketentuan mengenai standar bangunan gedung yang sesuai dengan karakteristik, jenis dan ancaman bencana, penyelenggaraan upaya mitigasi dan adaptasi bencana melalui penetapan lokasi dan jalur evakuasi bencana serta pembangunan sarana pemantauan bencana dan pengendalian perkembangan kegiatan budidaya terbangun dikawasan rawan abrasi disepanjang wilayah perbatasan antar provinsi Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Cilacap.

6. Strategi Operasionalisasi Perwujudan Pola Ruang Kawasan Budidaya

Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan budidaya di Kawasan Perbatasan Jabar-Jateng dalam RTR Pulau Jawa-Bali terdiri atas perwujudan :

1. Kawasan Peruntukkan Hutan

- a. Pengembangan pengelolaan kawasan peruntukkan hutan dengan menggunakan teknologi lingkungan, pengendalian perubahan peruntukkan dan/atau fungsi kawasan hutan sebagai upaya untuk mewujudkan kawasan berfungsi lindung paling sedikit 30% dari luas Pulau Jawa-Bali sesuai dengan ekosistemnya,
- b. Rehabilitasi kawasan peruntukkan hutan yang mengalami deforestasi dan degradasi dan peningkatan fungsi ekologis kawasan peruntukkan hutan di Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, dan Kabupaten Brebes.

2. Kawasan Peruntukkan Pertanian

- a. Pemertahanan luas lahan pertanian pangan berkelanjutan, pengendalian perkembangan kegiatan budidaya pada kawasan pertanian pangan berkelanjutan terutama di sisi kiri atau sisi kanan jalan, pengendalian alih fungsi peruntukkan lahan pertanian tanaman pangan dan pengembangan sentra pertanian tanaman pangan yang didukung peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan untuk ketahanan pangan nasional yang dilakukan di Kabupaten Ciamis, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Cilacap,
- b. Pengembangan sentra perkebunan berbasis bisnis yang didukung prasarana dan sarana dengan menggunakan teknologi lingkungan, serta memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan rehabilitasi kawasan peruntukkan pertanian untuk kegiatan perkebunan yang terdegradasi yang dilakukan di Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Brebes,
- c. Pengembangan kawasan peruntukkan pertanian pertanian untuk kegiatan hortikultura guna meningkatkan daya saing pertanian hortikultura yang dilakukan di Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Brebes.

3. Kawasan Peruntukkan Perikanan
 - a. Pengembangan sentra perikanan tangkap di Kabupaten Cirebon, Kabupaten Ciamis, dan Kabupaten Cilacap,
 - b. Pengembangan sentra perikanan budidaya di Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Brebes dan Kabupaten Cilacap,
 - c. Rehabilitasi kawasan peruntukkan perikanan budidaya untuk menjaga ekosistem yang dilakukan di Wilayahh Perbatasan antar provinsi Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Brebes,
 - d. Pengembangan kawasan minapolitan berbasis masyarakat yang dilakukan di Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Cilacap,
 - e. Pengendalian kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budidaya yang berpotensi mengganggu kawasan berfungsi lindung yang dilakukan di Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Brebes,
 - f. Revitalisasi wilayah penangkapan ikan yang mengalami gejala tingkat penangkapan yang berlebih yang dilakukan di Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Brebes,
4. Kawasan Peruntukkan Pertambangan
 - a. Peningkatan fungsi industri pengolahan yang berdaya saing dan ramah lingkungan berbasis mitigasi dan adaptasi bencana serta pengendalian perkembangan kawasan peruntukkan pertambangan mineral logam di Kabupaten Cilacap,
 - b. Peningkatan fungsi industri pengolahan yang berdaya saing dan ramah lingkungan berbasis mitigasi dan adaptasi bencana serta pengendalian perkembangan kawasan peruntukkan pertambangan minyak dan gas bumi di Kabupaten Cirebon,
5. Kawasan Peruntukkan Industri

Pengembangan kegiatan industri didalam kawasan peruntukkan industri dan mendorong relokasi kegiatan industri menuju kawasan industri, meningkatkan kualitas prasarana dan sarana penunjang kegiatan industri, peningkatan

penataan lokasi kegiatan industri didalam kegiatan industri, dan peningkatan kegiatan industri yang bernilai tambah tinggi dengan penggunaan teknologi tinggi dan ramah lingkungan yang dilakukan di Kabupaten Cirebon, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Brebes.

6. Kawasan Peruntukkan Pariwisata

- a. Rehabilitasi dan pengembangan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan di Museum Linggarjati (Kabupaten Kuningan), Ciung Wanara-Karang Kamulyan (Kabupaten Ciamis), Mekan Sunan Gunungjati (Kabupaten Cirebon),
- b. Rehabilitasi dan pengembangan kawasan wisata bahari Taman Wisata Alam Laut Cijulang Kabupaten Ciamis,
- c. Rehabilitasi dan pengembangan Suaka Margasatwa Gunung Sawal (Kabupaten Ciamis),

7. Kawasan Peruntukkan Permukiman

- a. Pengembangan kawasan peruntukkan permukiman dikawasan metropolis/perkotaan besar dengan mengoptimalkan pemanfaatan ruang secara kompak, vertical, hemat energy dan sumberdaya serta memanfaatkan teknologi lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang diarahkan di Kabupaten Cilacap,
- b. Pengendalian perkembangan kawasan peruntukkan permukiman secara horizontal dan mengelompok di kawasan perkotaan sedang dan kawasan perkotaan kecil yang dilakukan di Kabupaten Ciamis,
- c. Pengendalian perkembangan kawasan peruntukkan permukiman didaerah penyangga serta di sepanjang jaringan jalan arteri primer dan kolektor primer yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar yang dilakukan di Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Cilacap,
- d. Pengembangan kawasan peruntukkan permukiman berbasis mitigasi dan adaptasi bencana untuk meminimalkan potensi kerugian akibat bencana tanah longsor di Kabupaten Ciamis,

- e. Pengembangan kawasan peruntukkan permukiman berbasis mitigasi dan adaptasi bencana untuk meminimalkan potensi kerugian akibat banjir di Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Cilacap,
- f. Pengembangan kawasan peruntukkan permukiman berbasis mitigasi dan adaptasi bencana untuk meminimalkan potensi kerugian akibat bencana gempa bumi di Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Cilacap,,
- g. Pengembangan kawasan peruntukkan permukiman berbasis mitigasi dan adaptasi bencana untuk meminimalkan potensi kerugian akibat bencana gerakan tanah di Kabupaten Ciamis,
- h. Pengembangan kawasan peruntukkan permukiman berbasis mitigasi dan adaptasi bencana untuk meminimalkan potensi kerugian akibat tsunami di Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Cilacap,
- i. Pengembangan kawasan peruntukkan permukiman berbasis mitigasi dan adaptasi bencana untuk meminimalkan potensi kerugian akibat abrasi disepanjang perbatasan antar provinsi Kabupaten Ciamis.

B. Arah Kebijakan Provinsi Jawa Barat

1. Pengembangan Infrastruktur Wilayah

Pengembangan infrastruktur wilayah yang terkait dengan Kawasan Perbatasan Jabar-Jateng dijabarkan sebagai berikut:

- 1. Rencana pengembangan infrastruktur jalan dan perhubungan, mencakup:
 - a. Pengembangan jaringan primer sebagai penghubung antara pusat-pusat kegiatan, baik antar PKN, PKN dan PKW, antar PKW, PKW dan PKL, maupun dengan kawasan strategis nasional dan provinsi. Misalnya saja pembangunan jalan kolektor primer lintas utara yang menghubungkan daerah WP Bodebepunjur-WP Purwasuka- WP KK Cekungan Bandung – WP Ciayumajakuning; peningkatan jalan poros timur di jalur Pangandaran- Ciamis–Cikijing-Cirebon; pembangunan jalan lintas selatan daerah dan peningkatan status jalan lintas selatan daerah menjadi jalan nasional; peningkatan kapasitas dan kondisi ruas jalan strategis di WP Priatim- Pangandaran.

- b. Pengembangan jaringan jalan tol dalam kota maupun antar kota sebagai penghubung antar pusat-pusat kegiatan utama. Termasuk diantaranya pembangunan jalan Tol Cileunyi-Nagreg-Ciamis-Banjar, serta dukungan pembangunan jalan Tol Cileunyi–Sumedang-Dawuan (CISUMDAWU), dan pembangunan jalan tol Kanci - Pejagan di Kota Cirebon.
 - c. Pengembangan jaringan kereta api yang berfungsi sebagai penghubung antar PKN, antara PKN dan PKW, serta antar PKW, diantaranya peningkatan keandalan sistem jaringan jalur KA lintas selatan yang menghubungkan kota-kota Bandung-Tasikmalaya-Banjar; reaktivasi jalur KA Antar Kota Banjar-Cijulang.
 - d. Pengembangan bandara dan terminal untuk memenuhi kebutuhan pergerakan dari dan ke Jawa Barat dalam skala regional, nasional, maupun internasional. Termasuk diantaranya pembangunan Bandar udara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Kabupaten Majalengka sebagai Pusat Persebaran Sekunder; dan optimalisasi fungsi Bandar udara Cakrabuwana (Penggung) di Cirebon sebagai Pusat Persebaran Tersier; penyediaan terminal Tipe A di Kota Cirebon, Terminal Tipe B di Kabupaten Kuningan; peningkatan kapasitas dan fungsi Pelabuhan Internasional Arjuna di Kota Cirebon; serta optimalisasi fungsi Bandar udara Nusawiru di Pangandaran sebagai Pusat Persebaran Tersier.
 - e. Pengembangan transportasi terpadu dalam rangka mendukung pengembangan pusat-pusat kegiatan utama, misalnya pengembangan sistem angkutan umum massal di PKN Kawasan Perkotaan Cirebon dan peningkatan fasilitas dan prasarana lalu lintas angkutan jalan di WP Priatim- Pangandaran.
2. Rencana Pengembangan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Irigasi Berbasis DAS, meliputi:
 - a. Pengembangan waduk/bendungan, situ, dan embung dalam rangka konservasi dan pendayagunaan sumber daya air, termasuk diantaranya pembangunan Waduk Cipasang di Kabupaten Kuningan, waduk di WS Citanduy (Waduk Cikembang dan Leuwikeris di Kabupaten Ciamis);

- waduk di WS Ciwulan-Cilaki (diantaranya Waduk Hyang di Kabupaten Ciamis).
- b. Revitalisasi dan optimalisasi fungsi waduk dan danau/situ.
 - c. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis di hulu DAS.
3. Rencana Pengembangan Infrastruktur Energi dan Kelistrikan, mencakup:
- a. Pengembangan instalasi dan jaringan distribusi listrik untuk meningkatkan dan pemeratakan pasokan listrik ke seluruh wilayah Jawa Barat. Hal ini juga didukung oleh pengembangan desa mandiri energi serta pemerataan cakupan pelayanan energi listrik melalui pengembangan listrik perdesaan di wilayah-wilayah yang masih belum terjangkau oleh jaringan listrik.
 - b. Pengembangan energi terbarukan meliputi pengembangan panas bumi, energi potensial air (mikrohidro), tenaga surya serta tenaga angin, serta sumber energi bahan bakar nabati. Contohnya adalah pengembangan PLTU di Kabupaten Cirebon, pengembangan sumber energi panas bumi Sangkan Hurip Gunung Ciremai di Kabupaten Kuningan dan Gn. Kromong di Kabupaten Cirebon. Selain itu dikembangkan pemanfaatan energi air skala kecil, energi surya, energi angin dan bioenergi; serta pengembangan sumber energi bahan bakar nabati dan biogas di kawasan perdesaan sebagai sumber energi alternatif di Kabupaten Ciamis.
 - c. Pengembangan energi tak terbarukan meliputi pengembangan energi yang bersumber dari Bahan Bakar Minyak (BBM), gas, dan batubara untuk meningkatkan pasokan energi listrik, contohnya pengembangan pemanfaatan batubara untuk industri dan pembangkit listrik di Kabupaten Cirebon.
4. Rencana Pengembangan Prasarana Telekomunikasi, mencakup:
- a. Pengembangan telekomunikasi di desa-desa yang belum terjangkau sinyal telepon, diantaranya dengan pengembangan infrastruktur telekomunikasi perdesaan, khususnya di Kabupaten Kuningan .
 - b. Pengembangan telekomunikasi di desa-desa yang belum dilalui jaringan terestrial telekomunikasi

- c. Pengembangan cyber province
5. Rencana Pengembangan Permukiman, diantaranya mencakup:
- a. Pengembangan infrastruktur permukiman perkotaan, yaitu pengembangan kasiba/lisiba; peningkatan pelayanan air bersih; peningkatan sistem pengelolaan air limbah; penataan jaringan drainase perkotaan; peningkatan pengelolaan sampah regional di Kabupaten Cirebon; penataan permukiman kumuh; pembangunan kawasan olah raga terpadu di PKN dan PKW dan sarana olah raga di PKL; pembangunan Rumah Sakit Tipe A di PKN, Rumah Sakit Tipe B di PKW dan Rumah Sakit Tipe C di PKL; pembangunan pusat kebudayaan di PKN dan PKW; pembangunan pusat rekreasi terpadu skala nasional dan internasional di PKNp; dan pembangunan Pasar Induk Regional di Kabupaten Cirebon.
 - b. Pengembangan infrastruktur permukiman perdesaan, yaitu: peningkatan infrastruktur dasar permukiman di desa tertinggal, desa terpencil, desa perbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah, permukiman kumuh nelayan, dan kawasan rawan bencana; penataan kawasan permukiman perdesaan dengan prinsip konservasi dan pengelolaan bencana; pembangunan sarana olah raga dan pusat kegiatan belajar; serta pembangunan Puskesmas.
2. Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung

Rencana pola ruang kawasan lindung Provinsi Jawa Barat 2029 adalah :

- a. Menetapkan kawasan lindung provinsi seluas 45% dari luas seluruh wilayah Daerah yang meliputi kawasan lindung hutan dan kawasan lindung di luar kawasan hutan, serta ditargetkan untuk dicapai pada tahun 2018.
- b. Mempertahankan kawasan-kawasan resapan air atau kawasan yang berfungsi hidroorologis untuk menjamin ketersediaan sumberdaya air
- c. Mengendalikan pemanfaatan ruang di luar kawasan hutan sehingga tetap berfungsi lindung.

Termasuk pada lokasi kawasan lindung adalah: kawasan yang memberikan perlindungan bagi kawasan bawahannya (kawasan hutan berfungsi lindung dan kawasan resapan air); kawasan perlindungan setempat (sempadan pantai, sempadan

sungai kawasan sekitar waduk dan danau/situ, kawasan sekitar mata air, RTH Kota), kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya (mencakup kawasan mangrove, kawasan suaka margasatwa, kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya, taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam taman hutan raya, kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan), kawasan rawan bencana alam (kawasan rawan tanah longsor, kawasan gelombang pasang, kawasan rawan banjir), kawasan lindung geologi (kawasan cagar alam geologi dan kawasan kars, kawasan rawan bencana alam geologi, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah), serta kawasan lindung lainnya (kawasan perlindungan plasma nutfah eks-situ, taman buru, dll).

3. Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Dalam RTRW Provinsi Jawa Barat telah ditetapkan kawasan budidaya yang menjadi kewenangan provinsi dan merupakan kawasan strategis provinsi, dengan peruntukkan berupa kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian pangan, kawasan peruntukan perkebunan, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, serta kawasan peruntukan lainnya.

C. Arah Kebijakan Provinsi Jawa Tengah

1. Rencana Sistem Jaringan Jalan, meliputi :

- a. Rencana pengembangan jalan Arteri Primer meliputi Perbatasan Jawa Barat-Cilacap-Kebumen-Perbatasan Yogyakarta;
- b. Rencana pengembangan jalan kolektor Primer meliputi jalan kolektor Perbatasan Jawa Barat – Wangon – Purwokerto – Banyumas – Wonosobo – Secang dan rencana jalan kolektor Bandungsari – Penanggapan – Perbatasan Jawa Barat;

- c. Rencana pengembangan jalan strategis nasional meliputi Jalan di sisi pantai selatan dari Cilacap (Slarang-Ayah), Kebumen - Purworejo - Perbatasan Yogyakarta;
 - d. Rencana pengembangan jalan tol meliputi : Pengembangan jalan tol sepanjang Perbatasan Jawa Barat – Pejagan – Pemalang – Batang – Semarang; dan Pengembangan jalan tol sepanjang Ciamis – Cilacap –Yogyakarta.
2. Rencana pengembangan terminal penumpang jalan Tipe A di Kawasan Perbatasan Jabar-Jateng akan diarahkan di Kabupaten Cilacap sedangkan Rencana pengembangan terminal penumpang jalan Tipe B di Kawasan Perbatasan Jabar-Jateng akan diarahkan di Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Brebes.
3. Rencana pengembangan kereta api regional meliputi :
 - a. jalur Utara menghubungkan, Semarang-Jakarta, Semarang - Surabaya dan Semarang - Bandung;
 - b. jalur Selatan menghubungkan, Solo-Bandung/Jakarta dan Solo - Surabaya;
 - c. pengembangan Rel ganda, meliputi jalur Semarang – Pekalongan - Tegal - Cirebon, Solo - Yogyakarta - Kutoarjo - Kroya, Solo - Madiun, Kroya - Purwokerto - Prupuk - Cirebon.
4. Rencana peningkatan stasiun-stasiun kelas I, kelas II dan kelas III di Kabupaten Cilacap sebanyak 4 buah stasiun dan di Kabupaten Brebes sebanyak 6 buah stasiun,
5. Rencana pengembangan prasarana transportasi penyeberangan berupa:
 - a. Rencana pelabuhan penyeberangan di Cilacap;
 - b. Rencana pengembangan Pelabuhan umum (utama) Tanjung Intan di Kabupaten Cilacap;
 - c. Rencana pengembangan Pelabuhan pengumpan meliputi Pelabuhan Brebes di Kabupaten Brebes.
6. Pengembangan bandar udara umum Bandar udara pengumpan yaitu Bandar Udara Tunggul Wulung di Cilacap,

D. Arahan Kebijakan Kabupaten Cirebon

1. Rencana Sistem Infrastruktur

- a. Peningkatan **jalan poros timur di jalur Pangandaran - Ciamis - Cikijing – Cirebon**
- b. Pembangunan **Jalan Tol Cikopo/Cikampek – Palimanan**
- c. Peningkatan sistem jalur tunggal (single track) menjadi sistem **jalur ganda (double track) Losari – Brebes**
- d. Perbaiki TPAS di Ciledug
- e. Optimalisasi Tempat Pembuangan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) dengan Sistem *Sanitary Landfill* di Ciledug dan Palimanan

2. Rencana Kawasan Lindung

- a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya terdiri dari kawasan resapan air. Dimana wilayah kecamatan di Kabupaten Cirebon yang merupakan cakupan Kawasan Perbatasan Jabar-Jateng yang termasuk kawasan resapan air adalah Kecamatan Pasaleman berada di Desa Tonjong seluas kurang lebih 4 (empat) hektar;
- b. sempadan pantai yang terdapat Kecamatan Losari yang meliputi Desa Ambulu seluas kurang lebih 20 (dua puluh) hektar; Desa Tawang Sari seluas kurang lebih 20 (dua puluh) hektar; Desa Kalisari seluas kurang lebih 20 (dua puluh) hektar; dan Desa Kalirahayu seluas kurang lebih 20 (dua puluh) hektar. sempadan pantai ditetapkan dengan ketentuan minimal lebar 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah perbatasan antar kabupaten/kota proporsional sesuai bentuk dan kondisi fisik.
- c. sempadan sungai yang terdapat di Kecamatan Ciledug seluas kurang lebih 60 (enam puluh) hektar; Kecamatan Losari seluas kurang lebih 60 (enam puluh) hektar; Kecamatan Pabedilan seluas kurang lebih 60 (enam puluh) hektar; dan Kecamatan Pasaleman seluas kurang lebih 60 (enam puluh) hektar. Sempadan sungai ditetapkan dengan ketentuan :

- garis sempadan sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter dari tepi kiri-kanan tanggul pada sungai bertanggul di kawasan perkotaan;
 - sekurang-kurangnya 5 (lima) meter dari tepi kiri-kanan tanggul pada sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan;
 - sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri-kanan sungai tidak bertanggul dengan kedalaman kurang dari 3 (tiga) meter di kawasan perkotaan;
 - sekurang-kurangnya 15 (lima belas) meter dari tepi kiri-kanan sungai tidak bertanggul dengan kedalaman 3 (tiga) sampai dengan 20 (dua puluh) meter di kawasan perkotaan;
 - sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) meter dari tepi kiri-kanan sungai tidak bertanggul dengan kedalaman lebih dari 20 (dua puluh) meter di kawasan perkotaan; dan
 - sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter dari tepi kiri-kanan sungai besar tidak bertanggul dan 50 (lima puluh) meter dari tepi kiri-kanan sungai kecil tidak bertanggul yang di luar kawasan perkotaan.
- d. kawasan rawan bencana alam terdiri dari :
- 1) Rawan gelombang pasang yang terdapat di Kecamatan Losari.
 - 2) Rawan banjir yang terdapat di Desa Tawang Sari Kecamatan Losari; Desa Ambulu Kecamatan Losari; Desa Babakan Kecamatan Pabedilan dan Desa Losari Lor Kecamatan Pabedilan.
 - 3) Rawan angin rebut yang terdapat di Desa Panggang Sari Kecamatan Losari
- e. kawasan lindung geologi terdiri dari :
- 1) kawasan rawan letusan Gunung Api Ceremai yang terdapat di Kecamatan Pasaleman
 - 2) kawasan rawan rerakan tanah yang terdapat di Kecamatan Pasaleman
 - 3) kawasan rawan abrasi yang terdapat di Kecamatan Losari.

3. Rencana Kawasan Budidaya

- a. kawasan peruntukan hutan produksi di Kawasan Perbatasan Jabar-Jateng di Kabupaten Cirebon adalah terdapatnya hutan produksi tetap yang dikelola oleh kesatuan pemangku hutan (KPH) Kuningan yang terdapat di Kecamatan Pasaleman.
- b. kawasan hutan rakyat di Kabupaten Cirebon yang termasuk dalam Kawasan Perbatasan Jabar-Jateng terdapat di Kecamatan Ciledug seluas kurang lebih 171 (seratus tujuh puluh satu) hektar; Kecamatan Losari seluas kurang lebih 250 (dua ratus lima puluh) hektar; Kecamatan Pabedilan seluas kurang lebih 468 (empat ratus enam puluh delapan) hektar; dan Kecamatan Palimanan seluas kurang lebih 314 (tiga ratus empat belas) hektar.
- c. kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Cirebon terdiri dari
 - 1) kawasan peruntukan tanaman pangan di Kabupaten Cirebon yang termasuk dalam Kawasan Perbatasan Jabar-Jateng terdapat di Kecamatan Ciledug seluas kurang lebih 473 (empat ratus tujuh puluh tiga) hektar; Kecamatan Losari seluas kurang lebih 200 (dua ratus) hektar; Kecamatan Pabedilan seluas kurang lebih 450 (empat ratus lima puluh) hektar; dan di Kecamatan Pasaleman seluas kurang lebih 1.564 (seribu lima ratus enam puluh empat) hektar.
 - 2) kawasan peruntukan hortikultura sayuran terdapat di Kecamatan Pasaleman; Kecamatan Ciledug; Kecamatan Losari dan Kecamatan Pabedilan. Sedangkan kawasan peruntukkan hortikultura buah-buahan terdapat di Kecamatan Pasaleman dan Kecamatan Pabedilan.
 - 3) kawasan peruntukan perkebunan di Kabupaten Cirebon yang termasuk dalam Kawasan Perbatasan Jabar-Jateng terdapat di Kecamatan Pasaleman.
 - 4) kawasan peruntukan peternakan di Kawasan Perbatasan Jabar-Jateng adalah di hamper semua wilayah perbatasan di Cirebon yang merupakan peternakan besar dan peternakan unggas.

- d. kawasan peruntukan perikanan di Kabupaten Cirebon terdiri dari jenis perikanan sebagai berikut :
- 1) perikanan budidaya air tawar terdapat di Kecamatan Palimanan yang termasuk Kawasan Perbatasan Jabar-Jateng.
 - 2) perikanan budidaya air laut terdapat di Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon yang termasuk Kawasan Perbatasan Jabar-Jateng.
 - 3) perikanan budidaya air tambak terdapat di Kecamatan Losari yang termasuk Kawasan Perbatasan Jabar-Jateng.
 - 4) industri pengolahan ikan terdapat di Kecamatan Losari yang termasuk Kawasan Perbatasan Jabar-Jateng.
 - 5) pelabuhan penperbatasan antar kabupaten/kotaan ikan di Kecamatan Losari yang termasuk Kawasan Perbatasan Jabar-Jateng sebanyak 2 (dua) unit.
 - 6) kawasan peruntukan pertambangan di Kabupaten Cirebon yang termasuk dalam Kawasan Perbatasan Jabar-Jateng terdapat di Kecamatan Palimanan seluas kurang lebih 100 (seratus) hektar berupa pertambangan batuan dan mineral tepatnya berlokasi di Blok Gunung Giwur berada di Desa Kepuh; Blok Benggoi berada di Desa Kepuh; Blok Gunungrandu berada di Desa Kepuh; dan Blok Gunungsantri berada di Desa Kepuh.
- e. kawasan peruntukan industri besar terdapat di Kecamatan Losari yang meliputi industri manufaktur; industri penunjang pertanian; dan industri penunjang perikanan. Kawasan industri mengengah diarahkan di Kecamatan Palimanan berupa industri manufaktur serta industri kecil dan makro diarahkan di Kecamatan Losari meliputi Industri perikanan budidaya dan Industri bata merah.
- f. kawasan peruntukan pariwisata di Kabupaten Cirebon yang merupakan Kawasan Perbatasan Jabar-Jateng terdapat kawasan wisata budaya perbatasan antar provinsi pantai yang terdapat di Kecamatan Losari. Sedangkan kawasan

wisata buatan agropolitan terdapat Ageo Ciledug seluas kurang lebih 200 hektar dan wisata buatan minapolitan terdapat di Kecamatan Losari.

- g. kawasan peruntukan permukiman di perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah di Kabupaten Cirebon dialokasikan keseluruhh wilayah baik berupa kawasan permukiman perkotaan maupun kawasan permukiman perdesaan.
- h. kawasan peruntukan lainnya terdiri dari :
 - 1) Kawasan perbatasan antar provinsi dan laut diarahkan pada Kecamatan Losari,
 - 2) Kawasan pertahanan dan keamanan berupa Komando Rayon Militer yang tersebar diseluruh wilayah begitu pula dengan kawasan kepolisian.
 - 3) Kawasan fasilitas sosial dan fasiltas umum tersebar diseluruh wilayah.

E. Arahan Kebijakan Kabupaten Kuningan

1. Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi perbatasan antar kabupaten/kota, terdiri atas :
 - a. Pengembangan jalan kolektor 2, meliputi : ruas jalan Luragung - Cibingbin; dan ruas jalan Cibingbin - Banjarharja.
 - b. Pengembangan jalan lokal meliputi:
 - ruas jalan lingkaran Ciwaru - Karangrancia - Cibeureum - Cibingbin - Cimahi - Cidahu - Luragung;
 - Ruas jalan Cimahi - Gunungsari - Cimulya - Sukadana - Cibeureum;
 - Ruas jalan Cibingbin - Sindangjawa - Cimara;
 - Ruas jalan Cibeureum - Tarikolot - Cikananga; dan
 - Ruas jalan Selajambe - Subang - Cilebak.
 - c. Pembangunan jalan alternatif menuju Kabupaten Ciamis meliputi : Ruas jalan Subang - Tangkolo - Rancah;
 - d. Pembangunan jalan alternatif menuju Kabupaten Brebes meliputi : Ruas jalan Cibingbin - Pananggapan - Malahayu.

2. Rencana pengembangan sistem jaringan energi:
 1. *Pengembangan pembangkit listrik*, meliputi :
 - a. Pembangunan pembangkit listrik tenaga surya dengan di Kecamatan Cibingbin dan Kecamatan Cibeureum.
 - b. Pembangunan pembangkit listrik tenaga mikro hidro dengan lokasi di Kecamatan Cibingbin.
 2. Rencana pengembangan sistem jaringan sumberdaya air terdiri atas:
 - a. Peningkatan pengelolaan wilayah sungai meliputi sungai-sungai lintas Kabupaten Kuningan dan wilayah sungai strategis nasional. Sungai-sungai lintas Kabupaten Kuningan meliputi : Sungai Cijangkelok yang bermuara di Sungai Cisanggarung mengalir ke utara; dan Sungai Cijolang yang bermuara di Sungai Citanduy mengalir ke selatan.
 - b. Peningkatan pengelolaan waduk, telaga, Situ dan Embung, antara lain: Waduk Citaman dan Waduk Cariang di Kecamatan Cibinbin, serta Waduk Cikabuyutan di Kecamatan Cilebak. Selain itu adanya rencana pembanguna Waduk Cileuweung di Kecamatan Cibingbin.
 3. Rencana jalur evakuasi terdiri atas :
 1. Jalur evakuasi kawasan rawan tanah longsor, meliputi :
 - a. Kecamatan Cibeureum berupa jalan Desa Cimulya - jalan Desa Tarikolot;
 - b. Kecamatan Cibingbin meliputi :
 - jalan Desa Cipondok - Desa Cibingbin; dan
 - jalan Desa Sukaharja - Desa Cibingbin.
 - c. Kecamatan Cilebak berupa jalan Desa Patala - Desa Sumberjaya - Desa Citikur;
 4. Rencana Kawasan Lindung

Rencana pola ruang kawasan lindung yang terkait dengan wilayah studi kawasan strategis perbatasan adalah perlindungan terhadap kawasan rawan

bencana alam berupa kawasan rawan tanah longsor dengan luas kurang lebih 2.000 Ha meliputi:

- a. Kecamatan Cibeureum;
- b. Kecamatan Cibingbin;
- c. Kecamatan Cilebak;
- d. Kecamatan Karangkencana;

5. Rencana Kawasan Budidaya

- a. Kawasan peruntukan hutan produksi terbatas dengan luas kurang lebih 18.799 hektar meliputi antara lain: Kecamatan Cibeureum, Cibingbin, Cilebak, Ciwaru, Karangkencana, dan Subang.
- b. Kawasan peruntukan hutan produksi tetap dengan luas kurang lebih 7.957 hektar, meliputi Kecamatan Cibeureum, Cibingbin, Cilebak, Ciwaru, Karangkencana, dan Subang,
- c. Kawasan peruntukan tanaman pangan dikembangkan di setiap kecamatan agar dapat:
 - mempertahankan kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan beririgasi;
 - mendukung ketahanan pangan provinsi dan nasional;
 - meningkatkan produktivitas kawasan melalui pola intensifikasi, diversifikasi, dan pola tanam yang sesuai dengan kondisi tanah dan perubahan iklim;
 - pengembangan infrastruktur sumberdaya air yang mampu menjamin ketersediaan air; dan
 - meningkatkan kesejahteraan petani dan pemanfaatan lahan yang lestari.
- d. Kawasan peruntukan hortikultura untuk komoditas Durian yang berlokasi di Kecamatan Lebak, dan kawasan lainnya diluar kawasan perbatasan,

- e. Perkebunan rakyat dengan luas kurang lebih 866 hektar, antara lain meliputi Kecamatan Cibeureum, CiBingbin, , dan kecamatan lainnya di luar kawasan perbatasan,
- f. Kawasan peruntukan peternakan dengan luas sekitar 60 ha yang salah satunya terdapat di Kecamatan Cibeureum,
- g. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan luas kurang lebih 11.706 hektar meliputi seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Kuningan,
- h. Kawasan pertambangan mineral yang salah satunya diantaranya adalah Kecamatan Cibingbin, Cilebak, Karangkencana, dan Subang.
- i. Kawasan prospek panas bumi di Kecamatan Cibingbin, Subang, dan kecamatan lain di luar kawasan perbatasan.
- j. Kawasan peruntukan industri kecil dan mikro rumah tangga terletak di Kecamatan Cibeureum,
- k. Kawasan pariwisata alam, berupa:
 - Bumi Perkemahan Buyut Jaksa di Desa Bantarpanjang Kecamatan Cibingbin
 - Air Panas Ciangir di Desa Ciangir Kecamatan Cibingbin;
 - Air Panas Subang di Desa Subang Kecamatan Subang; dan
 - Gua Indrakila di Desa Indrahayu Kecamatan Ciwaru
- l. Kawasan peruntukan permukiman perkotaan dan perdesaan di seluruh kecamatan
- m. Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan berupa KORAMIL di Kecamatan Subang, Ciwaru, Cibingbin,
- n. Kawasan hutan pangonan dengan luas kurang lebih 344 hektar, meliputi Kecamatan Cibeureum, Cilebak, Ciwaru, Karangkencana, dan Subang.

E. Arahan Kebijakan Kota Banjar

1. Rencana sistem jaringan berupa rencana sistem prasarana transportasi kota yang terkait dengan kawasan perbatasan, adalah:
 - a. Pengembangan dan peningkatan fungsi jaringan jalan Arteri Primer, Kolektor primer, kolektor sekunder, jalan lokal, diantaranya:
 - Peningkatan jalan arteri dengan panjang 16,72 km
 - Peningkatan jalan kolektor primer dengan panjang 122,96 km
 - Peningkatan jalan kolektor sekunder dengan panjang 41,52 km
 - Peningkatan jalan lokal dengan panjang 148,78 km
 - b. Rencana pembangunan dan pengembangan jalan lingkar selatan yang melintasi Kecamatan Langensari, Purwaharja, dan Banjar dengan panjang jalan 7,44 km.
 - c. Pengembangan jaringan jalan poros tengah kota
 - d. Mengembangkan dan meningkatkan jalan perbatasan Jawa Barat – Jawa Tengah sampai Jalan Katapang via Rawa Onom.
 - e. Peningkatan dan pengembangan jaringan jalan untuk mengakomodir pergerakan dari dan ke kawasan agropolitan.
 - f. Rencana pembangunan jembatan Cijulang 2 Desa Panulisan (Jawa Tengah), terkait dengan telah ada kesepakatan antara Kota Banjar dengan Pemerintah Jawa Tengah.
 - g. Revitalisasi/peningkatan jalur Kereta Api Banjar-Cijulang
 - h. Pengembangan Terminal baru tipe B di bagian selatan Kota Banjar sebagai terminal regional yang berlokasi di Pataruman
 - i. Pengembangan terminal lokal (barang/pegudangan) untuk mengakomodir pergerakan koleksi dan distribusi agro di Kecamatan Pataruman dan Langensari
 - j. Pengembangan trayek angkutan dalam kota dan antar kota

2. Rencana pengembangan prasarana energi/listrik di Kota Banjar, adalah:
 - a. Penambahan kapasitas jaringan listrik dengan penyediaan tempat untuk tiang kabel dan gardu
 - b. Pengusahaan listrik masuk desa dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat.
 - c. Pembangunan dan peningkatan Gardu Induk Listrik di Kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Banjar.
 - d. Dalam jangka panjang dibutuhkan pembangunan pembangkit listrik dari sumber energi alternatif (energi matahari)
 - e. Prasarana energi dapat dibangun bersamaan dengan dan atau memanfaatkan jaringan jalan guna memudahkan distribusi pada wilayah-wilayah pelayanan.
 - f. Pembangunan jaringan kabel bawah tanah terpadu dengan memanfaatkan ruang manfaat jalan
 - g. Pengusahaan partisipasi badan-badan usaha (negeri dan swasta) untuk berperan dalam pelayanan listrik.
3. Rencana pengembangan jaringan telekomunikasi adalah sebagai berikut;
 - a. Penambahan kapasitas sentral telepon
 - b. Penambahan *Tower Relay* dan pemasangan sejumlah microcell di daerah yang diperkirakan akan terjadi *blackspot*.
 - c. Pengembangan fasilitas telepon umum dan warung telekomunikasi di tempat strategis
 - d. Pengembangan menara atau tower (BTS) telekomunikasi untuk mendukung pelayanan telepon seluler (*Handphone*).
4. Rencana jaringan irigasi di Kota Banjar, meliputi :
 - a. Saluran irigasi teknis yang dominan akan dipertahankan terutama terletak di Kecamatan Langensari dan Kecamatan Purwaharja serta sebagian Kecamatan Pataruman.

- b. Sementara untuk jaringan irigasi desa dan tadah hujan, bila ada peralihan fungsi lahan, maka saluran tersebut harus disesuaikan dengan kemungkinan fungsinya menjadi saluran drainase.
 - c. Mengoptimalkan jaringan irigasi yang sudah ada di Kota Banjar untuk mengaliri kegiatan pertanian (sawah).
5. Rencana penyediaan air bersih untuk Kota Banjar, sebagai berikut:
 - a. Pembangunan Reservoir Gunung Babakan dengan kapasitas 750 m^3 di Kecamatan Pataruman.
 - b. Sistem sambungan langsung dengan sumber dari PDAM direncanakan melayani kawasan perkotaan, pusat kegiatan komersil, industri maupun pusat pemerintahan. Daerah-daerah ini merupakan daerah yang menjadi kawasan perkotaan yang tersebar di kecamatan-kecamatan di Kota Banjar.
 - c. Sistem penyediaan air dengan swadaya murni dari masyarakat (Sumur Bor atau Artesis),
6. Rencana pengelolaan drainase di Kota Banjar, sebagai berikut:
 - a. Pembuatan Waduk/Kolam penampungan/penyanggah tebing pada kawasan di Kel. Purwahrja dan Ds. Mekarharja dimana pada saat hujan besar selalu tergenang dan terjadi longsor.
 - b. Meningkatkan fungsi drainase makro (S. Citanduy, S. Ciseel, S. Cijolang) berupa :
 - Pembuatan Sodetan, untuk mengurangi debit air.
 - Normalisasi alur Sungai dengan mengeruk sedimen yang mengendap di dasar sungai, terutama pada bagian sungai yang sudah mengalami pendangkalan
 - Perkuatan Tebing untuk melindungi bagian tebing sungai dari erosi, terutama pada pinggir sungai yang mudah longsor ataupun tergerus oleh aliran air.

7. Rencana Kawasan Lindung

- a. Kawasan sempadan sungai, dipertegas batas-batasnya, segera dikuasai pemerintah dan diperkuat statusnya.
- b. Perwujudan lahan-lahan sempadan sungai dapat dilakukan dengan cara partisipatif masyarakat, atau penertiban terutama di kawasan lindung yang membahayakan kelangsungan penduduk yang tinggal di kawasan sekitarnya.
- c. Sempadan sungai setelah dikuasai pemerintah, maka untuk mempermudah pengawasan dan pengendaliannya dilakukan pembangunan jalan inspeksi.
- d. Untuk wilayah sekitar sempadan sungai bangunan boleh didirikan setelah adanya pembangunan jalan inspeksi.
- e. Rehabilitasi dan pengerukan lumpur sungai pada aliran sungai yang telah mengalami pendangkalan.
- f. Bangunan yang didirikan di sekitar wilayah sempadan sungai harus menghadap sungai.

8. Rencana Kawasan Budidaya

- a. Kawasan permukiman
 - Kawasan permukiman kepadatan tinggi, tersebar di kecamatan di kawasan pusat kota yaitu Kecamatan Pataruman. Pengembangan kawasan permukiman kepadatan tinggi pda pusat kota diarahkan untuk pengembangan secara vertikal.
 - Kawasan permukiman kepadatan sedang diarahkan pengembangannya di wilayah pengembangan lainnya yaitu Langensari dan Banjar.
 - Kawasan permukiman kepadatan rendah, diarahkan di Kecamatan Purwaharja.
- b. Kawasan pusat kota

Kawasan Pusat Kota ini terletak di Kecamatan Pataruman (34,07 Ha) dan Kecamatan Banjar (15,86 Ha).
- c. Kawasan Perdagangan dan jasa

- Perdagangan skala kecamatan yang mendukung Sub Pusat Pelayanan Kota pengembangannya diarahkan di Desa Cibeureum, Kel. Mekarsari, Desa Batulawang, Desa Mulyasari dan Kel. Muktisari.
- Perdagangan lokal dengan skala pelayanan kecamatan dan kota, pengembangannya diarahkan di Kecamatan Purwaharja, Pataruman dan Langensari dengan mempertimbangkan keserasian antara skala kegiatan dengan lokasi kegiatan.

d. Kawasan khusus

Merupakan kawasan yang intensitas pemanfaatannya bersifat terbatas dan penanganannya pun bersifat khusus, yaitu: Komplek Batalyon Infantri 321 Buaya Putih di Kelurahan Purwaharja, dan Lapangan Terbang Langen di Desa Langensari.

e. Kawasan industri

Arahan pengembangan industri di Kota Banjar terdapat di Kecamatan Pataruman dengan luas 190,38 Ha dan Kecamatan Langensari dengan luas 25,42 Ha.

f. Kawasan pertanian tanaman pangan lahan basah

Sebaran untuk kawasan pertanian lahan basah di Kota Banjar seluas 3.817,90 Ha yang meliputi : Kecamatan Pataruman (951,24 Ha), Banjar (748,10 Ha), Purwaharja (680,25 Ha), Langensari (1.438,31 Ha).

g. Kawasan perkebunan

Rencana pengembangan kawasan perkebunan di Kota Banjar secara umum meliputi:

- Pengembangan kawasan perkebunan memanfaatkan lahan –lahan kritis
- Pengembangan kawasan perkebunan diutamakan untuk kepentingan masyarakat setempat.
- Pemberian prasarana dan sarana pendukung untuk pengembangan perkebunan
- Memberikan kemudahan dalam memasarkan hasil produksi perkebunan

- Sebaran untuk Kawasan Perkebunan di Kota Banjar seluas 2.871,80 Ha yang meliputi : Kecamatan Pataruman (2.265,73 Ha), Banjar (375,81 Ha), Purwahaerja (62,71 Ha), Langensari (167,55 Ha).

h. Kawasan Hutan Produksi

Kawasan hutan produksi yang dikembangkan di Kota Banjar terdapat di Kecamatan Pataruman seluas 507,07 Ha, Kecamatan Purwahaerja seluas 298,49 Ha, dan Kecamatan Langensari seluas 83,94 Ha. Hutan produksi akan dikembangkan dalam rangka mendukung perekonomian wilayah dan kelestarian alam dan lingkungan (ekosistem).

i. Ruang Terbuka Hijau

Rencana penyediaan RTH dilakukan melalui: (1) Pengembangan Hutan Kota. Lokasi Hutan Kota di Kota Banjar diarahkan dikembangkan di Kecamatan Purwahaerja. Hutan kota untuk wilayah Kota Banjar memanfaatkan hutan produksi yang berada di Kecamatan Purwahaerja dengan dikembangkan sebagai hutan kota. Tujuan pengembangan hutan kota di Kota Banjar adalah lebih ditekankan kepada pengembangan dan pemanfaatan kawasan hijau atau kawasan lindung yang telah ada; (2) Pengembangan sabuk hijau. Rencana pengembangan sabuk hijau di Kota Banjar berada di Sepanjang Rel Kereta Api dan sepanjang jalur lingkar; (3) Pengembangan taman-taman kota dengan konsep taman rekreatif dan edukatif; (4) Tempat pemakaman umum, pengembangan kompleks TPU berada hampir diseluruh kecamatan; serta (5) Pengembangan ruang terbuka hijau yang berada di sempadan jalan, median jalan dan pulau jalan.

j. Kawasan Strategis Banjar dan sekitarnya

Merupakan jantung utama penggerak pertumbuhan Kota Banjar secara keseluruhan dengan fungsi utamanya sebagai pusat jasa, ekonomi, pemerintahan dan pusat distribusi dan koleksi, peranan kawasan perkotaan Banjar sangat tinggi dalam mempengaruhi pertumbuhan Kota Banjar.

Kawasan Banjar dsk selain berperan sebagai ibukota Kota Banjar, secara lokasional dalam skala regional letaknya cukup strategis, karena dilalui oleh jalur lalu lintas Barat – Timur dan Utara - Selatan antar Kota dan antar Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Pengelolaan Kawasan Strategis Perkotaan Banjar ds, yaitu:

- Meningkatkan fungsi penggunaan lahan di Kawasan Perkotaan Banjar untuk kegiatan-kegiatan yang intensif produktif ekonomis, yang mendukung fungsinya sebagai ibukota Kota Banjar (dengan fungsi utama sebagai pusat jasa, ekonomi, pemerintahan dan pusat distribusi dan koleksi) dengan tetap melakukan pengendalian pada ekstensivitas pembangunan fisiknya.
- Melakukan pemberdayaan masyarakat lokal untuk menunjang kegiatan agrobisnis dan pariwisata, dengan memberikan kesempatan pendidikan dan latihan khusus.
- Melakukan kebijakan-kebijakan yang mendukung potensi unggulan di tiap Kawasan Perkotaan Banjar, yang sudah diidentifikasi sebagai sektor dan komoditi unggulan.

F. Arahan Kebijakan Kabupaten Ciamis

1. Rencana Jaringan transportasi
 - a. Penetapan sebagai jaringan jalan kolektor primer untuk ruas jalan Panjalu-**Cibereum; Cibereum-Jahim; Kalipucang-Majingklak.**
 - b. Penetapan sebagai jaringan jalan lokal primer untuk ruas jalan **Padaherang-Paledah; Mangunjaya Sidaharja - SP. Mangunjaya, Cibarengkok - Tambaksari, Sopla - SP. Mangunjaya;**
 - c. Penetapan ruas jalan strategis kabupaten untuk ruas jalan **Cibereum-Panjalu, Cisaga-Cipicung.**
 - d. Pengembangan terminal tipe C di Kecamatan **Kalipucang, Purwadadi, Tambaksari, Padaherang, Lakbok, Mangunjaya.**
 - e. Optimalisasi pelabuhan penyeberangan Santolo dan Majingklak di Kecamatan Kalipucang; dan
 - f. Optimalisasi Pelabuhan penyeberangan untuk tujuan lintas penyeberangan Sungai Citanduy dengan rute Kalipucang-Jawa Tengah.

2. Rencana jaringan energi listrik
 - a. Pengembangan Energi Tak Terbarukan, mencakup pengembangan energi yang bersumber dari bahan bakar minyak (BBM), gas dan batubara di wilayah-wilayah yang masih belum terjangkau oleh jaringan listrik;
 - b. Jaringan transmisi tenaga listrik Saluran Udara Tegangan Tinggi yang melewati Kecamatan Laktok, Purwodadi, Pamarican dan Cidolog;
 - c. Stasiun pengisian gas di koridor Kecamatan Cisaga, Cijeungjing, Ciamis, Cikoneng, Sindangkasih, Cihaurbeuti dan Panumbangan;
3. Rencana jaringan telekomunikasi
 - a. Jaringan kabel telepon di kawasan perkotaan, kawasan perdesaan dan desa-desa tergolong miskin yang dapat diakses oleh jaringan kabel telepon;
 - b. Nir kabel di kawasan perkotaan, kawasan perdesaan, desa-desa tergolong miskin yang belum dilalui jaringan kabel telepon yang dapat diakses oleh infrastruktur nir kabel dan jaraknya jauh atau belum terjangkau jaringan kabel telepon atau kondisi topografi alamnya sulit untuk dilalui jaringan kabel telepon;
4. Rencana Jaringan Sumber Daya Air
 - a. Pengembangan jaringan sumber daya air lintas provinsi, yaitu Sungai Citanduy dan Cijolang.
 - b. Pengembangan waduk Sukahurip di WS Ciwulan-Cilaki Kecamatan Pangandaran dan Kalipucang yang bermanfaat sebagai sumber air baku domestic PKW Pangandaran, Irigasi DI Ciputrapinggan dan pengendali banjir;
 - c. Pengembangan potensi peningkatan dan pembangunan jaringan irigasi di Kecamatan Kawali, Jatinegara, Rajadesa, Panawangan, Cipaku, Lumbung, Rancah, Tambaksari, Panjalu, Panumbangan, Sukamantri, Ciamis, Cikoneng, Sadananya, Baregbeg, Cijeungjing, Sukadana, Cisaga, Sindangkasih, Cihaurbeuti, Banjarsari, Padaherang, Laktok, Mangunjaya, Pamarican, Cimaragas, Cidolog, Purwadadi, Pangandaran, Kalipucang, Sidamulih, Cijulang, Cimerak, Parigi, Cigugur dan Langkaplancar.

5. Rencana Jaringan Prasarana Lingkungan

- a. Pengembangan sistem perpipaan air minum di kawasan perkotaan Kecamatan Padaherang, Banjarsari, Lakbok, Pamarican, Mangunjaya yang menggunakan sumber air baku bendung manganti;
- b. Pengembangan sistem perpipaan di kawasan perkotaan Kecamatan Cijeungjing, Cisaga, Rajadesa, Ciamis, Cihaurbeuti, Sadananya, Jatinagara, Kawali, Panumbangan, Sindangkasih, Baregbeg Dan Cikoneng menggunakan sumber air baku Sungai Cimuntur dan Sungai Citanduy;
- c. Pengembangan sistem perpipaan di kawasan perkotaan Kecamatan Tambaksari, Rancah, Sukadana, Cipakau menggunakan sumber air baku dari Sungai Cijolang atau Cimuntur;
- d. Pengembangan sistem perpipaan di kawasan perkotaan parigi, Sidamulih, Pangandaran, Cijulang, Kalipucang dengan sumber air baku Sungai Cikole dan penambahan sumber air baku dari Sungai Cijalu dan Sungai Kalipucang untukantisipasi peningkatan langganan;
- e. Jalur evakuasi bencana gerakan tanah tinggi di Kecamatan Sukamantri, Panawangan, Rajadesa, Rancah, Tambaksari, Sukadana, Cidolog, Pamarican, Banjarsari, Langkaplancar, Kalipucang dan Sidamulih yang mudah diakses menuju ruang evakuasi bencana yang aman berupa fasilitas umum dan fasilitas sosial yang dilengkapi prasarana dan sarana pendukung proses evakuasi bencana;
- f. Jalur evakuasi bencana gempa bumi di Kecamatan Cimerak, Cijulang, Cigugur, Parigi, Sidamulih, Pangandaran dan Kalipucang yang mudah diakses menuju ruang evakuasi bencana yang aman berupa ruang terbuka hijau yang dilengkapi prasarana dan sarana pendukung proses evakuasi bencana;
- g. Jalur evakuasi bencana banjir di Kecamatan Cisaga, Cijeungjing, Pamarican, Banjarsari, Purwodadi, Mangunjaya, Padaherang, Kalipucang, Sidamulih, Pangandaran, Parigi dan Cijulang yang mudah diakses menuju ruang evakuasi bencana yang aman dari banjir berupa fasilitas umum dan fasilitas sosial ditempat lebih tinggi yang dilengkapi prasarana dan sarana pendukung proses evakuasi bencana; dan

- h. Jalur evakuasi bencana tsunami di Kecamatan Cimerak, Cijulang, Parigi, Sidamulih, Pangandaran dan Kalipucang yang mudah diakses menuju ruang evakuasi bencana yang aman berupa fasilitas umum dan fasilitas sosial ditempat lebih tinggi yang dilengkapi prasarana dan sarana pendukung proses evakuasi bencana.
 - i. Optimalisasi instalasi pengolahan limbah terpadu (IPLT) Cimaragas untuk melayani Kecamatan Ciamis, Cikoneng, Sadananya, Baregbeg, Cijeungjing, Sukadana, Cisaga, Sindangkasih dan Cihaurbeuti;
 - j. Optimalisasi IPLT pangandaran untuk melayani Kecamatan Pangandaran, Kalipucang, Sidamulih, Cijulang, Cimerak, Parigi, Cigugur dan Langkaplancar;
 - k. Pembangunan IPLT banjarsari untuk melayani Kecamatan Banjarsari, Padaherang, Lakbok, Mangunjaya, Pamarican, Cimaragas, Cidolog dan Purwadadi;
 - l. Pembangunan IPLT kawali untuk melayani Kecamatan Kawali, Jatinegara, Rajadesa, Panawangan, Cipaku, Lumbang, Rancah, Tambaksari, Panjalu, Panumbangan dan Sukamantri;
6. Rencana Kawasan Lindung
- a. Kawasan perlindungan setempat, yaitu:
 - Sempadan Pantai di Kecamatan Kalipucang, Pangandaran, Sidamulih, Parigi, Cijulang dan Cimerak
 - Sempadan Mata Air terdapat di Parigi, Cimerak, Sidamulih, Panumbangan, Panawangan, Langkaplancar, Purwadadi, Cipaku, Cisaga, Padaherang, Banjarsari, Rajadesa, Pamarican, Cimaragas, Rancah, Cikoneng, Cihaurbeuti, Panumbangan, Panjalu, Kawali dan lain- lain.
 - b. Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya; berupa kawasan pantai berhutan bakau/ mangrove di Kecamatan Kalipucang, Pangandaran, Sidamulih, Parigi, Cijulang dan Cimerak;

- c. Kawasan rawan bencana alam, yaitu:
- kawasan rawan banjir di Kecamatan Cisaga, Cijeungjing, Pamarican, Banjarsari, Purwodadi, Mangunjaya, Padaherang, Kalipucang, Sidamulih, Pangandaran, Parigi dan Cijulang.
 - kawasan rawan gempa bumi tektonik di Kecamatan Cimerak, Cijulang, Cigugur, Parigi, Sidamulih, Pangandaran dan Kalipucang
 - kawasan rawan gerakan tanah tinggi di kecamatan Kecamatan Sukamantri, Panawangan, Rajadesa, Rancah, Tambaksari, Sukadana, Cidolog, Pamarican, Banjarsari, Langkaplancar, Kalipucang dan Sidamulih; dan
 - kawasan rawan tsunami di Kecamatan Cimerak, Cijulang, Parigi, Sidamulih, Pangandaran dan Kalipucang.
 - kawasan Kars di kecamatan Cimerak, Cijulang, Parigi, Sidamulih, Pangandaran, Kalipucang, Pamarican, Banjarsari, Cigugur
- d. Kawasan lindung lainnya, yaitu:
- kawasan perlindungan plasma nutfah eks-situ, meliputi Pantai Majingklak, Karang Kamulyan, Panjalu dan Cukang Taneuh;
 - kawasan cadangan hutan lindung di Kecamatan Sukamantri, Panawangan, Rajadesa, Rancah, Tambaksari, Cisaga, Panumbangan, Panjalu, Lumbang, Kawali, Jatinegara, Sukadana, Cihaurbeuti, Sadananya, Baregbeg, Sindangkasih, Cimaragas, Cidolog, Pamarican, Langkaplancar, Banjarsari, Padaherang, Cimerak, Cigugur, Sidamulih, Pangandaran dan Kalipucang.

7. Rencana Kawasan Budidaya

- a. Kawasan peruntukan hutan produksi tetap di Kecamatan Kalipucang, Padaherang, Lakbok, Cisaga, dan Tambaksari, serta kecamatan lain yang tidak termasuk kawasan perbatasan,
- b. kawasan hutan rakyat terdapat di Kecamatan Tambaksari, Cisaga, Padaherang, Lakbok, Mangunjaya, Purwadadi, dan Kalipucang, serta kecamatan lain;
- c. kawasan peruntukan pertanian;

- d. kawasan peruntukan perkebunan;
- 1) peruntukan perkebunan besar di Purwadadi, Pamarican, Banjarsari, Cimerak, Tambaksari, Cipaku, Kawali, Cisaga, Kalipucang, Langkaplancar dan Cigugur; dan
 - 2) peruntukan perkebunan rakyat di Kecamatan Kawali, Jatinegara, Rajadesa, Panawangan, Cipaku, Lumbung, Rancah, Tambaksari, Panjalu, Panumbangan, Sukamantri, Ciamis, Cikoneng, Sadananya, Baregbeg, Cijeungjing, Sukadana, Cisaga, Sindangkasih, Cihaurbeuti, Banjarsari, Padaherang, Lakbok, Mangunjaya, Pamarican, Cimaragas, Cidolog, Purwadadi, Pangandaran, Kalipucang, Sidamulih, Cijulang, Cimerak, Parigi, Cigugur dan Langkaplancar.
- e. kawasan peruntukan perikanan;
- 1) perikanan tangkap, yaitu:
 - a) perairan Laut, yaitu daerah penangkapan ikan di Pangandaran, Parigi, Cijulang, Cimerak, Sidamulih, Kalipucang;
 - b) perairan Umum Rawa di Cimerak, Kalipucang, Padaherang, Banjarsari, Lakbok, Tambaksari, Rancah, Purwodari dan Mangunjaya;
 - c) perairan Umum Danau/ situ/ cekdam, di Cigugur, Langkaplancar, Kalipucang, Padaherang, Banjarsari, Pamarican, Cisaga, Tambaksari, Rajadesa, Sadananya, Panawangan, Kawali, Panjalu, Panumbangan, Sindangkasih, Lumbung, Sukamantri
 - 2) budidaya air tawar Jaring Apung, terdapat di Kecamatan Padaherang, Panjalu dan Cijulang;
 - 3) budidaya air payau/ tambak terdapat di Kecamatan Cimerak, Cijulang, Parigi, Pangandaran dan Kalipucang,
 - 4) budidaya kolam air tenang, dan
 - 5) budidaya air tawar minapadi, meliputi Kecamatan Kalipucang, Padaherang, Cisaga, Tambaksari, Purwadari, Mangunjaya, dan kecamatan lainnya.

- 6) Industri pengolahan ikan, meliputi Kecamatan Kalipucang, Padaherang, Lakkok, Cisaga, Tambaksari, Purwodadi, dan kecamatan lainnya.
- f. kawasan peruntukan pertambangan;
- 1) Lokasi tambang batu gamping terdapat di Kecamatan Padaherang, Kalipucang
 - 2) Fosfat, Batu belah, pasir kwarsa, dan air panas di Kecamatan Padaherang
 - 3) Zeolit di Munggangsempu-Tunggilis, di Kecamatan Kalipucang, Padaherang
 - 4) Kalsit dan breksi Andesit di Kecamatan Kalipucang
 - 5) Batu Andesit di Kecamatan Kalipucang, dan Tambaksari,
 - 6) Gambut di Kecamatan Purwodadi,
 - 7) Batu bara di Kecamatan Tambaksari,
- g. kawasan peruntukan industri; semua kecamatan yang berada di kawasan perbatasan Jabar-Jateng termasuk dalam arahan peruntukan industri besar, sedang, dan industri rumah tangga, yaitu: Kecamatan Cisaga, Padaherang, Lakkok, Mangunjaya, Purwadadi, dan Kalipucang, selain kecamatan lainnya,
- h. kawasan peruntukan pariwisata;
- 1) Objek wisata budaya Kampung Kuta dan Museum Fossil diarahkan di Kecamatan Tambaksari
 - 2) Objek wisata alam Lembah Putri, Karapyak, Palatar Agung dan Majingklak diarahkan pengembangannya di Kecamatan Kalipucang
 - 3) Objek wisata minat khusus Karang Nini dan Goa Donan dikembangkan di Kecamatan Kalipucang;
- i. kawasan peruntukan permukiman;
- 1) permukiman Perkotaan Kota Kalipucang di Desa Kalipucang dan Cibuluh
 - 2) permukiman Perkotaan Kota Padaherang di Desa Padaherang dan Karangpawitan

- 3) permukiman Perkotaan Kota Lakhok di Desa Lakhok, Cintajaya dan Sidaharja;
 - 4) permukiman Perkotaan Kota Cisaga di Desa Cisaga dan Mekarmukt
 - 5) permukiman perkotaan Tambaksari di Desa Tambaksari dan Kaso
 - 6) permukiman Perkotaan Kota Purwadadi di Desa Purwadadi
 - 7) permukiman Perkotaan Kota Mangunjaya di Desa Mangunjaya
 - 8) Kawasan permukiman perdesaan, yaitu di desa-desa yang tidak termasuk kedalam ibukota kecamatan
- j. kawasan peruntukan lainnya, meliputi: kawasan peternakan, kawasan pertanian keamanan, yaitu:
- 1) ternak besar kuda di Kecamatan Kecamatan Ciamis, Sadananya, Cikoneng, Cihaurbeuti, Banjarsari, Lakhok, Pangandaran, Padaherang, Parigi, Cimerak dan Sidamulih
 - 2) ternak kecil domba dan kambing di seluruh kecamatan
 - 3) ternak unggas ayam dan itik di seluruh kecamatan
 - 4) pos polair Pangandaran dengan sub pos Kalipucang, Pangandaran, Parigi dan Batukaras

G. Program-program Pembangunan Kawasan Perbatasan Jabar-Jateng

Pembangunan kawasan di perbatasan Jabar-Jateng telah dilakukan melalui upaya-upaya perencanaan berupa program-program pembangunan infrastruktur dan pemanfaatan ruang wilayah baik dari kewenangan Provinsi Jawa Barat maupun kewenangan Provinsi Jawa Tengah melalui kabupaten-kabupaten yang berbatasan di wilayah tersebut. Berikut adalah uraian program-program pembangunan kawasan di Jabar-Jateng dalam kurun waktu perencanaan 20 (dua puluh tahun) periode 2001-2030.

Tabel 4-7 Program-Program Pembangunan Infrastruktur di Kawasan Perbatasan Jabar-Jateng

No.	Program Wilayah Jabar	Lokasi Jabar	Lokasi Jateng	Program Wilayah Jateng
1.	Peningkatan sistem jalur tunggal (single track) menjadi sistem jalur ganda (double track) Losari - Brebes	Cirebon	Brebes	Peningkatan jalan di Jl.Losari-Bojongsari, dan pemeliharaan berkala Losari-Bojongsari (Hotmix)
2	Pembangunan jalan alternatif menuju Kabupaten Cilacap meliputi ruas Jalan Pamulihan - Mandapajaya - Kutaagung	Kuningan	Brebes	Peningkatan jalan di Jl Mandapajaya-Kota Agung (program brebes)
3	Pembangunan jalan alternatif menuju Kabupaten Brebes meliputi ruas Jalan Cipondok – Capar	Kuningan	Brebes	Peningkatan jalan di : Jl. Capar – Cimara Jl. Wanoja – Capar Jl. Capar – Ciangir
4	Pembangunan jalan antar kawasan di kawasan perbatasan	Kuningan	Brebes	Peningkatan jalan di Jl. Bojongsari-Cikakak Tahap IV
5	Peningkatan jalan Kuningan-Brebes melalui Cibingbin	Kuningan	Brebes	Peningkatan jalan di: Jl. Cibingbin-Banjarharja Jl. Malahayu-Cibingbin
6	Peningkatan jalan Kuningan Cilacap melalui Cimahi-Karangkencana	Kuningan		
7	Penataan infrastruktur kecamatan wilayah perbatasan Kabupaten Kuningan (2 PKLp)	Kuningan		
8	Pembangunan PLTMH dan jaringan listrik di wilayah perbatasan	Kuningan		
9	Pembangunan Waduk Cileuwung Desa Randusari, Kec. Cibingbin	Kuningan	Brebes	Pengelolaan dan Penataan Waduk Cileuwung
10	Pengaturan lintasan dan jadwal kereta api baik barang maupun penumpang di Kec. Langensari, Pataruman	Kota Banjar		
11	Meningkatkan akses pusat pelayanan dalam mendukung koleksi dan distribusi kawasan agropolitan di Kec. Langensari dan Pataruman	Kota Banjar	Brebes	Pembangunan dan perbaikan Jembatan Cijolang II (desa Panulisan, Purwaharja), dan Jembatan Citanduy II (desa Tarisi, Maruyungsari)
12	Pengembangan Terminal barang / Pergudangan di Kec. Pataruman	Kota Banjar		
13	Pemeliharaan jalan kolektor primer Jl. LL RE Martadinata (Ciamis), Ciamis-Kawali, Jl. Siliwangi (Kawali), Kalipucang – Majingklak, Kalipucang-Batas Jateng, Panaekan/Goler-Cimaragas-Batas Kota Banjar	Ciamis	Cilacap	Rencana pengembangan jalan Arteri Primer pada Perbatasan Jawa Barat-Cilacap Rencana pengembangan jalan kolektor Primer di : <ul style="list-style-type: none"> • Perbatasan Jawa Barat – Wangon, • Bandungsari – Penanggapan – Perbatasan Jawa Barat, • Patimuan – Sidareja – Cilacap
14	Pemeliharaan dan penyediaan terminal tipe C di Kecamatan Kalipucang, Cisaga, Puradadi,	Ciamis		

No.	Program Wilayah Jabar	Lokasi Jabar	Lokasi Jateng	Program Wilayah Jateng
	Tambaksari, Padaherang, Sidamulih, Mangunjaya, Lakbok			
15	Pemeliharaan pelabuhan penyeberangan Santolo dan Majingklak di Kecamatan Kalipucang	Ciamis	Cilacap	Rencana pengembangan Pelabuhan umum di Tanjung Intan Kabupaten Cilacap
16	Pengoperasioan lintas penyebarangan Sungai Citanduy dengan rute Kalipucang-Jawa Tengah	Ciamis	Brebes	Rencana Dermaga Sungai Kalipucang-Majingklak
17	Perencanaan jaringan listrik di wilayah perbatasan dan terisolir	Ciamis	Brebes	Penerangan Jalan Umum Wilayah Perbatasan (termasuk pembangunan tugu batas)
			Cilacap	Pengembangan jaringan transmisi listrik di jalur Selatan terhubung Tasikmalaya-Cilacap-Kebumen-Purworejo-Klaten- Pedan-Wonogiri-Kediri; Gardu Induk 500/150 kV-Pedan- Ungaran
18	Penyelarasan infrastruktur pada kawasan perbatasan	Ciamis	Cilacap	Rencana Pengembangan jalan tol sepanjang Perbatasan Jawa Barat – Pejagan – Pemalang – Batang – Semarang
			Cilacap	Rencana Pengembangan jalan tol sepanjang Ciamis – Cilacap – Yogyakarta

Sumber: Dokumen RTRW Kabupaten/Kota terkait.

Tabel 4-8 Program-Program Pembangunan Pemanfaatan Ruang di Kawasan Perbatasan Jabar-Jateng

No.	Program Wilayah Jabar	Lokasi Jabar	Lokasi Jateng	Program Wilayah Jateng
1.	Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang di Koridor Jalan Tol Kanci - Ciledug, dan Koridor Jalan Pantura Kanci - Losari	Cirebon	Brebes	Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Strategis Cibening
			Brebes	Pembangunan pos lalu lintas ternak di Bojongsari wil. perbatasan dengan Ciledug-Cirebon, serta optimalisasi pelayanan pos lalu lintas ternak di perbatasan.
			Brebes	Pengembangan Promosi Paket Wisata di wilayah perbatasan
2	Penyusunan Tata Ruang Perbatasan antar provinsi	Cirebon		
3	Pengembangan dan Penataan Kawasan Perdagangan dan Jasa di Kecamatan Ciledug dan Losari	Cirebon		
4	Penyusunan Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa (KTP2D) dan Pusat pelayanan lingkungan di Kecamatan Pabedilan, Pasaleman	Cirebon		
5	Perlindungan Kawasan Lindung	Cirebon	Cilacap	Perlindungan terhadap kawasan lindung : hutan lindung, sempadan pantai, kawasan Cagar Alam Cagar

No.	Program Wilayah Jabar	Lokasi Jabar	Lokasi Jateng	Program Wilayah Jateng
				Alam Nusakambangan Barat, Cagar Alam Nusakambangan Timur, Cagar Alam Wijaya Kusuma, Cagar Alam Karangbolong
6	Larangan Tambak di Losari	Cirebon		
7	Perintisan pengembangan Kawasan Industri Koridor Mundu – Losari	Cirebon		
8	Peningkatan kegiatan ekonomi di PKL	Cirebon		
9	Perencanaan DAS	Kuningan	Brebes	Penyodetan dan pelurusan sungai Citanduy untuk mengurangi sedimentasi di wilayah Segara Anakan, dan rehabilitasi Tanggul S.Cisanggarung
10	Penyusunan RDTR PKLp Kecamatan Cibingbin dan Subang	Kuningan		
11	Mempertahankan lahan sawah yang beririgasi teknis untuk mendukung program ketahanan pangan nasional	Kuningan		
12	Pembangunan kawasan sentra industri kecil menengah dan pariwisata, serta perumahan baru terutama wilayah kecamatan yang terletak di sepanjang jalan koridor provinsi dan jalur kolektor tengah serta wilayah kecamatan di sebelah utara Kabupaten Kuningan	Kuningan		
13	Bantuan Teknik Perencanaan KTP2D Kec. Cibereum	Kuningan		
14	PSD KTP2D di Kec. Cibereum, Cibingbin	Kuningan		
15	Penyusunan RTBL Kawasan Terminal (Kawasan Strategis)	Kuningan		
16	Koordinasi, inventarisasi dan penyusunan rencana strategis penanganan lahan kritis	Kota Banjar		
17	Program Pengendalian Erosi dan Konservasi Air di Kec. Purwahrja	Kota Banjar		
18	Peningkatan fungsi lindung untuk kawasan hutan produksi dan penataan & rehabilitasi kawasan lindung di luar hutan produksi di Kec. Purwahrja dan Pataruman	Kota Banjar		
19	Pengembangan industri kecil dan menengah dengan dukungan sarana dan prasarana lingkungan di Kecamatan Pataruman dan Langensari	Kota Banjar		
20	Penyediaan atau pencadangan lahan basah dalam mendukung kawasan agropolitan, Kec. Pataruman dan Langensari	Kota Banjar		
21	Pemeliharaan dan Rehabilitasi di bagian hilir DWS Citanduy di	Ciamis	Brebes	Konservasi Lahan DAS Hulu Segara Anakan, dan rehabilitasi

No.	Program Wilayah Jabar	Lokasi Jabar	Lokasi Jateng	Program Wilayah Jateng
	Kalipucang, Padaherang dan Mangunjaya			Lahan Kritis DAS Citanduy dan DAS Cisanggarung
			Cilacap	Pengembangan Sungai di wilayah Sungai Citanduy dan pengendalian daya rusak air
			Cilacap	Pengendalian kawasan rawan bencana banjir, tanah lonsor, tsunami, abrasi, dll, serta kawasan imbuhan air: Cekungan Nusa Kambangan, Cekungan Cilacap., juga kawasan perlindungan plasma nutfah. Rehabilitasi dan atau reboisasi kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Alam yang mengalami kerusakan
22	Penanaman dan pemeliharaan hutan bakau di kawasan perbatasan antar provinsi, perlindungan terumbu karang, dll.	Ciamis		
23	Pengembangan lahan sawah abadi, agroindustri, dan fasilitas agribisnis lainnya	Ciamis	Brebes	Pengembangan Tanaman Pangan yg berbasis lokal di wilayah perbatasan
24	Pengembangan sarana angkutan orang dan barang untuk menunjang produksi pedesaan	Ciamis		
25	Peningkatan dan penataan sarana dan prasarana Kawasan Strategis Lumbung Padi di Kecamatan Padaherang, Lakbok, Mangunjaya, Purwadadi	Ciamis		Pengendalian dan Pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Pengendalian dan Pengembangan Lahan Kering untuk Hortikultura dan Perkebunan
26	Penyusunan RDTR KSK Perbatasan Kabupaten Koridor Utara dan Koridor Barat	Ciamis	Brebes	Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Strategis Pacangsanak
27	Penyediaan pasar kecamatan, pasar desa, dan puskesmas di Kecamatan Cisaga, Tambaksari, Padaherang, Lakbok, Mangunjaya, Purwadadi, dan Kalipucang.	Ciamis	Cilacap	Percepatan Pengembangan Kota-kota PKL untuk mendorong pengembangan kota-kota Sentra Produksi PKL yang Berbasis otonomi daerah. Revitalisasi dan percepatan pengembangan kota-kota pusat pertumbuhan lokal
			Brebes	Mitigasi Bencana Alam Banjir dan Kekeringan di Kaw.Segara Anakan
			Brebes	Inventarisasi Daerah Rawan Bencana Kaw. Perbatasan Jabar-Jateng;
			Cilacap	Perwujudan Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata: Pengembangan Pusat pengembangan pariwisata: Nusa Kambangan, Gunung Selok, Benteng Pendem, Pantai Widara Payung dan Segara Anakan
			Brebes	Penegasan Batas Wilayah Perbatasan: Inventarisasi dan

No.	Program Wilayah Jabar	Lokasi Jabar	Lokasi Jateng	Program Wilayah Jateng
				pemeliharaan pilar batas yg telah ditegaskan dalam Permendagri
			Brebes	Peningkatan koordinasi dan Pemantapan kerjasama antar daerah Kab./Kota dan daerah perbatasan dalam rangka peningkatan keamanan
			Brebes	Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan berupa kerjasama penanganan Penyakit menular, Penurunan AKI dan AKB
			Brebes	Peningkatan pelayanan pendidikan di wilayah perbatasan (khususnya penerimaan siswa baru dan pemberian beasiswa)

Sumber: Dokumen RTRW Kabupaten/Kota terkait.

Berdasarkan uraian kebijakan pembangunan kawasan dan tinjauan terhadap dokumen perencanaan terkait, diperoleh kawasan-kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan strategis baik di lingkup nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota. Kawasan yang memiliki nilai strategis adalah kawasan yang memiliki pengaruh sangat penting terhadap keamanan, ekonomi, sosial budaya, serta lingkungan sehingga penataan wilayahnya diprioritaskan.

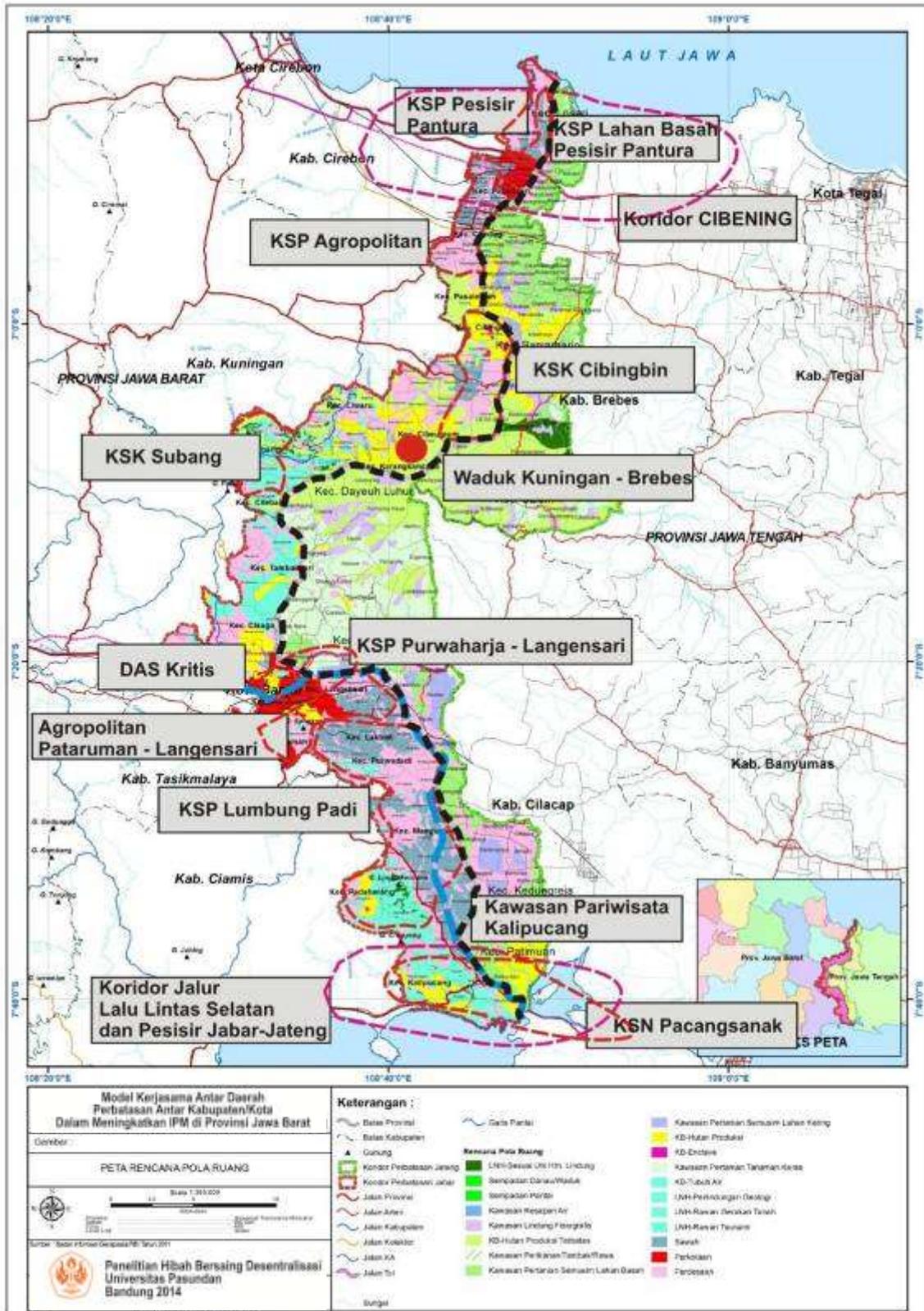
Dalam lingkup nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota, di kawasan perbatasan Jabar-Jateng terdapat kawasan-kawasan strategis yang telah ditetapkan dalam kebijakan pembangunan daerah dan memiliki dokumen perencanaan tertentu dengan masing-masing program prioritas yang ditetapkan di wilayah tersebut. Wilayah di perbatasan Jabar sebelah timur yang ditetapkan sebagai kawasan strategis dengan fungsi tertentu pada umumnya berperan sebagai kawasan yang berpengaruh terhadap pengembangan ekonomi, dan pelestarian lingkungan. Berikut adalah persebaran kawasan strategis berdasarkan kebijakan pembangunan yang terdapat di wilayah perbatasan Jabar-Jateng.

Tabel 4-9 Kawasan Strategis Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota di Wilayah Perbatasan Jabar-Jateng

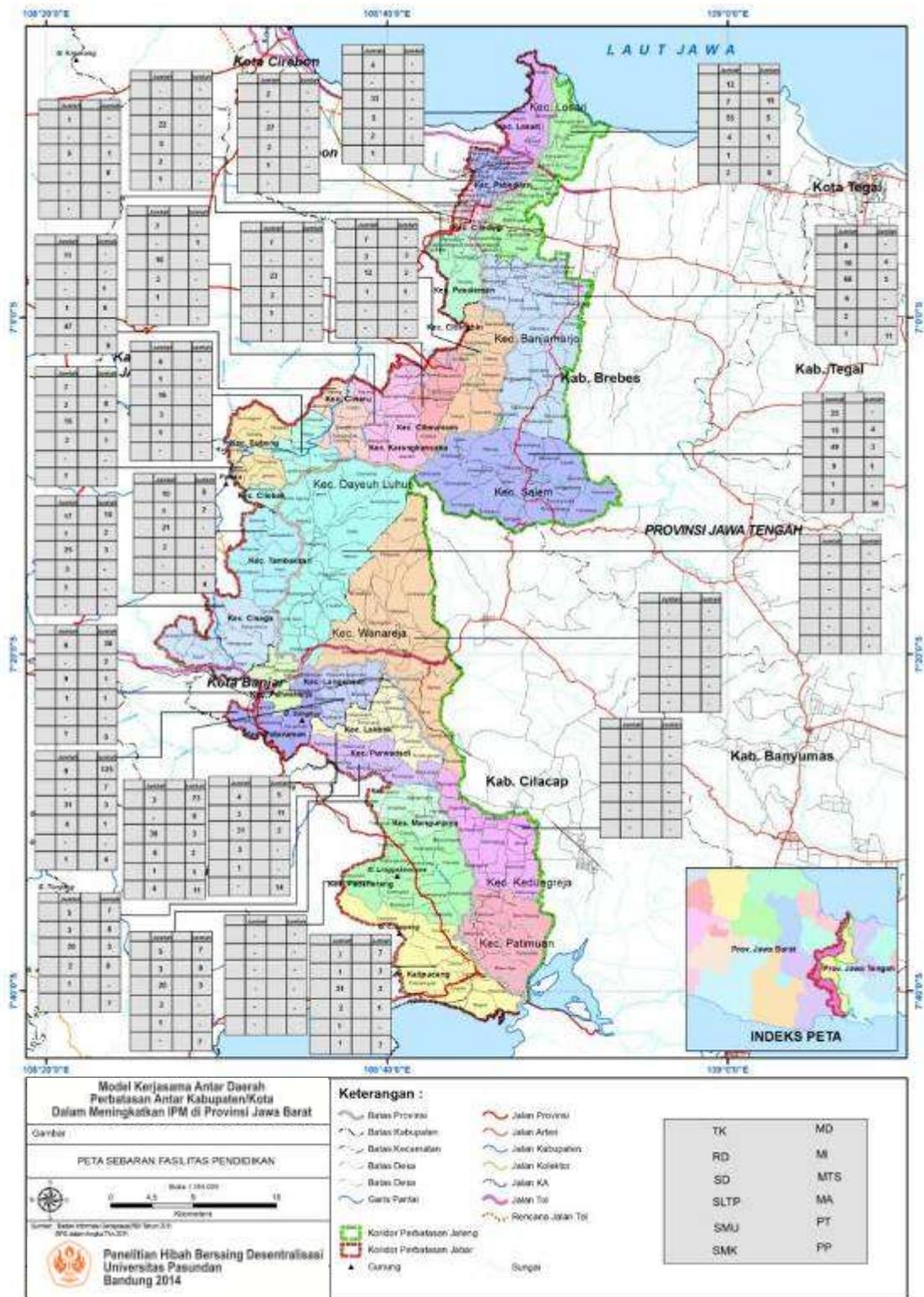
No.	Kawasan Strategis	Sudut Kepentingan	Lingkup	Lokasi
1	Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Cibening	Ekonomi	Nasional (KSN)	Kawasan perbatasan Jabar-Jateng yg terletak di Cirebon dan Kuningan yang termasuk kawasan CIBENING
2	KSP Pacangsanak	Lingkungan	Nasional (KSN)	Kabupaten Ciamis dan Kab. Cilacap
3	KSP Lumbung Padi	Ekonomi	Provinsi dan Nasional (KSN)	Kecamatan ² di Kota Banjar – Kab. Ciamis

No.	Kawasan Strategis	Sudut Kepentingan	Lingkup	Lokasi
4	KSP Pantura	Lingkungan	Provinsi	Kec. Losari Kab. Cirebon
5	KSK Pertanian Lahan Basah Pantura	Ekonomi	Provinsi	Kabupaten Cirebon
6	KSP Purwaharja – Langensari	Lingkungan	Provinsi	Kota Banjar
7	KSK Agro Ciledug	Ekonomi	Kabupaten	Kecamatan Ciledug – Kab. Cirebon
8	KSK Subang	Ekonomi	Kabupaten	Kecamatan Kab. Kuningan
9	KSK Cibingbin	Ekonomi	Kabupaten	Kec. Cibingbin – Kab. Kuningan
10	KSK Agropolitan	Ekonomi	Kabupaten	Kecamatan Pataruman – Langensari di Kota Banjar
11	KSK Lumbung Padi	Ekonomi	Kabupaten	Kecamatan Padaherang, Lakbok, Mangunjaya, Purwadadi di Kab. Ciamis
12	KSK Koridor Jalur Lalu Lintas Selatan dan Perbatasan antar provinsi Jateng	Ekonomi	Kabupaten	Kawasan industri perbatasan di Kab. Ciamis - Cilacap
13	KSK Kalipucang (pariwisata)	Ekonomi	Kabupaten	Kec. Kalipucang di Kab. Ciamis
14	KS Waduk Kuningan	Ekonomi dan Lingkungan	-	Kab. Kuningan

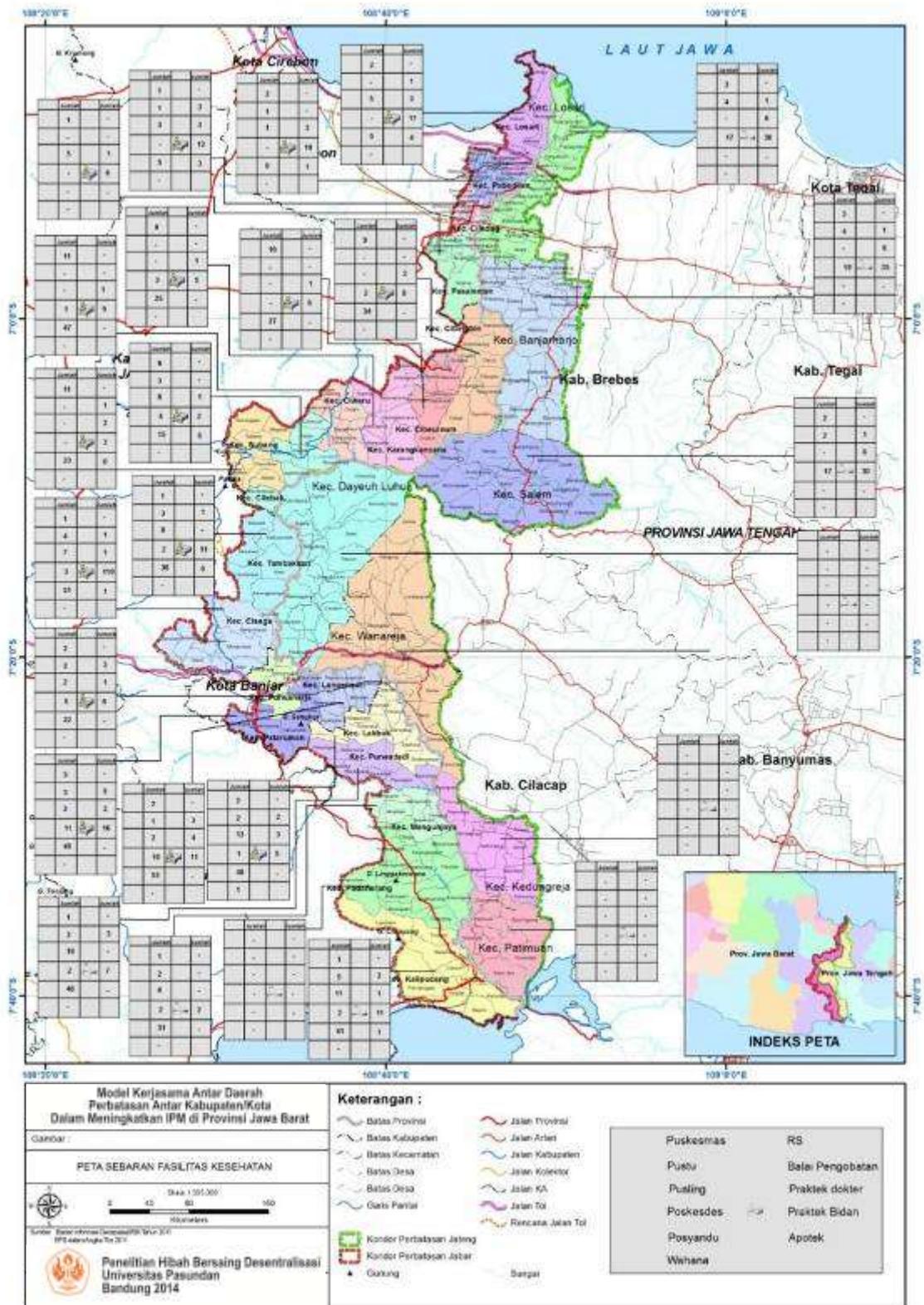
Sumber: Rekapitulasi Kebijakan, 2014.



Gambar 4-8 Peta Kawasan Strategis Berdasarkan Kebijakan Nasional, Provinsi, dan Tingkat Kabupaten/Kota di Wilayah Perbatasan Jabar-Jateng



Gambar 4-10 Peta Sebaran Sarana Pendidikan di Kawasan Perbatasan Provinsi Jawa Barat-Jawa Tengah



Gambar 4-12 Peta Sebaran Sarana Kesehatan di Kawasan Perbatasan Provinsi Jawa Barat-Jawa Tengah

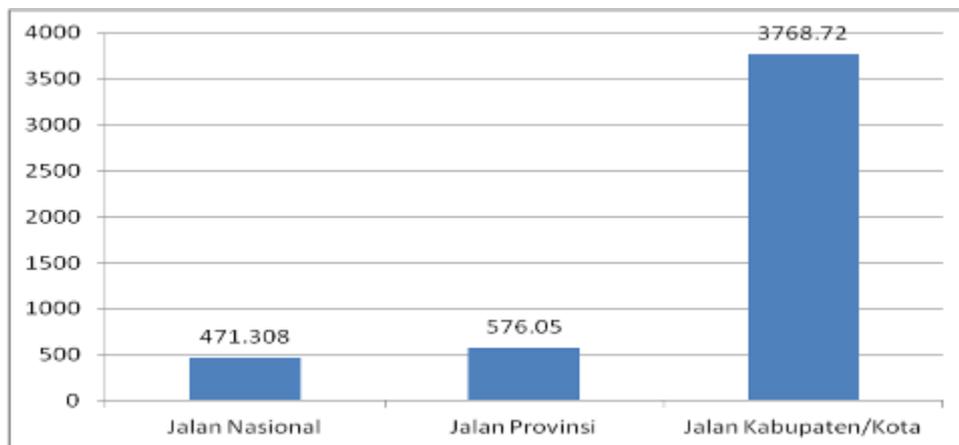
Keberadaan prasarana transportasi misalnya jalan dapat dijadikan sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Pembangunan di daerah terpencil sulit untuk dilaksanakan jika tidak ada akses menuju ke tempat tersebut. Ketersediaan jalan dapat memudahkan pergerakan orang maupun barang serta aktivitas pembangunan lainnya di suatu wilayah yang akan dikembangkan.

Pengembangan wilayah dalam struktur tata ruang Jawa Barat sampai saat ini masih terjadi ketimpangan. Dalam konteks wilayah utara-tengah-selatan Jawa Barat, terjadi pemusatan pertumbuhan perkotaan yang sangat pesat di wilayah utara dan tengah, sementara wilayah perdesaan di selatan Jawa Barat kurang mendapat sentuhan pemerataan pembangunan. Sementara itu di wilayah perbatasan masih terjadi ketidaksetaraan dalam penyediaan sarana dan prasarana dasar permukiman maupun prasarana jalan. Pada tahun 2010, jalan dengan status jalan kabupaten/kota di Kawasan Perbatasan Jabar-Jateng panjangnya adalah 3.768,72 Km (lihat **Gambar 4-13**).

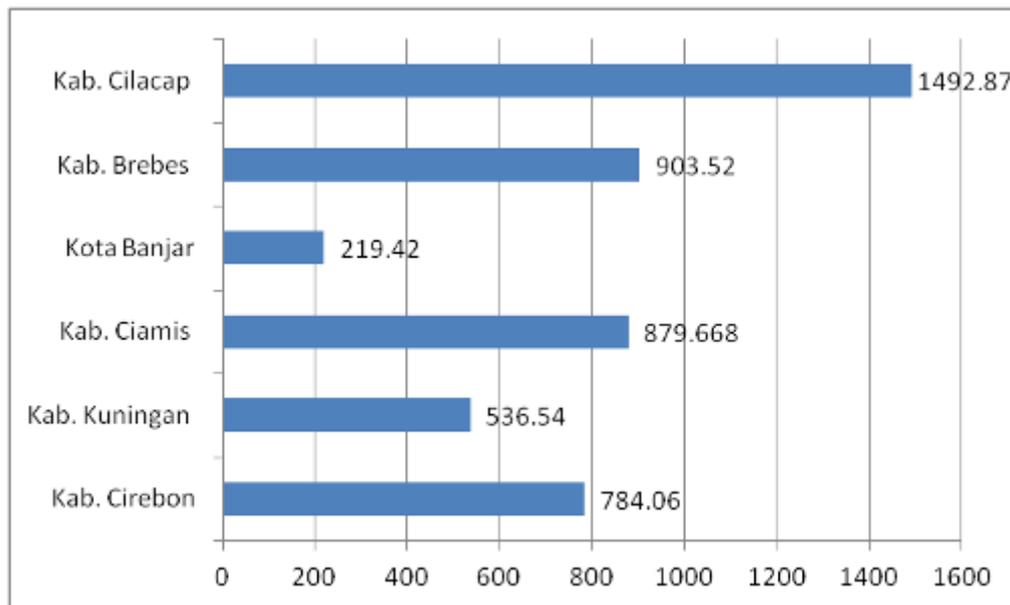
Tabel 4-10 Panjang Jalan (km) Kabupaten/Kota di Kawasan Perbatasan Jabar-Jateng Tahun 2010

No	Wilayah	Panjang Jalan (km)	Status		
			Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten
1	Kab. Cirebon	784,060	88,500	53,200	642,360
2	Kab. Kuningan	536,540	0,000	102,140	434,400
3	Kab. Ciamis	879,668	97,928	59,440	722,300
4	Kota Banjar	219,420	14,700	91,070	113,650
5	Kab. Brebes	903,520	61,190	167,490	674,840
6	Kab. Cilacap	1492,870	208,990	102,710	1181,170

Sumber: Kabupaten Dalam Angka, 2013



Gambar 4.13 Panjang Jalan (km) Berdasarkan Status Jalan di Kawasan Perbatasan Jabar-Jateng 2010



Gambar 3.14 Jumlah Panjang Jalan (km) Berdasarkan Kabupaten Kota di Kawasan Perbatasan Jabar-Jateng 2010

Di antara enam kabupaten/kota yang disebutkan di atas, Kabupaten Cilacap memiliki panjang jalan terpanjang dengan panjang 1.492,87 Km, sedangkan Kota Banjar memiliki panjang jalan terpendek dengan panjang 219,42 Km.

H. Perekonomian

Kegiatan ekonomi wilayah kawasan strategis perbatasan (KSP) Jabar-Jateng dipengaruhi oleh kebijakan pembangunan ekonomi secara makro di setiap kabupaten/kota sesuai dengan struktur dan jangkauan pelayanan, serta ketersediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan ekonomi masyarakat. Selain itu, keberadaan potensi sumber daya alam yang dikelola oleh masyarakat turut memperlihatkan bentuk-bentuk dan pola kegiatan perekonomian wilayah.

Kawasan perbatasan Jabar-Jateng yang terdiri dari beragam potensi kondisi wilayah dan sumber daya melimpah yang pada umumnya masih bergerak dalam sektor ekonomi primer berupa kegiatan pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan, dan peternakan, serta industri pengolahan makanan dalam skala kecil. Hal ini berkaitan dengan karakteristik penggunaan lahan yang didominasi oleh penggunaan lahan tidak terbangun

yang masih alami. Namun demikian, pada beberapa wilayah perkotaan atau pusat kegiatan ekonomi turut ditopang oleh kegiatan sektor jasa dan perdagangan.

Adapun gambaran umum perekonomian di Kawasan Perbatasan Jabar-Jateng ini dapat dilihat pada Produk Domestik Regional Bruto dan Produksi Komoditi di wilayah perbatasan Jabar-Jateng. Secara lebih rinci, dapat dilihat pada uraian berikut ini.

1. Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencerminkan seluruh nilai barang dan jasa yang dihasilkan suatu wilayah dalam satu tahun. Berdasarkan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik, didapat matriks Produk Domestik Regional Bruto masing-masing wilayah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Tengah yang dapat dilihat pada tabel selanjutnya.

2. Produksi Sektor Pertanian

Sebagaimana diuraikan pada uraian sebelumnya, bahwa Kawasan perbatasan Jabar-Jateng pada umumnya masih bergerak dalam sektor ekonomi primer berupa kegiatan pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan, dan peternakan. Oleh karena itu, pada sub-bab ini akan menguraikan tentang produksi komoditi pada sub-sektor ekonomi primer (pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan).

a) Tanaman Bahan Makanan

Sub-sektor ini mencakup komoditi tanaman bahan makanan seperti padi, jagung, ketela pohon, ketela rambat, kacang-kacangan, sayur-sayuran dan buah-buahan.

b) Tanaman Perkebunan

Komoditi yang dicakup disini adalah hasil tanaman perkebunan yang diusahakan oleh rakyat seperti karet, kopra, kopi, kapok, tebu, cengkeh, pala dan sebagainya. Termasuk produk turunannya dan hasil-hasil pengolahan sederhana seperti minyak kelapa rakyat, kopi olahan dan pala olahan.

c) Peternakan dan Hasilnya

Sub-sektor ini mencakup produksi ternak besar, ternak kecil, unggas, maupun hasil ternak seperti sapi, kerbau, kerbau, babi, kambing, domba, telur serta hasil pemotongan ternak.

d) Perikanan

Komoditi yang dicakup adalah semua hasil dari kegiatan perikanan laut, periaran umum, tambak, kolam, keramba serta pengolahan sederhana (penggaraman dan pengasapan ikan).

I. Isu-isu Strategis Kawasan Perbatasan Jabar-Jateng

Isu-isu strategis kawasan perbatasan Jabar-Jateng diantaranya :

1. Rendahnya nilai indeks aksesibilitas dan mobilitas rata-rata jaringan jalan dibandingkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk jaringan jalan provinsi (terutama di jalur jalan vertikal yang menghubungkan wilayah tengah dan selatan Jawa Barat) serta jaringan jalan nasional.
2. Terhambatnya pengembangan, perbaikan, atau pembangunan jalan yang menghubungkan wilayah-wilayah yang berada di kawasan perbatasan Jabar-Jateng
3. Minimnya kualitas penataan terminal sebagai tempat pertukaran moda
4. Ketidaksinkronan fungsi dan kelas jalan di wilayah perbatasan sehingga seolah menghasilkan "terputusnya" aliran pergerakan manusia, barang, dan jasa.
5. Belum meratanya pelayanan prasarana jaringan utilitas: air bersih, drainase, limbah dan sampah, telekomunikasi
6. Pembangunan dan pelayanan sarana pendidikan, kesehatan, permukiman, industri, perekonomian dan perbankan, serta lainnya tidak merata
7. Potensi pertanian, perkebunan, perikanan, maupun potensi lainnya yang belum dioptimalkan
8. Kemampuan sumber daya manusia yang rendah menyebabkan kawasan perbatasan Jabar-Jateng menjadi kantong kemiskinan
9. Belum terintegrasinya penataan ruang wilayah perbatasan; pemanfaatan kawasan budidaya (misal industri) yang berdampingan dengan kawasan lindung tanpa buffer zone, atau kawasan permukiman yang berbatasan dengan kawasan industri tanpa pembatas berupa jalur hijau
10. Belum optimalnya kerjasama antar daerah dalam pemanfaatan sumber daya alam, seperti pemanfaatan waduk Kuningan di Kecamatan Cibeureum

11. Alih fungsi lahan pertanian, perambahan hutan, penambangan pasir, menyebabkan turunnya kualitas lingkungan dan sumber daya alam
12. Abrasi pantai dan munculnya delta di kawasan Perbatasan antar provinsi Pantura yang berada di wilayah perbatasan Jabar-Jateng (sekitar Kalirahayu dan Tawang Sari, Kabupaten Cirebon), diduga akibat alih fungsi hutan mangrove oleh kegiatan tambak dan kegiatan budidaya lainnya
13. Merambahnya alih fungsi lahan pertanian lahan basah/sawah basah menjadi kawasan industri dan kawasan permukiman di wilayah Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon sebagai dampak dari pengembangan Koridor Mundu-Losari
14. Sedimentasi di catchment area Sungai Citanduy yang mengakibatkan pendangkalan Segara Anakan, menyebabkan luasan tinggal 600 Ha dari luas awal 6.450 Ha sejak tahun 1903 yang mempengaruhi Kawasan Pacangsanak

Terhambatnya alur transportasi sungai karena pendangkalan sungai yang mengakibatkan mati surinya beberapa dermaga, contohnya Dermaga Majingklak. Adapun kerusakan lahan di hulu dan tengah DAS Citanduy mengakibatkan banjir di wilayah sekitarnya.

4.3. Kategorisasi Fisik Geografis

Kategorisasi fisik geografis dalam penelitian ini di dasarkan kepada pembagian karakter antara keadaan pembeda yang mencolok antar kecamatan-kecamatan yang berbatasan baik antar Kabupaten Kota maupun kecamatan yang bernatasan antar provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Tengah. Kategorisasi yang paling membedakan antara lain adalah di tunjukkan dengan kondisi georgafis pegunungan dan kondisi geografis pesisir.

Dalam penelitian ini kondisi geografis berdasarkan kategorisasi wilayah pesisir dan pegunungan di deskripsikan sebaga berikut :

Tabel 4-11 Kategorisasi Perbatasan di Wilayah Pegunungan dan Pesisir

No	Kategorisasi Fisik Geografis		Tofografi	Klimatologi	Jenis Tanah
A.	Wilayah Pegunungan				
	Wilayah Jawa	Wilayah Jawa Tengah			
I	Kab. Cirebon	Kab. Brebes Kec. Salem Kec. Banjarharjo	Bentang alam kawasan perbatasan Jabar-Jateng di Provinsi Jawa Barat terdiri dari karakteristik daerah pantai di bagian utara dan selatan, sedangkan bagian tengah berupa daerah dataran dan perbukitan. Morfologi berupa dataran rendah dengan ketinggian antara 0-12 m di atas permukaan laut terdapat di bagian utara yaitu Kecamatan Losari, Ciledug, dan Pabedilan Kabupaten Cirebon, sedangkan Kecamatan Pasaleman di Kabupaten Cirebon berada pada ketinggian di atas 12 m dpl. Topografi kawasan perbatasan yang termasuk Kabupaten Kuningan merupakan dataran dengan ketinggian antara 120-222 m dpl. Sementara itu, Kecamatan Pataruman dan Purwaharja di Kota Banjar pada umumnya berada pada ketinggian 100 m dpl, sedangkan Kecamatan Langensari berada pada ketinggian kurang dari 25 m dpl. Begitu pula halnya dengan kondisi fisiografi di Kecamatan Laktok dan Padaherang Kabupaten Ciamis memiliki ketinggian lahan	termasuk beriklim tropis. Jumlah hari hujan di Kecamatan, Pabedilan, Ciledug, dan Pasaleman rata-rata sebesar 12 hari hujan dengan curah hujan rata-rata 2.504 mm. Jumlah hari hujan di Kabupaten Kuningan secara umum mencapai 156 hari dengan curah hujan mencapai 2995 mm per tahun. Adapun rata-rata curah hujan di Kota Banjar dalam setahun mencapai 4900 mm pada tahun 2010 dan jumlah hari hujan 177 hari. Curah hujan tertinggi terjadi pada Bulan Januari dan Desember.	Kondisi geologi di wilayah Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis terbentuk oleh struktur geologi yang didominasi oleh endapan gunung api tua disertai gunung api muda, formasi tapak, formasi gunung api Galunggung, aluvium, lalu ke selatan hingga ke Kalipucang berupa batu gamping. Kondisi geologi turut mempengaruhi kondisi jenis tanah di wilayah studi. Kabupaten Kuningan memiliki tanah yang subur yang berasal dari endapan vulkanis. Sementara itu, tingkat kesuburan tanah di Kota Banjar tergolong baik
	Kec. Pasaleman				
	Kec. Ciledug				
	Kec. Pabedilan				
II	Kab. Kuningan				
	Kec. Subang				
	Kec. Cilebak				
	Kec. Ciwaru				
	Kec. Karagkancana				
	Kec. Cibingbin				
	Kec. Cibeureum				
III	Kota Banjar	Kab. Cilacap Kec. Dayeuhluhur Kec. Wanareja Kec. Kedungreja Kec. Kampunglaut			
	Kec. Purwaharja				
	Kec. Pataruman				
	Kec. Langensari				
IV	Kab. Ciamis				
	Kec. Laktok				
	Kec. Cisaga				
	Kec. Tambaksari				
	Kec. Purwadadi				
	Kec. Mangunjaya				
B.	Wilayah Pesisir				
	Wilayah Jawa	Wilayah Jawa Tengah			
	Kec. Losari	Kec. Losari	Karakteristik fisik berdasarkan kemiringan di pantai utara lebih landai dibandingkan dengan karakteristik pantai selatan. Kemiringan lereng di wilayah studi pada umumnya berkisar antara 0-2% dan 0-8%. Namun demikian, pada kawasan lainnya yang berupa perbukitan cenderung memiliki kemiringan lahan 8%.	Wilayah Pesisir dalam setahun mencapai 4900 mm pada tahun 2010 dan jumlah hari hujan 177 hari. Curah hujan tertinggi terjadi pada Bulan Januari dan Desember.	Sementara di Wilayah Pesisir Kecamatan Losari di Kabupaten Cirebon memiliki Jenis Tanah aluvial sedangkan di Pesisir Selatan terdiri dari jenis tanah latosol
	Kec. Kalipucang	Kec. Patimuan			

Sumber : Hasil Analisis 2014

4.4 Kategorisasi Berdasarkan Jenis Perbatasan

Identifikasi berdasarkan kategorisasi jenis perbatasan dalam penelitian ini di bedakan menjadi perbatasan antar kabupaten di Jawa Barat dan perbatasan antar kabupaten antar provinsi. Kategori jenis perbatasan ini substansi yang akan dibedakan adalah berdasarkan identifikasi pola ruang, identifikasi pola dan kesempatan dalam kerjasama.

A. Kategorisasi Kecamatan Yang Berbatasan Dengan Kabupaten Lain di Jawa Barat

Identifikasi perbatasan kecamatan yang berbatasan dengan kecamatan antar kabupaten di Provinsi Jawa Barat meliputi fungsi dari ruang antar kecamatan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan rencana struktur dan pola ruang pada masing-masing RTRW. Dalam hal ini terdapat beberapa kecamatan sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.12 Kecamatan yang berbatasan antar Kabupaten

Kecamatan Berbatasan antar Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah		Arahan Keserasian Pola Pemanfaatan Ruang
Kabupaten Cirebon	Kabupaten Kuningan	
1. Kecamatan Pasaleman diperuntukan sebagai kawasan resapan air, sempadan sungai, kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan permukiman	1. Kecamatan Cibingbin diperuntukan sebagai Kawasan peruntukan hutan produksi, Kawasan peruntukan tanaman pangan, Perkebunan rakyat, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Kawasan peruntukan permukiman	Menyerasikan Sistem jaringan dan Pola Guna Lahan dan Membuka Keterisolasian <i>remote area</i> .
Kabupaten Kuningan	Kabupaten Ciamis	
2. Kecamatan. Cilebak diperuntukan sebagai Kawasan peruntukan hutan produksi, Kawasan peruntukan tanaman pangan, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Kawasan peruntukan permukiman	2. Kec. Tambaksari diperuntukan sebagai cadangan hutan lindung, Kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perkebunan, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan permukiman	Menyerasikan Sistem jaringan dan Pola Guna Lahan dan Membuka Keterisolasian <i>remote area</i> .
Kabupaten Ciamis	Kota Banjar	
3. Kec. Cisaga diperuntukan sebagai cadangan hutan lindung, Kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perkebunan, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan permukiman	3. Kec. Purwaharja diperuntukan sebagai kawasan permukiman, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan pertanian, perkebunan, hutan produksi	Menyerasikan Sistem jaringan dan Pola Guna Lahan dan Membuka Keterisolasian <i>remote area</i> .

Sumber : Hasil analisis 2014

Peluang kerjasama dapat dilakukan dalam berbagai bidang, antara lain :

1. Pola Pemanfaatan Ruang
 - a. Pengendalian fisik kawasan dalam menjaga lahan pertanian tanaman pangan
 - b. Pengendalian perkembangan di kawasan rawan bencana
 - c. Pengembangan kawasan dengan konsep hijau yang hemat energy, air, lahan dan run off.
 - d. Pengembangan pengelolaan, peningkatan fungsi dan mempertahankan luasan

kawasan lindung dikawasan hutan Kabupaten Ciamis, Kabupaten Kuningan.

- e. Pengendalian pemanfaatan ruang pada sempadan pantai yang berpotensi merusak fungsi sempadan pantai di Kabupaten Cirebon, Kabupaten Ciamis.
- f. Upaya mempertahankan luas lahan pertanian pangan berkelanjutan : pengembangan kawasan peruntukkan pertanian pertanian untuk kegiatan hortikultura guna meningkatkan daya saing pertanian hortikultura yang dilakukan di Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan.

2. Sosial Ekonomi

- a. Penguatan fungsi-fungsi pusat-pusat pertumbuhan di kawasan perbatasan termasuk penguatan dan keterkaitan antar kawasan-kawasan strategis di kawasan perbatasan antar Kecamatan di Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kota Banjar dan Kabupaten Ciamis, Pangandaran.
- b. Peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan
- c. peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan yang ramah lingkungan
- d. Pengembangan pusat kegiatan industri kreatif yang berdaya saing dan ramah lingkungan
- e. Pengembangan kegiatan pariwisata di kawasan perbatasan
- f. Pengembangan sentra perkebunan berbasis bisnis yang didukung prasaranan dan sarana dengan menggunakan teknologi lingkungan
- g. Pengembangan sentra perikanan tangkap di Kabupaten Cirebon, Kabupaten Ciamis/Pangandaran.
- h. Pengembangan kawasan minapolitan berbasis masyarakat yang dilakukan di Kabupaten Cirebon.
- i. Peningkatan kegiatan industri yang bernilai tambah tinggi dengan penggunaan teknologi tinggi dan ramah lingkungan yang dilakukan di Kabupaten Cirebon, Kabupaten Ciamis.
- j. Penedalialan perkembangan kawasan peruntukan permukiman didaerah

penyangga serta di sepanjang jaringan jalan arteri primer dan kolektor primer yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar yang dilakukan di Kabupaten Ciamis.

3. Infrastruktur

a. Perwujudan sistem jaringan transportasi, meliputi :

- Pengembangan Jalan Lintas antar Kabupaten di Perbatasan.
- Pengembangan jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa : Ancol – Ciamis – Banjar – Wangon.
- Pengembangan jaringan jalan strategis nasional yang menghubungkan Cirebon – Kuningan – Ciamis
- Peningkatan jalan poros timur di jalur Pangandaran- Ciamis–Cikijing- Cirebon

b. Sistem Jaringan Sumber daya Air, meliputi :

- Peningkatan fungsi, pengembangan dan pemeliharaan saluran irigasi teknis : DI Lakbok Utara yang melayani kawasan peruntukkan pertanian di Kabupaten Ciamis dan Kota Banjar, DI Lakbok Selatan/Manganti dan DI Rawa Onom/Panulisan yang melayani kawasan peruntukkan pertanian di Kabupaten Ciamis.

B. Kategorisasi Kecamatan Yang Berbatasan Antar Provinsi Jawa Barat

Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Analisis ini diarahkan untuk melihat keserasian pola ruang di kawasan perbatasan dari segi peruntukan kawasan baik kawasan lindung maupun kawasan budidaya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4-16.

Sesuai dengan kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Barat yang menetapkan bahwa wilayah perbatasan Jabar-Jateng merupakan kawasan strategis provinsi yang memiliki kepentingan ekonomi. Pengembangan kawasan-kawasan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan ekonomi wilayah dalam lingkup regional ini perlu menetapkan kembali peran, kedudukan, dan fungsinya melalui pemilihan kawasan-kawasan strategis

ekonomi di perbatasan Jabar-Jateng yang terintegrasi antar kawasan dalam wilayah perencanaan maupun integrasi dengan wilayah-wilayah disekitarnya.

Adapun sasaran dari perencanaan kawasan strategis Provinsi di perbatasan Jabar-Jateng adalah :

1. Mendorong pembangunan dan pengembangan kegiatan ekonomi pertanian untuk meningkatkan sektor ekonomi wilayah di kawasan perbatasan.
2. Mendorong terciptanya sentra ekonomi unggulan di kawasan perbatasan Jabar-Jateng di simpul-simpul koleksi dan distribusi pendukung pertanian di kawasan perbatasan Provinsi
3. Mendorong peningkatan kemampuan penyediaan dan pelayanan sarana dan prasarana perekonomian di kawasan perbatasan Jabar-Jateng
4. Mendorong berkembangnya investasi di kawasan perbatasan Jabar-Jateng yang mampu meningkatkan nilai tambah produk atau hasil-hasil pertanian
5. Mendorong terciptanya pengelolaan usaha pertanian yang ramah lingkungan dalam menjaga ekosistem kawasan dan kawasan lindung di perbatasan Jabar-Jateng
6. Mendorong terciptanya kemitraan antar stakeholders, meningkatnya keterlibatan masyarakat, serta memperkuat kelembagaan bidang ekonomi pertanian di kawasan perbatasan Jabar-Jateng

Tabel 4-13 Kategorisasi Kecamatan yang Berbatasan Antar Provinsi Jawa Barat dengan Jawa Tengah

Kecamatan Berbatasan antar Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah			Arahan Keserasian Pola Pemanfaatan Ruang
Kabupaten Cirebon	Kabupaten Kuningan	Kabupaten Brebes	
<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Pasaleman diperuntukan sebagai kawasan resapan air, sempadan sungai, kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan permukiman 	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Subang diperuntukan sebagai Kawasan peruntukan hutan produksi terbatas, Kawasan peruntukan hutan produksi tetap, Kawasan peruntukan tanaman pangan, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Kawasan peruntukan permukiman 	<ol style="list-style-type: none"> Kec. Salem diperuntukan sebagai Kawasan resapan air, Kawasan Pantai Berhutan Bakau, peruntukan hutan produksi, peruntukan pertanian, peruntukan perkebunan, peruntukan permukiman Kec. Banjarharjo diperuntukan sebagai Kawasan resapan air, peruntukan hutan produksi, peruntukan pertanian, peruntukan perkebunan Kec. Losari diperuntukan sebagai Kawasan resapan air, peruntukan hutan produksi, peruntukan pertanian, peruntukan perikanan 	
<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Ciledug diperuntukan sebagai sempadan sungai, kawasan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan permukiman 	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan. Cilebak diperuntukan sebagai Kawasan peruntukan hutan produksi, Kawasan peruntukan tanaman pangan, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Kawasan peruntukan permukiman 		
<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Losari diperuntukan sebagai sempadan sungai, kawasan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan permukiman 	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Ciwaru diperuntukan sebagai Kawasan peruntukan hutan produksi, Kawasan peruntukan tanaman pangan, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Kawasan peruntukan permukiman 		
<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Pabedilan diperuntukan sebagai sempadan sungai, kawasan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan permukiman 	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Karagkancana diperuntukan sebagai Kawasan peruntukan hutan produksi, Kawasan peruntukan tanaman pangan, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Kawasan peruntukan permukiman 		
	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Cibingbin diperuntukan sebagai Kawasan peruntukan hutan produksi, Kawasan peruntukan tanaman pangan, Perkebunan rakyat, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Kawasan peruntukan permukiman 		
	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Cibeureum diperuntukan sebagai Kawasan peruntukan hutan produksi, Kawasan peruntukan tanaman pangan, Perkebunan rakyat, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Kawasan peruntukan permukiman 		

Kota Banjar	Kabupaten Ciamis	Kabupaten Cilacap	Arahan Keserasian Pola Pemanfaatan Ruang
<ul style="list-style-type: none"> Kec. Purwaharja diperuntukan sebagai kawasan permukiman, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan pertanian, perkebunan, hutan produksi 	<ul style="list-style-type: none"> Kec. Kalipucang diperuntukan sebagai cadangan hutan lindung, Kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perkebunan, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan permukiman 	<ol style="list-style-type: none"> Kec. Dayeuhluhur diperuntukan sebagai kawasan lindung, kawasan resapan air, peruntukan hutan produksi, peruntukan hutan rakyat, kawasan pertanian, kawasan peruntukan perkebunan, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan permukiman 	
<ul style="list-style-type: none"> Kec. Pataruman diperuntukan sebagai kawasan permukiman, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan pertanian, perkebunan, hutan produksi, Kawasan industri 	<ul style="list-style-type: none"> Kec. Laktok diperuntukan sebagai Kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan permukiman 	<ol style="list-style-type: none"> Kec. Wanareja diperuntukan sebagai kawasan lindung kawasan resapan air, peruntukan hutan produksi, peruntukan hutan rakyat, kawasan pertanian, kawasan peruntukan perkebunan, peruntukan perikanan, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan permukiman 	
<ul style="list-style-type: none"> Kec. Langensari diperuntukan sebagai kawasan permukiman, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan pertanian, perkebunan, hutan produksi, Kawasan industri 	<ul style="list-style-type: none"> Kec. Cisaga diperuntukan sebagai cadangan hutan lindung, Kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perkebunan, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan permukiman 	<ol style="list-style-type: none"> Kec. Kedungreja diperuntukan sebagai peruntukan hutan rakyat, kawasan pertanian, kawasan peruntukan perkebunan, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan permukiman 	
	<ul style="list-style-type: none"> Kec. Tambaksari diperuntukan sebagai cadangan hutan lindung, Kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perkebunan, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan permukiman 	<ol style="list-style-type: none"> Kec. Patimuan diperuntukan sebagai peruntukan hutan rakyat, kawasan pertanian, kawasan peruntukan perkebunan, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan permukiman 	
	<ul style="list-style-type: none"> Kec. Purwadadi diperuntukan sebagai kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perkebunan, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan permukiman 	<ol style="list-style-type: none"> Kec. Kampunglaut diperuntukan sebagai kawasan pertanian, peruntukan perikanan, kawasan peruntukan permukiman 	
	<ul style="list-style-type: none"> Kec. Mangunjaya diperuntukan sebagai Kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perikanan perkebunan, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan permukiman 		<p>Arah keserasian rencana pola ruang di Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Brebes telah serasi dari segi peruntukan kawasan</p>

Sumber : Hasil Analisis, Tahun 2014

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa pola ruang perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah yang telah serasi. Hal ini dapat dilihat dari peruntukan pola ruang kawasan perbatasan yang hampir sama.

1. Peluang Kerjasama

Pemaduserasian program pengembangan kawasan di perbatasan Jabar-Jateng membuka potensi peluang kerjasama antar wilayah di kawasan perbatasan, baik kerjasama antar kabupaten dalam provinsi, maupun kerjasama antar provinsi. Kerjasama di kawasan perbatasan mencakup berbagai bidang terutama dalam pengembangan ekonomi wilayah yang mendukung fungsi strategis provinsi di kawasan perbatasan meliputi kerjasama bidang penataan ruang dalam upaya konservasi kawasan lindung, serta penguatan peran dan fungsi pusat-pusat pertumbuhan wilayah perbatasan, kerjasama bidang sosial ekonomi dan pertanian, serta bidang transportasi dan penyediaan infrastruktur di kawasan perbatasan.

Peluang kerjasama dapat dilakukan dalam berbagai bidang, antara lain :

4. Pola Pemanfaatan Ruang

- (a) Pengendalian fisik kawaan dalam menjaga lahan pertanian tanaman pangan
- (b) Pengendalian perkembangan di kawasan rawan bencana
- (c) Pengembangan kawasan dengan konsep hijau yang hemat energy, air, lahan dan minim limbah
- (d) Pengembangan pengelolaan, peningkatan fungsi dan mempertahankan luasan kawasan lindung dikawasan hutan Kabupaten Ciamis, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Brebes.
- (e) Pengendalian pemanfaatan ruang pada sempadan pantai yang berpotensi merusak fungsi sempadan pantai di di Kabupaten Cirebon, Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Brebes.
- (f) Upaya mempertahankan luas lahan pertanian pangan berkelanjutan : pengembangan kawasan peruntukkan pertanian pertanian untuk kegiatan hortikultura guna meningkatkan daya saing pertanian hortikultura yang dilakukan di Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Brebes.

5. Sosial Ekonomi

- (a) Penguatan fungsi-fungsi pusat-pusat pertumbuhan di kawasan perbatasan Jabar-Jateng termasuk penguatan dan keterkaitan antar kawasan-kawasan strategis di kawasan perbatasan Jabar-Jateng
- (b) Peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan
- (c) peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan yang ramah lingkungan
- (d) Pengembangan pusat kegiatan industri kreatif yang berdaya saing dan ramah lingkungan
- (e) Pengembangan kegiatan pariwisata di kawasan perbatasan
- (f) Pengembangan sentra perkebunan berbasis bisnis yang didukung prasaranan dan sarana dengan menggunakan teknologi lingkungan
- (g) Pengembangan sentra perikanan tangkap di Kabupaten Cirebon, Kabupaten Ciamis, dan Kabupaten Cilacap
- (h) Pengembangan kawasan minapolitan berbasis masyarakat yang dilakukan di Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Cilacap
- (i) peningkatan kegiatan industri yang bernilai tambah tinggi dengan penggunaan teknologi tinggi dan ramah lingkungan yang dilakukan di Kabupaten Cirebon, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Brebes
- (j) Pengendalian perkembangan kawasan peruntukkan permukiman didaerah penyangga serta di sepanjang jaringan jalan arteri primer dan kolektor primer yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar yang dilakukan di Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Cilacap.

6. Infrastruktur

- (a) Perwujudan sistem jaringan transportasi, meliputi :
 - Pengembangan Jalan Lintas Utara Pulau Jawa : Cirebon – Losari – Brebes.

- Pengembangan jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa : Ancol – Ciamis – Banjar – Wangon.
- Pengembangan jaringan jalan strategis nasional yang menghubungkan Cirebon – Kuningan – Ciamis
- Pemantapan Jalur Kereta Api Lintas Utara Pulau Jawa : Cirebon – Tegal
- Pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Selatan Pulau Jawa : Banjar – Kroya
- Peningkatan jalan poros timur di jalur Pangandaran- Ciamis–Cikijing- Cirebon

(b). Sistem Jaringan Sumber daya Air, meliputi :

- WS Strategis Nasional meliputi WS Cimanuk-Cisanggarung (Provinsi Jawa Barat – Jawa Tengah
- WS lintas provinsi yang meliputi WS Citanduy
- Pengembangan dan pemeliharaan bendungan beserta waduknya untuk mempertahankan daya tampung air : Waduk Malahayu.
- Peningkatan fungsi, pengembangan dan pemeliharaan saluran irigasi teknis : DI Lakbok Utara yang melayani kawasan peruntukkan pertanian di Kabupaten Ciamis dan Kota Banjar, DI Lakbok Selatan/Manganti dan DI Rawa Onom/Panulisan yang melayani kawasan peruntukkan pertanian di Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Cilacap, DI Waduk Malahayu yang melayani kawasan peruntukkan pertanian di Kabupaten Brebes.

-

2. Sinkronisasi Struktur dan Pola Ruang Kawasan Perbatasan

Rencana tata ruang wilayah perbatasan terdiri dari rencana struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang kawasan perbatasan. Rencana struktur ruang meliputi rencana pengembangan sistem pusat-pusat pelayanan perkotaan dan rencana pengembangan infrastruktur wilayah. Adapun rencana pola pemanfaatan ruang terdiri dari rencana pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya.

Tabel 4-14 Paduserasi Program Pengembangan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Jabar-Jateng Sebagai Peluang Kerjasama Antar Kawasan

No.	Program Wilayah Jabar	Lokasi Jabar	Lokasi Jateng	Program Wilayah Jateng	POTENSI PELUANG KERJASAMA
1.	Peningkatan sistem jalur tunggal (single track) menjadi sistem jalur ganda (double track) Losari - Brebes	Cirebon	Brebes	Peningkatan jalan di Jl.Losari-Bojongsari, dan pemeliharaan berkala Losari-Bojongsari (Hotmix)	Bidang Transportasi : Peningkatan jaringan jalan
2	Pembangunan jalan alternatif menuju Kabupaten Cilacap meliputi ruas Jalan Pamulihan - Mandapajaya - Kutaagung	Kuningan	Brebes	Peningkatan jalan di Jl Mandapajaya-Kota Agung (program brebes)	Bidang Transportasi : Peningkatan jaringan jalan
3	Pembangunan jalan alternatif menuju Kabupaten Brebes meliputi ruas Jalan Cipondok – Capar	Kuningan	Brebes	Peningkatan jalan di : Jl. Capar – Cimara Jl. Wanoja – Capar Jl. Capar – Ciangir	Bidang Transportasi : Peningkatan jaringan jalan
4	Pembangunan jalan antar kawasan di kawasan perbatasan	Kuningan	Brebes	Peningkatan jalan di Jl. Bojongsari-Cikakak Tahap IV	Bidang Transportasi : Peningkatan jaringan jalan
5	Peningkatan jalan Kuningan-Brebes melalui Cibingbin	Kuningan	Brebes	Peningkatan jalan di: Jl. Cibingbin-Banjarharja Jl. Malahayu-Cibingbin	Bidang Transportasi : Peningkatan jaringan jalan
6	Peningkatan jalan Kuningan Cilacap melalui Cimahi-Karangkencana	Kuningan			
7	Penataan infrastruktur kecamatan wilayah perbatasan Kabupaten Kuningan (2 PKLp)	Kuningan			
8	Pembangunan PLTMH dan jaringan listrik di wilayah perbatasan	Kuningan			
9	Pembangunan Waduk Cileuwung Desa Randusari, Kec. Cibingbin	Kuningan	Brebes	Pengelolaan dan Penataan Waduk Cileuwung	Bidang sumber daya air : perlindungan waduk
10	Pengaturan lintasan dan jadwal kereta api baik barang maupun penumpang di Kec. Langensari, Pataruman	Kota Banjar			Bidang Transportasi : Peningkatan sarana transportasi kereta api
11	Meningkatkan akses pusat pelayanan dalam mendukung koleksi dan distribusi kawasan agropolitan di Kec. Langensari dan Pataruman	Kota Banjar	Brebes	Pembangunan dan perbaikan Jembatan Cijolang II (desa Panulisan, Purwahrja), dan Jembatan Citanduy II (desa Tarisi, Maruyungsari)	Bidang Transportasi : Peningkatan aksesibilitas antar pusat-pusat pelayanan
12	Pengembangan Terminal barang / Pergudangan di Kec. Pataruman	Kota Banjar			
13	Pemeliharaan jalan kolektor primer Jl. LL	Ciamis	Cilacap	Rencana pengembangan jalan Arteri Primer	Bidang Transportasi : Peningkatan jaringan

No.	Program Wilayah Jabar	Lokasi Jabar	Lokasi Jateng	Program Wilayah Jateng	POTENSI PELUANG KERJASAMA
	RE Martadinata (Ciamis), Ciamis-Kawali, Jl. Siliwangi (Kawali), Kalipucang – Majingklak, Kalipucang-Batas Jateng, Panaekan/Goler-Cimaragas-Batas Kota Banjar			pada Perbatasan Jawa Barat-Cilacap Rencana pengembangan jalan kolektor Primer di : <ul style="list-style-type: none"> • Perbatasan Jawa Barat – Wangon, • Bandungsari – Penanggapan – Perbatasan Jawa Barat, • Patimuan – Sidareja – Cilacap 	jalan
14	Pemeliharaan dan penyediaan terminal tipe C di Kecamatan Kalipucang, Cisaga, Puradadi, Tambaksari, Padaherang, Sidamulih, Mangunjaya, Lakbok	Ciamis			
15	Pemeliharaan pelabuhan penyeberangan Santolo dan Majingklak di Kecamatan Kalipucang	Ciamis	Cilacap	Rencana pengembangan Pelabuhan umum di Tanjung Intan Kabupaten Cilacap	Bidang Transportasi : Peningkatan sarana pelabuhan
16	Pengoperasioan lintas penyebarangan Sungai Citanduy dengan rute Kalipucang-Jawa Tengah	Ciamis	Brebes	Rencana Dermaga Sungai Kalipucang-Majingklak	Bidang Transportasi : Peningkatan sarana pelabuhan
17	Perencanaan jaringan listrik di wilayah perbatasan dan terisolir	Ciamis	Brebes	Penerangan Jalan Umum Wilayah Perbatasan (termasuk pembangunan tugu batas)	Bidang energi : pelayanan jaringan listrik
			Cilacap	Pengembangan jaringan transmisi listrik di jalur Selatan terhubung Tasikmalaya-Cilacap-Kebumen-Purworejo-Klaten- Pedan-Wonogiri-Kediri; Gardu Induk 500/150 kV-Pedan-Ungaran	
18	Penyelarasan infrastruktur pada kawasan perbatasan	Ciamis	Cilacap	Rencana Pengembangan jalan tol sepanjang Perbatasan Jawa Barat – Pejagan – Pemalang – Batang – Semarang	Bidang Transportasi : Penyelarasan infrastruktur jalan Tol
			Cilacap	Rencana Pengembangan jalan tol sepanjang Ciamis – Cilacap –Yogyakarta	

Tabel 4-15 Paduserasi Program Pengembangan Pemafataan Ruang Kawasan Perbatasan Jabar-Jateng Sebagai Peluang Kerjasama Antar Kawasan

No.	Program Wilayah Jabar	Lokasi Jabar	Lokasi Jateng	Program Wilayah Jateng	POTENSI PELUANG KERJASAMA
1.	Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang di Koridor Jalan Tol Kanci - Ciledug, dan Koridor Jalan Pantura Kanci - Losari	Cirebon	Brebes	Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Strategis Cibening	Bidang Penataan Ruang : Penyusunan rencana detil kawasan strategis
			Brebes	Pembangunan pos lalu lintas ternak di Bojongsari wil. perbatasan dengan Ciledug-Cirebon, serta optimalisasi pelayanan pos lalu lintas ternak di perbatasan.	
			Brebes	Pengembangan Promosi Paket Wisata di wilayah perbatasan	Bidang Pariwisata : Pengembangan daya tarik wisata di kawasan perbatasan
2	Penyusunan Tata Ruang Perbatasan antar provinsi	Cirebon			
3	Pengembangan dan Penataan Kawasan Perdagangan dan Jasa di Kecamatan Ciledug dan Losari	Cirebon			
4	Penyusunan Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa (KTP2D) dan Pusat pelayanan lingkungan di Kecamatan Pabedilan, Pasaleman	Cirebon			
5	Perlindungan Kawasan Lindung	Cirebon	Cilacap	Perlindungan terhadap kawasan lindung : hutan lindung, sempadan pantai, kawasan Cagar Alam Cagar Alam Nusakambangan Barat, Cagar Alam Nusakambangan Timur, Cagar Alam Wijaya Kusuma, Cagar Alam Karangbolong	Bidang Penataan Ruang : Perlindungan terhadap kawasan lindung
6	Larangan Tambak di Losari	Cirebon			
7	Perintisan pengembangan Kawasan Industri Koridor Mundu – Losari	Cirebon			
8	Peningkatan kegiatan ekonomi di PKL	Cirebon			
9	Perencanaan DAS	Kuningan	Brebes	Penyodetan dan pelurusan sungai Citanduy untuk mengurangi sedimentasi di wilayah	Bidang Penataan Ruang : Perencanaan dan Pengelolaan DAS

No.	Program Wilayah Jabar	Lokasi Jabar	Lokasi Jateng	Program Wilayah Jateng	POTENSI PELUANG KERJASAMA
				Segara Anakan, dan rehabilitasi Tanggul S.Cisanggarung	
10	Penyusunan RDTR PKLp Kecamatan Cibingbin dan Subang	Kuningan			
11	Mempertahankan lahan sawah yang beririgasi teknis untuk mendukung program ketahanan pangan nasional	Kuningan			
12	Pembangunan kawasan sentra industri kecil menengah dan pariwisata, serta perumahan baru terutama wilayah kecamatan yang terletak di sepanjang jalan koridor provinsi dan jalur kolektor tengah serta wilayah kecamatan di sebelah utara Kabupaten Kuningan	Kuningan			
13	Bantuan Teknik Perencanaan KTP2D Kec. Cibereum	Kuningan			
14	PSD KTP2D di Kec. Cibeureum, Cibingbin	Kuningan			
15	Penyusunan RTBL Kawasan Terminal (Kawasan Strategis)	Kuningan			
16	Koordinasi, inventarisasi dan penyusunan rencana strategis penanganan lahan kritis	Kota Banjar			
17	Program Pengendalian Erosi dan Konservasi Air di Kec. Purwahrja	Kota Banjar			
18	Peningkatan fungsi lindung untuk kawasan hutan produksi dan penataan & rehabilitasi kawasan lindung di luar hutan produksi di Kec. Purwahrja dan Pataruman	Kota Banjar			
19	Pengembangan industri kecil dan menengah dengan dukungan sarana dan prasarana lingkungan di Kecamatan Pataruman dan Langensari	Kota Banjar			
20	Penyediaan atau pencadangan lahan basah	Kota Banjar			

No.	Program Wilayah Jabar	Lokasi Jabar	Lokasi Jateng	Program Wilayah Jateng	POTENSI PELUANG KERJASAMA
	dalam mendukung kawasan agropolitan, Kec. Pataruman dan Langensari				
21	Pemeliharaan dan Rehabilitasi di bagian hilir DWS Citanduy di Kalipucang, Padaherang dan Mangunjaya	Ciamis	Brebes	Konservasi Lahan DAS Hulu Segara Anakan, dan rehabilitasi Lahan Kritis DAS Citanduy dan DAS Cisanggarung	Bidang Penataan Ruang : Perencanaan dan Pengelolaan DAS
			Cilacap	Pengembangan Sungai di wilayah Sungai Citanduy dan pengendalian daya rusak air	
			Cilacap	Pengendalian kawasan rawan bencana banjir, tanah longsor, tsunami, abrasi, dll, serta kawasan imbuhan air: Cekungan Nusa Kambangan, Cekungan Cilacap., juga kawasan perlindungan plasma nutfah. Rehabilitasi dan atau reboisasi kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Alam yang mengalami kerusakan	
22	Penanaman dan pemeliharaan hutan bakau di kawasan perbatasan antar provinsi, perlindungan terumbu karang, dll.	Ciamis			
23	Pengembangan lahan sawah abadi, agroindustri, dan fasilitas agribisnis lainnya	Ciamis	Brebes	Pengembangan Tanaman Pangan yg berbasis lokal di wilayah perbatasan	Bidang Ekonomi Pertanian : Inisiasi pengembangan agribisnis dan agroindustri di wilayah perbatasan, serta pengembangan konsep ekonomi kreatif dalam meningkatkan nilai tambah hasil-hasil pertanian di wilayah perbatasan
24	Pengembangan sarana angkutan orang dan barang untuk menunjang produksi pedesaan	Ciamis			
25	Peningkatan dan penataan sarana dan prasarana Kawasan Strategis Lumbung Padi di Kecamatan Padaherang, Lakbok, Mangunjaya, Purwodadi	Ciamis		Pengendalian dan Pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Pengendalian dan Pengembangan Lahan Kering untuk Hortikultura dan Perkebunan	Bidang Ekonomi Pertanian : Pengembangan sarana dan prasarana penunjang kegiatan agribisnis dan agroindustri di wilayah perbatasan

No.	Program Wilayah Jabar	Lokasi Jabar	Lokasi Jateng	Program Wilayah Jateng	POTENSI PELUANG KERJASAMA
26	Penyusunan RDTR KSK Perbatasan Kabupaten Koridor Utara dan Koridor Barat	Ciamis	Brebes	Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Strategis Pacangsanak	Bidang Penataan Ruang : Penyusunan rencana detil kawasan strategis
27	Penyediaan pasar kecamatan, pasar desa, dan puskesmas di Kecamatan Cisaga, Tambaksari, Padaherang, Lakkok, Mangunjaya, Purwadadi, dan Kalipucang.	Ciamis	Cilacap	Percepatan Pengembangan Kota-kota PKL untuk mendorong pengembangan kota-kota Sentra Produksi PKL yang Berbasis otonomi daerah. Revitalisasi dan percepatan pengembangan kota-kota pusat pertumbuhan lokal	Bidang Penataan Ruang : Perencana struktur ruang dan penguatan pusat-pusat pertumbuhan / simpul2 kegiatan ekonomi pertanian
			Brebes	Mitigasi Bencana Alam Banjir dan Kekeringan di Kaw.Segara Anakan	
			Brebes	Inventarisasi Daerah Rawan Bencana Kaw. Perbatasan Jabar-Jateng;	
			Cilacap	Perwujudan Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata: Pengembangan Pusat pengembangan pariwisata: Nusa Kambangan, Gunung Selok, Benteng Pendem, Pantai Widara Payung dan Segara Anakan	
			Brebes	Penegasan Batas Wilayah Perbatasan: Inventarisasi dan pemeliharaan pilar batas yg telah ditegaskan dalam Permendagri	
			Brebes	Peningkatan koordinasi dan Pemantapan kerjasama antar daerah Kab./Kota dan daerah perbatasan dalam rangka peningkatan keamanan	
			Brebes	Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan berupa kerjasama penanganan Penyakit menular, Penurunan AKI dan AKB	
			Brebes	Peningkatan pelayanan pendidikan di wilayah perbatasan (khususnya penerimaan siswa baru dan pemberian beasiswa)	

Tabel 4-16 Sinkronisasi Tata Ruang Kawasan Perbatasan Jabar-Jateng

No.	Kebijakan Struktur dan Pola Ruang	Identifikasi Kebutuhan Kawasan Perbatasan	Paduserasi Struktur dan Pola Ruang
1.	<p>Kabupaten Cirebon</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Sistem Infrastruktur <ol style="list-style-type: none"> a. Peningkatan jalan poros timur di jalur Pangandaran - Ciamis - Cikijing – Cirebon b. Pembangunan Jalan Tol Cikopo/Cikampek – Palimanan c. Peningkatan sistem jalur tunggal (single track) menjadi sistem jalur ganda (double track) Losari – Brebes d. Perbaikan TPAS di Ciledug e. Optimalisasi Tempat Pembuangan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) dengan Sistem Sanitary Landfill di Ciledug dan Palimanan 2. Rencana Kawasan Lindung <ol style="list-style-type: none"> a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya terdiri dari kawasan resapan air. Dimana wilayah kecamatan di Kabupaten Cirebon yang merupakan cakupan Kawasan Perbatasan Jabar-Jateng yang termasuk kawasan resapan air adalah Kecamatan Pasaleman berada di Desa Tonjong seluas kurang lebih 4 (empat) hektar; b. sempadan pantai yang terdapat Kecamatan Losari yang meliputi Desa Ambulu seluas kurang lebih 20 (dua puluh) hektar; Desa Tawangsari seluas kurang lebih 20 (dua puluh) hektar; Desa Kalisari seluas kurang lebih 20 (dua puluh) hektar; dan Desa Kalirahayu seluas kurang lebih 20 (dua puluh) hektar. sempadan pantai ditetapkan dengan ketentuan minimal lebar 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah perbatasan antar kabupaten/kota proporsional sesuai bentuk dan kondisi fisik. c. sempadan sungai yang terdapat di Kecamatan 	<p>Rencana Struktur Ruang Rencana struktur ruang Kawasan Perbatasan Jabar-Jateng, terdiri atas rencana sistem pusat pelayanan, rencana jaringan transportasi, rencana jaringan utilitas umum.</p> <p>3. Rencana sistem pusat pelayanan Rencana sistem pusat-pusat pelayanan yang akan dikembangkan di Kawasan Perbatasan Jabar-Jateng diarahkan dengan mengacu kepada RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota. Sistem pusat pelayanan yang direncanakan secara berjenjang dan terpadu sesuai skala pelayanannya, meliputi :</p> <p>a) Pusat Kegiatan Lokal (PKL), yaitu kawasan perkotaan sebagai pusat jasa, pusat pengolahan dan simpul transportasi yang mempunyai pelayanan satu kabupaten atau beberapa kecamatan. Termasuk ke dalam PKL di Kawasan Perbatasan Jabar-Jateng adalah PKL Ciledug yang berada di Kabupaten Cirebon. Ciledug merupakan pusat pengolahan/pengumpul barang untuk beberapa kecamatan, dalam hal ini komoditas pertanian, yaitu mencakup Kecamatan Ciledug, Kecamatan Losari, Kecamatan Pabedilan, Kecamatan Pasaleman. Selain itu, PKL Ciledug mempunyai fungsi penunjang sebagai kawasan perikanan laut, perdagangan hasil pertanian, industri, pergudangan, pelayanan sosial ekonomi, perumahan, pendidikan tinggi, dan perdagangan.</p>	<p>Paduserasi rencana struktur ruang dan pola ruang pada dasarnya meliputi upaya perbaikan dan peningkatan sistem jaringan jalan, serta pengembangan dan pengelolaan tata ruang kawasan, yang memiliki program dalam bidang yang sama, seperti :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perbaikan dan Peningkatan Jaringan Jalan antar kecamatan dan antar provinsi • Peningkatan prasarana irigasi, air bersih, listrik, drainase, limbah, serta pendukung sistem pelayanan perdagangan dan jasa sektor pertanian • Penetapan sistem jaringan pergerakan/pola perjalanan/lalu lintas barang antar wilayah • Pengembangan dan Pengelolaan kawasan pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, serta permukiman yang berwawasan lingkungan • Pengembangan sarana pergudangan atau sarana pengumpul barang, serta sarana pemasaran dan pengolahan • Perlindungan terhadap kawasan cagar alam, hutan wisata, hutan produksi, perkebunan, serta kawasan irigasi, sungai, perbatasan antar provinsi, dan DAS. • Pengembangan sentra-sentra produksi pertanian, perkebunan, kehutanan terpadu

No.	Kebijakan Struktur dan Pola Ruang	Identifikasi Kebutuhan Kawasan Perbatasan	Paduserasi Struktur dan Pola Ruang
	<p>Ciledug seluas kurang lebih 60 (enam puluh) hektar; Kecamatan Losari seluas kurang lebih 60 (enam puluh) hektar; Kecamatan Pabedilan seluas kurang lebih 60 (enam puluh) hektar; dan Kecamatan Pasaleman seluas kurang lebih 60 (enam puluh) hektar. Sempadan sungai ditetapkan dengan ketentuan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • garis sempadan sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter dari tepi kiri-kanan tanggul pada sungai bertanggung di kawasan perkotaan; • sekurang-kurangnya 5 (lima) meter dari tepi kiri-kanan tanggul pada sungai bertanggung di luar kawasan perkotaan; • sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri-kanan sungai tidak bertanggung dengan kedalaman kurang dari 3 (tiga) meter di kawasan perkotaan; • sekurang-kurangnya 15 (lima belas) meter dari tepi kiri-kanan sungai tidak bertanggung dengan kedalaman 3 (tiga) sampai dengan 20 (dua puluh) meter di kawasan perkotaan; • sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) meter dari tepi kiri-kanan sungai tidak bertanggung dengan kedalaman lebih dari 20 (dua puluh) meter di kawasan perkotaan; dan • sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter dari tepi kiri-kanan sungai besar tidak bertanggung dan 50 (lima puluh) meter dari tepi kiri-kanan sungai kecil tidak bertanggung yang di luar kawasan perkotaan. <p>d. kawasan rawan bencana alam terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Rawan gelombang pasang yang terdapat di Kecamatan Losari. 2) Rawan banjir yang terdapat di Desa 	<p>b) Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp), yaitu pusat kegiatan yang ditetapkan/dipromosikan di kemudian hari untuk menjadi PKL. Termasuk dalam PKLp di Kawasan Perbatasan Jabar-Jateng adalah PKLp Losari (Kabupaten Cirebon), PKLp Cibingbin dan PKLp Subang (Kabupaten Kuningan). Pusat kegiatan lokal promosi ini sekaligus termasuk ke dalam kawasan strategis masing-masing kabupaten. Fungsi masing-masing pusat kegiatan dapat dilihat sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PKLp Losari yang merupakan bagian dari Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Koridor Mundu-Losari mempunyai fungsi utama sebagai kawasan pertanian dan fungsi penunjang sebagai kawasan perikanan laut, kawasan perdagangan hasil pertanian, industri, pelabuhan, pergudangan, pelayanan sosial ekonomi, perumahan, pendidikan tinggi, dan perdagangan. Sebagai PKLp, Losari juga merupakan pusat pengolahan dan pengumpul barang untuk beberapa kecamatan, termasuk juga kecamatan yang berada di Provinsi Jawa Tengah (Kecamatan Losari). - PKLp Subang yang merupakan bagian dari Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Subang, mempunyai fungsi 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan produk-produk pertanian dan industri kecil berdaya saing • Pengembangan dan pengelolaan kegiatan budidaya hasil-hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan. • Pengembangan kawasan pariwisata berwawasan lingkungan, dan peningkatan daya tarik serta produk pariwisata berdaya saing

No.	Kebijakan Struktur dan Pola Ruang	Identifikasi Kebutuhan Kawasan Perbatasan	Paduserasi Struktur dan Pola Ruang
	<p>Tawang Sari Kecamatan Losari; Desa Ambulu Kecamatan Losari; Desa Babakan Kecamatan Pabedilan dan Desa Losari Lor Kecamatan Pabedilan.</p> <p>3) Rawan angin rebut yang terdapat di Desa Panggangsari Kecamatan Losari</p> <p>e. kawasan lindung geologi terdiri dari :</p> <p>1) kawasan rawan letusan Gunung Api Ceremai yang terdapat di Kecamatan Pasaleman</p> <p>2) kawasan rawan rerakan tanah yang terdapat di Kecamatan Pasaleman</p> <p>3) kawasan rawan abrasi yang terdapat di Kecamatan Losari.</p> <p>3. Rencana Kawasan Budidaya</p> <p>a. kawasan peruntukan hutan produksi di Kawasan Perbatasan Jabar-Jateng di Kabupaten Cirebon adalah terdapatnya hutan produksi tetap yang dikelola oleh kesatuan pemangku hutan (KPH) Kuningan yang terdapat di Kecamatan Pasaleman.</p> <p>b. kawasan hutan rakyat di Kabupaten Cirebon yang termasuk dalam Kawasan Perbatasan Jabar-Jateng terdapat di Kecamatan Ciledug seluas kurang lebih 171 (seratus tujuh puluh satu) hektar; Kecamatan Losari seluas kurang lebih 250 (dua ratus lima puluh) hektar; Kecamatan Pabedilan seluas kurang lebih 468 (empat ratus enam puluh delapan) hektar; dan Kecamatan Palimanan seluas kurang lebih 314 (tiga ratus empat belas) hektar.</p> <p>c. kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Cirebon terdiri dari</p> <p>a. kawasan peruntukan tanaman pangan di Kabupaten Cirebon yang termasuk dalam Kawasan Perbatasan Jabar-Jateng terdapat di Kecamatan Ciledug seluas kurang lebih 473</p>	<p>sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat pelayanan sosial ekonomi</p> <p>- PKLp Cibingbin yang merupakan bagian dari Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Cibingbin, mempunyai fungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat sosial ekonomi, industri rumah tangga.</p> <p>c) Pusat Pelayanan Kota (PPK), yakni kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama kegiatan perkotaan skala kota atau wilayah yang lebih luas, atau kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala kota atau wilayah yang lebih luas. Tidak terdapat PPK di Kawasan Perbatasan Jabar-Jateng, namun demikian, PPK terdekat adalah Banjar yang merupakan pusat pelayanan jasa pemerintahan, jasa perdagangan, distribusi regional.</p> <p>d) Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK), yakni kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul kedua kegiatan perkotaan yang mendukung PPK. Selain itu SPPK dapat merupakan suatu kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul kegiatan perdagangan dan jasa yang melayani beberapa kecamatan dan skala kota yang</p>	

No.	Kebijakan Struktur dan Pola Ruang	Identifikasi Kebutuhan Kawasan Perbatasan	Paduserasi Struktur dan Pola Ruang
	<p>(empat ratus tujuh puluh tiga) hektar; Kecamatan Losari seluas kurang lebih 200 (dua ratus) hektar; Kecamatan Pabedilan seluas kurang lebih 450 (empat ratus lima puluh) hektar; dan di Kecamatan Pasaleman seluas kurang lebih 1.564 (seribu lima ratus enam puluh empat) hektar.</p> <p>b. kawasan peruntukan hortikultura sayuran terdapat di Kecamatan Pasaleman; Kecamatan Ciledug; Kecamatan Losari dan Kecamatan Pabedilan. Sedangkan kawasan peruntukkan hortikultura buah-buahan terdapat di Kecamatan Pasaleman dan Kecamatan Pabedilan.</p> <p>c. kawasan peruntukan perkebunan di Kabupaten Cirebon yang termasuk dalam Kawasan Perbatasan Jabar-Jateng terdapat di Kecamatan Pasaleman.</p> <p>d. kawasan peruntukan peternakan di Kawasan Perbatasan Jabar-Jateng adalah di hamper semua wilayah perbatasan di Cirebon yang merupakan peternakan besar dan peternakan unggas.</p> <p>d. kawasan peruntukan perikanan di Kabupaten Cirebon terdiri dari jenis perikanan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) perikanan budidaya air tawar terdapat di Kecamatan Palimanan yang termasuk Kawasan Perbatasan Jabar-Jateng. 2) perikanan budidaya air laut terdapat di Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon yang termasuk Kawasan Perbatasan Jabar-Jateng. 3) perikanan budidaya air tambak terdapat di Kecamatan Losari yang termasuk Kawasan 	<p>mendukung PPK.</p> <p>Sub pusat Pelayanan Kota di Kawasan Perbatasan Jabar-Jateng meliputi Purwaharja, Pataruman, dan Langensari di Kabupaten Banjar. Adapun fungsi kegiatan masing-masing sub pusat tersebut antara lain ;</p> <ul style="list-style-type: none"> - SPPK Purwaharja, merupakan sebagai sub pusat pelayanan kota dengan fungsi atau kegiatan utama adalah pariwisata skala lokal. - SPPK Pataruman, merupakan sebagai kegiatan pusat pelayanan kota dengan fungsi utama atau kegiatan utama adalah sebagai pusat agropolitan skala lokal. Adapun komoditas unggulan sebagai agropolitan adalah jenis padi dan perkebunan - SPPK Langensari merupakan sebagai kegiatan pusat pelayanan kota dengan fungsi utama atau kegiatan utama adalah sebagai pusat agropolitan skala lokal. Adapun komoditas unggulan sebagai agropolitan adalah jenis pertanian padi. <ul style="list-style-type: none"> • Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), merupakan kawasan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa. Adapun PPK yang berada di Kawasan Perbatasan Jabar-Jateng adalah Tambaksari, Cisaga, Lakhok, 	

No.	Kebijakan Struktur dan Pola Ruang	Identifikasi Kebutuhan Kawasan Perbatasan	Paduserasi Struktur dan Pola Ruang
	<p>Perbatasan Jabar-Jateng.</p> <p>4) industri pengolahan ikan terdapat di Kecamatan Losari yang termasuk Kawasan Perbatasan Jabar-Jateng.</p> <p>5) pelabuhan penperbatasan antar kabupaten/kotaan ikan di Kecamatan Losari yang termasuk Kawasan Perbatasan Jabar-Jateng sebanyak 2 (dua) unit.</p> <p>6) kawasan peruntukan pertambangan di Kabupaten Cirebon yang termasuk dalam Kawasan Perbatasan Jabar-Jateng terdapat di Kecamatan Palimanan seluas kurang lebih 100 (seratus) hektar berupa pertambangan batuan dan mineral tepatnya berlokasi di Blok Gunung Giwur berada di Desa Kepuh; Blok Benggoi berada di Desa Kepuh; Blok Gunungrandu berada di Desa Kepuh; dan Blok Gunungsantri berada di Desa Kepuh.</p> <p>e. kawasan peruntukan industri besar terdapat di Kecamatan Losari yang meliputi industri manufaktur; industri penunjang pertanian; dan industri penunjang perikanan. Kawasan industri mengengah diarahkan di Kecamatan Palimanan berupa industri manufaktur serta industri kecil dan makro diarahkan di Kecamatan Losari meliputi Industri perikanan budidaya dan Industri bata merah.</p> <p>f. kawasan peruntukan pariwisata di Kabupaten Cirebon yang merupakan Kawasan Perbatasan Jabar-Jateng terdapat kawasan wisata budaya perbatasan antar provinsi pantai yang terdapat di Kecamatan Losari. Sedangkan kawasan wisata buatan agropolitan terdapat Ageo Ciledug seluas kurang lebih 200 hektar dan wisata buatan</p>	<p>Purwadadi, Mangunjaya, Padaherang, dan Kalipucang (seluruhnya berada di wilayah Kabupaten Ciamis).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL), yakni merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan sosial ekonomi skala antar desa. Pusat pelayanan lingkungan yang terdapat di Kawasan Perbatasan Jabar-Jateng adalah Pabedilan dan Pasaleman yang berada di Kabupaten Cirebon; serta Cilebak, Ciwaru, Cibeureum, dan Karangkencana yang berada di Kabupaten Kuningan. <p>4. Rencana Pengembangan Jaringan Transportasi Kawasan Perbatasan Jabar-Jateng</p> <p>Rencana jaringan transportasi di Kawasan Perbatasan Jabar-Jateng dikembangkan untuk mendukung transportasi barang dan orang (tenaga kerja) dari sentra produksi (baik primer, sekunder, dan tersier), pusat-pusat kegiatan (baik PKL, PKLp, PPK, PPL), dan outlet distribusi (pelabuhan, bandara, stasiun) yang terbagi sebagai berikut:</p> <p>A. Sistem Jaringan Transportasi Perbatasan antar kabupaten/kota</p> <p>Rencana sistem jaringan transportasi perbatasan antar kabupaten/kota terbagi ke dalam rencana jaringan jalan, rencana terminal penumpang dan barang, rencana sistem angkutan dan trayek perdesaan, serta jaringan rel kereta</p>	

No.	Kebijakan Struktur dan Pola Ruang	Identifikasi Kebutuhan Kawasan Perbatasan	Paduserasi Struktur dan Pola Ruang
	<p>minapolitan terdapat di Kecamatan Losari.</p> <p>g. kawasan peruntukan permukiman di perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah di Kabupaten Cirebon dialokasikan keseluruhh wilayah baik berupa kawasan permukiman perkotaan maupun kawasan permukiman perdesaan.</p> <p>h. kawasan peruntukan lainnya terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kawasan perbatasan antar provinsi dan laut diarahkan pada Kecamatan Losari, 2) Kawasan pertahanan dan keamanan berupa Komando Rayon Militer yang tersebar diseluruh wilayah begitu pula dengan kawasan kepolisian. 3) Kawasan fasilitas sosial dan fasilitas umum tersebar diseluruh wilayah 	<p>api.</p> <p>A1. Jaringan Jalan Rencana jaringan jalan di Kawasan Perbatasan Jabar-jateng secara umum adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengoptimalkan ruas jalan yang telah ada, baik jalan yang berstatus nasional, provinsi, maupun lokal. • Meningkatkan dan memelihara ruas jalan dengan memperbaiki, memperlebar, atau tindakan lain yang bertujuan untuk meningkatkan fungsi dan kualitas ruas jalan tersebut. • Mengembangkan jaringan jalan lokal, dalam hal ini pengembangan jalan dari desa penghasil dan pengolah bahan baku ke sentra produksi; serta jaringan jalan dari sentra produksi ke outlet distribusi dan pasar • Membangun jalan alternatif dan jembatan. 	
2	Kab. Kuningan		
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi perbatasan antar kabupaten/kota, terdiri atas : <ol style="list-style-type: none"> a. Pengembangan jalan kolektor 2, meliputi : ruas jalan Luragung - Cibingbin; dan ruas jalan Cibingbin - Banjarharja. b. Pengembangan jalan lokal meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • ruas jalan lingkaran Ciwaru - Karangrancana - Cibeureum - Cibingbin - Cimahi - Cidahu - Luragung; • Ruas jalan Cimahi - Gunungsari - Cimulya - Sukadana - Cibeureum; • Ruas jalan Cibingbin - Sindangjawa - Cimara; • Ruas jalan Cibeureum - Tarikolot - Cikananga; dan • Ruas jalan Selajambe - Subang - Cilebak. c. Pembangunan jalan alternatif menuju Kabupaten 	<p>A2. Rencana Terminal Penumpang dan Barang Rencana pengembangan terminal penumpang dan barang di Kawasan Perbatasan Jabar-Jateng mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan dan pengembangan terminal tipe B dan C • Pembangunan terminal penumpang baru • Pembangunan terminal barang (lokal) untuk mengakomodir pergerakan koleksi dan distribusi komoditas 	

No.	Kebijakan Struktur dan Pola Ruang	Identifikasi Kebutuhan Kawasan Perbatasan	Paduserasi Struktur dan Pola Ruang
	<p>Ciamis meliputi : Ruas jalan Subang - Tangkolo - Rancah;</p> <p>d. Pembangunan jalan alternatif menuju Kabupaten Brebes meliputi : Ruas jalan Cibingbin - Pananggapan - Malahayu.</p> <p>2. Rencana pengembangan sistem jaringan energi:</p> <p>a. Pembangunan pembangkit listrik tenaga surya dengan di Kecamatan Cibingbin dan Kecamatan Cibeureum.</p> <p>b. Pembangunan pembangkit listrik tenaga mikro hidro dengan lokasi di Kecamatan Cibingbin.</p> <p>3. Rencana pengembangan sistem jaringan sumberdaya air terdiri atas:</p> <p>a. Peningkatan pengelolaan wilayah sungai meliputi sungai-sungai lintas Kabupaten Kuningan dan wilayah sungai strategis nasional. Sungai-sungai lintas Kabupaten Kuningan meliputi : Sungai Cijangkelok yang bermuara di Sungai Cisanggarung mengalir ke utara; dan Sungai Cijolang yang bermuara di Sungai Citanduy mengalir ke selatan.</p> <p>b. Peningkatan pengelolaan waduk, telaga, Situ dan Embung, antara lain: Waduk Citaman dan Waduk Cariang di Kecamatan Cibinbin, serta Waduk Cikabuyutan di Kecamatan Cilebak. Selain itu adanya rencana pembanguna Waduk Cileuweung di Kecamatan Cibingbin.</p> <p>4. Rencana jalur evakuasi terdiri atas :</p> <p>1. Jalur evakuasi kawasan rawan tanah longsor, meliputi :</p> <p>a. Kecamatan Cibeureum berupa jalan Desa Cimulya - jalan Desa Tarikolot;</p> <p>b. Kecamatan Cibingbin meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • jalan Desa Cipondok - Desa Cibingbin; dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penataan kualitas fisik dan peningkatan pelayanan terminal • Pembangunan halte • Penyusunan rencana detail bagi pengembangan terminal <p>A3. Jaringan Sistem Angkutan dan Trayek Angkutan</p> <p>Rencana jaringan sistem angkutan dan trayek di Kawasan Perbatasan Jabar-Jateng adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan sistem angkutan perkotaan, pedesaan, maupun antar perbatasan secara menyeluruh, termasuk rute-rute yang belum terlayani dan angkutan dalam kawasan agropolitan • Meningkatkan kualitas sistem angkutan yang telah ada, melalui peremajaan angkutan umum, penambahan armada, pengaturan sistem dan rute angkutan. • Mengembangkan fasilitas pendukung angkutan perbatasan antar kabupaten/kota, termasuk pembangunan terminal dan halte. <p>A4. Jaringan Rel Kereta Api</p> <p>Rencana jaringan rel kereta api di Kawasan Perbatasan Jabar-Jateng adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan dan meningkatkan sistem dan layanan jaringan kereta api • Mengaktifkan jaringan kereta api yang berfungsi sebagai penghubung pusat-pusat pertumbuhan dan jalur wisata 	

No.	Kebijakan Struktur dan Pola Ruang	Identifikasi Kebutuhan Kawasan Perbatasan	Paduserasi Struktur dan Pola Ruang
	<ul style="list-style-type: none"> • jalan Desa Sukaharja - Desa Cibingbin. c. Kecamatan Cilebak berupa jalan Desa Patala - Desa Sumberjaya - Desa Citikur; <p>5. Rencana Kawasan Lindung Rencana pola ruang kawasan lindung yang terkait dengan wilayah studi kawasan strategis perbatasan adalah perlindungan terhadap kawasan rawan bencana alam berupa kawasan rawan tanah longsor dengan luas kurang lebih 2.000 Ha meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kecamatan Cibeureum; b. Kecamatan Cibingbin; c. Kecamatan Cilebak; d. Kecamatan Karangkencana; <p>6. Rencana Kawasan Budidaya</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kawasan peruntukan hutan produksi terbatas dengan luas kurang lebih 18.799 hektar meliputi antara lain: Kecamatan Cibeureum, Cibingbin, Cilebak, Ciwaru, Karangkencana, dan Subang. b. Kawasan peruntukan hutan produksi tetap dengan luas kurang lebih 7.957 hektar, meliputi Kecamatan Cibeureum, Cibingbin, Cilebak, Ciwaru, Karangkencana, dan Subang, c. Kawasan peruntukan tanaman pangan dikembangkan di setiap kecamatan agar dapat: <ul style="list-style-type: none"> • mempertahankan kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan beririgasi; • mendukung ketahanan pangan provinsi dan nasional; • meningkatkan produktivitas kawasan melalui pola intensifikasi, diversifikasi, dan pola tanam yang sesuai dengan kondisi tanah dan perubahan iklim; • pengembangan infrastruktur sumberdaya air yang mampu menjamin ketersediaan air; dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan stasiun kereta api beserta fasilitas pendukungnya sebagai simpul transportasi <p>B. Sistem Jaringan Transportasi Sungai, Danau, dan Laut Rencana jaringan transportasi sungai, danau, dan laut di Kawasan Perbatasan Jabar-Jateng adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi pelabuhan penyeberangan Santolo dan Majingklak di Kecamatan Kalipucang untuk melayani rute komersial dan angkutan pariwisata • Mengembangkan pelabuhan penyeberangan untuk tujuan lintas penyeberangan Sungai Citanduy dengan rute Kalipucang-Jawa Tengah untuk melayani rute komersial dan angkutan pariwisata • Mengembangkan dan membangun pelabuhan laut dan sarana pendukung berada di Kecamatan Gebang sebagai outlet distribusi komoditas unggulan di Kabupaten Kuningan • Mengembangkan pelabuhan laut/samudra dan sarana pendukung secara terpadu di Cikidang Kecamatan Pangandaran dan Bojongsalawe Kecamatan Cijulang sebagai pelabuhan pengumpan primer sekaligus outlet distribusi di Kabupaten Ciamis <p>C. Sistem Jaringan Transportasi Udara Rencana sistem jaringan transportasi udara di Kawasan Perbatasan Jabar-Jateng adalah sebagai</p>	

No.	Kebijakan Struktur dan Pola Ruang	Identifikasi Kebutuhan Kawasan Perbatasan	Paduserasi Struktur dan Pola Ruang
	<ul style="list-style-type: none"> • meningkatkan kesejahteraan petani dan pemanfaatan lahan yang lestari. d. Kawasan peruntukan hortikultura untuk komoditas Durian yang berlokasi di Kecamatan Lebak, dan kawasan lainnya diluar kawasan perbatasan, e. Perkebunan rakyat dengan luas kurang lebih 866 hektar, antara lain meliputi Kecamatan Cibeureum, CiBingbin, , dan kecamatan lainnya di luar kawasan perbatasan, f. Kawasan peruntukan peternakan dengan luas sekitar 60 ha yang salah satunya terdapat di Kecamatan Cibeureum, g. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan luas kurang lebih 11.706 hektar meliputi seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Kuningan, h. Kawasan pertambangan mineral yang salah satunya diantaranya adalah Kecamatan Cibingbin, Cilebak, Karangancana, dan Subang. i. Kawasan prospek panas bumi di Kecamatan Cibingbin, Subang, dan kecamatan lain di luar kawasan perbatasan. j. Kawasan peruntukan industri kecil dan mikro rumah tangga terletak di Kecamatan Cibeureum, k. Kawasan pariwisata alam, berupa: <ul style="list-style-type: none"> • Bumi Perkemahan Buyut Jaksa di Desa Bantarpanjang Kecamatan Cibingbin • Air Panas Ciangir di Desa Ciangir Kecamatan Cibingbin; • Air Panas Subang di Desa Subang Kecamatan Subang; dan • Gua Indrakila di Desa Indrahayu Kecamatan Ciwaru l. Kawasan peruntukan permukiman perkotaan dan perdesaan di seluruh kecamatan 	berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi Bandara Nusawiru di Pangandaran sebagai pusat pengumpul tersier sekaligus outlet distribusi komoditas unggulan dari Kabupaten Ciamis • Optimalisasi Bandara Cakrabuana berada di Kecamatan Talun sebagai bandar udara pengumpul skala tersier sekaligus outlet distribusi komoditas unggulan dari Kabupaten Kuningan. <p>5. Rencana Sistem Jaringan Energi Rencana sistem jaringan energi, termasuk listrik dan gas adalah sebagai berikut:</p> <p>a) Memanfaatkan sumber energi listrik terbarukan, seperti energi air skala kecil, tenaga surya, tenaga angin, bahan bakar nabati, dan biogas di wilayah perdesaan potensial, dalam hal ini desa penghasil bahan baku dan pengolah bahan baku yang belum terlayani oleh jaringan listrik untuk mewujudkan desa mandiri energi. Contohnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pembangkit listrik dari sumber energi alternatif seperti tenaga surya di Kecamatan Cibingbin dan Kecamatan Cibeureum - pembangunan pembangkit listrik tenaga mikro di Kecamatan Cibingbin; - pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi di Kecamatan Subang dan Kecamatan Cibingbin; <p>b) Mengembangkan energi yang bersumber</p>	

No.	Kebijakan Struktur dan Pola Ruang	Identifikasi Kebutuhan Kawasan Perbatasan	Paduserasi Struktur dan Pola Ruang
	<p>m. Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan berupa KORAMIL di Kecamatan Subang, Ciwaru, Cibingbin,</p> <p>n. Kawasan hutan pangonan dengan luas kurang lebih 344 hektar, meliputi Kecamatan Cibeureum, Cilebak, Ciwaru, Karangkencana, dan Subang.</p>	<p>dari bahan bakar minyak (BBM), gas dan batubara di wilayah-wilayah yang masih belum terjangkau oleh jaringan listrik beserta pembangunan stasiun gas di koridor tertentu.</p>	
3.	Kota Banjar	c) Mengembangkan jaringan listrik tersebar di seluruh kecamatan untuk penyediaan energi listrik untuk kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan non rumah tangga;	
	<p>1. Rencana sistem jaringan berupa rencana sistem prasarana transportasi kota yang terkait dengan kawasan perbatasan, adalah:</p> <p>a. Pengembangan dan peningkatan fungsi jaringan jalan Arteri Primer, Kolektor primer, kolektor sekunder, jalan lokal, diantaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan jalan arteri dengan panjang 16,72 km ▪ Peningkatan jalan kolektor primer dengan panjang 122,96 km ▪ Peningkatan jalan kolektor sekunder dengan panjang 41,52 km ▪ Peningkatan jalan lokal dengan panjang 148,78 km <p>b. Rencana pembangunan dan pengembangan jalan lingkaran selatan yang melintasi Kecamatan Langensari, Purwaharja, dan Banjar dengan panjang jalan 7,44 km.</p> <p>c. Pengembangan jaringan jalan poros tengah kota</p> <p>d. Mengembangkan dan meningkatkan jalan perbatasan Jawa Barat – Jawa Tengah sampai Jalan Katapang via Rawa Onom.</p> <p>e. Peningkatan dan pengembangan jaringan jalan untuk mengakomodir pergerakan dari dan ke kawasan agropolitan.</p> <p>f. Rencana pembangunan jembatan Cijolang 2 Desa Panulisan (Jawa Tengah), terkait dengan telah ada</p>	<p>d) Mengembangkan transmisi tenaga listrik melalui peningkatan kualitas dan kuantitas gardu induk listrik di seluruh kecamatan, jaringan SUTET dan SUTT secara bertahap dan terpadu</p> <p>e) Membangun jaringan kabel bawah tanah terpadu dengan memanfaatkan ruang manfaat jalan</p> <p>f) Adanya perusahaan partisipasi badan-badan usaha (negeri dan swasta) untuk berperan dalam pelayanan listrik.</p> <p>6. Rencana Sistem Jaringan Air Baku dan Irigasi Rencana sistem jaringan air baku dan irigasi di Kawasan Perbatasan Jabar-Jateng adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pengelolaan wilayah sungai (DAS Cisanggarung, DAS Citanduy, DAS Cimanuk) melalui pengembangan prasarana pengendali daya rusak air dan pengembangan jaringan irigasi, serta merehabilitasi kawasan hutan dan lahan kritis di hulu DAS kritis dan 	

No.	Kebijakan Struktur dan Pola Ruang	Identifikasi Kebutuhan Kawasan Perbatasan	Paduserasi Struktur dan Pola Ruang
	<p>kesepakatan antara Kota Banjar dengan Pemerintah Jawa Tengah.</p> <p>g. Revitalisasi/peningkatan jalur Kereta Api Banjar-Cijulang</p> <p>h. Pengembangan Terminal baru tipe B di bagian selatan Kota Banjar sebagai terminal regional yang berlokasi di Pataruman</p> <p>i. Pengembangan terminal lokal (barang/pegudangan) untuk mengakomodir pergerakan koleksi dan distribusi agro di Kecamatan Pataruman dan Langensari</p> <p>j. Pengembangan trayek angkutan dalam kota dan antar kota</p> <p>2. Rencana pengembangan prasarana energi/listrik di Kota Banjar, adalah:</p> <p>a. Penambahan kapasitas jaringan listrik dengan penyediaan tempat untuk tiang kabel dan gardu</p> <p>b. Pengusahaan listrik masuk desa dengan harga yang terjangkau olah masyarakat.</p> <p>c. Pembangunan dan peningkatan Gardu Induk Listrik di Kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Banjar.</p> <p>d. Dalam jangka panjang dibutuhkan pembangunan pembangkit listrik dari sumber energi alternatif (energi matahari)</p> <p>e. Prasarana energi dapat dibangun bersamaan dengan dan atau memanfaatkan jaringan jalan guna memudahkan distribusi pada wilayah-wilayah pelayanan.</p> <p>f. Pembangunan jaringan kabel bawah tanah terpadu dengan memanfaatkan ruang manfaat jalan</p> <p>g. Pengusahaan partisipasi badan-badan usaha (negeri dan swasta) untuk berperan dalam pelayanan listrik.</p> <p>3. Rencana pengembangan jaringan telekomunikasi adalah sebagai berikut;</p>	<p>sangat kritis</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan situ dan embung dalam rangka konservasi dan pendayagunaan sumberdaya air untuk irigasi dan pariwisata • Melestarikan bentuk dan fungsi sungai dengan pengawasan ruang sempadan secara ketat • Melakukan normalisasi jaringan irigasi secara rutin dan berkala untuk mencegah pendangkalan • Mempertahankan saluran irigasi teknis yang dominan, salah satunya terletak di Kecamatan Langensari dan Kecamatan Purwaharja serta sebagian Kecamatan Pataruman. • Mengoptimalkan jaringan irigasi yang sudah ada untuk mengaliri kegiatan pertanian (sawah). • Membentuk gerakan pemberdayaan manajemen Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan Gabungan P3A pada semua DI (daerah irigasi) dalam pengelolaan sarana dan prasarana pengairan. • Membangun dan mengelola waduk dalam rangka konservasi dan pendayagunaan sumberdaya air dengan mempertimbangkan daya dukung sumberdaya air, studi AMDAL, kekhasan dan aspirasi daerah, kemampuan pembiayaan, serta kelestarian <i>biodiversity</i> (misalnya Waduk Cileuweung di Dusun 	

No.	Kebijakan Struktur dan Pola Ruang	Identifikasi Kebutuhan Kawasan Perbatasan	Paduserasi Struktur dan Pola Ruang
	<p>a. Penambahan kapasitas sentral telepon</p> <p>b. Penambahan <i>Tower Relay</i> dan pemasangan sejumlah microcell di daerah yang diperkirakan akan terjadi <i>blackspot</i>.</p> <p>c. Pengembangan fasilitas telepon umum dan warung telekomunikasi di tempat strategis</p> <p>d. Pengembangan menara atau tower (BTS) telekomunikasi untuk mendukung pelayanan telepon seluler (<i>Handphone</i>).</p> <p>4. Rencana jaringan irigasi di Kota Banjar, meliputi :</p> <p>a. Saluran irigasi teknis yang dominan akan dipertahankan terutama terletak di Kecamatan Langensari dan Kecamatan Purwaharja serta sebagian Kecamatan Pataruman.</p> <p>b. Sementara untuk jaringan irigasi desa dan tadah hujan, bila ada peralihan fungsi lahan, maka saluran tersebut harus disesuaikan dengan kemungkinan fungsinya menjadi saluran drainase.</p> <p>c. Mengoptimalkan jaringan irigasi yang sudah ada di Kota Banjar untuk mengaliri kegiatan pertanian (sawah).</p> <p>5. Rencana penyediaan air bersih untuk Kota Banjar, sebagai berikut:</p> <p>a. Pembangunan Reservoir Gunung Babakan dengan kapasitas 750 m³ di Kecamatan Pataruman.</p> <p>b. Sistem sambungan langsung dengan sumber dari PDAM direncanakan melayani kawasan perkotaan, pusat kegiatan komersil, industri maupun pusat pemerintahan. Daerah-daerah ini merupakan daerah yang menjadi kawasan perkotaan yang tersebar di kecamatan-kecamatan di Kota Banjar.</p> <p>c. Sistem penyediaan air dengan swadaya murni dari masyarakat (Sumur Bor atau Artesis),</p> <p>6. Rencana pengelolaan drainase di Kota Banjar, sebagai</p>	<p>Cibangkawang Desa Randusari Kecamatan Cibingbin)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan dan melakukan koordinasi jaringan sumber daya air lintas kabupaten dan kota dan kepentingan irigasi melalui pengaturan kerjasama dengan proporsi yang seimbang dan pengaturan kebutuhan irigasi dan komposisi antar wilayah • Meningkatkan pengelolaan sistem jaringan irigasi melalui perlindungan terhadap sumber-sumber mata air; perlindungan terhadap daerah aliran air; serta peningkatan operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi • Mengembangkan jaringan air baku untuk air minum • Mengembangkan jaringan air minum kepada kelompok pengguna. <p>Rencana Pola Ruang Pengembangan pola pemanfaatan ruang di kawasan perbatasan Jabar-Jateng bertipe kawasan agraris yang memiliki ciri khas sebagai kawasan pertanian yang dibatasi oleh wilayah konservasi, hutan, lahan kritis di kawasan DAS, serta kawasan lindung di perbatasan antar provinsi pantai di wilayah yang berbatasan dengan laut.</p> <p>Rencana pemanfaatan ruang di wilayah perbatasan Jabar-Jateng diarahkan pada</p>	

No.	Kebijakan Struktur dan Pola Ruang	Identifikasi Kebutuhan Kawasan Perbatasan	Paduserasi Struktur dan Pola Ruang																																
	<p>berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pembuatan Waduk/Kolam penampungan/penyanggah tebing pada kawasan di Kel. Purwaharja dan Ds. Mekarharja dimana pada saat hujan besar selalu tergenang dan terjadi longsor. b. Meningkatkan fungsi drainase makro (S. Citanduy, S. Ciseel, S. Cijolang) berupa : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembuatan Sodetan, untuk mengurangi debit air. ▪ Normalisasi alur Sungai dengan mengeruk sedimen yang mengendap di dasar sungai, terutama pada bagian sungai yang sudah mengalami pendangkalan ▪ Perkuatan Tebing untuk melindungi bagian tebing sungai dari erosi, terutama pada pinggiran sungai yang mudah longsor ataupun tergerus oleh aliran air. <p>7. Rencana Kawasan Lindung</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kawasan sempadan sungai, dipertegas batas-batasnya, segera dikuasai pemerintah dan diperkuat statusnya. b. Perwujudan lahan-lahan sempadan sungai dapat dilakukan dengan cara partisipatif masyarakat, atau penertiban terutama di kawasan lindung yang membahayakan kelangsungan penduduk yang tinggal di kawasan sekitarnya. c. Sempadan sungai setelah dikuasai pemerintah, maka untuk mempermudah pengawasan dan pengendaliannya dilakukan pembangunan jalan inspeksi. d. Untuk wilayah sekitar sempadan sungai bangunan boleh didirikan setelah adanya pembangunan jalan inspeksi. 	<p>perencanaan dan pengembangan kegiatan pertanian. Hal ini mendukung terhadap pengembangan sektor-sektor pertanian (kegiatan ekonomi primer) untuk tumbuh dan berkembang sebagai basis kegiatan di wilayah perbatasan. Kegiatan pengembangan pertanian ini sejalan dengan pola pemanfaatan ruang di wilayah Jawa Tengah yang dominasi dan rencana pengembangan kawasan perbatasannya juga dimanfaatkan untuk penggunaan lahan pertanian lahan kering dan pengembangan pertanian.</p> <table border="1" data-bbox="981 707 1489 1114"> <thead> <tr> <th>Kecamatan</th> <th>Sentra produksi</th> <th>Sektor basis</th> <th>Subsektor/Komoditas unggulan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Losari</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Primer • Sekunder • Tersier </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Pertanian • Bangunan • Jasa-jasa </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Tanaman Bahan Makanan • Perikanan (laut, tambak) • Peternakan (itik) • Perikanan (kolam) </td> </tr> <tr> <td>Pabelitan</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Primer • Sekunder • Tersier </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Pertanian • Bangunan • Jasa-jasa </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Perikanan (kolam) </td> </tr> <tr> <td>Purwaharja</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Tersier </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Jasa-Jasa • Pengangkutan dan Komunikasi </td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pataruman</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Tersier </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan • Perdagangan, Hotel dan Restoran • Pengangkutan dan Komunikasi </td> <td></td> </tr> <tr> <td>Langensari</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Primer • Sekunder • Tersier </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Pertanian • Bangunan • Jasa-jasa </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Tanaman Bahan Makanan (sayur-sayuran) • Perikanan (kolam) </td> </tr> <tr> <td>Lakbok</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Primer • Sekunder • Tersier </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Pertanian • Bangunan • Jasa-jasa </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Tanaman Bahan Makanan (kangkung) • Perkebunan (kelapa) </td> </tr> <tr> <td>Purwadadi</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Primer • Sekunder • Tersier </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Pertanian • Bangunan • Jasa-jasa </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Tanaman Bahan Makanan (kacang panjang, pisang) • Peternakan (kambing) </td> </tr> </tbody> </table> <p>Pda dasarnya, rencana pola ruang kawasan perbatasan Jabar-Jateng terdiri dari pengembangan lahan terbangun dan lahan tidak terbangun. Sesuai dengan kepentingan kawasan perbatasan, pola penggunaan lahan dititikberatkan pada rencana pemanfaatan lahan</p>	Kecamatan	Sentra produksi	Sektor basis	Subsektor/Komoditas unggulan	Losari	<ul style="list-style-type: none"> • Primer • Sekunder • Tersier 	<ul style="list-style-type: none"> • Pertanian • Bangunan • Jasa-jasa 	<ul style="list-style-type: none"> • Tanaman Bahan Makanan • Perikanan (laut, tambak) • Peternakan (itik) • Perikanan (kolam) 	Pabelitan	<ul style="list-style-type: none"> • Primer • Sekunder • Tersier 	<ul style="list-style-type: none"> • Pertanian • Bangunan • Jasa-jasa 	<ul style="list-style-type: none"> • Perikanan (kolam) 	Purwaharja	<ul style="list-style-type: none"> • Tersier 	<ul style="list-style-type: none"> • Jasa-Jasa • Pengangkutan dan Komunikasi 		Pataruman	<ul style="list-style-type: none"> • Tersier 	<ul style="list-style-type: none"> • Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan • Perdagangan, Hotel dan Restoran • Pengangkutan dan Komunikasi 		Langensari	<ul style="list-style-type: none"> • Primer • Sekunder • Tersier 	<ul style="list-style-type: none"> • Pertanian • Bangunan • Jasa-jasa 	<ul style="list-style-type: none"> • Tanaman Bahan Makanan (sayur-sayuran) • Perikanan (kolam) 	Lakbok	<ul style="list-style-type: none"> • Primer • Sekunder • Tersier 	<ul style="list-style-type: none"> • Pertanian • Bangunan • Jasa-jasa 	<ul style="list-style-type: none"> • Tanaman Bahan Makanan (kangkung) • Perkebunan (kelapa) 	Purwadadi	<ul style="list-style-type: none"> • Primer • Sekunder • Tersier 	<ul style="list-style-type: none"> • Pertanian • Bangunan • Jasa-jasa 	<ul style="list-style-type: none"> • Tanaman Bahan Makanan (kacang panjang, pisang) • Peternakan (kambing) 	
Kecamatan	Sentra produksi	Sektor basis	Subsektor/Komoditas unggulan																																
Losari	<ul style="list-style-type: none"> • Primer • Sekunder • Tersier 	<ul style="list-style-type: none"> • Pertanian • Bangunan • Jasa-jasa 	<ul style="list-style-type: none"> • Tanaman Bahan Makanan • Perikanan (laut, tambak) • Peternakan (itik) • Perikanan (kolam) 																																
Pabelitan	<ul style="list-style-type: none"> • Primer • Sekunder • Tersier 	<ul style="list-style-type: none"> • Pertanian • Bangunan • Jasa-jasa 	<ul style="list-style-type: none"> • Perikanan (kolam) 																																
Purwaharja	<ul style="list-style-type: none"> • Tersier 	<ul style="list-style-type: none"> • Jasa-Jasa • Pengangkutan dan Komunikasi 																																	
Pataruman	<ul style="list-style-type: none"> • Tersier 	<ul style="list-style-type: none"> • Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan • Perdagangan, Hotel dan Restoran • Pengangkutan dan Komunikasi 																																	
Langensari	<ul style="list-style-type: none"> • Primer • Sekunder • Tersier 	<ul style="list-style-type: none"> • Pertanian • Bangunan • Jasa-jasa 	<ul style="list-style-type: none"> • Tanaman Bahan Makanan (sayur-sayuran) • Perikanan (kolam) 																																
Lakbok	<ul style="list-style-type: none"> • Primer • Sekunder • Tersier 	<ul style="list-style-type: none"> • Pertanian • Bangunan • Jasa-jasa 	<ul style="list-style-type: none"> • Tanaman Bahan Makanan (kangkung) • Perkebunan (kelapa) 																																
Purwadadi	<ul style="list-style-type: none"> • Primer • Sekunder • Tersier 	<ul style="list-style-type: none"> • Pertanian • Bangunan • Jasa-jasa 	<ul style="list-style-type: none"> • Tanaman Bahan Makanan (kacang panjang, pisang) • Peternakan (kambing) 																																

No.	Kebijakan Struktur dan Pola Ruang	Identifikasi Kebutuhan Kawasan Perbatasan	Paduserasi Struktur dan Pola Ruang
	<p>e. Rehabilitasi dan pengerukan lumpur sungai pada aliran sungai yang telah mengalami pendangkalan.</p> <p>f. Bangunan yang didirikan di sekitar wilayah sempadan sungai harus menghadap sungai.</p> <p>8. Rencana Kawasan Budidaya</p> <p>a. Kawasan permukiman</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kawasan permukiman kepadatan tinggi, tersebar di kecamatan di kawasan pusat kota yaitu Kecamatan Pataruman. Pengembangan kawasan permukiman kepadatan tinggi pda pusat kota diarahkan untuk pengembangan secara vertikal. ▪ Kawasan permukiman kepadatan sedang diarahkan pengembangannya di wilayah pengembangan lainnya yaitu Langensari dan Banjar. ▪ Kawasan permukiman kepadatan rendah, diarahkan di Kecamatan Purwahrja. <p>b. Kawasan pusat kota Kawasan Pusat Kota ini terletak di Kecamatan Pataruman (34,07 Ha) dan Kecamatan Banjar (15,86 Ha).</p> <p>c. Kawasan Perdagangan dan jasa</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perdagangan skala kecamatan yang mendukung Sub Pusat Pelayanan Kota pengembangannya diarahkan di Desa Cibeureum, Kel. Mekarsari, Desa Batulawang, Desa Mulyasari dan Kel. Muktisari. ▪ Perdagangan lokal dengan skala pelayanan kecamatan dan kota, pengembangannya diarahkan di Kecamatan Purwahrja, Pataruman dan Langensari dengan 	<p>untuk kegiatan pertanian.</p>	

No.	Kebijakan Struktur dan Pola Ruang	Identifikasi Kebutuhan Kawasan Perbatasan	Paduserasi Struktur dan Pola Ruang
	<p>mempertimbangkan keserasian antara skala kegiatan dengan lokasi kegiatan.</p> <p>d. Kawasan khusus Merupakan kawasan yang intensitas pemanfaatannya bersifat terbatas dan penanganannya pun bersifat khusus, yaitu: Komplek Batalyon Infantri 321 Buaya Putih di Kelurahan Purwaharja, dan Lapangan Terbang Langen di Desa Langensari.</p> <p>e. Kawasan industri Arahan pengembangan industri di Kota Banjar terdapat di Kecamatan Pataruman dengan luas 190,38 Ha dan Kecamatan Langensari dengan luas 25,42 Ha.</p> <p>f. Kawasan pertanian tanaman pangan lahan basah Sebaran untuk kawasan pertanian lahan basah di Kota Banjar seluas 3.817,90 Ha yang meliputi : Kecamatan Pataruman (951,24 Ha), Banjar (748,10 Ha), Purwaharja (680,25 Ha), Langensari (1.438,31 Ha).</p> <p>g. Kawasan perkebunan Rencana pengembangan kawasan perkebunan di Kota Banjar secara umum meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan kawasan perkebunan memanfaatkan lahan –lahan kritis ▪ Pengembangan kawasan perkebunan diutamakan untuk kepentingan masyarakat setempat. ▪ Pemberian prasarana dan sarana pendukung untuk pengembangan perkebunan ▪ Memberikan kemudahan dalam memasarkan hasil produksi perkebunan ▪ Sebaran untuk Kawasan Perkebunan di Kota Banjar seluas 2.871,80 Ha yang 		

No.	Kebijakan Struktur dan Pola Ruang	Identifikasi Kebutuhan Kawasan Perbatasan	Paduserasi Struktur dan Pola Ruang
	<p>meliputi : Kecamatan Pataruman (2.265,73 Ha), Banjar (375,81 Ha), Purwahrja (62,71 Ha), Langensari (167,55 Ha).</p> <p>h. Kawasan Hutan Produksi Kawasan hutan produksi yang dikembangkan di Kota Banjar terdapat di Kecamatan Pataruman seluas 507,07 Ha, Kecamatan Purwahrja seluas 298,49 Ha, dan Kecamatan Langensari seluas 83,94 Ha. Hutan produksi akan dikembangkan dalam rangka mendukung perekonomian wilayah dan kelestarian alam dan lingkungan (ekosistem).</p> <p>i. Ruang Terbuka Hijau Rencana penyediaan RTH dilakukan melalui: (1) Pengembangan Hutan Kota. Lokasi Hutan Kota di Kota Banjar diarahkan dikembangkan di Kecamatan Purwahrja. Hutan kota untuk wilayah Kota Banjar memanfaatkan hutan produksi yang berada di Kecamatan Purwahrja dengan dikembangkan sebagai hutan kota. Tujuan pengembangan hutan kota di Kota Banjar adalah lebih ditekankan kepada pengembangan dan pemanfaatan kawasan hijau atau kawasan lindung yang telah ada; (2) Pengembangan sabuk hijau. Rencana pengembangan sabuk hijau di Kota Banjar berada di Sepanjang Rel Kereta Api dan sepanjang jalur lingkar; (3) Pengembangan taman-taman kota dengan konsep taman rekreatif dan edukatif; (4) Tempat pemakaman umum, pengembangan kompleks TPU berada hampir diseluruh kecamatan; serta (5) Pengembangan ruang terbuka hijau yang berada di sempadan jalan, median jalan dan pulau jalan.</p> <p>j. Kawasan Strategis Banjar dan sekitarnya Merupakan jantung utama penggerak</p>		

No.	Kebijakan Struktur dan Pola Ruang	Identifikasi Kebutuhan Kawasan Perbatasan	Paduserasi Struktur dan Pola Ruang
	<p>pertumbuhan Kota Banjar secara keseluruhan dengan fungsi utamanya sebagai pusat jasa, ekonomi, pemerintahan dan pusat distribusi dan koleksi, peranan kawasan perkotaan Banjar sangat tinggi dalam mempengaruhi pertumbuhan Kota Banjar.</p> <p>Kawasan Banjar dsk selain berperan sebagai ibukota Kota Banjar, secara lokasional dalam skala regional letaknya cukup strategis, karena dilalui oleh jalur lalu lintas Barat – Timur dan Utara - Selatan antar Kota dan antar Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah.</p> <p>Pengelolaan Kawasan Strategis Perkotaan Banjar dsk, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan fungsi penggunaan lahan di Kawasan Perkotaan Banjar untuk kegiatan-kegiatan yang intensif produktif ekonomis, yang mendukung fungsinya sebagai ibukota Kota Banjar (dengan fungsi utama sebagai pusat jasa, ekonomi, pemerintahan dan pusat distribusi dan koleksi) dengan tetap melakukan pengendalian pada ekstensivitas pembangunan fisiknya. ▪ Melakukan pemberdayaan masyarakat lokal untuk menunjang kegiatan agrobisnis dan pariwisata, dengan memberikan kesempatan pendidikan dan latihan khusus. ▪ Melakukan kebijakan-kebijakan yang mendukung potensi unggulan di tiap Kawasan Perkotaan Banjar, yang sudah diidentifikasi sebagai sektor dan komoditi unggulan. 		

No.	Kebijakan Struktur dan Pola Ruang	Identifikasi Kebutuhan Kawasan Perbatasan	Paduserasi Struktur dan Pola Ruang
4	Kabupaten Ciamis		
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Jaringan transportasi <ol style="list-style-type: none"> a. Penetapan sebagai jaringan jalan kolektor primer untuk ruas jalan Panjalu-Cibereum; Cibeureum-Jahim; Kalipucang-Majingklak. b. Penetapan sebagai jaringan jalan lokal primer untuk ruas jalan Padaherang-Paledah; Mangunjaya Sidaharja - SP. Mangunjaya, Cibarengkok - Tambaksari, Sopla - SP. Mangunjaya; c. Penetapan ruas jalan strategis kabupaten untuk ruas jalan Cibeureum-Panjalu, Cisaga-Cipicung. d. Pengembangan terminal tipe C di Kecamatan Kalipucang, Purwadadi, Tambaksari, Padaherang, Lakbok, Mangunjaya. e. Optimalisasi pelabuhan penyeberangan Santolo dan Majingklak di Kecamatan Kalipucang; dan f. Optimalisasi Pelabuhan penyeberangan untuk tujuan lintas penyeberangan Sungai Citanduy dengan rute Kalipucang-Jawa Tengah. 2. Rencana jaringan energi listrik <ol style="list-style-type: none"> a. Pengembangan Energi Tak Terbarukan, mencakup pengembangan energi yang bersumber dari bahan bakar minyak (BBM), gas dan batubara di wilayah-wilayah yang masih belum terjangkau oleh jaringan listrik; b. Jaringan transmisi tenaga listrik Saluran Udara Tegangan Tinggi yang melewati Kecamatan Lakbok, Purwodadi, Pamarican dan Cidolog; c. Stasiun pengisian gas di koridor Kecamatan Cisaga, Cijeungjing, Ciamis, Cikoneng, Singdangkasih, Cihaurbeuti dan Panumbangan; 3. Rencana jaringan telekomunikasi <ol style="list-style-type: none"> a. Jaringan kabel telepon di kawasan perkotaan, kawasan perdesaan dan desa-desa tergolong miskin 		

No.	Kebijakan Struktur dan Pola Ruang	Identifikasi Kebutuhan Kawasan Perbatasan	Paduserasi Struktur dan Pola Ruang
	<p>yang dapat diakses oleh jaringan kabel telepon;</p> <p>b. Nir kabel di kawasan perkotaan, kawasan perdesaan, desa-desa tergolong miskin yang belum dilalui jaringan kabel telepon yang dapat diakses oleh infrastruktur nir kabel dan jaraknya jauh atau belum terjangkau jaringan kabel telepon atau kondisi topografi alamnya sulit untuk dilalui jaringan kabel telepon;</p> <p>4. Rencana Jaringan Sumber Daya Air</p> <p>a. Pengembangan jaringan sumber daya air lintas provinsi, yaitu Sungai Citanduy dan Cijulang.</p> <p>b. Pengembangan waduk Sukahurip di WS Ciwulan-Cilaki Kecamatan Pangandaran dan Kalipucang yang bermanfaat sebagai sumber air baku domestic PKW Pangandaran, Irigasi DI Ciputrapinggan dan pengendali banjir;</p> <p>c. Pengembangan potensi peningkatan dan pembangunan jaringan irigasi di Kecamatan Kawali, Jatinegara, Rajadesa, Panawangan, Cipaku, Lumbung, Rancah, Tambaksari, Panjalu, Panumbangan, Sukamantri, Ciamis, Cikoneng, Sadananya, Baregbeg, Cijeungjing, Sukadana, Cisaga, Sindangkasih, Cihaurbeuti, Banjarsari, Padaherang, Lakbok, Mangunjaya, Pamarican, Cimaragas, Cidolog, Purwadadi, Pangandaran, Kalipucang, Sidamulih, Cijulang, Cimerak, Parigi, Cigugur dan Langkaplancar.</p> <p>5. Rencana Jaringan Prasarana Lingkungan</p> <p>a. Pengembangan sistem perpipaan air minum di kawasan perkotaan Kecamatan Padaherang, Banjarsari, Lakbok, Pamarican, Mangunjaya yang menggunakan sumber air baku bendung manganti;</p> <p>b. Pengembangan sistem perpipaan di kawasan perkotaan Kecamatan Cijeungjing, Cisaga,</p>		

No.	Kebijakan Struktur dan Pola Ruang	Identifikasi Kebutuhan Kawasan Perbatasan	Paduserasi Struktur dan Pola Ruang
	<p>Rajadesa, Ciamis, Cihaurbeuti, Sadananya, Jatinagara, Kawali, Panumbangan, Sindangkasih, Baregbeg Dan Cikoneng menggunakan sumber air baku Sungai Cimuntur dan Sungai Citanduy;</p> <p>c. Pengembangan sistem perpipaan di kawasan perkotaan Kecamatan Tambaksari, Rancah, Sukadana, Cipakau menggunakan sumber air baku dari Sungai Cijolang atau Cimuntur;</p> <p>d. Pengembangan sistem perpipaan di kawasan perkotaan Parigi, Sidamulih, Pangandaran, Cijulang, Kalipucang dengan sumber air baku Sungai Cikole dan penambahan sumber air baku dari Sungai Cijalu dan Sungai Kalipucang untukantisipasi peningkatan langganan;</p> <p>e. Jalur evakuasi bencana gerakan tanah tinggi di Kecamatan Sukamantri, Panawangan, Rajadesa, Rancah, Tambaksari, Sukadana, Cidolog, Pamarican, Banjarsari, Langkaplancar, Kalipucang dan Sidamulih yang mudah diakses menuju ruang evakuasi bencana yang aman berupa fasilitas umum dan fasilitas sosial yang dilengkapi prasarana dan sarana pendukung proses evakuasi bencana;</p> <p>f. Jalur evakuasi bencana gempa bumi di Kecamatan Cimerak, Cijulang, Cigugur, Parigi, Sidamulih, Pangandaran dan Kalipucang yang mudah diakses menuju ruang evakuasi bencana yang aman berupa ruang terbuka hijau yang dilengkapi prasarana dan sarana pendukung proses evakuasi bencana;</p> <p>g. Jalur evakuasi bencana banjir di Kecamatan Cisaga, Cijeungjing, Pamarican, Banjarsari, Purwodadi, Mangunjaya, Padaherang, Kalipucang, Sidamulih, Pangandaran, Parigi dan Cijulang yang</p>		

No.	Kebijakan Struktur dan Pola Ruang	Identifikasi Kebutuhan Kawasan Perbatasan	Paduserasi Struktur dan Pola Ruang
	<p>mudah diakses menuju ruang evakuasi bencana yang aman dari banjir berupa fasilitas umum dan fasilitas sosial ditempat lebih tinggi yang dilengkapi prasarana dan sarana pendukung proses evakuasi bencana; dan</p> <p>h. Jalur evakuasi bencana tsunami di Kecamatan Cimerak, Cijulang, Parigi, Sidamulih, Pangandaran dan Kalipucang yang mudah diakses menuju ruang evakuasi bencana yang aman berupa fasilitas umum dan fasilitas sosial ditempat lebih tinggi yang dilengkapi prasarana dan sarana pendukung proses evakuasi bencana.</p> <p>i. Optimalisasi instanlasi pengolahan limbah terpadu (IPLT) Cimaragas untuk melayani Kecamatan Ciamis, Cikoneng, Sadananya, Baregbeg, Cijeungjing, Sukadana, Cisaga, Sindangkasih dan Cihaurbeuti;</p> <p>j. Optimalisasi IPLT pangandaran untuk melayani Kecamatan Pangandaran, Kalipucang, Sidamulih, Cijulang, Cimerak, Parigi, Cigugur dan Langkaplancar;</p> <p>k. Pembangunan IPLT banjarsari untuk melayani Kecamatan Banjarsari, Padaherang, Lakbok, Mangunjaya, Pamarican, Cimaragas, Cidolog dan Purwadadi;</p> <p>l. Pembangunan IPLT kawali untuk melayani Kecamatan Kawali, Jatinegara, Rajadesa, Panawangan, Cipaku, Lumbang, Rancah, Tambaksari, Panjalu, Panumbangan dan Sukamantri;</p> <p>6. Rencana Kawasan Lindung</p> <p>a. Kawasan perlindungan setempat, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sempadan Pantai di Kecamatan Kalipucang, Pangandaran, Sidamulih, Parigi, Cijulang dan 		

No.	Kebijakan Struktur dan Pola Ruang	Identifikasi Kebutuhan Kawasan Perbatasan	Paduserasi Struktur dan Pola Ruang
	<p>Cimerak</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sempadan Mata Air terdapat di Parigi, Cimerak, Sidamulih, Panumbangan, Panawangan, Langkaplancar, Purwadadi, Cipaku, Cisaga, Padaherang, Banjarsari, Rajadesa, Pamarican, Cimaragas, Rancah, Cikoneng, Cihaurbeuti, Panumbangan, Panjalu, Kawali dan lain- lain. <p>b. Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya; berupa kawasan pantai berhutan bakau/ mangrove di Kecamatan Kalipucang, Pangandaran, Sidamulih, Parigi, Cijulang dan Cimerak;</p> <p>c. Kawasan rawan bencana alam, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ kawasan rawan banjir di Kecamatan Cisaga, Cijeungjing, Pamarican, Banjarsari, Purwodadi, Mangunjaya, Padaherang, Kalipucang, Sidamulih, Pangandaran, Parigi dan Cijulang. ▪ kawasan rawan gempa bumi tektonik di Kecamatan Cimerak, Cijulang, Cigugur, Parigi, Sidamulih, Pangandaran dan Kalipucang ▪ kawasan rawan gerakan tanah tinggi di kecamatan Kecamatan Sukamantri, Panawangan, Rajadesa, Rancah, Tambaksari, Sukadana, Cidolog, Pamarican, Banjarsari, Langkaplancar, Kalipucang dan Sidamulih; dan ▪ kawasan rawan tsunami di Kecamatan Cimerak, Cijulang, Parigi, Sidamulih, Pangandaran dan Kalipucang. ▪ kawasan Kars di kecamatan Cimerak, Cijulang, Parigi, Sidamulih, Pangandaran, Kalipucang, Pamarican, Banjarsari, Cigugur <p>d. Kawasan lindung lainnya, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ kawasan perlindungan plasma nutfah eks-situ, meliputi Pantai Majingklak, Karang Kamulyan, Panjalu dan Cukang Taneuh; 		

No.	Kebijakan Struktur dan Pola Ruang	Identifikasi Kebutuhan Kawasan Perbatasan	Paduserasi Struktur dan Pola Ruang
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ kawasan cadangan hutan lindung di Kecamatan Sukamantri, Panawangan, Rajadesa, Rancah, Tambaksari, Cisaga, Panumbangan, Panjalu, Lumbung, Kawali, Jatinegara, Sukadana, Cihaurbeuti, Sadananya, Baregbeg, Sindangkasih, Cimaragas, Cidolog, Pamarican, Langkaplancar, Banjarsari, Padaherang, Cimerak, Cigugur, Sidamulih, Pangandaran dan Kalipucang. <p>7. Rencana Kawasan Budidaya</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kawasan peruntukan hutan produksi tetap di Kecamatan Kalipucang, Padaherang, Lakbok, Cisaga, dan Tambaksari, serta kecamatan lain yang tidak termasuk kawasan perbatasan, b. kawasan hutan rakyat terdapat di Kecamatan Tambaksari, Cisaga, Padaherang, Lakbok, Mangunjaya, Purwadadi, dan Kalipucang, serta kecamatan lain; c. kawasan peruntukan pertanian; d. kawasan peruntukan perkebunan; <ul style="list-style-type: none"> 1) peruntukan perkebunan besar di Purwadadi, Pamarican, Banjarsari, Cimerak, Tambaksari, Cipaku, Kawali, Cisaga, Kalipucang, Langkaplancar dan Cigugur; dan 2) peruntukan perkebunan rakyat di Kecamatan Kawali, Jatinegara, Rajadesa, Panawangan, Cipaku, Lumbung, Rancah, Tambaksari, Panjalu, Panumbangan, Sukamantri, Ciamis, Cikoneng, Sadananya, Baregbeg, Cijeungjing, Sukadana, Cisaga, Sindangkasih, Cihaurbeuti, Banjarsari, Padaherang, Lakbok, Mangunjaya, Pamarican, Cimaragas, Cidolog, Purwadadi, Pangandaran, Kalipucang, Sidamulih, Cijulang, Cimerak, Parigi, Cigugur dan Langkaplancar. 		

No.	Kebijakan Struktur dan Pola Ruang	Identifikasi Kebutuhan Kawasan Perbatasan	Paduserasi Struktur dan Pola Ruang
	<p>e. kawasan peruntukan perikanan;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) perikanan tangkap, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a) perairan Laut, yaitu daerah penangkapan ikan di Pangandaran, Parigi, Cijulang, Cimerak, Sidamulih, Kalipucang; b) perairan Umum Rawa di Cimerak, Kalipucang, Padaherang, Banjarsari, Lakbok, Tambaksari, Rancah, Purwodari dan Mangunjaya; c) perairan Umum Danau/ situ/ cekdam, di Cigugur, Langkaplancar, Kalipucang, Padaherang, Banjarsari, Pamarican, Cisaga, Tambaksari, Rajadesa, Sadananya, Panawangan, Kawali, Panjalu, Panumbangan, Sindangkasih, Lumbung, Sukamantri 2) budidaya air tawar Jaring Apung, terdapat di Kecamatan Padaherang, Panjalu dan Cijulang; 3) budidaya air payau/ tambak terdapat di Kecamatan Cimerak, Cijulang, Parigi, Pangandaran dan Kalipucang, 4) budidaya kolam air tenang, dan 5) budidaya air tawar minapadi, meliputi Kecamatan Kalipucang, Padaherang, Cisaga, Tambaksari, Purwadari, Mangunjaya, dan kecamatan lainnya. 6) Industri pengolahan ikan, meliputi Kecamatan Kalipucang, Padaherang, Lakbok, Cisaga, Tambaksari, Purwodadi, dan kecamatan lainnya. <p>f. kawasan peruntukan pertambangan;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Lokasi tambang batu gamping terdapat di Kecamatan Padaherang, Kalipucang 2) Fosfat, Batu belah, pasir kwarsa, dan air 		

No.	Kebijakan Struktur dan Pola Ruang	Identifikasi Kebutuhan Kawasan Perbatasan	Paduserasi Struktur dan Pola Ruang
	<p>panas di Kecamatan Padaherang</p> <ol style="list-style-type: none"> 3) Zeolit di Munggangsempu-Tunggilis, di Kecamatan Kalipucang, Padaherang 4) Kalsit dan breksi Andesit di Kecamatan Kalipucang 5) Batu Andesit di Kecamatan Kalipucang, dan Tambaksari, 6) Gambut di Kecamatan Purwodadi, 7) Batu bara di Kecamatan Tambaksari, <p>g. kawasan peruntukan industri; semua kecamatan yang berada di kawasan perbatasan Jabar-Jateng termasuk dalam arahan peruntukan industri besar, sedang, dan industri rumah tangga, yaitu: Kecamatan Cisaga, Padaherang, Lakbok, Mangunjaya, Purwadadi, dan Kalipucang, selain kecamatan lainnya,</p> <p>h. kawasan peruntukan pariwisata;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Objek wisata budaya Kampung Kuta dan Museum Fosil diarahkan di Kecamatan Tambaksari 2) Objek wisata alam Lembah Putri, Karapyak, Palatar Agung dan Majingklak diarahkan pengembangannya di Kecamatan Kalipucang 3) Objek wisata minat khusus Karang Nini dan Goa Donan dikembangkan di Kecamatan Kalipucang; <p>i. kawasan peruntukan permukiman;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) permukiman Perkotaan Kota Kalipucang di Desa Kalipucang dan Cibuluh 2) permukiman Perkotaan Kota Padaherang di Desa Padaherang dan Karangpawitan 3) permukiman Perkotaan Kota Lakbok di Desa Lakbok, Cintajaya dan Sidaharja; 		

No.	Kebijakan Struktur dan Pola Ruang	Identifikasi Kebutuhan Kawasan Perbatasan	Paduserasi Struktur dan Pola Ruang
	<ul style="list-style-type: none"> 4) permukiman Perkotaan Kota Cisaga di Desa Cisaga dan Mekarmukt 5) permukiman perkotaan Tambaksari di Desa Tambaksari dan Kaso 6) permukiman Perkotaan Kota Purwadadi di Desa Purwadadi 7) permukiman Perkotaan Kota Mangunjaya di Desa Mangunjaya 8) Kawasan permukiman perdesaan, yaitu di desa-desa yang tidak termasuk kedalam ibukota kecamatan j. kawasan peruntukan lainnya, meliputi: kawasan peternakan, kawasan pertanahan keamanan, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> 1) ternak besar kuda di Kecamatan Kecamatan Ciamis, Sadananya, Cikoneng, Cihaurbeuti, Banjarsari, Lakbok, Pangandaran, Padaherang, Parigi, Cimerak dan Sidamulih 2) ternak kecil domba dan kambing di seluruh kecamatan 3) ternak unggas ayam dan itik di seluruh kecamatan 4) pos polair Pangandaran dengan sub pos Kalipucang, Pangandaran, Parigi dan Batukaras 		

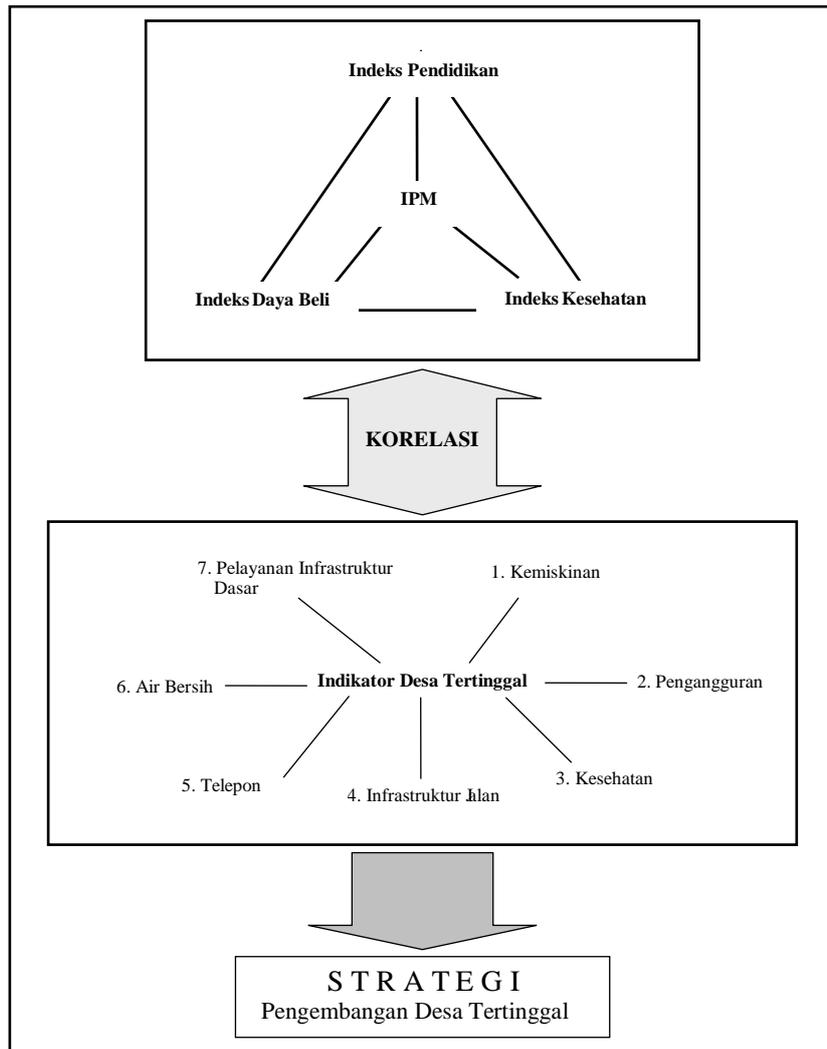
4.5 Klasifikasi IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Di Wilayah Perbatasan.

A. Analisis Komponen-Komponen Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia adalah merupakan indeks komposit dari Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan dan Indeks Daya Beli dari masing-masing indeks tersebut saling berkaitan erat terhadap pembangunan manusia yang merupakan alat ukur dari pembangunan suatu wilayah baik daerah, propinsi maupun secara nasional.

Dari IPM tersebut akan di ketahui bagaimana keterkaitan dengan Indikator desa tertinggal untuk dapat diketahui sejauhmana indikator desa tertinggal mampu meningkatkan IPM yang selanjutnya akan diketahui strategi pengembangannya seperti divisualisasikan pada Gambar .1.

Dalam keterkaitannya Komponen IPM memiliki keterkaitan erat dan merupakan bangun korelasi yang kuat antara komponen-komponennya. Tujuan utama dari IPM pada dasarnya adalah merupakan memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki manusia yang didasarkan kepada kebebasan memilih apa yang diinginkan dan bagaimana menjalankan hidup dan kehidupannya untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik.



Gambar 4-15 Bangun Korelasi Indeks Pembangunan Manusia dengan Indikator Desa Tertinggal

Komponen-komponen itu adalah pendidikan, kesehatan dan daya beli dalam berbagai perspektif memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya antara sebagaimana dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 4-17 Matriks Keterkaitan Antar Komponen IPM

	Pendidikan (P)	Kesehatan (K)	Daya Beli (DB)	Korespondensi
Pendidikan (P)		P-K	P-DB	P-K P-DB
Kesehatan (K)	K-P		K-DB	K-P K-DB
Daya Beli (DB)	DB-P	DB-K		DB-P DB-K

Sumber : Analisis 20014.

1. Pendidikan Terhadap Kesehatan dan Daya Beli

Komponen pendidikan dipengaruhi oleh rata-rata lama sekolah /RLS dan Angka Melek huruf kedua angka ini masing-masing dipengaruhi pula oleh kebebasan seseorang dalam, menggunakan akses pendidikan dan kesempatan pendidikan. Kesempatan pendidikan ini akan dipengaruhi oleh kesehatan seseorang dalam yaitu sehat jasmani dan rohani. Selanjutnya sehat jasmani dan rohani itu sendiri dipengaruhi pula oleh daya beli yaitu pendapatan yang digunakan untuk makan dan non makan. Pendapatan keluarga yang digunakan untuk kegiatan non makan adalah diantaranya digunakan untuk membiayai pendidikan.

[1]. Pendidikan Terhadap Kesehatan

Indeks Pendidikan adalah diperoleh berdasarkan Angka Melek Huruf (AMH), yaitu perbandingan antara yang bisa membaca tulis dengan jumlah penduduk. Angka banding ini untuk mengetahui seberapa besar tingkat baca tulis di suatu daerah atau wilayah yang di ukur. Selanjutnya pendidikan juga berdasarkan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), yaitu mengukur rata-rata jenjang pendidikan yang ditempuh penduduk di suatu daerah atau wilayah.

Kedua variabel pendidikan tersebut kemudian di kompositkan menjadi indeks pendidikan. Indeks pendidikan pada dasarnya adalah untuk mengetahui seberapa besar pendidikan di suatu daerah dan pengaruhnya terhadap aspek lain manusia. Semakin tinggi pendidikan maka akan semakin tinggi penghasilan dan kegiatan usahanya dengan demikian semakin bebas manusia melakukan berbagai macam pilihan-pilihan ekonominya termasuk meningkatnya kesehatan. Sebaliknya bahwa pendidikan yang

rendah di suatu daerah maka daerah tersebut akan rendah kesehatannya. Hal ini disebabkan pendidikan yang rendah menyebabkan sempitnya pengetahuan mengenai kesehatan (menjaga lingkungan tetap bersih, gizi yang baik dan sanitasi lingkungan yang baik dan kebiasaan menjaga kebersihan dan kesehatan) yang dimiliki oleh masyarakat.

Sebagai contoh berdasarkan karakteristik desa tertinggal wilayah perbatasan antar kabupaten/kota dan perbatasan antar provinsi pendidikan di desa perbatasan antar provinsi maupun di desa perbatasan antar kabupaten/kota adalah rata-rata tamat Sekolah Dasar mencapai proporsi 70 %, dan lingkungan rumah tinggal mencapai 40 % tidak memenuhi standar hidup layak serta sanitasi dan air bersih di wilayah perbatasan antar provinsi dan perbatasan antar kabupaten/kota mencapai lebih dari 50 % tidak memenuhi standar bersih.

[2]. Pendidikan Terhadap Daya Beli

Pendidikan terhadap Daya Beli adalah memiliki keterkaitan kuat dimana jika pendidikannya tinggi maka pengetahuan menjadi sangat luas dan kesempatan untuk memperoleh penghasilan dan pekerjaan menjadi lebih baik serta kemampuan untuk konsumsi menjadi lebih tinggi. Sebaliknya jika pendidikan rendah maka pengetahuan dan kemampuan bekerja menjadi rendah dengan demikian kemampuan konsumsi akan menjadi lebih rendah.

Kondisi di kecamatan wilayah perbatasan antar provinsi memberikan beberapa pengaruh Kondisi di desa tertinggal wilayah perbatasan antar kabupaten/kota adalah lebih dari 60 % penduduknya adalah berpendidikan Sekolah Dasar sementara struktur mata pencaharian penduduk lebih dari 60 % yang terdapat di desa tertinggal wilayah perbatasan antar kabupaten/kota adalah sebagai petani penggarap dan buruh tani serta jumlah masyarakat miskin adalah 54,58%.

Sementara itu di kecamatan wilayah perbatasan antar provinsi lebih dari 75% penduduknya berpendidikan Sekolah Dasar sedangkan lebih dari 50% mata pencaharian penduduk adalah sebagai buruh tani dan buruh perkebunan serta jumlah kemiskinan mencapai 42,76%.

Hal ini menunjukkan bahwa selain proporsi tingkat pendidikan, struktur pekerjaan dan pendapatan masyarakat yang rendah sehingga menyebabkan kemiskinan yang tinggi pula. Proporsi ini tidak hanya menunjukkan besar tidaknya proporsi tetapi juga menunjukkan pendidikan memiliki keterkaitan yang kuat terhadap daya beli.

B. Kesehatan Terhadap Pendidikan dan Daya Beli

Kesehatan merupakan komponen yang saling berkaitan dengan pendidikan dan peningkatan ekonomi keluarga. Jika manusia sehat maka kebebasan mereka untuk bisa melaksanakan pendidikan dan bekerja menjadi sangat luas. Dan hal tersebut membuktikan bahwa modal sehat adalah manusia menjadi berpendidikan dan bekerja (dalam arti produktifitas manusia meningkat). Tetapi hal ini juga dipengaruhi faktor-faktor lain baik internal maupun eksternal.

[1]. Kesehatan Terhadap Pendidikan

Keterkaitan antara kesehatan terhadap pendidikan adalah terletak pada seberapa besar pendidikan dapat meningkatkan pendidikan. Dalam hal ini jika kesehatan penduduk meningkat maka pendidikan akan menjadi semakin baik karena penduduknya sehat secara jasmani dan rohani serta cukup akan kebutuhan gizi.

Kondisi di kecamatan wilayah perbatasan memberikan gambaran bahwa tingkat kesehatan di desa tertinggal wilayah perbatasan antar kabupaten/kota dan perbatasan antar provinsi jika dilihat dari keluhan kesakitan maka tidak terdapat data mengenai jumlah keluhan sakit, tetapi jika dilihat dari fisik lingkungan bahwa terdapat kerentanan kesehatan akibat dari lingkungan. Rata-rata yang memiliki rumah tinggal layak secara fisik adalah jumlahnya kurang dari 25 %, sedangkan tingkat kelayakan huni ruangan yang memenuhi standar kelayakan yaitu 8M²/orang adalah kurang dari 20 %.

Kondisi ini akan mempengaruhi terhadap kesehatan masyarakat di kecamatan wilayah perbatasan antar kabupaten/kota dan perbatasan antar provinsi dengan tingkat kemiskinan yang tinggi sebagian pendapatannya digunakan untuk konsumsi dan kesehatan menjadi terabaikan. Keterkaitan kesehatan terhadap pendidikan berdasarkan kemampuan keuangan (daya beli) dan kuat dan sehat jasmani dan rohani untuk berpendidikan.

[2]. Kesehatan Terhadap Daya Beli

Keterkaitan kesehatan terhadap daya beli adalah merupakan fungsi dari pendidikan dan kesehatan. Interpretasi keterkaitan ini adalah jika kesehatan penduduk meningkat maka masyarakat akan menjadi semakin baik penghasilannya karena penduduknya sehat secara jasmani dan rohani serta cukup akan kebutuhan gizi menjadi modal untuk digunakan beraktivitas ekonomi.

Kondisi di kecamatan wilayah perbatasan antar kabupaten/kota dan perbatasan antar provinsi pada umumnya sebagian besar penduduk memiliki penghasilan yang sangat rendah dengan rata-rata penghasilan per hari adalah rata – rata Rp. 15.000,- di desa tertinggal wilayah perbatasan antar kabupaten/kota yaitu Rp. 17.000,- di desa tertinggal wilayah perbatasan antar provinsi. Dengan rata-rata penghasilan tersebut, sebagian besar bahkan hingga seluruh penghasilan digunakan untuk konsumsi makan, akibatnya tidak dapat mengalokasikan penghasilannya untuk konsumsi non makan termasuk kesehatan.

Kondisi sebaliknya jika sebagian masyarakat desa tertinggal di wilayah perbatasan antar kabupaten/kota dan perbatasan antar provinsi kesehatan tubuh dan kesehatan lingkungannya rendah, maka rentan terserang penyakit dan tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari yang berakibat berkurangnya pendapatan.

Dengan rendahnya pendapatan maka daya beli di desa tertinggal sangat rendah oleh sebab itu untuk berobat dan menjaga kesehatan fisik lingkungan menjadi rendah termasuk sanitasi dan kebutuhan gizi keluarganya. Kondisi ini menjadikan kesehatan merupakan prioritas berikutnya karena prioritas utama adalah memenuhi kebutuhan makan.

Dengan daya beli yang rendah maka kesehatannya pun akan rendah dan sebaliknya, kesehatan rendah akan menyebabkan terganggunya mencari pekerjaan dan melakukan kerja sehingga akan menurunkan pendapatan dan daya beli keluarganya.

C. Daya Beli Terhadap Pendidikan dan Kesehatan

Daya Beli dalam perspektif IPM adalah dinilai dari pengeluaran untuk makan dan non makan. Jika faktor makan digunakan untuk kegiatan pendidikan maka komponen

kesehatan adalah bergantung pada pengeluaran sehari-hari yang di gunakan untuk makan. Seseorang dapat meningkatkan pendidikan untuk dirinya dan generasi penerusnya (anak-anaknya) dan kesehatannya semua itu dapat dilakukan kalau ekonomi keluarganya meningkat. Hal ini juga yang disebut dengan keberlangsungan hidup (*life continuum*).

[1]. Daya Beli Terhadap Pendidikan

Keterkaitan antara daya beli terhadap pendidikan adalah bagaimana daya beli dapat meningkatkan dan menurunkan pendidikan di suatu daerah. Interpretasi keterkaitannya adalah semakin tinggi daya beli masyarakat maka akan semakin tinggi minat masyarakat untuk berpendidikan sehingga tingkat pendidikan akan semakin tinggi. Tingginya daya beli masyarakat berarti tingginya pilihan-pilihan secara ekonomi maka pendidikannya baik dalam jenjang pendidikan maupun dalam kualitas pendidikannya akan semakin tinggi pula.

Merunut pada kondisi di kecamatan wilayah perbatasan adalah rata-rata kurang dari 5% penduduk yang dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang perguruan tinggi, sedangkan sekitar 60% adalah tamatan Sekolah Dasar. Dengan tingkat kemiskinan desa tertinggal yang mencapai 50%, mengandung pengertian bahwa penduduk yang daya belinya rendah adalah hanya mampu menyekolahkan anak-anaknya pada tingkat dasar, sedangkan masyarakat yang memiliki daya beli yang tinggi dapat menyekolahkan anak-anaknya hingga mencapai perguruan tinggi.

Dengan demikian bahwa masyarakat daya beli yang tinggi akan memiliki peluang yang besar untuk dapat menyekolahkan anak-anaknya hingga ke jenjang yang tinggi. Sedangkan masyarakat yang daya belinya rendah perpeluang untuk tidak dapat menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang perguruan tinggi.

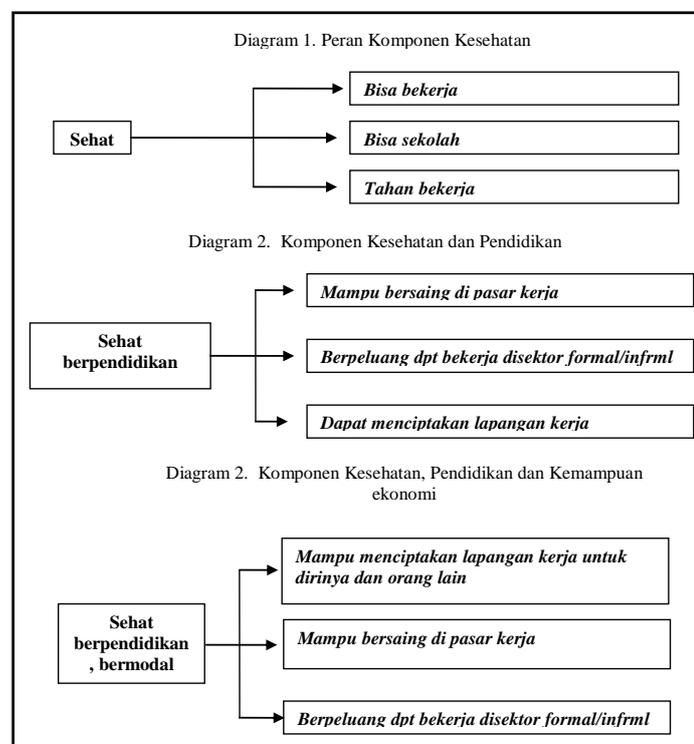
[2]. Daya Beli Terhadap Kesehatan

Keterkaitan daya beli dengan kesehatan adalah terletak dari sejauhmana daya beli dapat meningkatkan kesehatan. Interpretasi dari kondisi ini adalah semakin tinggi daya beli masyarakat maka akan semakin baik pendidikan masyarakat dan kesehatan menjadi

semakin baik karena semakin tinggi pilihan-pilihan masyarakat terhadap perbaikan kualitas kesehatannya dan lingkungannya.

Kondisi ini juga terdapat di kecamatan wilayah perbatasan bahwa masyarakat yang memiliki daya beli yang tinggi memiliki tingkat kesehatan yang tinggi terlihat dari fisik lingkungan, sanitasi dan kecukupan gizi. Dilihat dari sanitasinya baik yang proporsinya di desa tertinggal meliputi kurang dari 20 % kondisi rumahnya layak huni memenuhi standar kelayakan rumah sehat, dan memiliki air bersih yang terlindungi dan memiliki sanitasi (jamban sendiri) yang baik. Jika dilihat dari kondisi tersebut bahwa keterkaitannya sangat kuat antara daya beli dan kesehatan. Karena daya beli yang tinggi memiliki kebebasan pilihan-pilihan ekonomi dan kebebasan memenuhi kebutuhan hidup termasuk kesehatannya.

Pembahasan dari ketiga komponen tersebut dapat disimpulkan bahwa ketiga komponen IPM memiliki bangun korelasi yang kuat. Hal ini juga digambarkan oleh Lismawati (2007) peran dari komponen kesehatan, komponen kesehatan dan pendidikan serta kesehatan, pendidikan dan kemampuan ekonomi.



Gambar 4-16 Konsep IPM dihubungkan dengan pengentasan kemiskinan dan Pengangguran (Lismawati , 2007)

Tabel 4-18 Data Pendukung IPM (Jumlah Penduduk, Sarana Pendidikan dan Sarana Kesehatan)

No	Wilayah	Luas	Jumlah Penduduk (jiwa)			Sarana Pendidikan					Sarana Kesehatan				
		Wilayah (km ²)	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	TK	SD	SMP	SMU	PT	Puskesmas	Pustu	Pusling	Posyandu	RS
I	(Perbatasan Cirebon-	107,51	88.411	84.307	172.718	8	95	14	5	0	6	2	14	0	0
Kab. Cirebon	Kec. Pasaleman	32,11	12.554	12.414	24.968	2	13	2	0	0	1	0	5	0	0
	Kec. Ciledug	12,25	21.297	20.877	42.174	0	22	5	2	0	1	1	3	0	0
	Kec. Losari	39,07	28.046	26.055	54.101	4	33	5	2	0	2	0	5	0	0
	Kec. Pabedilan	24,08	26.514	24.961	51.475	2	27	2	1	0	2	1	1	0	0
II	(Perbatasan Kuningan-	283,1	47.774	53.513	143.569	37	95	12	3	0	58	0	0	171	0
Kab. Kuningan	Kec. Subang	47,58	8.694	8.645	17.339	7	16	2	0	0	11	0	0	23	0
	Kec. Cilebak	42,50	621	6.192	12.402	6	16	3	1	0	8	0	0	15	0
	Kec. Ciwaru	52,17	15.886	16.023	31.909	3	12	2	0	0	11	0	0	47	0
	Kec. Karagkencana	65,35	1.027	10.074	20.344	7	16	2	1	0	9	0	0	25	0
	Kec. Cibingbin	70,91	20.511	2.015	40.661	7	12	1	0	0	9	0	0	34	0
	Kec. Cibeureum	47,09	1.035	10.564	20.914	7	23	2	1	0	10	0	0	27	0
III	(Perbatasan Banjar-	105,73	66.638	39.829	131.154	17	70	11	2	1	7	6	7	123	0
Kota Banjar	Kec. Purwaharja	18,27	10.743	10.199	20.942	6	9	1	0	0	2	2	2	22	0
	Kec. Pataruman	54,05	28.238	2.743	55.668	9	31	4	0	0	3	3	3	48	0
	Kec. Langensari	33,41	27.657	26.887	54.544	2	30	6	2	1	2	1	2	53	0
IV	(Perbatasan Ciamis-	423,42	112.313	119.994	232.307	48	152	17	4	0	6	20	5	241	0
Kec. Ciamis	Kec. Kalipucang	136,78	20.397	20.349	40.746	7	31	3	1	0	1	5	1	41	0
	Kec. Lakbok	55,53	29.936	29.672	59.608	4	31	3	1	0	1	3	1	40	0
	Kec. Cisaga	60,4	19.485	20.244	39.729	17	25	3	1	0	1	4	1	51	0
	Kec. Tambaksari	64,31	11.477	12.011	23.488	10	21	2	0	0	1	3	0	38	0
	Kec. Purwadadi	43,37	20.116	20.857	40.973	5	24	4	0	0	1	3	1	40	0
	Kec. Mangunjaya	63,03	10.902	16.861	27.763	5	20	2	1	0	1	2	1	31	0
Kawasan Perbatasan Jawa Barat		919,76	315136	297643	679748	110	412	54	14	1	77	28	26	535	0

Hasil dari hitungan IPM di Perbatasan Jawa Barat menunjukkan rata-rata Indeks Pembangunan Manusianya rendah, hal ini dapat dipahami karena pada umumnya rendahnya indeks daya beli masyarakat karena termasuk daerah relatif tertinggal dan *remote area*. Sedangkan apabila dilihat berdasarkan indeks pendidikan rata-rata memiliki tingkat pendidikan yang baik, hal ini di dukung oleh adanya fasilitas pendidikan, begitu pula dengan fasilitas kesehatan pada kecamatan di wilayah perbatasan cukup baik oleh sebab itu indeks kesehatannya pun dirasa cukup baik. Berikut ini hasil hitungan indeks pembangunan manusia di wilayah perbatasan dapat dilihat sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 4.19 Hasil Hitungan IPM di Wilayah Perbatasan

No	Wilayah	Luas	Jumlah Penduduk (jiwa)			Indeks Pembangunan Manusia			
		Wilayah (km ²)	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	IP	IK	IDB	IPM
I	(Perbatasan Cirebon-Jateng)	107,51	88.411	84.307	172.718				
Kab. Cirebon	Kec. Pasaleman	32,11	12.554	12.414	24.968	72,65	68,34	59,99	66,99
	Kec. Ciledug	12,25	21.297	20.877	42.174	72,87	66,44	58,35	65,89
	Kec. Losari	39,07	28.046	26.055	54.101	73,92	67,31	61,75	67,66
	Kec. Pabedilan	24,08	26.514	24.961	51.475	73,76	63,47	59,76	65,66
II	(Perbatasan Kuningan-Jateng)	283,1	47.774	53.513	143.569				
Kab. Kuningan	Kec. Subang	47,58	8.694	8.645	17.339	72,36	71,48	57,57	67,14
	Kec. Cilebak	42,50	621	6.192	12.402	73,98	68,92	56,82	66,57
	Kec. Ciwaru	52,17	15.886	16.023	31.909	75,76	70,31	59,49	68,52
	Kec. Karagkencana	65,35	1.027	10.074	20.344	74,32	70,75	60,44	68,50
	Kec. Cibingbin	70,91	20.511	2.015	40.661	72,54	70,48	60,87	67,96
	Kec. Cibeureum	47,09	1.035	10.564	20.914	74,8	72,77	65,78	71,12
III	(Perbatasan Banjar-Jateng)	105,73	66.638	39.829	131.154				
Kota Banjar	Kec. Purwaharja	18,27	10.743	10.199	20.942	74,37	73,76	68,32	72,15
	Kec. Pataruman	54,05	28.238	2.743	55.668	77,65	73,54	70,55	73,91
	Kec. Langensari	33,41	27.657	26.887	54.544	79,35	75,74	72,54	75,88
IV	(Perbatasan Ciamis-Jateng)	423,42	112.313	119.994	232.307				
Kec. Ciamis	Kec. Kalipucang	136,78	20.397	20.349	40.746	73,76	73,67	57,46	68,30
	Kec. Lakbok	55,53	29.936	29.672	59.608	74,71	72,9	62,9	70,17
	Kec. Cisaga	60,4	19.485	20.244	39.729	75,21	71,37	62,97	69,85
	Kec. Tambaksari	64,31	11.477	12.011	23.488	73,48	72,21	63,84	69,84
	Kec. Purwadadi	43,37	20.116	20.857	40.973	73,79	73,89	62,76	70,15
	Kec. Mangunjaya	63,03	10.902	16.861	27.763	72,87	72,63	57,34	67,61

Sumber : Hasil Analisis 2014

C. Hasil Klasifikasi IPM

Berdasarkan keterkaitan antar komponen-komponen IPM, masing-masing komponen IPM memiliki keterkaitan yang kuat sehingga membentuk suatu bangun keterkaitan antara aspek pendidikan (pengetahuan), aspek kesehatan dan aspek daya beli (ekonomi). Dalam menyusun strategi pengembangannya maka isu strategis digunakan sebagai tolok ukur dalam usaha peningkatannya. Menurut UNDP bahwa score IPM 0-40 berarti (*very low score*), 41 – 60 (*low score*), 61-80 (*midle score*), 81-100 (*high score*). Pada penelitian ini akan di bagi 2 bagian , mengingat *score* terendah di kawasan adalah 65, 66 dan yang tertinggi adalah 75,88 maka dalam mengkategorisasikan tinggi berarti > 70 dan yang rendah adalah <70. Isu strategis dari masing-masing komponen IPM di Kabupaten/Kota yang berbatasan dan dengan melihat kategorisasi IPM adalah sebagai berikut :

Tabel 4.20 Kategorisasi IPM Kawasan Perbatasan

No	Wilayah	Indeks Pembangunan Manusia				Kategori
		IP	IK	IDB	IPM	
I	(Perbatasan Cirebon-Jateng)					
Kab. Cirebon	Kec. Pasaleman	72,65	68,34	59,99	66,99	Rendah
	Kec. Ciledug	72,87	66,44	58,35	65,89	Rendah
	Kec. Losari	73,92	67,31	61,75	67,66	Rendah
	Kec. Pabedilan	73,76	63,47	59,76	65,66	Rendah
II	(Perbatasan Kuningan-Jateng)					
Kab. Kuningan	Kec. Subang	72,36	71,48	57,57	67,14	Rendah
	Kec. Cilebak	73,98	68,92	56,82	66,57	Rendah
	Kec. Ciwaru	75,76	70,31	59,49	68,52	Rendah
	Kec. Karagkencana	74,32	70,75	60,44	68,50	Rendah
	Kec. Cibingbin	72,54	70,48	60,87	67,96	Rendah
	Kec. Cibeureum	74,8	72,77	65,78	71,12	Tinggi
III	(Perbatasan Banjar-Jateng)					
Kota Banjar	Kec. Purwaharja	74,37	73,76	68,32	72,15	Tinggi
	Kec. Pataruman	77,65	73,54	70,55	73,91	Tinggi
	Kec. Langensari	79,35	75,74	72,54	75,88	Tinggi
IV	(Perbatasan Ciamis-Jateng)					
Kec. Ciamis	Kec. Kalipucang	73,76	73,67	57,46	68,30	Rendah
	Kec. Lakbok	74,71	72,9	62,9	70,17	Tinggi
	Kec. Cisaga	75,21	71,37	62,97	69,85	Rendah
	Kec. Tambaksari	73,48	72,21	63,84	69,84	Rendah
	Kec. Purwadadi	73,79	73,89	62,76	70,15	Tinggi
	Kec. Mangunjaya	72,87	72,63	57,34	67,61	Rendah
Rata-Rata		74,32	71,05	62,08	69,15	

Sumber : Hasil Analisis 2014

1. Pendidikan

- Rendahnya Angka Melek Huruf pada umur 15 tahun keatas di wilayah perbatasan antar kabupaten/kota. Rata-rata angka melek huruf pada usia 15 tahun 70 %.
- Rendahnya rata-rata lama sekolah di wilayah perbatasan daerah kabupaten/kota dan provinsi dengan rata-rata 8 tahun.
- Rendahnya Angka Partisipasi Sekolah di wilayah perbatasan kabupaten/kota dan provinsi, berdasarkan karakteristik desa tertinggal di perbatasan proporsi tingkat pendidikan terbesar adalah tamatan Sekolah Dasar (SD), yaitu 70,33%.

2. Kesehatan

- Rendahnya rata-rata usia hidup yang digunakan sebagai indikasi tingkat kesehatan di wilayah perbatasan kabupaten/kota dan provinsi, yaitu rata – rata 70 tahun.
- Belum meluasnya kesadaran masyarakat di wilayah kabupaten/kota dan provinsi mengenai kesehatan, dan usaha untuk menjaga kesehatan dan lingkungan termasuk sanitasi.
- Terbatasnya fasilitas kesehatan dan kurang berjalannya kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada kesehatan seperti pencegahan penyakit tertentu, kesehatan ibu dan balita dan pemenuhan terhadap gizi.

3. Daya Beli

- Rendahnya daya beli masyarakat di wilayah perbatasan kabupaten/kota dan provinsi, dengan rata-rata konsumsi makan dan non makan yang rendah yaitu rata-rata daya beli masyarakat di perbatasan kabupaten/kota adalah sebesar Rp. 380.000,00,- sampai dengan Rp. 600.000,00,- daya beli masyarakat di wilayah perbatasan.
- Rendahnya pendapatan yang disebabkan struktur mata pencaharian yang homogen yaitu sebagai petani penggarap dan buruh tani. oleh sebab itu rata-rata pendapatan buruh tani juga rendah yaitu Rp. 10.000.00,- sampai dengan Rp. 20.000.00,- per hari kerja.

Untuk mengetahui keterkaitan antara komponen IPM dengan indikator wilayah Perbatasan akan dibahas berdasarkan komponen IPM berikut ini:

1. Pendidikan

Aspek pendidikan dipandang sebagai aspek yang sangat menentukan terutama dalam menentukan besarnya pendapatan/daya beli suatu keluarga. Pendidikan diartikan sebagai *people investment* dimana merupakan modal intangibel yang memberikan pengaruh positif terhadap perekonomian keluarga.

Menurut Solow, fungsi produksi adalah (Romer, 1996) merupakan fungsi dari modal manusia, teknologi dan tenaga kerja. Menurut Park (1995), modal manusia dapat diartikan sebagai spesialisasi keahlian yang disediakan tenaga kerja dan dapat diperoleh dengan mengalokasikan pendapatan untuk pendidikan dan kesehatan.

Dari fungsi diatas bahwa terdapat korelasi yang kuat antara pendidikan dengan modal manusia yang berakibat kepada pengentasan kemiskinan dan pendidikan yang baik dengan jenjang yang tinggi akan mengurangi pengangguran karena adanya peningkatan *life skill*.

Hal lain yang berkaitan erat dengan pendidikan adalah pelayanan infrastruktur jalan dan telekomunikasi dan informasi. Infrastruktur jalan berkorelasi kuat terhadap peningkatan pendidikan masyarakat sementara itu telekomunikasi dan informasi dapat meningkatkan wawasan masyarakat akibatnya *life skill* menjadi meningkat karena terjadi transformasi pengetahuan melalui surat kabar, televisi, radio dan sebagainya.

2. Kesehatan

Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat tidaklah cukup hanya berbicara tentang masalah kesehatan saja. Hal ini didukung oleh beberapa hasil studi yang menemukan bahwa besarnya persentase angka kesakitan di negara-negara berkembang dipengaruhi oleh kondisi sosial-ekonomi. Faktor- faktor yang mempengaruhi kesakitan seseorang (*disease of an individual or family*) menurut Zaidi (1988), adalah merupakan fungsi dari : pemenuhan terhadap air bersih, sanitasi, rumah, pendidikan, kecukupan terhadap gizi, perbedaan jenis kelamin dan kemudahan fasilitas kesehatan.

Melihat hal- hal di atas jelas bahwa kesehatan sangat dipengaruhi oleh banyak hal. Tetapi jika dihubungkan dengan indikator desa tertinggal bahwa beberapa setelah melihat korelasi diatas bahwa kesehatan sangat berpengaruh positif terhadap kemiskinan, air bersih, pendidikan, dan akses terhadap fasilitas kesehatan yang juga merupakan infrastruktur dasar. Kemiskinan menyebabkan kekurangan gizi dan berpengaruh terhadap kesehatan anak-anaknya.

Hasil penelitian pada orang-orang Wopkaimin di daerah pegunungan di perbatasan antara PNG dan Irian Jaya (Hyndman, 1989) yang menyatakan bahwa *gender patterns*

menyebabkan kekurangan gizi yang sistematis di antara kaum perempuan dewasa sebab perempuan memakan lebih sedikit, lebih jarang dan kualitas makanan yang lebih rendah dibanding dengan laki-laki akibatnya gizi yang diterima anak-anaknya menjadi sedikit.

Disisi lain infrastruktur jalan juga berpengaruh kuat terhadap kesehatan, orang-orang yang sakit, melahirkan, cedera dan mengidap penyakit tertentu yang perlu penanganan cepat sangat memerlukan infrastruktur jalan. Hal ini berkaitan dengan kesempatan hidup seseorang yang mengalami gangguan kesehatan.

3. Daya Beli

Keterkaitan ini dijalin dengan adanya infrastruktur jalan yang berpengaruh positif terhadap perkembangan fisik, sosial dan ekonomi masyarakat perdesaan, terutama di desa tertinggal. Keterkaitan ini jika ditempatkan dalam IPM adalah bahwa aksesibilitas/infrastruktur jalan, telekomunikasi, informasi dan listrik berpengaruh positif terhadap peningkatan indeks pendidikan, indeks kesehatan dan indeks daya beli masyarakat.

Peranan aksesibilitas telah membuktikan adanya integrasi antara kota dan desa dimana peranan ini tidak hanya antara kota dan desa tetapi juga keterkaitan antar desa dengan desa lainnya. Infrastruktur jalan mempunyai peran yang disamakan dengan fungsi integrasi dan *linkage*, untuk memacu terhadap adanya keuntungan ekonomi dan sosial.

Pendekatan pembangunan yang berorientasi kepada infrastruktur dan *basic needs* mendorong keterkaitan dan integrasi antara kota dan desa terhadap pendekatan yang digunakan dalam pembangunan wilayah dan pembangunan manusia yang berkelanjutan.

Tabel 4-21 Peran Kota dan Desa serta Keterkaitannya

Desa (lokasi Kegiatan Pertanian dan SDA)	Keterkaitan	Kota (Lokasi Kegiatan Non Pertanian)
Produksi Makanan	←.....→	Pemasaran produksi pertanian
Produksi Tanaman pertanian dan perkebunan dan sumber daya alam	←.....→	Pusat pengolahan produk pertanian dan perkebunan, serta ekspor
Permintaan inputs kegiatan pertanian dan jasa pelayanan pertanian	←.....→	Pusat jasa pelayanan bagi produksi pertanian
Permintaan barang dan jasa pelayanan kesehatan, pendidikan, perdagangan, hiburan, keuangan	←.....→	Pusat perdagangan barang kebutuhan rumah tangga dan lainnya, fasilitas sosial dan hiburan
Transfer surplus ke sektor non pertanian	←.....→	Investasi lokal bagi sektor pengolahan dan jasa pendukung kegiatan pertanian
Sektor tenaga kerja on-farm dan off-farm	←.....→	Sektor tenaga kerja non pertanian

Sumber : Douglass, 1991 dalam Sugiana 2005.

Hubungan daya beli dengan indikator desa tertinggal sangat berkorelasi kuat dengan pendidikan dan kesehatan seperti ditunjukkan pada Tabel V.5. Hal diatas mengandung pengertian bahwa Daya Beli memiliki keterkaitan yang kuat terhadap kemiskinan, pengangguran, kesehatan, infrastruktur jalan, telekomunikasi dan pelayanan Infrastruktur dasar.

Keterkaitan antara komponen IPM dan Indikator Desa Tertinggal masing-masing memiliki keterkaitan yang kuat karena berkaitan langsung dan yang lemah. Berdasarkan hal tersebut bahwa keterkaitan tersebut akan dapat secara jelas strategi yang dilakukan dalam pengembangan desa tertinggal wilayah perbatasan antar kabupaten/kota dan perbatasan antar provinsi dalam menaikan IPM.

4.6 Klasifikasi Konektifitas

Dalam struktur ruang di wilayah perbatasan konektifitas ditunjukkan oleh keberadaan prasarana/infrastruktur jalan yang menghubungkan antar pusat kegiatan kota merupakan unsur yang terpenting. Prasarana jaringan jalan merupakan salah satu unsur lingkungan binaan yang mendukung pengembangan perbatasan sesuai dengan fungsinya. Dalam konteks daya dukung lingkungan perbatasan yang pada dasarnya tidak bersifat statis yang semata-mata berdasarkan sumber daya alam atau unsur lingkungan alamiah, daya dukung lingkungan binaan ini menjadi sangat penting untuk dipertimbangkan. Keberadaan jalan menjadi faktor bagi aksesibilitas perbatasan untuk dikembangkan serta faktor mobilitas bagi penduduk untuk melakukan pergerakan.

Jaringan jalan di kecamatan wilayah perbatasan meliputi Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis terdiri dari jaringan jalan primer untuk lalu lintas regional dan antar kota serta jaringan jalan sekunder untuk lalu lintas antar wilayah baik dalam provinsi dan antar provinsi. Sistem jaringan primer yang ada di wilayah perbatasan adalah linear menghubungkan antar kota dan kabupaten, sedangkan untuk sampai ke kecamatan-kecamatan di wilayah perbatasan seperti Kabupaten Kuningan menggunakan jalan dengan status jalan kabupaten, kecuali di utara di Kabupaten Cirebon, Kota Banjar dan Kabupaten Ciamis/Pangandaran menggunakan jalan status nasional dan provinsi.

Total jalan di wilayah perbatasan Jawa Barat adalah sebagai berikut panjang jalan Kabupaten Cirebon adalah 784.060 km terdiri dari 88.500 km status jalan nasional, 53.200 km status jalan provinsi dan 642.360km status jalan kabupaten.

Kabupaten Kuningan adalah 536.540 km terdiri dari 102.140 km status jalan provinsi dan 434.400km status jalan kabupaten. Kota Banjar adalah 219.420 km terdiri dari 14.700 km status jalan nasional, 91.070 km status jalan provinsi dan 113.650 km status jalan kota. Kabupaten Ciamis adalah 879.668 km terdiri dari 97.928 km status jalan nasional, 59.440 km status jalan provinsi dan 722.300 km status jalan kabupaten.

Menurut statusnya, jalan arteri primer merupakan jalan negara/nasional, jalan kolektor primer merupakan jalan provinsi dan jalan-jalan sekunder serta lokal merupakan jalan kabupaten/Kota.

- **Indeks Aksesibilitas dan Mobilitas**

Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa indeks aksesibilitas di wilayah perbatasan pada tahun 2014 rata-rata sebesar $1,5 \text{ km/km}^2$. Hal ini sudah memenuhi syarat minimal indeks aksesibilitas yaitu sebesar 1.5 km/km^2 meskipun demikian masih juga terdapat kecamatan-kecamatan yang memiliki indeks aksesibilitas di bawah 1.5 km/km^2 . Sedangkan indeks mobilitas di wilayah perbatasan di Jawa Barat rata-rata adalah sebesar 2.08 km/1000 penduduk. Angka tersebut tepat pada batas dapat memenuhi syarat minimal indeks mobilitas yaitu 2 km/1000 penduduk.

- **Proporsi Luas Jalan**

Luas wilayah perbatasan di Provinsi Jawa Barat adalah sebesar 962 Km², sedangkan luas jalan yang berada di wilayah perbatasan Provinsi Jawa Barat adalah 558 Km², sehingga diperkirakan luas area jalan dibandingkan dengan luas wilayah perbatasan adalah sekitar 11%. perbandingan luas ini tepat dari yang dipersyaratkan untuk perbandingan luas area jalan yang ideal terhadap luas wilayah kota sebesar 10%-20%.

- **Kemantapan Jalan**

Untuk melihat kemantapan jalan di wilayah Perbatasan Provinsi Jawa Barat dapat dilihat dari persentase kondisi jalan dari total panjang jalan yang ada di wilayah Perbatasan Provinsi Jawa Barat. Dapat dilihat bahwa kondisi jalan Nasional yang berada di wilayah Perbatasan Provinsi Jawa Barat yang dapat dianggap baik hanya berkisar 42,34%, sedangkan untuk kondisi rusak sebesar 5,65%. Untuk Jalan Propinsi yang memiliki kondisi baik sebesar 64,72%, sedangkan untuk jalan yang memiliki kondisi rusak 21,58%. Sedangkan jalan kota yang dianggap memiliki kondisi baik sebesar 72,10%, kemudian untuk jalan kota yang memiliki kondisi rusak adalah 11,16%. Ringkasan kondisi konektifitas di wilayah Perbatasan Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4-22 Klasifikasi Nilai Indeks Aksesibilitas, Indeks Mobilitas dan Proporsi Luas Jalan

Kab/Kota	NO	KECAMATAN	Luas Wilayah (KM2)	Jumlah Penduduk	TOTAL PANJANG JALAN (KM)	LUAS JALAN TOTAL (Ha)	Aksesibilitas		Mobilitas		Proporsi Luas Jalan	
							Km/Km2	Klasifikasi	Km/1000 penduduk	Klasifikasi	Persentase (%)	Klasifikasi
Kab. Cirebon	1	Kec. Pasaleman	32,11	24.968	94,97	47,48	2,96	Tinggi	3,80	Tinggi	19,02%	Tinggi
	2	Kec. Ciledug	12,25	42.174	51,75	26,07	4,22	Tinggi	1,23	Rendah	6,18%	Rendah
	3	Kec. Losari	39,07	54.101	68,72	37,16	1,76	Tinggi	1,27	Rendah	6,87%	Rendah
	4	Kec. Pabedilan	24,08	51.475	43,26	21,63	1,80	Tinggi	0,84	Rendah	4,20%	Rendah
Kab. Kuningan	5	Kec. Subang	47,58	17.339	70,92	35,46	1,49	Tinggi	4,09	Tinggi	20,45%	Tinggi
	6	Kec. Cilebak	42,5	12.402	72,06	36,03	1,70	Tinggi	5,81	Tinggi	29,05%	Tinggi
	7	Kec. Ciwaru	52,17	31.909	41,72	20,86	0,80	Rendah	1,31	Rendah	6,54%	Rendah
	8	Kec. Karagkancana	65,35	20.344	35,96	17,98	0,55	Rendah	1,77	Rendah	8,84%	Rendah
	9	Kec. Cibingbin	70,91	40.661	50,62	25,31	0,71	Rendah	1,24	Rendah	6,22%	Rendah
	10	Kec. Cibeureum	47,09	20.914	49,19	24,6	1,04	Rendah	2,35	Tinggi	11,76%	Tinggi
Kota Banjar	11	Kec. Purwaharja	18,27	20.942	69,82	39,99	3,82	Tinggi	3,33	Tinggi	19,10%	Tinggi
	12	Kec. Pataruman	54,05	55.668	63,11	34,63	1,17	Rendah	1,13	Rendah	6,22%	Rendah
	13	Kec. Langensari	33,41	54.544	25,18	12,59	0,75	Rendah	0,46	Rendah	2,31%	Rendah
Kab. Ciamis	14	Kec. Kalipucang	136,78	40.746	37,71	21,19	0,28	Rendah	0,93	Rendah	5,20%	Rendah
	15	Kec. Laktok	55,53	59.608	34,56	17,44	0,62	Rendah	0,58	Rendah	2,93%	Rendah
	16	Kec. Cisaga	60,4	39.729	67,03	33,51	1,11	Tinggi	1,69	Rendah	8,43%	Rendah

Kab/Kota	NO	KECAMATAN	Luas Wilayah (KM2)	Jumlah Penduduk	TOTAL PANJANG JALAN (KM)	LUAS JALAN TOTAL (Ha)	Aksesibilitas		Mobilitas		Proporsi Luas Jalan	
							Km/Km2	Klasifikasi	Km/1000 penduduk	Klasifikasi	Persentase (%)	Klasifikasi
	17	Kec. Tambaksari	64,31	23.488	108,64	54,32	1,69	Tinggi	4,63	Tinggi	23,13%	Tinggi
	18	Kec. Purwadadi	43,37	40.973	54,37	27,18	1,25	Rendah	1,33	Rendah	6,63%	Rendah
	19	Kec. Mangunjaya	63,03	27.763	50,07	25,04	0,79	Rendah	1,80	Rendah	9,02%	Rendah
Total/Rata-Rata			962	679.748	1.090	558	1,50	Tinggi	2,08	Tinggi	11%	Tinggi

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2014

4.7 Klasifikasi Intensitas Ekonomi

Berdasarkan hasil hitungan klasifikasi konektivitas di atas beberapa kegiatan ekonomi yang menjadi kegiatan ekonomi primer adalah mengembangkan intensitas kegiatan ekonomi antar kecamatan dalam kabupaten di wilayah Perbatasan Jawa Barat. Berdasarkan analisis sebelumnya, maka wilayah potensial yang akan dikembangkan di Kawasan Perbatasan Jabar-Jateng adalah sebagai berikut:

- a) Kecamatan Losari (Kabupaten Cirebon)
- b) Kecamatan Pabedilan (Kabupaten Cirebon)
- c) Kecamatan Purwaharja (Kabupaten Banjar)
- d) Kecamatan Pataruman (Kabupaten Banjar)
- e) Kecamatan Langensari (Kabupaten Banjar)
- f) Kecamatan Lakbok (Kabupaten Ciamis)
- g) Kecamatan Purwadadi (Kabupaten Ciamis)

Kecamatan-kecamatan tersebut berpotensi untuk dapat dikembangkan sebagai sentra ekonomi unggulan kawasan perbatasan. Sentra didefinisikan sebagai pusat kegiatan di kawasan/lokasi tertentu dimana terdapat usaha yang menggunakan bahan baku/sarana yang sama, menghasilkan produk yang sama serta memiliki prospek untuk dikembangkan menjadi usaha yang besar dalam satuan wilayah tertentu. Pembagian sentra produksi secara umum terbagi ke dalam:

- Sentra produksi primer (pertanian, perikanan, perkebunan, pertambangan, kehutanan, dan peternakan);
- Sentra produksi sekunder (industri pengolahan/industri manufaktur);
- Sentra produksi tersier (jasa, termasuk diantaranya pariwisata/agrowisata/ekowisata/minawisata, dll)

Sentra memiliki pengertian yang relatif berbeda dengan klaster (*cluster*), dimana klaster merupakan konsentrasi geografis berbagai kegiatan usaha di kawasan tertentu yang satu sama lain saling melengkapi (komplementer), saling bergantung, dan saling bersaing dalam melakukan aktivitas bisnis (dalam Meyer dan Stamer, 2003).

Pembagian sentra ekonomi unggulan yang mencakup sektor ekonomi basis dan komoditas unggulan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4-23 Klasifikasi Intensitas Ekonomi Unggulan dan Non Unggulan

Kab/Kota	NO	KECAMATAN	Sentra Produksi	Sektor Basis	Subsektor/Komoditas Unggulan	Klasifikasi Ekonomi
Kab. Cirebon	1	Kec. Pasaleman	<ul style="list-style-type: none"> • Primer • Sekunder 	-	-	Non Unggulan
	2	Kec. Ciledug	<ul style="list-style-type: none"> • Primer • Sekunder 	-	-	Non Unggulan
	3	Kec. Losari	<ul style="list-style-type: none"> • Primer • Sekunder • Tersier 	<ul style="list-style-type: none"> • Pertanian • Bangunan • Jasa-jasa 	<ul style="list-style-type: none"> • Tanaman Bahan Makanan • Perikanan (laut, tambak) • Peternakan (itik) 	Unggulan
	4	Kec. Pabedilan	<ul style="list-style-type: none"> • Primer • Sekunder • Tersier 	<ul style="list-style-type: none"> • Pertanian • Bangunan • Jasa-jasa 	<ul style="list-style-type: none"> • Perikanan (kolam) 	Unggulan
Kab. Kuningan	5	Kec. Subang	<ul style="list-style-type: none"> • Primer • Sekunder 	-	-	Non Unggulan
	6	Kec. Cilebak	<ul style="list-style-type: none"> • Primer • Sekunder 	-	-	Non Unggulan
	7	Kec. Ciwaru	<ul style="list-style-type: none"> • Primer • Sekunder 	-	-	Non Unggulan
	8	Kec. Karagkencana	<ul style="list-style-type: none"> • Primer • Sekunder 	-	-	Non Unggulan
	9	Kec. Cibingbin	<ul style="list-style-type: none"> • Primer • Sekunder 	-	-	Non Unggulan
	10	Kec. Cibeureum	<ul style="list-style-type: none"> • Primer • Sekunder 	-	-	Non Unggulan
Kota Banjar	11	Kec. Purwaharja	<ul style="list-style-type: none"> • Tersier 	<ul style="list-style-type: none"> • Jasa-Jasa • Pengangkutan dan Komunikasi 		Unggulan
	12	Kec. Pataruman	<ul style="list-style-type: none"> • Tersier 	<ul style="list-style-type: none"> • Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan • Perdagangan, Hotel dan Restoran • Pengangkutan dan Komunikasi 		Unggulan
	13	Kec. Langensari	<ul style="list-style-type: none"> • Primer • Sekunder • Tersier 	<ul style="list-style-type: none"> • Pertanian • Bangunan • Jasa-jasa 	<ul style="list-style-type: none"> • Tanaman Bahan Makanan (sayur-sayuran) • Perikanan (kolam) 	Unggulan
Kab. Ciamis	14	Kec. Kalipucang	<ul style="list-style-type: none"> • Primer • Sekunder 	-	-	Non Unggulan
	15	Kec. Lakbok	<ul style="list-style-type: none"> • Primer • Sekunder • Tersier 	<ul style="list-style-type: none"> • Pertanian • Bangunan • Jasa-jasa 	<ul style="list-style-type: none"> • Tanaman Bahan Makanan (kangkung) • Perkebunan (kelapa) 	Unggulan
	16	Kec. Cisaga	<ul style="list-style-type: none"> • Primer • Sekunder 	-	-	Non Unggulan
	17	Kec. Tambaksari	<ul style="list-style-type: none"> • Primer • Sekunder 	-	-	Non Unggulan
	18	Kec. Purwadadi	<ul style="list-style-type: none"> • Primer • Sekunder • Tersier 	<ul style="list-style-type: none"> • Pertanian • Bangunan • Jasa-jasa 	<ul style="list-style-type: none"> • Tanaman Bahan Makanan (kacang panjang, pisang) • Peternakan (kambing) 	Unggulan
	19	Kec. Mangunjaya	<ul style="list-style-type: none"> • Primer • Sekunder 	-	-	Non Unggulan

Sumber : Hasil Analisis 2014

Pola pemanfaatan ruang kawasan di wilayah perbatasan Jabar-Jateng pada umumnya berupa lahan tidak terbangun. Berdasarkan pola penggunaan lahannya, wilayah perbatasan Jabar-Jateng didominasi oleh lahan kebun campuran, pertanian lahan basah, perkebunan, dan hutan. Pengembangan pola pemanfaatan ruang di kawasan perbatasan Jabar-Jateng bertipe kawasan agraris yang memiliki ciri khas sebagai kawasan pertanian yang dibatasi oleh wilayah konservasi, hutan, lahan kritis di kawasan DAS, serta kawasan lindung di pesisir pantai di wilayah yang berbatasan dengan laut. Pola pemanfaatan ruang yang diusahakan masyarakat sebagai mata pencaharian yang mendukung sistem ekonomi kawasan antara lain kawasan hutan produksi, lahan perkebunan rakyat atau perkebunan negara, lahan pertanian sawah (lahan basah), kawasan perikanan tambak, kawasan kebun campuran yang diusahakan masyarakat untuk budidaya sayuran, buah-buahan, dan sebagainya. Adapun pemanfaatan lahan terbangun berupa kawasan permukiman (perkotaan dan perdesaan) yang juga dilengkapi dengan penggunaan lahan untuk industri. Kondisi fisik tanah yang subur termasuk aspek bentang alam dengan kemiringan dan ketinggian yang relatif cocok untuk kegiatan pembangunan cukup mendukung untuk kegiatan pertanian serta berbagai penggunaan lainnya.

Perkembangan kegiatan permukiman paling besar di perbatasan Jabar-Jateng terletak di Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan Kabupaten Cirebon, sedangkan kawasan permukiman yang dominan terdapat di wilayah perbatasan Jateng adalah Kabupaten Brebes. Adapun lahan terbangun untuk permukiman yang relatif masih sedikit adalah Kabupaten Kuningan di Jabar, dan Kabupaten Cilacap di Jateng. Namun demikian, jumlah penduduk yang menempati kawasan tersebut secara berurutan di Jawa Barat paling besar terdapat di Kabupaten Ciamis, Kuningan, dan Cirebon, sedangkan di sisi Jawa Tengah paling banyak terdapat di Kabupaten Brebes lalu Cilacap.

Rencana pemanfaatan ruang di wilayah perbatasan Jabar-Jateng diarahkan pada perencanaan dan pengembangan kegiatan pertanian. Hal ini mendukung terhadap pengembangan sektor-sektor pertanian (kegiatan ekonomi primer) untuk tumbuh dan berkembang sebagai basis kegiatan di wilayah perbatasan. Kegiatan pengembangan pertanian ini sejalan dengan pola pemanfaatan ruang di wilayah Jawa Tengah yang didominasi dan rencana pengembangan kawasan perbatasannya juga dimanfaatkan untuk penggunaan lahan pertanian lahan kering dan pengembangan pertanian. Berikut adalah

program pengembangan pola pemanfaatan ruang kawasan di wilayah perbatasan Jabar-Jateng.

Sesuai dengan kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Barat yang menetapkan bahwa wilayah perbatasan Jabar-Jateng merupakan kawasan strategis provinsi yang memiliki kepentingan ekonomi. Pengembangan kawasan-kawasan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan ekonomi wilayah dalam lingkup regional ini perlu menetapkan kembali peran, kedudukan, dan fungsinya melalui pemilihan kawasan-kawasan strategis ekonomi di perbatasan Jabar-Jateng yang terintegrasi antar kawasan dalam wilayah perencanaan maupun integrasi dengan wilayah-wilayah disekitarnya.

Berdasarkan hasil kajian perekonomian, menunjukkan bahwa wilayah perbatasan Jabar-Jateng memiliki sektor basis berupa pertanian sebagai kegiatan utama yang dominan. Kegiatan ekonomi primer tersebut didukung pula oleh sektor basis lainnya yang menopang perekonomian daerah berupa sektor bangunan, jasa-jasa, keuangan, persewaan, pengangkutan dan komunikasi, serta sektor perdagangan, hotel dan restoran yang didominasi oleh subsektor perdagangan besar dan eceran. Komoditas unggulan sektor pertanian yang menjadi basis antara lain berasal dari subsektor tanaman bahan makanan, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Pola pemanfaatan ruang di kawasan perbatasan juga didominasi oleh lahan tidak terbangun berupa kebun campuran, hutan sekunder, pertanian lahan basah/sawah, pertanian lahan kering, dan perkebunan.

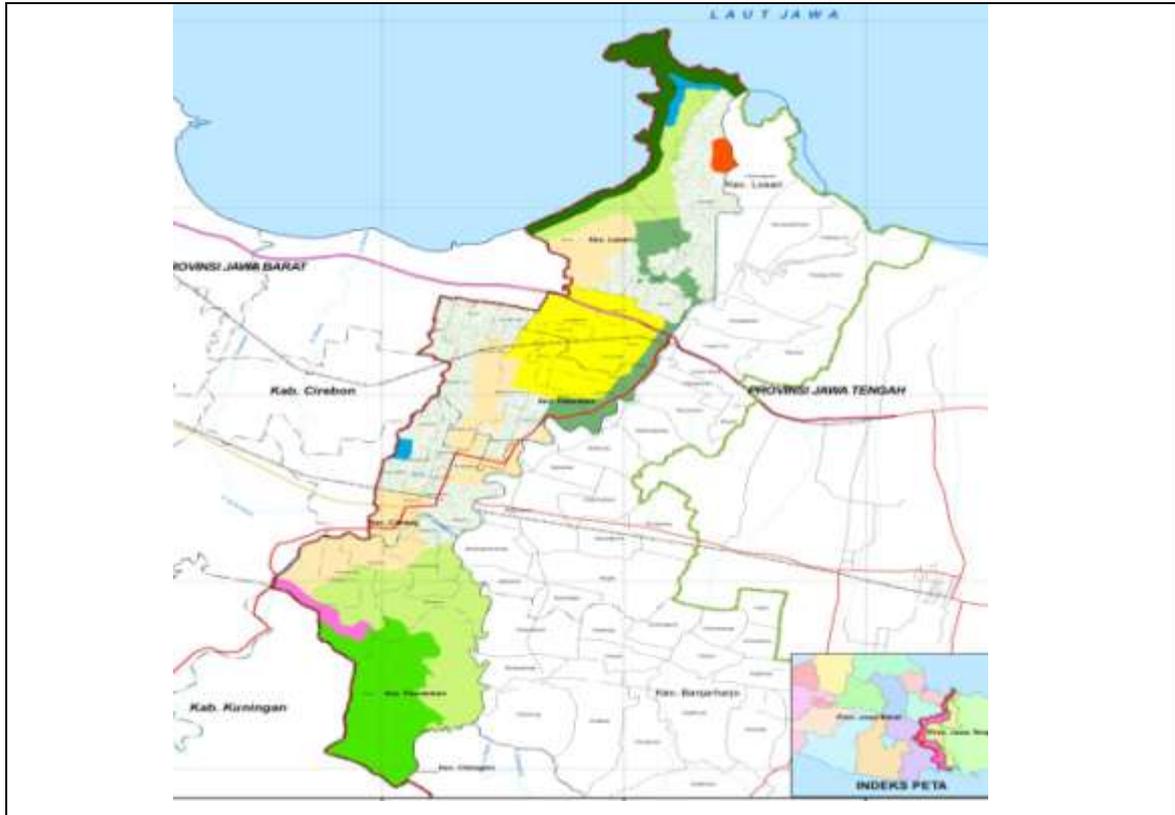
Selain itu, program-program pembangunan daerah di wilayah perbatasan mendukung pada pengembangan infrastruktur dan rencana pola ruang yang mendukung pengembangan kegiatan pertanian sebagai kegiatan utama disamping menunjang fungsi lainnya sebagai kawasan lindung, permukiman, industri, dan pelayanan jasa perdagangan. Namun demikian, kedudukan wilayah perbatasan dalam lingkup regional berfungsi sebagai pusat-pusat pelayanan lokal yang berorientasi pada ibukota kabupaten/kota masing-masing wilayah dan berperan sebagai jalur lintas barang dan jasa. Kondisi ini dipengaruhi oleh masih kurangnya kelembagaan ekonomi, sarana dan prasarana penunjang, jarak-jarak antar kawasan yang relatif cukup jauh, serta pengaruh sistem jaringan jalan utama (akses regional) yang terkonsentrasi di bagian utara, tengah, dan selatan yang telah berkembang dengan fungsi-fungsi tertentu sebagai koridor pengembangan wilayah.

Sesuai dengan deliniasi kawasan strategis ekonomi Provinsi Jawa Barat di kawasan perbatasan Jabar-Jateng, berikut adalah rencana pengembangan kawasan strategis dengan kepentingan ekonomi.

Tabel 4-24 Pengembangan Pola Ruang Kawasan Perbatasan

No	Lindung	Luas	%
1	LNH-Perlindungan Geologi	95,12	0,30
2	Kawasan Lindung Fisiografis	7761,18	24,86
3	Kawasan Resapan Air	8,46	0,03
4	LNH-Rawan Gerakan Tanah	18061,94	57,85
5	LNH-Rawan Tsunami	651,87	2,09
6	LNH-Sesuai Utk Htn. Lindung	2960,83	9,48
7	Sempadan Danau/Waduk	194,29	0,62
8	Sempadan Pantai	132,12	0,42
9	KB-Tubuh Air	1356,47	4,34
JUMLAH		31222,28	100,00
	Budidaya		
1	Kawasan Perikanan/Tambak/Rawa	1161,59	0,70
2	Kawasan Pertanian Semusim Lahan Basah	20700,5	12,45
3	Kawasan Pertanian Semusim Lahan Kering	5213,24	3,14
4	Kawasan Pertanian Tanaman Keras	23945,46	14,40
5	KB-Enclave	217,44	0,13
6	KB-Hutan Produksi	17554,52	10,56
7	KB-Hutan Produksi Terbatas	27958,33	16,82
8	Perdesaan	47322,02	28,47
9	Perkotaan	7341,11	4,42
10	Sawah	14830,58	8,92
JUMLAH		166244,8	100,00

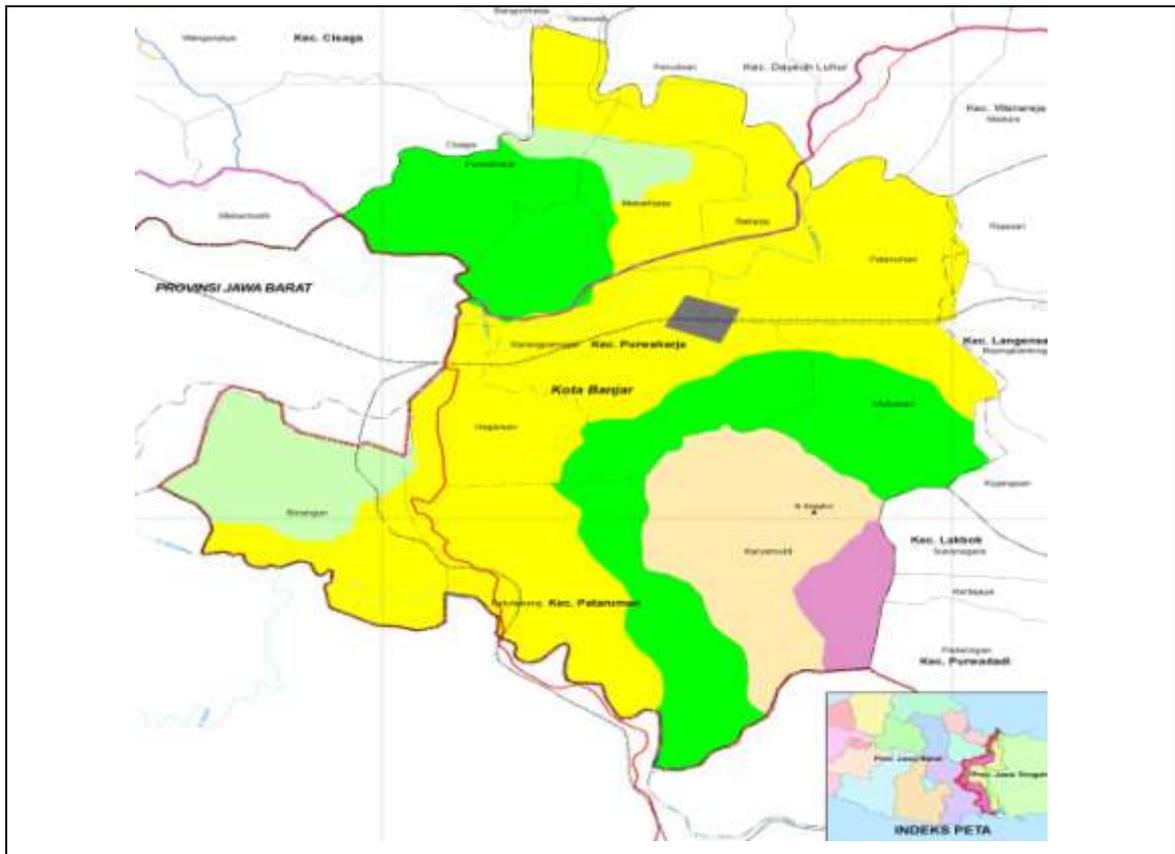
Sumber : analisis GIS, Tahun 2014



Rencana Pola Ruang

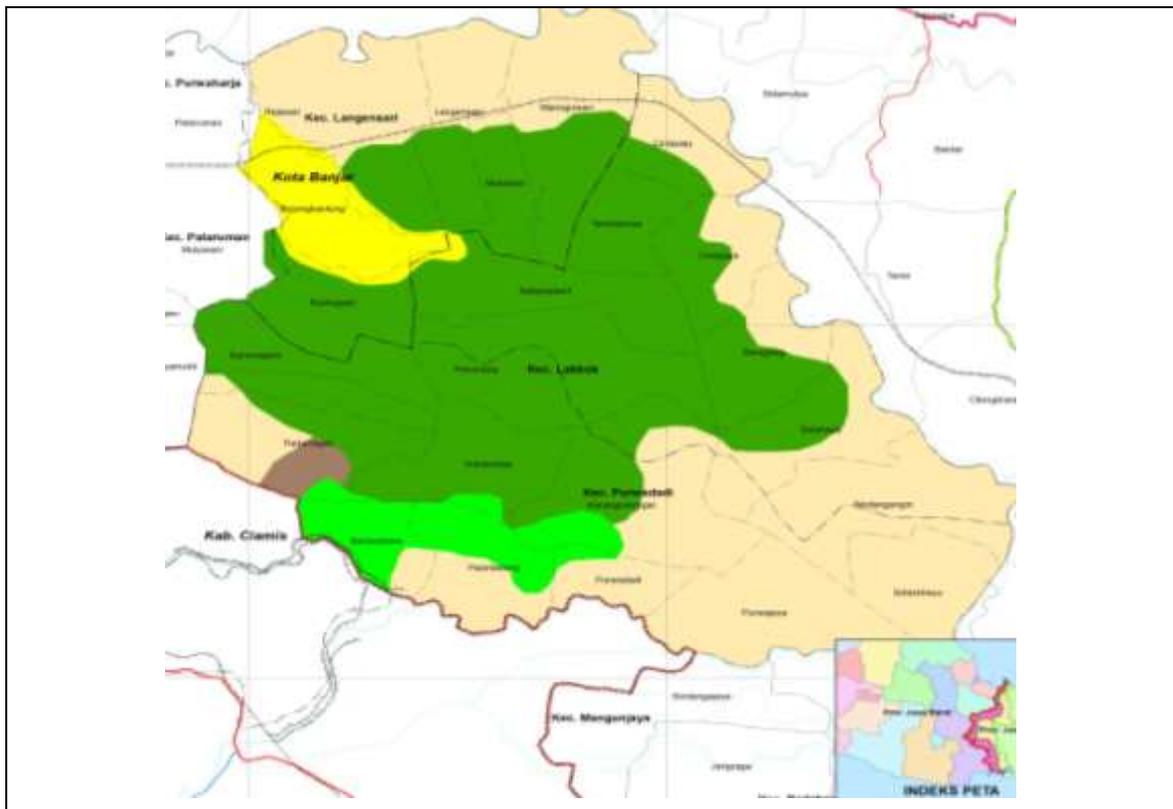
Rencana Pengembangan Sistem Jaringan	Rencana Pengembangan Kawasan Budidaya
<ul style="list-style-type: none"> • Perbaikan dan Peningkatan Jaringan Jalan antar kecamatan dan antar provinsi • Peningkatan prasarana irigasi, air bersih, listrik, drainase, limbah, serta pendukung sistem pelayanan perdagangan dan jasa sektor pertanian • Penetapan sistem jaringan pergerakan/pola perjalanan/lalu lintas barang antar wilayah 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan dan Pengelolaan kawasan pertanian, perikanan, serta permukiman yang berwawasan lingkungan • Pengembangan sarana pergudangan atau sarana pengumpul barang, serta sarana pemasaran dan pengolahan • Pengembangan kegiatan industri ramah lingkungan • Perlindungan terhadap kawasan budidaya perikanan, pertanian, perkebunan, serta kawasan irigasi, sungai, pesisir • Pengembangan sentra-sentra produksi pertanian dan industri terpadu • Pengembangan produk-prduk pertanian dan industri berdaya saing • Pengembangan dan pengelolaan kegiatan budidaya hasil-hasil pertanian

Gambar 4-17 Rencana Pengembangan Sentra Ekonomi Unggulan Pabelan-Losari (Jabar)-Losari (Jateng).



Rencana Pola Ruang	
Rencana Pengembangan Sistem Jaringan	Rencana Pengembangan Kawasan Budidaya
<ul style="list-style-type: none"> • Perbaikan dan Peningkatan Jaringan Jalan antar kecamatan dan antar provinsi • Peningkatan prasarana irigasi, air bersih, listrik, drainase, limbah, serta pendukung sistem pelayanan perdagangan dan jasa sektor pertanian • Penetapan sistem jaringan pergerakan/pola perjalanan/lalu lintas barang antar wilayah 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan dan Pengelolaan kawasan pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, dan kehutanan, serta permukiman yang berwawasan lingkungan • Pengembangan sarana pergudangan atau sarana pengumpul barang, serta sarana pemasaran dan pengolahan • Pengembangan kegiatan industri pengolahan ramah lingkungan • Perlindungan terhadap kawasan budidaya perikanan, pertanian, perkebunan, kehutanan, serta kawasan irigasi, dan sungai. • Pengembangan sentra-sentra produksi pertanian, perkebunan, kehutana, dan industri terpadu • Pengembangan produk-prduk pertanian dan industri berdaya saing • Pengembangan dan pengelolaan kegiatan budidaya hasil-hasil pertanian, perkebunan, dan kehutanan.

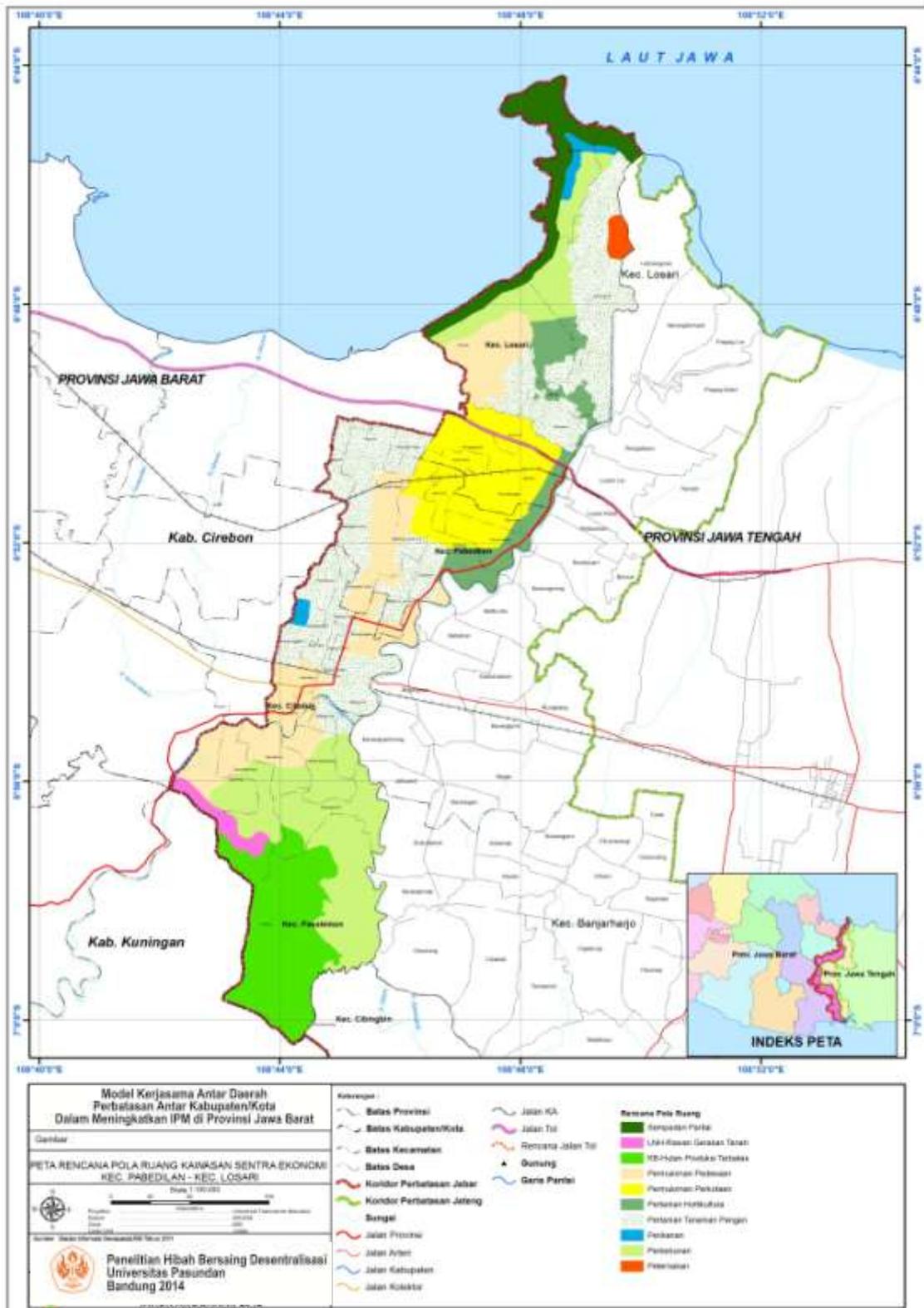
Gambar 4-18 Rencana Pengembangan Sentra Ekonomi Unggulan Purwaharja-Pataruman (Kab. Banjar)



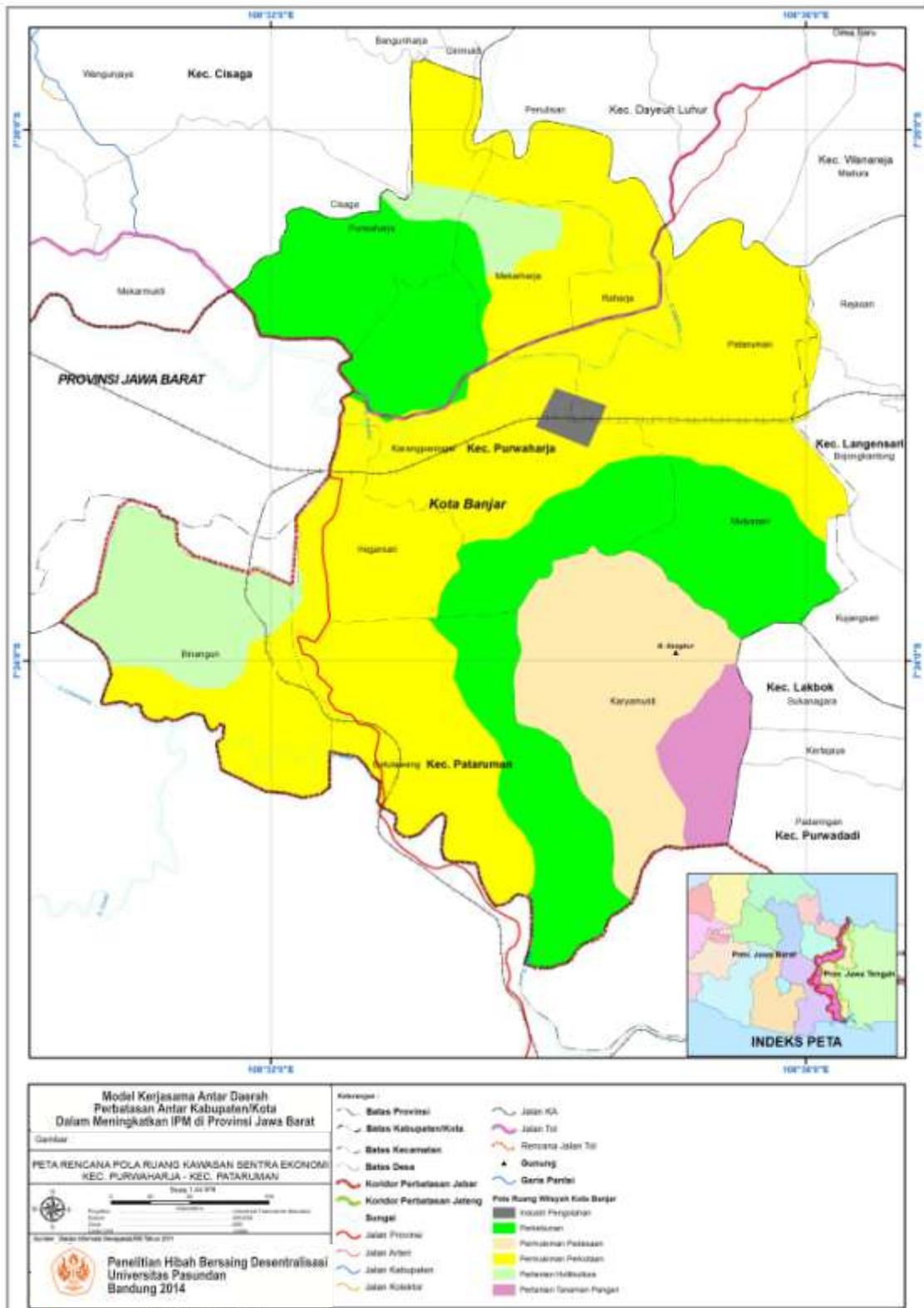
Rencana Pola Ruang

Rencana Pengembangan Kawasan Budaya	Rencana Pengembangan Kawasan Budaya
<ul style="list-style-type: none"> • Perbaikan dan Peningkatan Jaringan Jalan antar kecamatan dan antar provinsi • Peningkatan prasarana irigasi, air bersih, listrik, drainase, limbah, serta pendukung sistem pelayanan perdagangan dan jasa sektor pertanian • Penetapan sistem jaringan pergerakan/pola perjalanan/lalu lintas barang antar wilayah 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan dan Pengelolaan kawasan pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, serta permukiman yang berwawasan lingkungan • Pengembangan sarana pergudangan atau sarana pengumpul barang, serta sarana pemasaran dan pengolahan • Perlindungan terhadap kawasan cagar alam, hutan wisata, hutan produksi, perkebunan, serta kawasan irigasi, sungai, pesisir, dan DAS. • Pengembangan sentra-sentra produksi pertanian, perkebunan, kehutanan terpadu • Pengembangan produk-produk pertanian dan industri kecil berdaya saing • Pengembangan dan pengelolaan kegiatan budidaya hasil-hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan. • Pengembangan kawasan pariwisata berwawasan lingkungan, dan peningkatan daya tarik serta produk pariwisata berdaya saing

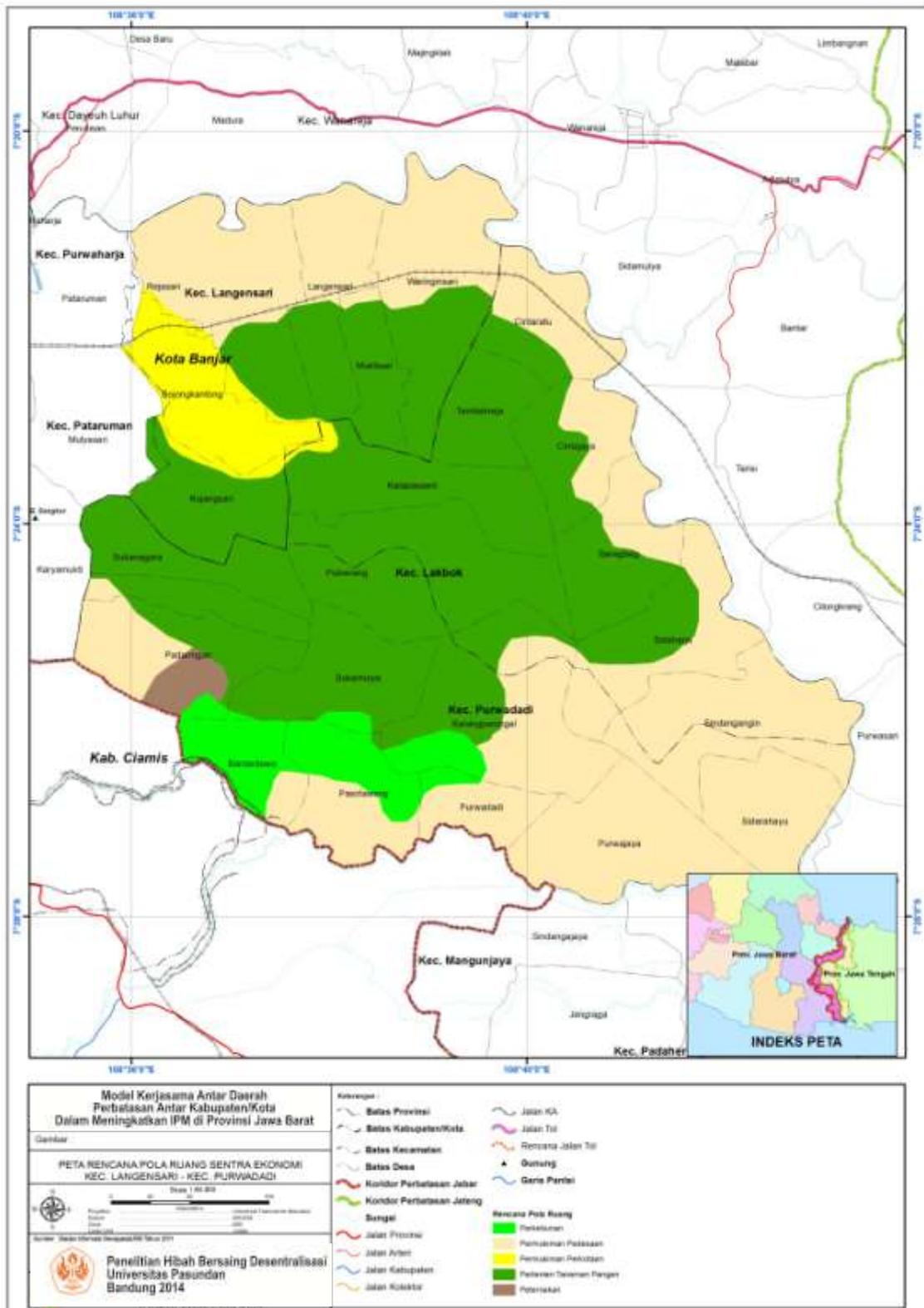
Gambar 4-19 Rencana Pengembangan Sentra Ekonomi Unggulan Langensari (Banjar)-Lakbok-Purwadadi (Ciamis)



Gambar 4-20 Peta Rencana Pola Ruang Rencana Pengembangan Sentra Ekonomi Unggulan Pabelan-Losari (Jabar)-Losari (Jateng)



Gambar 4-21 Peta Rencana Pola Ruang Rencana Pengembangan Sentra Ekonomi Unggulan Purwaharja-Pataruman (Kab. Banjarnegara)



Gambar 4-22 Peta Rencana Pola Ruang Pengembangan Sentra Ekonomi Unggulan Langensari (Banjar)-Lakbok-Purwadadi (Ciamis)

4.8 Identifikasi Tipologi Wilayah Perbatasan

Berdasarkan hasil kategorisasi dan klasifikasi yang telah dilakukan pada sub-bab sebelumnya. Selanjutnya dalam penelitian tahun pertama ini adalah menyusun tipologi kawasan berdasarkan kategorisasi fisik geografis, kategorisasi jenis perbatasan yaitu perbatasan antar kabupaten dan batas antar provinsi, klasifikasi IPM dan klasifikasi konektivitas.

Semua wilayah perbatasan yang berbatasan antar kecamatan di kabupaten - kabupaten Jawa Barat dan perbatasan kecamatan yang berbatasan dengan kecamatan dan Kabupaten di Provinsi Jawa Timur memiliki kendala (*constrain*) dan pembatasan (*limitation*) yang bervariasi. Kendala dan limitasi ini akan menjadi dasar dalam menentukan bagaimana meningkatkan Kerjasama Antar Daerah (KAD) dan meningkatkan IPM di wilayah perbatasan. Adapun identifikasi tipologi wilayah perbatasan di susun dalam bentuk tabel berikut ini.

Tabel 4-25 Identifikasi Tipologi Wilayah Perbatasan

NO.	KECAMATAN PERBATASAN	KARAKTERISTIK WILAYAH	DIFERENSIASI KOMPONEN/PENANGANAN PENTING
I.	KATEGORISASI FISIK GEOGRAFIS		
A.	Kategori Perbatasan Wilayah Pegunungan		
	<p>1. Kab. Cirebon Kec. Pasaleman Kec. Ciledug Kec. Pabedilan</p> <p>2. Kab. Kuningan Kec. Subang Kec. Cilebak Kec. Ciwaru Kec. Karagkancana Kec. Cibingbin Kec. Cibeureum</p> <p>Berbatasan dengan Kecamatan, Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah :</p> <p>Kab. Brebes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kec. Salem • Kec. Banjarharjo 	<p>Topografi : Bentang alam kawasan perbatasan Jabar-Jateng di Provinsi Jawa Barat terdiri dari karakteristik daerah pantai di bagian utara dan selatan, sedangkan bagian tengah berupa daerah dataran dan perbukitan. Morfologi berupa dataran rendah dengan ketinggian antara 0-12 m di atas permukaan laut terdapat di bagian utara yaitu Kecamatan Losari, Ciledug, dan Pabedilan Kabupaten Cirebon, sedangkan Kecamatan Pasaleman di Kabupaten Cirebon berada pada ketinggian di atas 12 m dpl. Topografi kawasan perbatasan yang termasuk Kabupaten Kuningan merupakan dataran dengan ketinggian antara 120-222 m dpl. Sementara itu, Kecamatan Pataruman dan Purwaharja di Kota Banjar pada umumnya berada pada ketinggian 100 m dpl, sedangkan Kecamatan Langensari berada pada ketinggian kurang dari 25 m dpl. Begitu pula halnya dengan kondisi fisiografi di Kecamatan Lakbok dan Padaherang Kabupaten Ciamis memiliki ketinggian lahan 0-25 m dpl, sedangkan kawasan perbatasan lainnya yang terdapat di Kabupaten Ciamis berada pada ketinggian antara 25-1.000 m dpl.</p> <p>Klimatologi : termasuk beriklim tropis. Jumlah hari hujan di Kecamatan, Pabedilan, Ciledug, dan Pasaleman rata-rata sebesar 12 hari hujan dengan curah hujan rata-rata 2.504 mm. Jumlah hari hujan di</p>	
	<p>3. Kota Banjar Kec. Purwaharja Kec. Pataruman Kec. Langensari</p> <p>4. Kab. Ciamis Kec. Lakbok Kec. Cisaga Kec. Tambaksari Kec. Purwadadi Kec. Mangunjaya</p>		

	<p>Berbatasan dengan Kecamatan, Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah :</p> <p>Kab. Cilacap :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kec. Dayeuhluhur • Kec. Wanareja • Kec. Kedungreja • Kec. Kampunglaut 	<p>Kabupaten Kuningan secara umum mencapai 156 hari dengan curah hujan mencapai 2995 mm per tahun. Adapun rata-rata curah hujan di Kota Banjar dalam setahun mencapai 4900 mm pada tahun 2010 dan jumlah hari hujan 177 hari. Curah hujan tertinggi terjadi pada Bulan Januari dan Desember.</p> <p>Jenis Tanah : Kondisi geologi di wilayah Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis terbentuk oleh struktur geologi yang didominasi oleh endapan gunung api tua disertai gunung api muda, formasi tapak, formasi halang, breksi gunung api Galunggung, aluvium, lalu ke selatan hingga ke Kalipucang berupa batu gamping. Kondisi geologi turut mempengaruhi kondisi jenis tanah di wilayah studi. Kabupaten Kuningan memiliki tanah yang subur yang berasal dari endapan vulkanis. Sementara itu, tingkat kesuburan tanah di Kota Banjar tergolong baik dengan tekstur</p>	
B.	Kategori Perbatasan Wilayah Pesisir		
	<p>Kec. Losari (Kabupaten Cirebon) Kec. Kalipucang (Kabupaten Ciamis)</p> <p>Berbatasan dengan Kecamatan, Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah : Kec. Losari (Kabupaten Brebes) Kec. Patimuan (Kabupaten Cilacap)</p>	<p>Topografi : Karakteristik fisik berdasarkan kemiringan di pantai utara lebih landai dibandingkan dengan karakteristik pantai selatan. Kemiringan lereng di wilayah studi pada umumnya berkisar antara 0-2% dan 0-8%. Namun demikian, pada kawasan lainnya yang berupa perbukitan cenderung memiliki kemiringan lahan 8%.</p> <p>Klimatologi : Wilayah Pesisir dalam setahun mencapai 4900 mm pada tahun 2010 dan jumlah hari hujan 177 hari. Curah hujan tertinggi terjadi pada Bulan Januari dan Desember.</p>	

		Jenis Tanah : Wilayah Pesisir Kecamatan Losari di Kabupaten Cirebon memiliki Jenis Tanah aluvial sedangkan di Pesisir Selatan terdiri dari jenis tanah latosol	
II.	KATEGORISASI WILAYAH PERBATASAN		
B.	Kategori Wilayah Perbatasan Antar Provinsi Jawa Barat- Jawa Tengah		
	<p>1. Kab. Cirebon Kec. Losari Kec. Pasaleman Kec. Ciledug Kec. Pabedilan</p> <p>2. Kab. Kuningan Kec. Subang Kec. Cilebak Kec. Ciwaru Kec. Karagkancana Kec. Cibingbin Kec. Cibeureum</p> <p>Berbatasan dengan Kecamatan, Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah :</p> <p>Kab. Brebes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kec. Salem • Kec. Banjarharjo • Kec. Loasari 	<p>Kabupaten Cirebon :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Pasaleman diperuntukan sebagai kawasan resapan air, sempadan sungai, kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan permukiman 2. Kecamatan Ciledug diperuntukan sebagai sempadan sungai, kawasan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan permukiman 3. Kecamatan Losari diperuntukan sebagai sempadan sungai, kawasan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan permukiman 4. Kecamatan Pabedilan diperuntukan sebagai sempadan sungai, kawasan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan permukiman. <p>Kabupaten Kuningan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Subang diperuntukan sebagai Kawasan peruntukan hutan produksi terbatas, Kawasan peruntukan hutan produksi tetap, 	<p>Pemaduserasian program pengembangan kawasan di perbatasan Jabar-Jateng membuka potensi peluang kerjasama antar wilayah di kawasan perbatasan, baik kerjasama antar kabupaten dalam provinsi, maupun kerjasama antar provinsi. Kerjasama di kawasan perbatasan mencakup berbagai bidang terutama dalam pengembangan ekonomi wilayah yang mendukung fungsi strategis provinsi di kawasan perbatasan meliputi kerjasama bidang penataan ruang dalam upaya konservasi kawasan lindung, serta penguatan peran dan fungsi pusat-pusat pertumbuhan wilayah perbatasan, kerjasama bidang sosial ekonomi dan pertanian, serta bidang transportasi dan penyediaan infrastruktur di kawasan perbatasan.</p> <p>Peluang kerjasama dapat dilakukan dalam berbagai bidang, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pola Pemanfaatan Ruang <ul style="list-style-type: none"> • Pengendalian fisik kawasan dalam menjaga lahan pertanian tanaman pangan • Pengendalian perkembangan di kawasan rawan bencana • Pengembangan kawasan dengan konsep hijau yang hemat energy, air, lahan dan minim limbah • Pengembangan pengelolaan, peningkatan fungsi dan mempertahankan luasan kawasan lindung di kawasan hutan Kabupaten Ciamis, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Brebes.

		<p>Kawasan peruntukan tanaman pangan, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Kawasan peruntukan permukiman</p> <p>2. Kecamatan Cilebak diperuntukan sebagai Kawasan peruntukan hutan produksi, Kawasan peruntukan tanaman pangan, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Kawasan peruntukan permukiman</p> <p>3. Kecamatan Ciwaru diperuntukan sebagai Kawasan peruntukan hutan produksi, Kawasan peruntukan tanaman pangan, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Kawasan peruntukan permukiman</p> <p>4. Kecamatan Karagkencana diperuntukan sebagai Kawasan peruntukan hutan produksi, Kawasan peruntukan tanaman pangan, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Kawasan peruntukan permukiman</p> <p>5. Kecamatan Cibingbin diperuntukan sebagai Kawasan peruntukan hutan produksi, Kawasan peruntukan tanaman pangan, Perkebunan rakyat, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Kawasan peruntukan permukiman</p> <p>6. Kecamatan Cibeureum diperuntukan sebagai Kawasan peruntukan hutan produksi, Kawasan peruntukan tanaman pangan, Perkebunan rakyat, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Kawasan peruntukan permukiman</p> <p>Kabupaten Brebes :</p> <p>1. Kec. Salem diperuntukan sebagai Kawasan resapan air, Kawasan Pantai Berhutan Bakau, peruntukan hutan produksi, peruntukan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pengendalian pemanfaatan ruang pada sempadan pantai yang berpotensi merusak fungsi sempadan pantai di Kabupaten Cirebon, Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Brebes. • Upaya mempertahankan luas lahan pertanian pangan berkelanjutan : pengembangan kawasan peruntukan pertanian pertanian untuk kegiatan hortikultura guna meningkatkan daya saing pertanian hortikultura yang dilakukan di Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Brebes. <p>2. Sosial Ekonomi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penguatan fungsi-fungsi pusat-pusat pertumbuhan di kawasan perbatasan Jabar-Jateng termasuk penguatan dan keterkaitan antar kawasan-kawasan strategis di kawasan perbatasan Jabar-Jateng • Peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan • peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan yang ramah lingkungan • Pengembangan pusat kegiatan industri kreatif yang berdaya saing dan ramah lingkungan • Pengembangan kegiatan pariwisata di kawasan perbatasan • Pengembangan sentra perkebunan berbasis bisnis yang didukung prasarana dan sarana dengan menggunakan teknologi lingkungan • Pengembangan sentra perikanan tangkap di Kabupaten Cirebon, Kabupaten Ciamis, dan Kabupaten Cilacap • Pengembangan kawasan minapolitan berbasis masyarakat yang dilakukan di Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Cilacap
--	--	---	--

		<p>pertanian, peruntukan perkebunan, peruntukan permukiman</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Kec. Banjarharjo diperuntukan sebagai Kawasan resapan air, peruntukan hutan produksi, peruntukan pertanian, peruntukan perkebunan 3. Kec. Losari diperuntukan sebagai Kawasan resapan air, peruntukan hutan produksi, peruntukan pertanian, peruntukan perikanan 	<ul style="list-style-type: none"> • peningkatan kegiatan industri yang bernilai tambah tinggi dengan penggunaan teknologi tinggi dan ramah lingkungan yang dilakukan di Kabupaten Cirebon, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Brebes • Pengedalian perkembangan kawasan peruntukkan permukiman didaerah penyangga serta di sepanjang jaringan jalan arteri primer dan kolektor primer yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar yang dilakukan di Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Cilacap.
	<p>3. Kota Banjar Kec. Purwaharja Kec. Pataruman Kec. Langensari</p> <p>4. Kab. Ciamis Kec. Lakhok Kec. Cisaga Kec. Tambaksari Kec. Purwadadi Kec. Mangunjaya Kec. Kalipucang</p> <p>Berbatasan dengan Kecamatan, Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah :</p> <p>Kab. Cilacap :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kec. Dayeuhluhur • Kec. Wanareja • Kec. Kedungreja • Kec. Kemplunglaut • Kec. Patimuan 	<p>Kota Banjar :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kec. Purwaharja diperuntukan sebagai kawasan permukiman, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan pertanian, perkebunan, hutan produksi. 2. Kec. Pataruman diperuntukan sebagai kawasan permukiman, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan pertanian, perkebunan, hutan produksi, Kawasan industri. 3. Kec. Langensari diperuntukan sebagai kawasan permukiman, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan pertanian, perkebunan, hutan produksi, Kawasan industri. <p>Kabupaten Ciamis :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kec. Kalipucang diperuntukan sebagai cadangan hutan lindung, Kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perkebunan, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan permukiman 2. Kec. Lakhok diperuntukan sebagai Kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Infrastruktur <ul style="list-style-type: none"> • Perwujudan sistem jaringan transportasi, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan Jalan Lintas Utara Pulau Jawa : Cirebon – Losari – Brebes. - Pengembangan jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa : Ancol – Ciamis – Banjar – Wangon. - Pengembangan jaringan jalan strategis nasional yang menghubungkan Cirebon – Kuningan – Ciamis - Pemantapan Jalur Kereta Api Lintas Utara Pulau Jawa : Cirebon – Tegal - Pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Selatan Pulau Jawa : Banjar – Kroya - Peningkatan jalan poros timur di jalur Pangandaran- Ciamis–Cikijing-Cirebon • Sistem Jaringan Sumber daya Air, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> - WS Strategis Nasional meliputi WS Cimanuk-Cisanggarung (Provinsi Jawa Barat – Jawa Tengah - WS lintas provinsi yang meliputi WS Citanduy - Pengembangan dan pemeliharaan bendungan beserta waduknya untuk mempertahankan daya

		<p>industri, kawasan peruntukan permukiman</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Kec. Cisaga diperuntukan sebagai cadangan hutan lindung, Kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perkebunan, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan permukiman 4. Kec. Tambaksari diperuntukan sebagai cadangan hutan lindung, Kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perkebunan, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan permukiman 5. Kec. Purwadadi diperuntukan sebagai kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perkebunan, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan permukiman 6. Kec. Mangunjaya diperuntukan sebagai Kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan, kawasan peruntukan perikanan perkebunan, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan permukiman <p>Kabupaten Cilacap :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kec. Dayeuhluhur diperuntukan sebagai kawasan lindung, kawasan resapan air, peruntukan hutan produksi, peruntukan hutan rakyat, kawasan pertanian, kawasan peruntukan perkebunan, peruntukan perikanan, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan permukiman 	<p>tampung air : Waduk Malahayu.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan fungsi, pengembangan dan pemeliharaan saluran irigasi teknis : DI Lakkok Utara yang melayani kawasan peruntukkan pertanian di Kabupaten Ciamis dan Kota Banjar, DI Lakkok Selatan/Manganti dan DI Rawa Onom/Panulisan yang melayani kawasan peruntukkan pertanian di Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Cilacap, DI Waduk Malahayu yang melayani kawasan peruntukkan pertanian di Kabupaten Brebes.
--	--	--	--

		<p>2. Kec. Wanareja diperuntukan sebagai kawasan lindung kawasan resapan air, peruntukan hutan produksi, peruntukan hutan rakyat, kawasan pertanian, kawasan peruntukan perkebunan, peruntukan perikanan, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan permukiman</p> <p>3. Kec. Kedungreja diperuntukan sebagai peruntukan hutan rakyat, kawasan pertanian, kawasan peruntukan perkebunan, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan permukiman</p> <p>4. Kec. Patimuan diperuntukan sebagai peruntukan hutan rakyat, kawasan pertanian, kawasan peruntukan perkebunan, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan permukiman</p> <p>5. Kec. Kampunglaut diperuntukan sebagai kawasan pertanian, peruntukan perikanan, kawasan peruntukan permukiman</p>	
B.	Kategori Wilayah Antar Kabupaten di Jawa Barat		
	Kecamatan Pasaleman (Kabupaten Cirebon_ -Kecamatan Cibingbin (Kabupaten Kuningan)	<p>Kecamatan Pasaleman diperuntukan sebagai kawasan resapan air, sempadan sungai, kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan permukiman</p> <p>Kecamatan Cibingbin diperuntukan sebagai Kawasan peruntukan hutan produksi, Kawasan peruntukan tanaman pangan, Perkebunan rakyat, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Kawasan peruntukan permukiman</p>	<p>Peluang kerjasama dapat dilakukan dalam berbagai bidang, antara lain :</p> <p>4. Pola Pemanfaatan Ruang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengendalian fisik kawaan dalam menjaga lahan pertanian tanaman pangan • Pengendalian perkembangan di kawasan rawan bencana • Pengembangan kawasan dengan konsep hijau yang hemat energy, air, lahan dan run off. • Pengembangan pengelolaan, peningkatan fungsi dan

	<p>Kecamatan Cilebak (Kabupaten Kuningan) – Kecamatan Tambaksari (Kabupaten Ciamis)</p>	<p>Kecamatan. Cilebak diperuntukan sebagai Kawasan peruntukan hutan produksi, Kawasan peruntukan tanaman pangan, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Kawasan peruntukan permukiman</p> <p>Kec. Tambaksari diperuntukan sebagai cadangan hutan lindung, Kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perkebunan, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan permukiman</p>	<p>mempertahankan luasan kawasan lindung dikawasan hutan Kabupaten Ciamis, Kabupaten Kuningan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengendalian pemanfaatan ruang pada sempadan pantai yang berpotensi merusak fungsi sempadan pantai di Kabupaten Cirebon, Kabupaten Ciamis. • Upaya mempertahankan luas lahan pertanian pangan berkelanjutan : pengembangan kawasan peruntukkan pertanian pertanian untuk kegiatan hortikultura guna meningkatkan daya saing pertanian hortikultura yang dilakukan di Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan.
	<p>Kecamatan Cisaga (Kabupaten Ciamis) – Kecamatan Purwaharja (Kota Banjar)</p>	<p>Kec. Cisaga diperuntukan sebagai cadangan hutan lindung, Kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perkebunan, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan permukiman</p> <p>Kec. Purwaharja diperuntukan sebagai kawasan permukiman, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan pertanian, perkebunan, hutan produksi</p>	<p>5. Sosial Ekonomi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penguatan fungsi-fungsi pusat-pusat pertumbuhan di kawasan perbatasan termasuk penguatan dan keterkaitan antar kawasan-kawasan strategis di kawasan perbatasan antar Kecamatan di Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kota Banjar dan Kabupaten Ciamis, Pangandaran. • Peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan • peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan yang ramah lingkungan • Pengembangan pusat kegiatan industri kreatif yang berdaya saing dan ramah lingkungan • Pengembangan kegiatan pariwisata di kawasan perbatasan • Pengembangan sentra perkebunan berbasis bisnis yang didukung prasaranan dan sarana dengan menggunakan teknologi lingkungan • Pengembangan sentra perikanan tangkap di Kabupaten Cirebon, Kabupaten Ciamis/Pangandaran. • Pengembangan kawasan minapolitan berbasis masyarakat yang dilakukan di Kabupaten Cirebon.

			<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kegiatan industri yang bernilai tambah tinggi dengan penggunaan teknologi tinggi dan ramah lingkungan yang dilakukan di Kabupaten Cirebon, Kabupaten Ciamis. • Pengendalian perkembangan kawasan peruntukan permukiman didaerah penyangga serta di sepanjang jaringan jalan arteri primer dan kolektor primer yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar yang dilakukan di Kabupaten Ciamis. <p>6. Infrastruktur</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perwujudan sistem jaringan transportasi, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan Jalan Lintas antar Kabupaten di Perbatasan. - Pengembangan jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa : Ancol – Ciamis – Banjar – Wangon. - Pengembangan jaringan jalan strategis nasional yang menghubungkan Cirebon – Kuningan – Ciamis - Peningkatan jalan poros timur di jalur Pangandaran- Ciamis–Cikijing-Cirebon • Sistem Jaringan Sumber daya Air, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan fungsi, pengembangan dan pemeliharaan saluran irigasi teknis : DI Lakbok Utara yang melayani kawasan peruntukkan pertanian di Kabupaten Ciamis dan Kota Banjar, DI Lakbok Selatan/Manganti dan DI Rawa Onom/Panulisan yang melayani kawasan peruntukkan pertanian di Kabupaten Ciamis.
--	--	--	--

III.	KLASIFIKASI IPM	
A.	Klasifikasi IPM Tinggi	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kabupaten Kuningan <ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Cibeureum 2). Kabupaten Banjar <ul style="list-style-type: none"> • Kec. Purwaharja • Kec. Pataruman • Kec. Langensari 3). Kabupaten Ciamis <ul style="list-style-type: none"> • Kec. Lakbok • Kec. Purwadadi 	<p>Kondisi IPM di Wilayah Perbatasan dengan Klasifikasi Tinggi : Indeks Pendidikan rata-rata di wilayah perbatasan yang memiliki klasifikasi IPM rendah Indeks pendidikan rata-rata adalah 75,78, indeks Kesehatan adalah 73,77, sedangkan indeks daya beli rata-rata 67,14 secara keseluruhan Indeks Pembangunan Manusia di 6 Kecamatan di wilayah perbatasan dengan klasifikasi tinggi adalah 72,23.</p> <p>Kondisi pada setiap aspek Pendidikan, Kesehatan dan Daya Beli adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan <ul style="list-style-type: none"> • Angka Melek Huruf pada umur 15 tahun keatas di wilayah perbatasan antar kabupaten/kota. Rata-rata angka melek huruf pada usia 15 tahun >80%. • Rata-rata lama sekolah di desa tertinggal di perbatasan daerah kabupaten/kota dan provinsi dengan rata-rata >8 tahun di kecamatan wilayah perbatasan. • Angka Partisipasi Sekolah di desa tertinggal perbatasan kabupaten/kota dan provinsi, berdasarkan karakteristik desa tertinggal di perbatasan proporsi tingkat pendidikan terbesar adalah tamatan Sekolah Menengah Pertama (SMP), yaitu >600%%. 2. Kesehatan <ul style="list-style-type: none"> • Rata-rata usia hidup yang digunakan sebagai indikasi tingkat kesehatan di desa tertinggal perbatasan kabupaten/kota dan provinsi, yaitu rata – rata 77 tahun di desa tertinggal wilayah perbatasan provinsi. • Kesadaran masyarakat mengenai kesehatan, dan usaha untuk menjaga kesehatan dan lingkungan termasuk sanitasi dinilai baik. • Fasilitas kesehatan yang baik dan berorientasi pada sanitasi dan kesehatan seperti pencegahan penyakit dengan vektor tertentu, kesehatan ibu dan balita dan pemenuhan terhadap gizi. 3. Daya Beli <ul style="list-style-type: none"> • Daya beli masyarakat di desa tertinggal wilayah

			<p>perbatasan kabupaten/kota dan provinsi, dengan rata-rata konsumsi makan dan non makan yang baik yaitu rata-rata daya beli masyarakat di perbatasan kabupaten/kota adalah sebesar > Rp. 600.000,00,- .</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan yang baik disebabkan struktur mata pencaharian yang heterogen lebih besar di sektor perdagangan dan jasa.
B.	Klasifikasi IPM Rendah		
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kabupaten Cirebon <ul style="list-style-type: none"> • Kec. Pasaleman • Kec. Ciledug • Kec. Losari • Kec. Pabedilan 2. Kabupaten Kuningan <ul style="list-style-type: none"> • Kec. Subang • Kec. Cilebak • Kec. Ciwaru • Kec. Karagkencana • Kec. Cibingbin 3. Kabupaten Ciamis <ul style="list-style-type: none"> • Kec. Kalipucang • Kec. Cisaga • Kec. Tambaksari • Kec. Mangunjaya 	<p>Kondisi IPM di Wilayah Perbatasan dengan Klasifikasi Tinggi : Indeks Pendidikan rata-rata di wilayah perbatasan yang memiliki klasifikasi IPM rendah Indeks pendidikan rata-rata adalah 73,65, indeks Kesehatan adalah 69,80, sedangkan indeks daya beli rata-rata 59,74 secara keseluruhan Indeks Pembangunan Manusia di 13 Kecamatan di wilayah perbatasan adalah 63,73.</p>	<p>Kondisi pada setiap aspek Pendidikan, Kesehatan dan Daya Beli adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan <ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya Angka Melek Huruf pada umur 15 tahun keatas di desa tertinggal wilayah perbatasan antar kabupaten/kota. Rata-rata angka melek huruf pada usia 15 tahun 70%. • Rendahnya rata-rata lama sekolah dengan rata-rata 8 tahun di kecamatan wilayah perbatasan. • Rendahnya Angka Partisipasi Sekolah, berdasarkan karakteristik wilayah perbatasan proporsi tingkat pendidikan terbesar adalah tamatan Sekolah Dasar (SD), yaitu 70,33%. 2. Kesehatan <ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya rata-rata usia hidup yang digunakan sebagai indikasi tingkat kesehatan di desa tertinggal perbatasan kabupaten/kota dan provinsi, yaitu rata – rata 70 tahun di desa tertinggal wilayah perbatasan provinsi. • Belum meluasnya kesadaran masyarakat mengenai kesehatan, dan usaha untuk menjaga kesehatan dan lingkungan termasuk sanitasi. • Terbatasnya fasilitas kesehatan dan kurang berjalannya kegiatan-kegiatan yang berorientasi

			<p>pada kesehatan seperti pencegahan penyakit tertentu, kesehatan ibu dan balita dan pemenuhan terhadap gizi.</p> <p>3. Daya Beli</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya daya beli masyarakat wilayah perbatasan kabupaten/kota dan provinsi, dengan rata-rata konsumsi makan dan non makan yang rendah yaitu rata-rata daya beli masyarakat di perbatasan kabupaten/kota adalah sebesar Rp. 380.000,00,- sampai dengan Rp. 600.000,00,- daya beli masyarakat di wilayah perbatasan. • Rendahnya pendapatan yang disebabkan struktur mata pencaharian yang homogen yaitu sebagai petani penggarap dan buruh tani. oleh sebab itu rata-rata pendapatan buruh tani juga rendah yaitu Rp. 10.000.00,- sampai dengan Rp. 20.000.00,- per hari kerja. 																																																				
IV.	KLASIFIKASI KONEKTIFITAS																																																						
A.	Klasifikasi Indeks Aksesibilitas Tinggi																																																						
	<p>1. Kabupaten Cirebon :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kec. Pasaleman • Kec. Ciledug • Kec. Losari • Kec. Pabedilan <p>2. Kabupaten Kuningan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kec. Subang • Kec. Cilebak <p>3. Kota Banjar :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kec. Purwaharja <p>4. Kabupaten Ciamis :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kec. Cisaga • Kec. Tambaksari 	<p>Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa indeks aksesibilitas di wilayah perbatasan dengan tingkat aksesibilitas tinggi adalah rata-rata 2,28 km/km². Hal ini sudah memenuhi syarat minimal indeks aksesibilitas yaitu sebesar 1,5 km/km².</p> <p>Disisi lain kondisi ini menunjukkan bahwa pada klasifikasi indeks aksesibilitas tinggi, masyarakat sangat mudah mencapai infrastruktur transportasi darat.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Kab. Kota</th> <th rowspan="2">NO</th> <th rowspan="2">KECAMATAN</th> <th colspan="2">Mobilitas</th> </tr> <tr> <th>Km/1000 penduduk</th> <th>Klasifikasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">Kab. Cirebon</td> <td>1</td> <td>Kec. Pasaleman</td> <td>2,96</td> <td>Tinggi</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Kec. Ciledug</td> <td>4,22</td> <td>Tinggi</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Kec. Losari</td> <td>1,76</td> <td>Tinggi</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Kec. Pabedilan</td> <td>1,80</td> <td>Tinggi</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Kab. Kuningan</td> <td>5</td> <td>Kec. Subang</td> <td>1,49</td> <td>Tinggi</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Kec. Cilebak</td> <td>1,70</td> <td>Tinggi</td> </tr> <tr> <td>Kota Banjar</td> <td>7</td> <td>Kec. Purwaharja</td> <td>3,82</td> <td>Tinggi</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Kab. Ciamis</td> <td>8</td> <td>Kec. Cisaga</td> <td>1,11</td> <td>Tinggi</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Kec. Tambaksari</td> <td>1,69</td> <td>Tinggi</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Rata-Rata</td> <td>2,28</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kab. Kota	NO	KECAMATAN	Mobilitas		Km/1000 penduduk	Klasifikasi	Kab. Cirebon	1	Kec. Pasaleman	2,96	Tinggi	2	Kec. Ciledug	4,22	Tinggi	3	Kec. Losari	1,76	Tinggi	4	Kec. Pabedilan	1,80	Tinggi	Kab. Kuningan	5	Kec. Subang	1,49	Tinggi	6	Kec. Cilebak	1,70	Tinggi	Kota Banjar	7	Kec. Purwaharja	3,82	Tinggi	Kab. Ciamis	8	Kec. Cisaga	1,11	Tinggi	9	Kec. Tambaksari	1,69	Tinggi	Rata-Rata			2,28	
Kab. Kota	NO	KECAMATAN	Mobilitas																																																				
			Km/1000 penduduk	Klasifikasi																																																			
Kab. Cirebon	1	Kec. Pasaleman	2,96	Tinggi																																																			
	2	Kec. Ciledug	4,22	Tinggi																																																			
	3	Kec. Losari	1,76	Tinggi																																																			
	4	Kec. Pabedilan	1,80	Tinggi																																																			
Kab. Kuningan	5	Kec. Subang	1,49	Tinggi																																																			
	6	Kec. Cilebak	1,70	Tinggi																																																			
Kota Banjar	7	Kec. Purwaharja	3,82	Tinggi																																																			
Kab. Ciamis	8	Kec. Cisaga	1,11	Tinggi																																																			
	9	Kec. Tambaksari	1,69	Tinggi																																																			
Rata-Rata			2,28																																																				

B.	Klasifikasi Indeks Aksesibilitas Rendah 1. Kabupaten Kuningan : <ul style="list-style-type: none"> • Kec. Ciwaru • Kec. Karagkancana • Kec. Cibingbin • Kec. Cibeureum 2. Kota Banjar : <ul style="list-style-type: none"> • Kec. Pataruman • Kec. Langensari 3. Kabupaten Ciamis : <ul style="list-style-type: none"> • Kec. Kalipucang • Kec. Lakbok • Kec. Purwadadi • Kec. Mangunjaya 	<p>Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa indeks aksesibilitas di wilayah perbatasan dengan tingkat aksesibilitas rendah adalah rata-rata 0,80 km/km². Hal ini belum memenuhi syarat minimal indeks aksesibilitas yaitu sebesar 1,5 km/km².</p> <p>Disisi lain kondisi ini menunjukkan bahwa pada klasifikasi indeks aksesibilitas rendah, masyarakat kesulitan menjangkau infrastruktur transportasi darat.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Kab/Kota</th> <th rowspan="2">NO</th> <th rowspan="2">KECAMATAN</th> <th colspan="2">Mobilitas</th> </tr> <tr> <th>Km/1000 penduduk</th> <th>Klasifikasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">Kab. Kuningan</td> <td>1</td> <td>Kec. Ciwaru</td> <td>0,80</td> <td>Rendah</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Kec. Karagkancana</td> <td>0,55</td> <td>Rendah</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Kec. Cibingbin</td> <td>0,71</td> <td>Rendah</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Kec. Cibeureum</td> <td>1,04</td> <td>Rendah</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Kota Banjar</td> <td>5</td> <td>Kec. Pataruman</td> <td>1,17</td> <td>Rendah</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Kec. Langensari</td> <td>0,75</td> <td>Rendah</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">Kab. Ciamis</td> <td>7</td> <td>Kec. Kalipucang</td> <td>0,28</td> <td>Rendah</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Kec. Lakbok</td> <td>0,62</td> <td>Rendah</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Kec. Purwadadi</td> <td>1,25</td> <td>Rendah</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Kec. Mangunjaya</td> <td>0,79</td> <td>Rendah</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Rata-Rata</td> <td>0,80</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kab/Kota	NO	KECAMATAN	Mobilitas		Km/1000 penduduk	Klasifikasi	Kab. Kuningan	1	Kec. Ciwaru	0,80	Rendah	2	Kec. Karagkancana	0,55	Rendah	3	Kec. Cibingbin	0,71	Rendah	4	Kec. Cibeureum	1,04	Rendah	Kota Banjar	5	Kec. Pataruman	1,17	Rendah	6	Kec. Langensari	0,75	Rendah	Kab. Ciamis	7	Kec. Kalipucang	0,28	Rendah	8	Kec. Lakbok	0,62	Rendah	9	Kec. Purwadadi	1,25	Rendah	10	Kec. Mangunjaya	0,79	Rendah	Rata-Rata			0,80	
Kab/Kota	NO	KECAMATAN	Mobilitas																																																							
			Km/1000 penduduk	Klasifikasi																																																						
Kab. Kuningan	1	Kec. Ciwaru	0,80	Rendah																																																						
	2	Kec. Karagkancana	0,55	Rendah																																																						
	3	Kec. Cibingbin	0,71	Rendah																																																						
	4	Kec. Cibeureum	1,04	Rendah																																																						
Kota Banjar	5	Kec. Pataruman	1,17	Rendah																																																						
	6	Kec. Langensari	0,75	Rendah																																																						
Kab. Ciamis	7	Kec. Kalipucang	0,28	Rendah																																																						
	8	Kec. Lakbok	0,62	Rendah																																																						
	9	Kec. Purwadadi	1,25	Rendah																																																						
	10	Kec. Mangunjaya	0,79	Rendah																																																						
Rata-Rata			0,80																																																							
A.	Klasifikasi Indeks Mobilitas Tinggi 1. Kabupaten Cirebon : <ul style="list-style-type: none"> • Kec. Pasaleman 2. Kabupaten Kuningan : <ul style="list-style-type: none"> • Kec. Subang • Kec. Cilebak • Kec. Cibeureum 3. Kota Banjar : <ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Purwaharja 4. Kabupaten Ciamis : <ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Tambaksari 	<p>Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa indeks mobilitas di wilayah perbatasan dengan tingkat mobilitas tinggi adalah rata-rata 4,00 km/1000 penduduk. Hal ini sudah memenuhi syarat minimal indeks mobilitas yaitu sebesar 2 km/1000 penduduk.</p> <p>Kondisi ini menunjukkan bahwa pada klasifikasi indeks mobilitas tinggi, setiap 1000 penduduk dapat melakukan mobilitas sebesar 4 km.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Kab/Kota</th> <th rowspan="2">NO</th> <th rowspan="2">KECAMATAN</th> <th colspan="2">Mobilitas</th> </tr> <tr> <th>Km/1000 penduduk</th> <th>Klasifikasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kab. Cirebon</td> <td>1</td> <td>Kec. Pasaleman</td> <td>3,80</td> <td>Tinggi</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Kab. Kuningan</td> <td>2</td> <td>Kec. Subang</td> <td>4,09</td> <td>Tinggi</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Kec. Cilebak</td> <td>5,81</td> <td>Tinggi</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Kec. Cibeureum</td> <td>2,35</td> <td>Tinggi</td> </tr> <tr> <td>Kota Banjar</td> <td>5</td> <td>Kec. Purwaharja</td> <td>3,33</td> <td>Tinggi</td> </tr> <tr> <td>Kec. Ciamis</td> <td>6</td> <td>Kec. Tambaksari</td> <td>4,63</td> <td>Tinggi</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Total/Rata-Rata</td> <td>4,00</td> <td>Tinggi</td> </tr> </tbody> </table>	Kab/Kota	NO	KECAMATAN	Mobilitas		Km/1000 penduduk	Klasifikasi	Kab. Cirebon	1	Kec. Pasaleman	3,80	Tinggi	Kab. Kuningan	2	Kec. Subang	4,09	Tinggi	3	Kec. Cilebak	5,81	Tinggi	4	Kec. Cibeureum	2,35	Tinggi	Kota Banjar	5	Kec. Purwaharja	3,33	Tinggi	Kec. Ciamis	6	Kec. Tambaksari	4,63	Tinggi	Total/Rata-Rata			4,00	Tinggi															
Kab/Kota	NO	KECAMATAN	Mobilitas																																																							
			Km/1000 penduduk	Klasifikasi																																																						
Kab. Cirebon	1	Kec. Pasaleman	3,80	Tinggi																																																						
Kab. Kuningan	2	Kec. Subang	4,09	Tinggi																																																						
	3	Kec. Cilebak	5,81	Tinggi																																																						
	4	Kec. Cibeureum	2,35	Tinggi																																																						
Kota Banjar	5	Kec. Purwaharja	3,33	Tinggi																																																						
Kec. Ciamis	6	Kec. Tambaksari	4,63	Tinggi																																																						
Total/Rata-Rata			4,00	Tinggi																																																						

B.	Klasifikasi Indeks Mobilitas Rendah																																																																						
	1. Kabupaten Cirebon : <ul style="list-style-type: none"> • Kec. Ciledug • Kec. Losari • Kec. Pabedilan 2. Kabupaten Kuningan : <ul style="list-style-type: none"> • Kec. Ciwaru • Kec. Karagkancana • Kec. Cibingbin 3. Kota Banjar : <ul style="list-style-type: none"> • Kec. Pataruman • Kec. Langensari 4. Kabupaten Ciamis : <ul style="list-style-type: none"> • Kec. Kalipucang • Kec. Lakbok • Kec. Cisaga • Kec. Purwadadi • Kec. Mangunjaya 	Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa indeks mobilitas di wilayah perbatasan dengan tingkat mobilitas tinggi adalah rata-rata 1,20 km/1000 penduduk. Hal ini belum memenuhi syarat minimal indeks mobilitas yaitu sebesar 2 km/1000 penduduk. Kondisi ini menunjukkan bahwa pada klasifikasi indeks mobilitas rendah, setiap 1000 penduduk hanya dapat melakukan mobilitas sebesar 1,20 km.	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Kab/Kota</th> <th rowspan="2">NO</th> <th rowspan="2">KECAMATAN</th> <th colspan="2">Mobilitas</th> </tr> <tr> <th>Km/1000 penduduk</th> <th>Klasifikasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">Kab. Cirebon</td> <td>1</td> <td>Kec. Ciledug</td> <td>1,23</td> <td>Rendah</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Kec. Losari</td> <td>1,27</td> <td>Rendah</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Kec. Pabedilan</td> <td>0,84</td> <td>Rendah</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Kec. Ciwaru</td> <td>1,31</td> <td>Rendah</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Kab. Kuningan</td> <td>5</td> <td>Kec. Karagkancana</td> <td>1,77</td> <td>Rendah</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Kec. Cibingbin</td> <td>1,24</td> <td>Rendah</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Kota Banjar</td> <td>7</td> <td>Kec. Pataruman</td> <td>1,13</td> <td>Rendah</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Kec. Langensari</td> <td>0,46</td> <td>Rendah</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">Kab. Ciamis</td> <td>9</td> <td>Kec. Kalipucang</td> <td>0,93</td> <td>Rendah</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Kec. Lakbok</td> <td>0,58</td> <td>Rendah</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Kec. Cisaga</td> <td>1,69</td> <td>Rendah</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>Kec. Purwadadi</td> <td>1,33</td> <td>Rendah</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>Kec. Mangunjaya</td> <td>1,80</td> <td>Rendah</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Total/Rata-Rata</td> <td>1,20</td> <td>Rendah</td> </tr> </tbody> </table>	Kab/Kota	NO	KECAMATAN	Mobilitas		Km/1000 penduduk	Klasifikasi	Kab. Cirebon	1	Kec. Ciledug	1,23	Rendah	2	Kec. Losari	1,27	Rendah	3	Kec. Pabedilan	0,84	Rendah	4	Kec. Ciwaru	1,31	Rendah	Kab. Kuningan	5	Kec. Karagkancana	1,77	Rendah	6	Kec. Cibingbin	1,24	Rendah	Kota Banjar	7	Kec. Pataruman	1,13	Rendah	8	Kec. Langensari	0,46	Rendah	Kab. Ciamis	9	Kec. Kalipucang	0,93	Rendah	10	Kec. Lakbok	0,58	Rendah	11	Kec. Cisaga	1,69	Rendah	12	Kec. Purwadadi	1,33	Rendah	13	Kec. Mangunjaya	1,80	Rendah	Total/Rata-Rata			1,20	Rendah
Kab/Kota	NO	KECAMATAN	Mobilitas																																																																				
			Km/1000 penduduk	Klasifikasi																																																																			
Kab. Cirebon	1	Kec. Ciledug	1,23	Rendah																																																																			
	2	Kec. Losari	1,27	Rendah																																																																			
	3	Kec. Pabedilan	0,84	Rendah																																																																			
	4	Kec. Ciwaru	1,31	Rendah																																																																			
Kab. Kuningan	5	Kec. Karagkancana	1,77	Rendah																																																																			
	6	Kec. Cibingbin	1,24	Rendah																																																																			
Kota Banjar	7	Kec. Pataruman	1,13	Rendah																																																																			
	8	Kec. Langensari	0,46	Rendah																																																																			
Kab. Ciamis	9	Kec. Kalipucang	0,93	Rendah																																																																			
	10	Kec. Lakbok	0,58	Rendah																																																																			
	11	Kec. Cisaga	1,69	Rendah																																																																			
	12	Kec. Purwadadi	1,33	Rendah																																																																			
	13	Kec. Mangunjaya	1,80	Rendah																																																																			
Total/Rata-Rata			1,20	Rendah																																																																			
A.	Klasifikasi Proporsi Ruas Jalan Tinggi																																																																						
	1. Kabupaten Cirebon : <ul style="list-style-type: none"> • Kec. Pasaleman 2. Kabupaten Kuningan : <ul style="list-style-type: none"> • Kec. Subang • Kec. Cilebak • Kec. Cibeureum 3. Kota Banjar : <ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Purwaharja 4. Kabupaten Ciamis : <ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Tambaksari 	Dengan melakukan analisis proporsi luas jalan diperkirakan luas area jalan dibandingkan dengan luas wilayah di masing-masing kecamatan di kabupaten/kota di perbatasan pada klasifikasi proporsi luas jalan tinggi rata-rata sekitar 20,42%. perbandingan luas ini tepat dari yang dipersyaratkan untuk perbandingan luas area jalan yang ideal terhadap luas wilayah Kabupaten/kota sebesar 10%-20%.	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Kab/Kota</th> <th rowspan="2">NO</th> <th rowspan="2">KECAMATAN</th> <th colspan="2">Proporsi Luas Jalan</th> </tr> <tr> <th>Persentase (%)</th> <th>Klasifikasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kab. Cirebon</td> <td>1</td> <td>Kec. Pasaleman</td> <td>19,02%</td> <td>Tinggi</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Kab. Kuningan</td> <td>2</td> <td>Kec. Subang</td> <td>20,45%</td> <td>Tinggi</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Kec. Cilebak</td> <td>29,05%</td> <td>Tinggi</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Kec. Cibeureum</td> <td>11,76%</td> <td>Tinggi</td> </tr> <tr> <td>Kota Banjar</td> <td>5</td> <td>Kec. Purwaharja</td> <td>19,10%</td> <td>Tinggi</td> </tr> <tr> <td>Kec. Ciamis</td> <td>6</td> <td>Kec. Tambaksari</td> <td>23,13%</td> <td>Tinggi</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Total/Rata-Rata</td> <td>20,42</td> <td>Tinggi</td> </tr> </tbody> </table>	Kab/Kota	NO	KECAMATAN	Proporsi Luas Jalan		Persentase (%)	Klasifikasi	Kab. Cirebon	1	Kec. Pasaleman	19,02%	Tinggi	Kab. Kuningan	2	Kec. Subang	20,45%	Tinggi	3	Kec. Cilebak	29,05%	Tinggi	4	Kec. Cibeureum	11,76%	Tinggi	Kota Banjar	5	Kec. Purwaharja	19,10%	Tinggi	Kec. Ciamis	6	Kec. Tambaksari	23,13%	Tinggi	Total/Rata-Rata			20,42	Tinggi																												
Kab/Kota	NO	KECAMATAN	Proporsi Luas Jalan																																																																				
			Persentase (%)	Klasifikasi																																																																			
Kab. Cirebon	1	Kec. Pasaleman	19,02%	Tinggi																																																																			
Kab. Kuningan	2	Kec. Subang	20,45%	Tinggi																																																																			
	3	Kec. Cilebak	29,05%	Tinggi																																																																			
	4	Kec. Cibeureum	11,76%	Tinggi																																																																			
Kota Banjar	5	Kec. Purwaharja	19,10%	Tinggi																																																																			
Kec. Ciamis	6	Kec. Tambaksari	23,13%	Tinggi																																																																			
Total/Rata-Rata			20,42	Tinggi																																																																			

B.	Klasifikasi Proporsi Ruas Jalan Rendah																																																																						
	<p>1. Kabupaten Cirebon :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kec. Ciledug • Kec. Losari • Kec. Pabedilan <p>2. Kabupaten Kuningan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kec. Ciwaru • Kec. Karagkancana • Kec. Cibingbin <p>3. Kota Banjar :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kec. Pataruman • Kec. Langensari <p>4. Kabupaten Ciamis :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kec. Kalipucang • Kec. Laktok • Kec. Cisaga • Kec. Purwadadi • Kec. Mangunjaya 	<p>Dengan melakukan analisis proporsi luas jalan diperkirakan luas area jalan dibandingkan dengan luas wilayah di masing-masing kecamatan di kabupaten/kota di perbatasan pada klasifikasi proporsi luas jalan rendah rata-rata sekitar 6,12%. perbandingan luas ini kurang dari yang dipersyaratkan untuk perbandingan luas area jalan yang ideal terhadap luas wilayah Kabupaten/kota sebesar 10%-20%.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Kab/Kota</th> <th rowspan="2">NO</th> <th rowspan="2">KECAMATAN</th> <th colspan="2">Proporsi Luas Jalan</th> </tr> <tr> <th>Persentase (%)</th> <th>Klasifikasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">Kab. Cirebon</td> <td>1</td> <td>Kec. Ciledug</td> <td>6,18%</td> <td>Rendah</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Kec. Losari</td> <td>6,87%</td> <td>Rendah</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Kec. Pabedilan</td> <td>4,20%</td> <td>Rendah</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Kec. Ciwaru</td> <td>6,54%</td> <td>Rendah</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Kab. Kuningan</td> <td>5</td> <td>Kec. Karagkancana</td> <td>8,84%</td> <td>Rendah</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Kec. Cibingbin</td> <td>6,22%</td> <td>Rendah</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Kota Banjar</td> <td>7</td> <td>Kec. Pataruman</td> <td>6,22%</td> <td>Rendah</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Kec. Langensari</td> <td>2,31%</td> <td>Rendah</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">Kab. Ciamis</td> <td>9</td> <td>Kec. Kalipucang</td> <td>5,20%</td> <td>Rendah</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Kec. Laktok</td> <td>2,93%</td> <td>Rendah</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Kec. Cisaga</td> <td>8,43%</td> <td>Rendah</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>Kec. Purwadadi</td> <td>6,63%</td> <td>Rendah</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>Kec. Mangunjaya</td> <td>9,02%</td> <td>Rendah</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Total/Rata-Rata</td> <td>6,12</td> <td>Rendah</td> </tr> </tbody> </table>	Kab/Kota	NO	KECAMATAN	Proporsi Luas Jalan		Persentase (%)	Klasifikasi	Kab. Cirebon	1	Kec. Ciledug	6,18%	Rendah	2	Kec. Losari	6,87%	Rendah	3	Kec. Pabedilan	4,20%	Rendah	4	Kec. Ciwaru	6,54%	Rendah	Kab. Kuningan	5	Kec. Karagkancana	8,84%	Rendah	6	Kec. Cibingbin	6,22%	Rendah	Kota Banjar	7	Kec. Pataruman	6,22%	Rendah	8	Kec. Langensari	2,31%	Rendah	Kab. Ciamis	9	Kec. Kalipucang	5,20%	Rendah	10	Kec. Laktok	2,93%	Rendah	11	Kec. Cisaga	8,43%	Rendah	12	Kec. Purwadadi	6,63%	Rendah	13	Kec. Mangunjaya	9,02%	Rendah	Total/Rata-Rata			6,12	Rendah
Kab/Kota	NO	KECAMATAN	Proporsi Luas Jalan																																																																				
			Persentase (%)	Klasifikasi																																																																			
Kab. Cirebon	1	Kec. Ciledug	6,18%	Rendah																																																																			
	2	Kec. Losari	6,87%	Rendah																																																																			
	3	Kec. Pabedilan	4,20%	Rendah																																																																			
	4	Kec. Ciwaru	6,54%	Rendah																																																																			
Kab. Kuningan	5	Kec. Karagkancana	8,84%	Rendah																																																																			
	6	Kec. Cibingbin	6,22%	Rendah																																																																			
Kota Banjar	7	Kec. Pataruman	6,22%	Rendah																																																																			
	8	Kec. Langensari	2,31%	Rendah																																																																			
Kab. Ciamis	9	Kec. Kalipucang	5,20%	Rendah																																																																			
	10	Kec. Laktok	2,93%	Rendah																																																																			
	11	Kec. Cisaga	8,43%	Rendah																																																																			
	12	Kec. Purwadadi	6,63%	Rendah																																																																			
	13	Kec. Mangunjaya	9,02%	Rendah																																																																			
Total/Rata-Rata			6,12	Rendah																																																																			
V.	KLASIFIKASI INTENSITAS EKONOMI																																																																						
A.	Klasifikasi Unggulan																																																																						
	<p>1. Kabupaten Cirebon</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kec. Losari • Kec. Pabedilan <p>2. Kota Banjar</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kec. Purwaharja • Kec. Pataruman • Kec. Langensari <p>3. Kabupaten Ciamis</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kec. Laktok 	<p>Pembagian sentra produksi secara umum terbagi ke dalam:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sentra produksi primer (pertanian, perikanan, perkebunan, pertambangan, kehutanan, dan peternakan); • Sentra produksi sekunder (industri pengolahan/industri manufaktur); • Sentra produksi tersier (jasa, termasuk diantaranya pariwisata/agrowisata/ekowisata/minawisata, dll) 	<p>Kecamatan-kecamatan tersebut berpotensi untuk dapat dikembangkan sebagai sentra ekonomi unggulan kawasan perbatasan. Sentra didefinisikan sebagai pusat kegiatan di kawasan/lokasi tertentu dimana terdapat usaha yang menggunakan bahan baku/sarana yang sama, menghasilkan produk yang sama serta memiliki prospek untuk dikembangkan menjadi usaha yang besar dalam satuan wilayah tertentu.</p>																																																																				

	<ul style="list-style-type: none"> • Kec. Purwadadi 		
B.	Klasifikasi Non Unggulan		
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kabupaten Cirebon <ul style="list-style-type: none"> • Kec. Pasaleman • Kec. Ciledug 2. Kabupaten Kuningan <ul style="list-style-type: none"> • Kec. Subang • Kec. Cilebak • Kec. Ciwaru • Kec. Karagkencana • Kec. Cibingbin • Kec. Cibeureum 3. Kabupaten Ciamis <ul style="list-style-type: none"> • Kec. Kalipucang • Kec. Cisaga • Kec. Tambaksari 	Sentra produksi primer (pertanian, perikanan, perkebunan, pertambangan, kehutanan, dan peternakan);	Perlu di dorong perkembangannya melalui sektor ekonomi unggulan dan menjadi wilayah peripheri ekonomi bagi daerah yang menjadi sektor ekonomi unggulan.

Sumber : Hasil Analisis 2014

Bab V Simpulan dan Rekomendasi

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada tahap 1 untuk penelitian tahun pertama yaitu melakukan identifikasi wilayah perbatasan dan IPM berdasarkan analisis tipologi kawasan perbatasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan fisik geografis wilayah kecamatan di perbatasan maka terdapat 2 kategorisasi dalam membedakan wilayahnya yaitu wilayah perbukitan atau pegunungan dan wilayah pesisir. Hal ini menjadikan pembeda antara 2 wilayah berdasarkan fisik geografisnya wilayah pegunungan cenderung memiliki kendala dan pembatas terutama dalam kewilayahan antara lain kelandaian diatas 25% , sempadan sungai, kawasan lindung dan kawasan preservasi serta kerentanan gerakan tanah. Wilayah yang di gunakan untuk budidaya memiliki syarat untuk pengembangannya. Jika dilihat dari wilayah perbatasan pesisir seluruh wilayah relatif bisa di gunakan untuk budidaya karena kemiringannya antara lain memiliki kelandaian 0-8% tetapi juga dengan beberapa limitasi yaitu sempadan pantai.
2. Berdasarkan kategorisasi karakteristik administrasi perencanaan wilayah perbatasan, kategorisasi di dasarkan kepada unit analisis kecamatan yang berbatasan antar kabupaten dan kecamatan yang berbatasan antar Provinsi Jawa Barat dan Antara Provinsi Jawa Tengah. Secara umum karakteristik antar administrasi perencanaan baik antar kabupaten maupun antar provinsi baik struktur dan pola ruang sudah terdapat sinkronisasi dan harmonisasi antar ruang. Tetapi dalam hal pengembangan kabupaten antar Provinsi membutuhkan pola kerjasama antara Provinsi Jawa Barat dengan Provinsi Jawa Tengah, karena di beberapa Kecamatan di Jawa Tengah terkendala dan limitasi masih luasnya kawasan lindung seperti di Kecamatan Banjarharjo dan Kecamatan Dayeuh Luhur di Kabupaten Cilacap, sedangkan di Kecamatan Kedungjaya dan Patimuan merupakan lahan sawah beririgasi teknis yang juga merupakan lumbung padi Kabupaten Cilacap. Untuk pengembangan kecamatan yang berbatasan antar kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Pengembangannya lebih kepada penguatan struktur ruang untuk mendorong perkembangan dan integrasi perencanaan antar kabupaten.

3. Meninjau Klasifikasi IPM (Indeks Pembangunan Manusia) beberapa kecamatan memiliki IPM yang relatif tinggi dengan Indeks Pendidikan Indeks pendidikan rata-rata adalah 75,78, indeks Kesehatan adalah 73,77, sedangkan indeks daya beli rata-rata 67,14 secara keseluruhan Indeks Pembangunan Manusia di 6 Kecamatan di wilayah perbatasan dengan klasifikasi tinggi adalah 72,23. IPM dengan klasifikasi tinggi antara lain terdapat di [1] Kabupaten Cirebon (Kec. Pasaleman, Kec. Ciledug, Kec. Losari, Kec. Pabedilan); [2] Kabupaten Kuningan (Kec. Subang, Kec. Cilebak, Kec. Ciwaru, Kec. Karagkancana, Kec. Cibingbin); [3] Kabupaten Ciamis (Kec. Kalipucang, Kec. Cisaga, Kec. Tambaksari, Kec. Mangunjaya). Indeks Pendidikan rata-rata di wilayah perbatasan yang memiliki klasifikasi IPM rendah Indeks pendidikan rata-rata adalah 73,65, indeks Kesehatan adalah 69,80, sedangkan indeks daya beli rata-rata 59,74 secara keseluruhan Indeks Pembangunan Manusia di 13 Kecamatan di wilayah perbatasan adalah 63,73. IPM dengan klasifikasi tinggi antara lain terdapat di [1] Kabupaten Cirebon (Kec. Pasaleman, Kec. Ciledug, Kec. Losari, Kec. Pabedilan); [2] Kabupaten Kuningan (Kec. Subang, Kec. Cilebak, Kec. Ciwaru, Kec. Karagkancana, Kec. Cibingbin); [3] Kabupaten Ciamis (Kec. Kalipucang, Kec. Cisaga, Kec. Tambaksari, Kec. Mangunjaya).
4. Klasifikasi Konektifitas di kecamatan di wilayah perbatasan di cirikan berdasarkan karakteristik indeks aksesibilitas, indeks mobilitas dan proporsi luas jalan. Ditinjau berdasarkan indeks aksesibilitas, diketahui bahwa indeks aksesibilitas di wilayah perbatasan dengan tingkat aksesibilitas tinggi adalah rata-rata 2,28 km/km². Sedangkan indeks aksesibilitas di wilayah perbatasan dengan tingkat aksesibilitas rendah adalah rata-rata 0,80 km/km² berada di bawah indeks aksesibilitas minimal yaitu sebesar 1,5 km/km². Ditinjau berdasarkan indeks aksesibilitas diketahui bahwa indeks mobilitas di wilayah perbatasan tinggi adalah rata-rata 4,00 km/1000 penduduk. Sedangkan indeks mobilitas di wilayah perbatasan dengan tingkat rendah adalah rata-rata 1,20 km/1000 berada di bawah indeks aksesibilitas minimal yaitu sebesar 2 km/1000 penduduk. Ditinjau berdasarkan proporsi luas jalan, klasifikasi proporsi luas jalan tinggi rata-rata sekitar 20,42%, sedangkan klasifikasi proporsi luas jalan rendah rata-rata sekitar 6,12% dari yang dipersyaratkan untuk perbandingan luas area jalan yang ideal

terhadap luas wilayah Kabupaten/kota sebesar 10%-20%. Berdasarkan ke tiga klasifikasi konektifitas terdapat beberapa kecamatan dengan kategori tinggi berdasarkan aksesibilitas, mobilitas dan proporsi luas jalan yaitu Kecamatan Pasaleman Kabupaten Cirebon, Kecamatan Sabang dan Cilebak di Kabupaten Kuningan, Kecamatan Prwaharja di Kota Banjar dan Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis.

5. Intensitas Kegiatan Ekonomi di wilayah perbatasan di bedakan menjadi 2 klasifikasi yaitu ekonomi unggulan dan non unggulan. Secara ekonomi sektor unggulan di kecamatan-kecamatan wilayah perbatasan adalah memiliki sektor basis dan selain itu pengembangan intensitas ekonomi di tunjukan oleh kegiatan Sentra produksi primer (pertanian, perikanan, perkebunan, pertambangan, kehutanan, dan peternakan); Sentra produksi sekunder (industri pengolahan/industri manufaktur); Sentra produksi tersier (jasa, termasuk diantaranya pariwisata/agro wisata/ekowisata/minawisata). Adapun kecamatan yang memiliki sektor unggulan yang juga sebagai penggerak kecamatan lain di perbatasan adalah [1] Kabupaten Cirebon (Kec. Losari, Kec. Pabedilan); [2] Kota Banjar (Kec. Purwaharja, Kec. Pataruman, Kec. Langensari); [3] Kabupaten Ciamis (Kec. Laktok, Kec. Purwadadi).

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan simpulan di atas adapun rekomendasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Belum memasukan pemahaman terhadap karakteristik sosial, karakteristik ekonomi, karakteristik kemasyarakatan dan aspirasinya dalam penelitian ini. Pengembangan suatu kota akan sangat berkaitan dengan bagaimana rencana tata ruang dapat mendukung perikehidupan sosial masyarakat yang beragam.
2. Belum memuat pemahaman terhadap keterkaitan timbal balik antara kinerja aktifitas wilayah perbatasan dengan wujud dan perwujudan ruang fisiknya. Dalam hal ini, kinerja aktifitas yang buruk akan mewujudkan kualitas ruang fisik kehidupan yang buruk, atau sebaliknya ruang fisik yang tidak tertata dengan baik akan mewujudkan kinerja aktifitas yang buruk pula. Kondisi ini bersifat *kumulatif* dan saling memberikan pengaruh negatif serta akan semakin menurunkan kualitas kehidupan lingkungan fisik, sosial, ekonomi di masa yang akan datang.

3. Belum memuat Pemahaman mengenai bagaimana mewujudkan ruang fisik yang kondusif untuk menunjang kehidupan wilayah perbatasan. Upaya mewujudkan ruang bukan hanya sekedar membuat rencana tata ruang namun terkait upaya perealisasiannya serta pengarahannya, dan penciptaan faktor intensif (*menstimulasi*) dan disinsentif (*mencegah*), agar elemen, fungsi dan infrastruktur, sistem pelayanan sosial ekonomi perbatasan dapat ada dan tumbuh sesuai dengan harapan.
4. Belum memuat Pemahaman terhadap pelaku dan aktor-aktor pembangunan wilayah perbatasan dalam mendukung wujud ruang yang diharapkan. Setiap rencana pembangunan termasuk rencana tata ruang akan melibatkan setiap pelakunya sebagai *subjek* dan harus menjamin adanya mekanisme partisipasi masyarakat, swasta dan pemerintah dalam mendukung program-program pembangunan. Upaya untuk mendeseminasikan serta mensosialisasikan kebutuhan yang perlu dilakukan untuk menghindari rencana tata ruang menjadi produk yang tidak dapat/tidak mungkin direalisasikan karena masyarakat tidak tahu, menganggap tidak perlu atau kepentingannya tidak terakomodasi atau dianggap merugikan kepentingannya.
5. Belum memuat Pemahaman terhadap aspek kelembagaan, aspek hukum dan aspek manajemen pembangunan untuk mendukung realisasi wujud ruang yang diharapkan. upaya untuk menata ruang wilayah perbatasan akan tidak terlepas dari persoalan kelembagaan dan manajemen pembangunan yang terkait dengan upaya mengkonsolidasikan serta mengintegrasikan berbagai perencanaan yang telah dibuat. Dalam hal lain, upaya mengelola sumber daya dana, tenaga dan waktu juga menjadi faktor mendukung penataan ruang wilayah.
6. Belum memuat pemahaman terhadap aspek eksternal regional/konstelasi geografis kewilayahan sebagai faktor pengaruh terhadap eksistensi wilayah perbatasan. Perkembangan lingkungan eksternal dapat mempengaruhi eksistensi baik bersifat positif maupun negatif. Pertumbuhan kota sekitar yang pesat dengan fungsi berbeda, serta pengaruh perkembangan transportasi regional harus dijadikan landasan makro untuk mengembangkan fungsi mikro/lokal kota secara saling mendukung.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, (2009). Undang-Undang Otonomi Daerah: Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat Dan Pemerintah Daerah, Fokusmedia, Jakarta.
- Harmantyo, Djoko, (2007). Pemekaran Daerah Dan Konflik Keruangan Kebijakan Otonomi Daerah Dan Implementasinya Di Indonesia, Jurnal Makara Sains, Vol. 11, No. 1, April 2007: 16-22.
- Hartati, Gini, dan Syarifudin, Deden, (2008). Analisis Kondisi Infrastruktur Desa Tertinggal dalam Perspektif Penanggulangan Kemiskinan : Wilayah Studi Kabupaten Ciamis, Penelitian Dosen Muda Universitas Galuh Ciamis.
- Landiyanto, Erlangga Agustino, (2005). Kinerja Keuangan dan Strategi Pembangunan Kota di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Kota Surabaya. (Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga)
- Mayer, B. (2000). *The Dynamics of Conflict Resolution: A practitioner's guide*. San Fransisco: Jossey-Bass.
- Nisjar, Karhi (2002). Bahan Kuliah Ilmu Administrasi Negara Lanjut Kontemporer. Bandung : Program Pasca Sarjana, Universitas Padjajaran.
- Pollit, C. & G.Bouckaert. (2000). *Public Management Reform: A Comparative Analysis*. New York: Oxford University Press.
- Syarifudin, Deden, (2011). Analisis Kondisi Infrastruktur Desa Tertinggal dalam perspektif Penanggulangan Kemiskinan : Wilayah Studi Kabupaten Ciamis, Jurnal Pemasaran dan Sumberdaya Manusia Januari 2011 Volume 13 Nomor 1, ISSN : 1411-8661, Program Pascasarjana Universitas Galuh , halaman 67-91.
- Syarifudin, Deden, (2008). Strategi Pengembangan Desa Tertinggal Wilayah Darat dan Pesisir dalam Perspektif Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia : Wilayah Studi Kabupaten Ciamis, Tesis Magister, Institut Teknologi Bandung.
- Warsono, Hadi, (2009). Regionalisasi dan Manajemen Kerjasama Antar Daerah : Studi Kasus Dinamika Kerjasama Antar Daerah yang Berdekatan di Jawa Tengah, Disertasi, Program Doktor Ilmu Administrasi Negara, Universitas Gajah Mada.
- Yin, Robert, K., (1994). Terjemahan Mudzakir, M., Djauzi, *Studi Kasus : Desain & Metode*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta
- _____, (2008), *Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang*.

25

LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : YANG TIDAK DIPUBLIKASIKAN

Judul Jurnal Ilmiah (Artikel) : **Model Kerjasama Antar Daerah (KAD) Perbatasan Antar Kabupaten/Kota dalam Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Barat.**

Penulis Jurnal Ilmiah : **Supratignyo Aji¹⁾, Riza Fathoni Iskak²⁾ Deden Syarifudin³⁾, 2015 *Kelompok*.**

Identitas Jurnal Ilmiah :

a. Nama Jurnal : -
 b. Nomor/Volume : -
 c. Edisi (bulan/tahun) : Desember 2015
 d. Penerbit : -
 e. Jumlah halaman : 194 Halaman

URL ARTIKEL : <http://repository.unpas.ac.id/>

Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah : (beri \checkmark pada kategori yang tepat)

Jurnal Ilmiah Internasional
 Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi
 Jurnal Ilmiah Nasional tidak Terakreditasi
 Karya Ilmiah yang tidak dipublikasikan

Hasil penilaian Peer Review :

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Jurnal Ilmiah				Nilai Akhir yang Diperoleh
	Internasional	Nasional Terakreditasi	Nasional tidak Terakreditasi	Karya Ilmiah tidak Dipublikasi	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
a. Kelengkapan unsur isi buku (10%)				0,2	0,2
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)				0,6	0,6
c. Kecakupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)				0,6	0,6
d. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (30%)				0,6	0,6
Total = (100%)				0,4	0,4

Catatan Penilaian artikel oleh Reviewer :

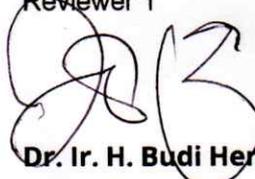
Semua unsur dipenuhi dengan baik, termasuk komponen yang dinilai
Catatan:
Sitasi harus lebih banyak dari jumlah buku referensi dan buku atau terbitan dokumen dinas.

Bandung, 20 Mei / 2022

Reviewer 2

Dr. Ir. Firmansyah, MT.
 NIP : 151.102.90
 Unit Kerja : Fakultas Teknik

Reviewer 1


Dr. Ir. H. Budi Heri Pirngadi, MT.
 NIP : 151.101.16
 Unit Kerja : Fakultas Teknik

25

LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : YANG TIDAK DIPUBLIKASIKAN

Judul Jurnal Ilmiah (Artikel) : **Model Kerjasama Antar Daerah (KAD) Perbatasan Antar Kabupaten/Kota dalam Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Barat.**

Penulis Jurnal Ilmiah : **Supratignyo Aji¹⁾, Riza Fathoni Iskak²⁾ Deden Syarifudin³⁾.
 2015 **Kelompok.****

Identitas Jurnal Ilmiah :

a. Nama Jurnal : -
 b. Nomor/Volume : -
 c. Edisi (bulan/tahun) : Desember 2015
 d. Penerbit : -
 e. Jumlah halaman : 194 Halaman

URL ARTIKEL : <http://repository.unpas.ac.id/>

Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah : (beri \checkmark pada kategori yang tepat)

Jurnal Ilmiah Internasional
 Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi
 Jurnal Ilmiah Nasional tidak Terakreditasi
 Karya Ilmiah yang tidak dipublikasikan

Hasil penilaian *Peer Review* :

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Jurnal Ilmiah				Nilai Akhir yang Diperoleh
	Internasional	Nasional Terakreditasi	Nasional tidak Terakreditasi	Karya Ilmiah tidak Dipublikasi	
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
a. Kelengkapan unsur isi buku (10%)				0,2	0,2
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)				0,6	0,6
c. Kecakupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)				0,6	0,6
d. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (30%)				0,6	0,6
Total = (100%)				0,4	0,4

Catatan Penilaian artikel oleh Reviewer :

tema penelitian sangat menarik, pemilihan metode penelitian sesuai

Bandung, 3 / Juni / 2022

Reviewer 2

Dr. Ir. Firmansyah, MT.
 NIP : 151.102.90
 Unit Kerja : Fakultas Teknik

Reviewer 1

Dr. Ir. H. Budi Heri Pirngadi, MT.
 NIP : 151.101.16
 Unit Kerja : Fakultas Teknik

LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : YANG TIDAK DIPUBLIKASIKAN

Judul Jurnal Ilmiah (Artikel) : **Model Kerjasama Antar Daerah (KAD) Perbatasan Antar Kabupaten/Kota dalam Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Barat.**

Penulis Jurnal Ilmiah : **Supratignyo Aji¹⁾, Riza Fathoni Iskak²⁾ Deden Syarifudin³⁾, 2015 *Kelompok*.**

Identitas Jurnal Ilmiah :

- a. Nama Jurnal : -
- b. Nomor/Volume : -
- c. Edisi (bulan/tahun) : Desember 2015
- d. Penerbit : -
- e. Jumlah halaman : 194 Halaman

URL ARTIKEL : <http://repository.unpas.ac.id/>

Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah :
 (beri \checkmark pada kategori yang tepat)

- Jurnal Ilmiah Internasional
- Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi
- Jurnal Ilmiah Nasional tidak Terakreditasi
- Karya Ilmiah yang tidak dipublikasikan

Hasil penilaian *Peer Review* :

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Jurnal Ilmiah				Nilai Akhir yang Diperoleh
	Internasional	Nasional Terakreditasi	Nasional tidak Terakreditasi	Karya Ilmiah tidak Dipublikasi	
a. Kelengkapan unsur isi buku (10%)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,2
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)				0,6	0,6
c. Kecakupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)				0,6	0,6
d. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (30%)				0,6	0,6
Total = (100%)				0,4	0,4

Catatan Penilaian artikel oleh Reviewer :

Bandung, 7, Juni / 2022

Reviewer 2

Dr. Ir. Firmansyah, MT.
 NIP : 151.102.90
 Unit Kerja : Fakultas Teknik

Reviewer 1

Dr. Ir. H. Budi Heri Pirngadi, MT.
 NIP : 151.101.16
 Unit Kerja : Fakultas Teknik